



# **Menemukan Kembali Liberalisme**

Ludwig von Mises



# MENEMUKAN KEMBALI LIBERALISME

LUDWIG von MISES

FREEDOM INSTITUTE  
FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG

## **MENEMUKAN KEMBALI LIBERALISME**

**Ludwig von Mises**

Judul asli Liberalism: In the Classical Tradition

Penerbit The Foundation for Economic Education, Inc.

Irvington-on-Hudson, New York – 1985

ISBN 978-602-99571-1-2

Penerjemah Lela E. Madjiah

Sampul dan tata letak Sijo Sudarsono

Diterbitkan atas kerja sama

**FREEDOM INSTITUTE**

Jl. Proklamasi No. 41, Menteng - Jakarta 10320

Tel: (021) 31909226 Fax: (021) 31909227

Website: <http://www.freedom-institute.org>

E-mail: [office@freedom-institute.org](mailto:office@freedom-institute.org)

dan

**FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG**

Jalan Rajasa II No. 7 – Jakarta 12110

Tel: (021) 7256012 Fax: (021) 7203868

Website: <http://www.fnsindonesia.org>

E-mail: [indonesia@fnst.org](mailto:indonesia@fnst.org)

Cetakan pertama, Desember 2011

---

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Akhmad Sahal .....	vii
Bettina Bien Greaves .....	xv
Louis M. Spadaro .....	xxi
Ludwig von Mises .....	xxxii
Pendahuluan .....	1
BAB 1 Dasar-dasar Kebijakan Liberal .....	21
BAB 2 Kebijakan Ekonomi Liberal .....	71
BAB 3 Kebijakan Luar Negeri Liberal .....	123
BAB 4 Liberalisme dan Partai Politik .....	181
BAB 5 Masa Depan Liberalisme .....	221
Lampiran .....	227
Indeks .....	237
Penulis .....	243



---

KATA PENGANTAR  
FREEDOM INSTITUTE

Ludwig von Mises dan Liberalismenya

Pada 1956, Arthur M. Schlesinger, Jr., sejarawan terkemuka Amerika yang sekaligus penasehat mendiang Presiden John F. Kennedy, menulis sebuah surat upaya bertajuk “Liberalism: A Note for European Friends.”<sup>1</sup> Dalam esai tersebut, intelektual partai demokrat tersebut mendedahkan mengapa liberalisme dalam konteks Amerika maknanya berbeda, kalau bukan bertentangan, dibandingkan dengan artinya semula di Eropa.

Liberalisme pada awalnya senantiasa dilekatkan dengan paham tentang kebebasan individu dan hak milik pribadi, tentang mekanisme pasar bebas, yakni pasar yang bisa mengatur mengatur dirinya sendiri (antara lain melalui pembagian kerja) untuk menciptakan tata masyarakat yang setara, dan pembatasan peran negara seminimal mungkin. Liberalisme dalam arti ini dianggap identik dengan paham *laissez faire*.

Tapi menurut Schlesinger, dalam sejarah Amerika, paham liberalisme klasik semacam itu tidak dimengerti dan diamalkan secara harfiah. Gejala ini menarik karena masyarakat Amerika pada hakikatnya sudah liberal dari sononya, dalam arti menjunjung tinggi prinsip kesetaraan manusia dan tidak mengakui sistem feodalisme yang hirarkis seperti halnya di Eropa (setidaknya secara

---

1 Arthur M. Schlesinger, Jr., *The Politics of Hope and the Bitter Heritage: American Liberalism in the 1960s* (Princeton: Princeton University Press, 2007)

teoretik). Bukankah konstitusi Amerika sejak awal menjamin bahwa *all men are created equal*, yang nota bene merupakan pilar utama liberalisme? Kalau memang Amerika pada dasarnya berwatak liberal, mengapa pohon liberalisme yang tumbuh di tanah Amerika menghasilkan buah yang berbeda dibandingkan di tempat asalnya di Eropa?

Dalam esainya Schlesinger mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengaitkannya pada kompleksitas masyarakat modern di Amerika yang berkembang begitu cepat seiring dengan semakin pesatnya kemajuan industri pada awal abad ke-20. Situasi semacam itu tentu saja menuntut respon tersendiri dari perspektif liberalisme. Tradisi pemikiran liberal, dalam pandangan Schlesinger, mestinya lebih setia terhadap tujuan utamanya (yakni kesetaraan kesempatan bagi semua) ketimbang terhadap doktrinnya (*laissez faire*). Ini artinya, kelompok liberal di Amerika mesti melihat peran negara secara berbeda dibanding dengan kaum liberal di Eropa. Negara bukan lagi dimengerti sebagai *minimal state*, melainkan *welfare state*. Schlesinger menulis:

*“The process of redefining liberalism in terms of the social needs of the 20th century was conducted by Theodore Roosevelt and his New Nationalism, Woodrow Wilson and his New Freedom, and Franklin D. Roosevelt and his New Deal. Out of these three great reform periods there emerged the conception of a social welfare state, in which the national government had the express obligation to maintain high levels of employment in the economy, to supervise standards of life and labor, to regulate the methods of business competition, and to establish comprehensive patterns of social security.”<sup>2</sup>*

Esai Schlesinger yang ditulisnya setengah abad lalu menjadi menarik untuk di tengok kembali kalau kita ingin memahami secara

---

2 *Ibid.*



lebih baik buku karangan Ludwig von Mises tentang liberalisme ini. Saya tidak tahu apakah Mises membaca esai Schlesinger tersebut, dan walaupun ya, apakah ia memberi tanggapan atasnya. Tapi yang pasti, saat Schlesinger mempublikasikan “Liberalism: A Note for European Friends”, Mises, tak pelak lagi, adalah salah satu “kawan liberal Eropa” dalam kategori Schlesinger dalam esai tersebut. Dengan kata lain, liberalisme Mises termasuk dalam spesies liberalisme klasik yang dalam lanskap ekonomi dan politik Amerika, setidaknya sampai dekade 1980-an dianggap kuno dan dogmatis bahkan oleh mayoritas kaum liberal Amerika sendiri. Mereka lebih terpicat pada pemikiran ekonomi Keynesian dan ide tentang negara kesejahteraan.

Meskipun demikian, Ludwig von Mises, bersama dengan muridnya yang jauh lebih dikenal publik, Friedrich A. Hayek, tak henti henti mengkampanyekan paham liberalisme klasik yang dianutnya. Bagi mereka, liberalisme sosial ala Amerika yang tercermin dalam bentuk kebijakan regulasi dan intervensi negara terhadap mekanisme pasar merupakan ancaman terhadap keberlangsungan masyarakat bebas, yang tidak kalah berbahayanya dibanding dengan ideologi kolektivisme seperti sosialisme dan komunisme

Semangat Mises untuk membela liberalisme klasik sedikit banyak terkait dengan latar belakang hidupnya sebagai eksil politik yang trauma akan horor Perang Dunia I dan ancaman kolektivisme dan fasisme di Eropa. Lahir dan tumbuh dalam keluarga Yahudi sekuler di Wina yang saat itu masih dalam kekuasaan imperium Austro-Hungaria, Mises sejak awal menaruh minat intelektual yang kuat terhadap ilmu ekonomi. Setelah Perang Dunia I, ia menjadi dosen pada Universitas Wina dan menjadi penasihat ekonomi pemerintah Austria. Ia menyaksikan Eropa yang bonyok akibat Perang Dunia I. Dalam situasi semacam itu, Mises merasa galau dengan runtuhnya tatanan liberal di Eropa yang disertai dengan naiknya pamor sosialisme dan komunisme di Eropa.

Kegalauan Mises ini tercermin dalam kritiknya terhadap sosialisme, yang menurutnya merupakan sistem ekonomi yang mustahil

bisa berjalan karena *central planning* yang mencirikan ekonomi sosialisme tidak punya cara kalkulasi ekonomi yang rasional dalam menentukan harga suatu komoditas. Pada saat yang sama, Mises juga cemas dengan semakin menguatnya Nazisme di Jerman. Beberapa tahun sebelum Hitler mencaplok Austria, Mises menetap sementara di Swis sebelum akhirnya hijrah untuk selamanya ke Amerika Serikat pada 1940. Sejak saat itu ia tinggal di New York, mengajar ekonomi di New York University (NYU) sampai akhir hayatnya.

Lantas apa itu liberalisme menurut Mises? Secara selintas, tidak ada yang baru dalam paparan Mises tentang liberalisme. Buku ini, yang pertama kali terbit dalam bahasa Jerman pada tahun 1927 dan dalam bahasa Inggris tahun 1965, menegaskan, misalnya, bahwa liberalisme per definisi adalah doktrin tentang kebebasan yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu tanpa pengaturan, kontrol dan regulasi dari negara (berbeda dengan kolektivisme dan intervensionisme). Liberalisme juga berurusan dengan aktivitas manusia menyangkut soal kesejahteraan material (berbeda dengan agama, misalnya).

Namun kalau kita perhatikan pada bagian akhir bukunya, kita menemukan adanya pernyataan menarik dari sang pengarang tentang kaitan antara liberalisme dan ilmu ekonomi. Mises menyatakan bahwa liberalisme tidak lain adalah aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi ke dalam ranah politik dan sosial.

Artinya, di mata Mises, setiap individu menyerupai sosok Robinson Crusoe yang kecenderungan utamanya hanyalah memaksimalkan terpenuhinya kepentingan-dirinya, bertanggung jawab hanya pada dirinya, dan bergantung pada dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama, si Robinson Crusoe juga menyadari bahwa meski keinginan dan kebutuhannya tak terbatas, lingkungan, waktu dan alam tempat dia hidup sangat terbatas. Karena itu, ia mesti melakukan pilihan-pilihan, menimbang secara rasional alternatif-alternatif yang ada. Selain itu, si Robinson Crusoe juga menyadari bahwa mengingat sumber daya dan kemampuan manusia tidak

sama dan tidak terdistribusi secara sama pula, maka pembagian kerja (*division of labor*) menjadi hal yang niscaya untuk meningkatkan produktivitas. Dan proses semacam itulah yang menurut Mises merupakan kecenderungan natural dari manusia. Atau untuk meminjam istilah Adam Smith, pembagian kerja dimungkinkan karena *propensity to truck, barter and exchange* adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia.

Dalam kerangka berpikir semacam itu, Mises lalu menyimpulkan bahwa hanya sistem *laissez faire* yang paling cocok karena paling sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu ekonomi modern. Dengan kata lain, Mises menerima liberalisme karena sistem tersebut dinilai paling natural dan menolak sosialisme karena sistem itu dari segi ilmu ekonomi tidak akan bisa jalan.

Pernyataan ini menarik sekurang-kurangnya karena dua hal: *Pertama*, berbeda dengan para pemikir liberalisme semacam John Locke, John Stuart Mill, dan Isaiah Berlin yang umumnya bertolak dari argumen-argumen politik, Mises justru memakai lensa ilmu ekonomi dalam memformulasikan liberalismenya. *Kedua*, Mises adalah ekonom yang bersama-sama dengan Carl Menger dan Frierdrich Hayek tergabung dalam mazhab ekonomi Austria yang terkenal dengan teorinya tentang “methodological individualism,” yang dirumuskan dengan sangat baik oleh Hayek begini: “*there is no other way toward an understanding of social phenomena but through our understanding of individual actions directed toward other people and guided by their expected behavior.*”<sup>3</sup>

Dengan kata lain, fenomena ekonomi, sosial dan politik menurut mazhab ekonomi Austria berporos pada “tindakan individu”, yakni sosok Robinson Crusoe yang tindakannya didorong *self-interest*, yang menyadari adanya faktor *scarcity* dan karena itu mesti punya kebebasan memilih. Dalam kesempatan lain, Mises berbicara tentang “kedaulatan konsumen” yang punya kebebasan memilih

---

3 Friedrich Hayek, “Individualism: True and False,” *Individualism and Economic Order* (Chicago: The University of Chicago Press, 1948).

sebagai karakter utama dari masyarakat bebas.

Keyakinan Mises bahwa “ilmu ekonomi adalah panglima” ini bukan hanya mendorongnya untuk tampil sebagai penganjur sistem pasar bebas, melainkan juga membawanya pada keyakinan bahwa hanya dengan bertopang pada ilmu ekonomilah peradaban modern bisa diselamatkan dari ancaman kolektivisme dan fasisme.

*“The body of economic knowledge is an essential element in the structure of human civilization; it is the foundation upon which modern industrialism and all the moral, intellectual and therapeutical achievements of the last centuries have been built. It rests with men whether they will make proper use of the rich treasure with which this knowledge provides them or whether they will leave it unused. But if they fail to take the best advantage of it and disregard its teachings and warnings, they will annihilate economics; they will stamp out society and the human race.”<sup>4</sup>*

Pasasi di atas menarik kalau dibandingkan dengan argumen Hayek tentang kenapa pasar bebas merupakan suatu kemestian. Keduanya sama-sama merumuskan teori yang mendukung *laissez faire*, tapi dasar pijakan keduanya justru berbeda, kalau bukan bertolak belakang.

Kalau Mises melihat sistem *laissez faire* sebagai tatanan yang didasarkan pada prinsip yang rasional dan saintifik, karena bertopang pada ilmu ekonomi, maka Hayek justru curiga bahwa penekanan pada rasionalitas, terutama tradisi rasionalitas Cartesian, justru bisa membawa pada keyakinan bahwa proses sosial akan mencapai tujuan utamanya apabila dikontrol dan dikonstruksi berdasar suatu desain rasional dari negara. Dengan kata lain, menurut Hayek, rasionalisme justru bisa menjadi alasan pembenar bagi diperlukannya *central planning*, yang justru bertolak belakang dengan hakikat pasar menurut Hayek, yakni suatu tatanan spontan

---

4 Ludwig von Mises, *Human Action* (Chicago: Henry Regnery, 1966) p.885.

yang bergerak karena adanya tindakan individu-individu yang mengejar kepentingan diri sendiri tapi juga punya kecenderungan *to truck, to barter, and to exchange*, dan bukan digerakkan oleh perencanaan yang terpusat dan desain dari atas. Tapi lepas dari adanya perbedaan tersebut, buku Mises ini merupakan kontribusi yang penting bagi wacana liberalisme klasik.

*Jakarta, 28 November 2011*

**Akhmad Sahal**  
*Associate, Freedom Institute*



---

## KATA PENGANTAR

*untuk Edisi Ketiga, 1985*

ISTILAH “liberalism”, dari kata Latin “liber” yang berarti “bebas”, awalnya merujuk pada falsafah kebebasan. Makna kata ini tetap dipertahankan di Eropa ketika buku ini ditulis (1927), sehingga pembaca yang membuka halaman sampulnya berharap memperoleh analisis tentang falsafah kebebasan liberalisme klasik. Namun, sangat disayangkan karena dalam beberapa dasawarsa terakhir, “liberalisme” berubah arti sama sekali. Kata itu, khususnya di Amerika Serikat, diambil alih para sosialis-filosofis, yang memakainya untuk merujuk pada campur tangan pemerintah dan program negara kesejahteraan. Salah satu dari sekian banyak kemungkinan contoh, mantan Senator AS Joseph S. Clark, Jr., saat menjabat Walikota Philadelphia, menjelaskan posisi liberal modern dengan sangat gamblang dalam kalimat berikut:

Untuk menghilangkan keraguan dan mengabaikan semantik, seorang liberal adalah seseorang yang percaya bahwa pemerintah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pemenuhan keadilan sosial, politik dan ekonomi di tingkat kota, negara bagian, nasional dan internasional... Seorang liberal percaya bahwa pemerintah adalah alat tepat untuk membangun masyarakat yang berupaya menerapkan prinsip perilaku Kristiani dalam tindakan nyata. (Atlantic, Juli 1953, hal. 27)

Pandangan tentang “liberalisme” seperti ini sangat marak pada 1962, ketika buku ini muncul dalam bahasa Inggris, sehingga Mises berkesimpulan bahwa menerjemahkan judul asli, *Liberalismus*, secara harafiah akan menimbulkan kebingungan luar biasa. Itu sebabnya, ia menyebut versi bahasa Inggris *The Free and Prosperous Commonwealth* (Persemakmuran Bebas dan Makmur). Akan tetapi, tahun berikutnya, Mises memutuskan bahwa para penyokong kebebasan dan pasar bebas tidak boleh memasrahkan “liberalisme” kepada kaum sosialis-filosofis. Dalam Kata Pengantar untuk edisi kedua (1963) dan ketiga (1966) maha karyanya, *Human Action* (Tindakan Manusia), Mises menulis bahwa para penyokong falsafah kebebasan harus merebut kembali “istilah ‘liberal’... semata-mata karena tidak ada istilah lain untuk menjelaskan gerakan politik dan intelektual luar biasa ini” yang telah mendorong terciptanya peradaban modern melalui pembangunan ekonomi pasar bebas, pembatasan pemerintah dan kebebasan individu. Pemahaman “liberalisme” inilah yang dipakai dalam buku ini. Bagi para pembaca yang tidak akrab dengan karya-karya Ludwig von Mises (1881-1973), dapat dijelaskan bahwa selama beberapa dekade ia menjadi corong utama aliran ekonomi Austria karena Mises, seperti halnya dua orang pendahulunya yang terkemuka Carl Menger dan Eugen von Böhm Bawerk adalah kelahiran Austria. Landasan dari aliran Austria adalah teori nilai kepuasan marjinal (*subjective value marginal utility theory*). Teori ini menelusuri semua fenomena ekonomi, baik yang sederhana maupun yang rumit, ke tindakan para individu. Setiap tindakan diambil berdasarkan nilai-nilai subyektif individu. Berdasarkan teori nilai subyektif ini, Mises menjelaskan dan menganalisa metodologi, nilai, tindakan, harga, pasar, uang, monopoli, campur tangan pemerintah, ledakan (keberhasilan) dan kehancuran ekonomi dan sebagainya, dan memberi sumbangan luar biasa besar pada bidang kalkulasi ekonomi dan uang.

Mises memperoleh gelar doktornya dari Universitas Vienna pada 1906. Tesisnya, *The Theory of Money and Credit* (Teori Uang



dan Kredit), yang diterbitkan di Jerman pada 1912 dan di Inggris pada 1934, merupakan karya awal dari berbagai karya-karya teoritis di bidang ekonomi. Di periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, selain menulis artikel dan buku, seperti makalahnya (*treatise*) yang berpengaruh, *Socialism* (Sosialisme) Mises bekerja penuh untuk Kamar Dagang Austria sebagai penasihat ekonomi pemerintah Austria dan pengajar tidak tetap di Universitas Vienna. Ia juga menyelenggarakan sebuah seminar ekonomi untuk para ilmuwan dan banyak di antaranya kemudian memiliki pengaruh internasional. Pada 1926 ia mendirikan lembaga riset swasta, Austrian Institute for Business Cycle Research (Institut Riset Siklus Bisnis Austria), yang bertahan hingga hari ini.

Setelah Hitler berkuasa di Jerman, Mises meramalkan bahwa Austria akan dirundung masalah. Oleh karena itu pada 1934 ia pindah ke Swiss dan bergabung dengan Graduate Institute of International Studies (Institut Studi Internasional). Di sana ia menulis *Nationaloekonomie* (Ekonomi Nasional, 1940). Meskipun hanya sedikit orang-orang Jerman di kalangan nasional-sosialis Eropa yang membaca karya ekonomi monumental ini, uraian Mises tentang prinsip-prinsip ekonomi yang sangat masuk akal telah menjangkau kalangan lebih luas melalui versi bahasa Inggris, yang ditulis ulang oleh Mises untuk pembaca Amerika dengan judul *Human Action* (*Tindakan Manusia*, edisi pertama, 1949).

Mises dan istrinya pindah ke Amerika pada 1940 untuk menyingkir dari pengaruh Hitler yang semakin luas di Eropa. Reputasinya telah dikenal baik di Eropa, tapi di Amerika ia nyaris tidak dikenal. Oleh karena itu, ia mulai merintis kembali upaya untuk menarik perhatian para siswa dan pembaca. Melalui penanya ia mulai menghasilkan buku-buku berbahasa Inggris—*Omnipotent Government* (Pemerintah yang sangat Berkuasa) dan *Bureaucracy* (Birokrasi), keduanya terbit pada 1944. Kemudian maha karya ekonominya, *Human Action* (*Tindakan Manusia*) pada 1949, disusul *Planning for Freedom* (Rencana untuk Meraih Kebebasan, 1952), *The Anti-Capitalistic Mentality* (Mentalitas Anti Kapitalis,

1952), *Theory and History* (Teori dan Sejarah, 1957) dan *The Ultimate Foundations of Economic Science* (Landasan Utama Ilmu Ekonomi, 1962). Semua buku-buku itu merupakan karya penting teori ekonomi.

Mises berperan dalam pendirian Masyarakat Internasional Mont Pelerin pada 1947. Ia memberikan kuliah di berbagai tempat di Amerika dan Amerika Latin dan selama 24 tahun menyelenggarakan seminar ekonominya yang terkenal di Universitas New York untuk mahasiswa S2 dan S3. Ia juga bekerja sebagai konsultan National Association of Manufacturers dan penasehat Yayasan Pendidikan Ekonomi (Foundation for Economic Education).

Mises menerima berbagai penghargaan dalam hidupnya—gelar doktor kehormatan dari Grove City College (1957), Universitas New York (1963), dan Universitas Freiburg (1964) di Jerman. Sebagai penghargaan atas semua prestasinya, pada 1956 alma maternya, Universitas Vienna, merayakan dan “memperbarui” gelar doktornya—sebuah tradisi Eropa—bertepatan dengan perayaan 50 tahun universitas itu. Pemerintah Austria memberikan penghargaan serupa pada 1962. Pada 1969 Asosiasi Ekonomi Amerika (American Economic Association) memberinya gelar “Anggota Terhormat” (*Distinguished Fellow*).

Pengaruh Mises terus berkembang di kalangan para pemikir. Muridnya yang paling menonjol di masa-masa ia masih tinggal Eropa, pemenang hadiah Nobel F.A. Hayek, menulis: “Pengaruh Mises telah melampaui batas-batas individu...Suluh yang Anda [Mises] nyalakan telah menjadi penunjuk jalan bagi sebuah gerakan kebebasan baru yang semakin hari semakin kokoh.” Dan salah seorang muridnya yang paling menonjol di Amerika, Profesor Israel Kirzner dari Universitas New York, mengatakan saat menjelaskan pengaruhnya pada para mahasiswanya: “Mises memberi sumbangan penting dan menentukan seperti tercermin dari semangat menggebu-gebu yang menyertai minat baru terhadap perspektif Austria.”

Sebagai pakar teori, Mises dikenal sangat berhati-hati dan logis,

akan tetapi ia lebih dari sekadar pakar teori menara gading. Logika argumentasi ilmiahnya, yang mendorongnya pada kesimpulan bahwa sebuah masyarakat liberal dengan pasar bebas adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keserasian domestik dan internasional, ia merasa berkewajiban untuk menerapkan semua uraian teori ekonominya ke dalam kebijakan pemerintah. Dalam *Menemukan Kembali Liberalisme* Mises tidak hanya memberikan uraian singkat tentang berbagai gejala ekonomi penting, tetapi juga menyampaikan secara lebih gamblang dibandingkan dengan semua bukunya yang lain pandangannya tentang pemerintah dan perannya yang terbatas namun penting dalam melestarikan kerjasama sosial di mana pasar bebas dapat berfungsi. Pandangan Mises masih tetap segar dan modern dan pembaca bisa melihat bahwa analisisnya tetap relevan.

Pesan yang ingin disampaikan Mises, bahwa idelah yang menguasai dunia, muncul berulang kali dalam semua bukunya namun tidak sekuat pesan yang disampaikan dalam *Menemukan Kembali Liberalisme*. “Hasil akhir dari pertarungan” antara liberalisme dan totaliterisme, tulisnya pada 1927, “tidak ditentukan oleh senjata, tetapi oleh ide. Idelah yang membuat manusia terpecah ke dalam berbagai kelompok yang saling bertentangan, yang meletakkan senjata di tangan mereka, dan yang menentukan siapa yang memegang senjata dan siapa yang menjadi sasaran senjata itu. Sebagai kesimpulan, ide, bukan senjata, yang mengubah keadaan.”

Sesungguhnya, satu-satunya cara agar dunia tidak terjerumus ke dalam kekacauan dan konflik baru adalah dengan meyakinkan semua orang agar mereka menanggalkan intervensi pemerintah dan menganut kebijakan liberal.

**Bettina Bien Greaves**

*Foundation for Economic Education, Inc.*

*Agustus 1985*



---

## KATA PENGANTAR

**M**AKNA buku kecil ini jauh lebih besar, dalam pandangan saya, dari ukurannya dan bahasanya yang sederhana. Buku ini tidak lebih dari sebuah buku tentang masyarakat bebas, tentang apa yang dewasa ini didefinisikan sebagai “implikasi politik” bagi masyarakat seperti itu dalam penyelenggaraan kegiatan dalam negeri dan internasionalnya; dan terutama tentang berbagai rintangan dan masalah, baik nyata maupun imajiner, dalam upaya membangun dan memperahankan organisasi sosial semacam itu.

Namun, meski tak ada sesuatu yang luar biasa dalam hal ini, fakta yang paling mencengangkan adalah bahwa nyaris tak satu pun dari mereka yang menganjurkan bentuk-bentuk alternatif organisasi sosial ekonomi yang menawarkan argumentasi serupa untuk usulan mereka. Anehnya, bahkan dewasa ini, para penulis, yang jumlahnya semakin banyak, yang menghibur kita dengan kritik terhadap kapitalisme secara detil dan yang meramalkan bahwa akhir kapitalisme hanya masalah waktu, enggan mengulas “kontradiksi” atau kesulitan lain yang mungkin timbul dalam pengoperasian sistem pilihan mereka atau sistem yang mereka bayangkan.

Meski demikian, hakekat kekhilafan ini dikesampingkan hanya karena tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab atas hal itu. Tuduhan terhadap Karl Marx—sebagai contoh yang paling banyak digunakan—bahwa ia telah gagal menjelaskan secara detil mekanisme dan implikasi sebuah masyarakat sosialis di *Das Kapital* merupakan tuduhan tidak berdasar; karena memang itulah tujuan karya itu: sebuah kajian sangat kritis terhadap mekanisme kapitalisme dalam pemahaman Marx. Tuduhan itu sama lemahnya

dengan tuduhan terhadap Mises bahwa ia lalai membahas, dalam *Liberalisme*, prinsip-prinsip sebuah sistem perusahaan. Tapi hal terpenting adalah bahwa Mises menyoroti hal itu dalam buku lain—yaitu buku ini—hal yang tidak dilakukan Marx. Maka buku ini adalah buku yang tidak ditulis Marx maupun para pengikutnya serta para kritikus liberalisme lain.

Akan tetapi, makna sesungguhnya buku ini tidak ditemukan dalam logika sempit dan penuh polemik ini melainkan dalam logika lebih mendasar dan bersifat membangun. Meski singkat, karangan ini mampu menjawab cukup banyak pertanyaan, keraguan dan kebingungan yang dirasakan hampir semua orang ketika mereka harus menentukan pilihan mengenai isu-isu sosial dan ekonomi yang kontroversial dan seringkali emosional. Nilai terpenting buku ini terletak pada kemampuan Mises memberikan wawasan dan pandangan alternatif yang sangat bermanfaat terhadap semua pertanyaan yang diajukan.

Tentunya pembaca ingin langsung mendalami dan merenungkan berbagai hal tersebut dan oleh karena itu saya tidak akan menghalangi niat mereka dengan memberikan komentar, kecuali satu atau dua refleksi yang tak mampu saya hindari yang akan menutup kata pengantar ini. Sebaliknya kita akan membahas contoh pertanyaan dan pendapat yang umum terdapat di benak orang saat merenungkan berbagai isu kontroversial serta pendapat Mises tentang isu-isu tersebut yang layak dipertimbangkan. Untuk memudahkan pembaca, isu-isu itu disusun dalam sebuah daftar yang sedapat mungkin dibuat berdasarkan urutan mereka dalam naskah ini.

1. Sistem pasar bebas telah berlangsung sejak lama tapi terbukti tidak berhasil.
2. Liberalisme terjebak pada obsesi meningkatkan produksi dan kesejahteraan material dan nyata-nyata mengabaikan kebutuhan spiritual manusia.
3. Karena manusia tidak selalu bertindak secara rasional

- seungguhnya, tidakkah akan lebih baik bila kita, dalam beberapa hal, tidak terlalu tergantung pada argumentasi yang sepenuhnya bersifat logis dan untuk lebih memercayai intuisi, dorongan hati dan apa yang sering disebut sebagai firasat (*"gut" feeling*)?
4. Tak dipungkiri bahwa pada hakekatnya kapitalisme adalah sistem yang dibuat sedemikian rupa agar menguntungkan golongan kaya dan pemilik tanah di atas pengorbanan golongan kelas lain.
  5. Mengapa mempertahankan sistem sosial yang tidak mampu membantu setiap individu meraih impian mereka atau mencapai tujuan mereka?
  6. Apakah kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi merupakan sesuatu yang tidak perlu dan usang yang dibawa dari masa silam oleh orang-orang yang sulit menerima perubahan?
  7. Bukankah secara alamiah hal terbaik dari ekonomi pasar yang kompetitif ialah bahwa sistem itu cenderung bertentangan dengan perdamaian internasional dan hal terburuk adalah bahwa sistem itu sesungguhnya mendukung perang?
  8. Apa pembelaan yang mungkin diberikan bagi sebuah sistem sosial-ekonomi yang berakibat pada kesenjangan penghasilan dan konsumsi yang begitu besar?
  9. Terlepas dari pragmatisme, apakah ada pembenaran yang secara moral dapat diterima untuk hak-hak intelektual individu?
  10. Dengan menolak intervensi pemerintah, tidakkah liberalisme pada akhirnya secara tidak langsung menganjurkan anarki?
  11. Tidak ada bukti nyata bahwa sebuah masyarakat demokratis yang stabil lebih mungkin di bawah sistem dengan perencanaan dan pengambilan keputusan yang didesentralisasi dibandingkan dengan perekonomian yang direncanakan secara terpusat.
  12. Apakah beralasan mengharapkan sebuah masyarakat kapitalis pasti lebih toleran terhadap pemberontakan dibandingkan dengan masyarakat sosialis?
  13. Kapitalisme menciptakan dan melestarikan posisi istimewa untuk anggota *"leisure class"* yang tidak bekerja yang menguasai

sumber daya atau memberikan sumbangan berarti terhadap masyarakat.

14. Kepemilikan individu bertahan begitu lama karena perlindungan negara; sesungguhnya, seperti dikatakan Marx, melestarikan kepemilikan individu merupakan salah satu fungsi negara.
15. Pendapat bahwa sosialisme tidak dapat berjalan dengan sendirinya karena tidak memiliki cukup alat untuk membuat kalkulasi ekonomi yang dibutuhkan merupakan pendapat menarik, tapi apakah ada ilustrasi nyata dan spesifik untuk mendukung pendapat tersebut?
16. Yang juga menarik adalah pendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam pengoperasi perusahaan swasta pasti menimbulkan distorsi dan oleh karena itu merugikan diri sendiri. Tapi, adakah contoh nyata untuk mendukung pendapat itu?
17. Selain perdebatan tentang apakah ada bukti bahwa sistem-sistem alternatif yang diusulkan bersifat inferior, adakah alasan positif dan benar di balik dukungan terhadap sistem usaha bebas?
18. Agar bisa berjalan, semua sistem usaha membutuhkan sejumlah besar perusahaan-perusahaan kecil yang saling bersaing dengan aktif di antara mereka sendiri. Bukankah sistem ini menjadi usang akibat perkembangan perusahaan-perusahaan raksasa, monopoli dan sejenis?
19. Mengingat manajemen perusahaan-perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi birokrasi, bukankah ini berarti isu mengenai kontrol publik versus kontrol individu pada dasarnya sebuah pembeda tanpa perbedaan?
20. Apakah koordinasi antara kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri lebih mungkin atau konsisten dalam liberalisme dibandingkan dengan sistem lain?
21. Bukankah perlindungan terhadap kepemilikan individu merupakan kendala ketimbang membantu meraih serta mempertahankan perdamaian dan saling pengertian internasional?
22. Jelas bahwa nasionalisme, kolonialisme dan imperialisme hanya



- bisa berkembang di bawah sistem kapitalisme.
23. Sifat mementingkan diri sendiri usaha swasta merupakan kendala utama dalam membangun sebuah pergerakan barang dan orang yang lebih bebas di wilayah-wilayah dunia.
  24. Karena liberalisme mewakili dan mendukung kepentingan khusus sebuah kelas—para pemilik sumber daya atau modal—maka liberalisme membuat kesalahan strategi yang serius dengan tidak menjadikan dirinya partai politik dan dengan mengabaikan kompromi dan manfaat politik dalam mencapai tujuannya.

Siapa pun yang pernah mendapat kesempatan melakukan pengamatan secara cermat tentang bagaimana praduga, separuh-kebenaran, dan “nilai-nilai” yang kelihatannya telah terbukti sering mencegah orang untuk memberikan pertimbangan lengkap dan adil terhadap pandangan-pandangan ekonomi yang tidak biasa atau tidak sejalan dengan tren akan mengenali banyak hal yang disebut dalam daftar ini. Jawaban Mises untuk setiap isu ini akan membantu pembaca umum (dan siswa pemula) membangun perspektif lebih utuh tentang isu-isu sosial, sekaligus membantu mengatasi keraguan atau kecurigaan mereka. Mengingat hal ini, pelarangan buku ini di Jerman Timur, yang disinggung Mises dalam kata pengantarnya, dapat dipahami dan merupakan indikasi lain, tanpa disengaja, makna penting buku ini.

Akhirnya, saya ingin memberi komentar singkat tentang dua hal. Pertama tentang masalah yang muncul beberapa kali dalam buku ini namun dalam konteks sangat berbeda dan sama sekali terpisah satu sama lain sehingga sifatnya yang umum dan makna pentingnya mungkin luput dari perhatian.

Inilah yang dimaksud—yang sangat penting bagi logika liberalisme sejati sehingga seringkali dianggap langkah cerdas dan produktif untuk membuat apa yang oleh Mises di satu tempat disebut sebagai pengorbanan “sementara”. Untuk mendapatkan keuntungan langsung, betapa pun menariknya nampaknya hal

itu, merupakan tindakan bodoh, jika, dengan melakukan hal itu seseorang menutup kesempatan untuk keuntungan yang jauh lebih besar di kemudian hari; keuntungan yang begitu besar yang bisa menggantikan keuntungan saat ini dan kesediaan untuk menunggu.

Tentu saja, tidak banyak orang rasional yang membuat “kalkulasi” semacam ini akan memilih mengambil keuntungan hari ini dalam kondisi seperti disebut di atas. Akan tetapi—dan inilah inti permasalahannya—kadang-kadang orang tidak membuat perhitungan cermat atau tidak dianjurkan melakukan hal itu. Kehilafan seperti itu terjadi dalam situasi yang berbeda-beda dan tidak benar bahwa hanya warga negara atau konsumen “biasa” yang melakukan hal itu. Kesalahan sama mungkin dibuat para pengusaha dalam upaya mereka mengejar keuntungan atau keunggulan kompetitif jangka pendek; oleh para pembuat undang-undang yang mendukung kenaikan upah minimum secepatnya; dalam manfaat jaminan sosial, tarif atau pajak-pajak lain; oleh para ekonom yang menganjurkan peningkatan pasokan uang atau pembagian kembali pendapatan; dan oleh banyak kalangan lain yang daftarnya tak berkesudahan. Sesungguhnya, merupakan latihan sangat baik bagi pembaca untuk mencari contoh-contoh lain baik di bagian-bagian utama buku ini maupun terutama dalam merenungkan isu-isu mutakhir dan kontroversial.

Akhirnya, judul buku ini memerlukan penjelasan. Karya asli, yang diterbitkan pada 1927, diberi judul *Liberalismus* dan dilengkapi, seperti dijelaskan sebelumnya, buku Mises mengenai sosialisme. Bahwa dianggap perlu memberi judul baru, *Persemakmuran Bebas dan Sejahtera* (*The Free and Prosperous Commonwealth*), saat terjemahan bahasa Inggrisnya disiapkan pada awal tahun 60an, menjelaskan dengan gamblang apa yang saya yakini sebagai tragedi sesungguhnya dalam sejarah intelektual: transfer istilah liberalisme.

Isu yang mendasari masalah ini lebih dari sekadar masalah terminologi; masalah ini juga tidak bisa dikesampingkan hanya sebagai sebuah contoh kemerosotan bahasa secara umum—seleksi kata (entropy), bisa dikatakan—di mana perbedaan makna dan

nada suara seringkali hilang. Masalah ini lebih dari hanya sekadar devaluasi istilah (*devaluation of terms*), meskipun hal itu mungkin penting; masalah ini menyangkut hal-hal substansi yang sangat penting, baik dari sisi praktis maupun intelektual.

Pertama-tama, kata “liberal” memiliki akar etimologi yang jelas dan berhubungan dengan cita-cita tentang kebebasan individu. Kata itu juga memiliki landasan sejarah yang sangat berharga dalam tradisi dan pengalaman, serta warisan literatur yang kaya dan luas dalam falsafah sosial, pemikiran politik, *belles-lettres* (jenis karya sastra yang menekankan aspek keindahan daripada pesan yang ingin disampaikan), dan lain-lain. Karena hal ini dan berbagai alasan lain, sulit diterima bahwa cara pandang yang digambarkan buku ini tidak memiliki klaim eksklusif dan tak terbantahkan atas label liberal.

Kendati demikian, istilah liberalisme terbukti gagal melewati abad ke-19 atau Lautan Atlantik tanpa mengalami perubahan makna—dan tidak hanya sedikit tapi nyaris berlawanan! Kebingungan dan kerancuan yang diakibatkannya sedemikian besar sehingga sulit dibayangkan kemungkinan penjelasan lain yang lebih membingungkan lagi.

Akibat menyedihkan dari semua hal itu semakin terasa paling tidak karena dua hal. Pertama adalah kepasrahan luar biasa yang ditunjukkan para pewaris liberalisme dengan tak hanya membiarkan judul itu lepas dari genggaman mereka, tapi juga melalui kesediaan mereka memakai sebuah istilah yang memalukan bagi pendukung rahasia kelompok sosialis karena ada istilah lain yang lebih relevan untuk mereka. Bandingkan hal ini dengan dongeng kuno *Unta dan Tenda* (*The Camel and the Tent*), yang terlihat seperti ringan kasus pemetaan wilayah.

Alasan lain yang disesalkan adalah bahwa hilangnya istilah “liberal” memaksa penggunaan istilah-istilah rekaan canggih atau penjelasan berputar-putar (misalnya “libertarian,” “liberalisme abad ke-19,” atau “liberalisme klasik”). Mungkinkah secara tak disengaja ada liberalisme “neo-klasik” dan orang-orang yang mendukungnya?)

Apakah kita benar-benar telah kehilangan label liberal? Dalam

sebuah lampiran dalam edisi asli Jerman (dan dimuat dalam terjemahan ini), Mises membahas perubahan makna istilah itu dan menyinggung kemungkinan meraihnya kembali. Tapi, hingga 1962, dalam pengantarnya untuk edisi Inggris, nampaknya ia telah melepaskan semua harapan untuk melakukan hal itu.

Dengan segala rasa hormat saya menyatakan tidak sependapat. Karena, berdasarkan standar mana pun yang masuk akal, liberalisme milik kita semua, saya percaya kita pasti akan berupaya merebutnya kembali—sebagai sebuah prinsip, jika bukan karena alasan lain. Dan ada beberapa alasan lain, termasuk kenyataan bahwa liberalisme, seperti dikemukakan Mises, lebih dari sekadar istilah kebebasan ekonomi karena istilah itu merupakan istilah paling sesuai dan menyeluruh. Alasan lain adalah kebutuhan untuk mengkomunikasikan secara jelas tanpa kerancuan kepada masyarakat umum—yang dukungannya sangat penting—bahwa kita harus memiliki sebuah istilah tunggal yang sederhana dan bukan kata rekaan yang akan terdengar dibuat-buat oleh orang awam. Selain itu, kondisi dewasa ini cukup mendukung—ketidakpuasan merata terhadap campur tangan pemerintah dan kebangkitan kesadaran mengenai kebebasan individu untuk memilih dapat mengidentifikasi diri dengan sebutan yang lebih bermakna dan terhormat.

Bagaimana kita bisa merebut kembali nama kita sendiri? Hampir dipastikan dengan membalikkan proses yang telah membuat kita kehilangan nama itu; pertama-tama, kita harus berhenti memakai istilah itu dengan maknanya yang salah; lalu memperjuangkan pemakaian kata itu secara benar (di beberapa bagian dunia istilah itu belum sepenuhnya diabaikan); dan akhirnya dengan menolak, sesering mungkin, membiarkan penguasaan kata itu oleh mereka yang tidak berhak—mereka harus dipaksa mencari label yang sesuai dengan pandangan mereka seperti halnya liberalisme sesuai dengan pandangan kita.

Akan muncul keluhan berlebihan tentang kerancuan doktrin dan ini tak bisa dihindari—saya menduga kekhawatiran ini menjadi salah satu sebab kita terburu-buru meninggalkan tenda—tapi ini

harga yang harus kita bayar pada waktunya. Karena kebingungan masih akan berlanjut, menambah sedikit kebingungan untuk waktu yang tidak lama dapat ditolelir. Selain itu, kebingungan akan terjadi di kedua belah pihak, sehingga pihak lain akan ikut menanggung akibatnya dan kali ini, mungkin, perasaan tidak nyaman akan membuat unta mundur teratur.

Itu sebabnya terbitan ulang ini mengacu pada judul asli buku. Diharapkan pihak lain sepakat memakai istilah ini tanpa harus meminta maaf atau tanpa mengajukan syarat—yang tidak dibutuhkan—sehingga pada akhirnya liberalisme menemukan kembali makna awalnya yang benar.

**Louis M. Spadaro**

*Universitas Fordham, Agustus 1977*



---

## KATA PENGANTAR

*untuk Edisi Bahasa Inggris*

TATANAN sosial yang lahir dari falsafah Pencerahan (*Enlightenment*) memberikan kekuasaan kepada rakyat biasa. Dalam kapasitasnya sebagai konsumen, “rakyat biasa” diharapkan menentukan apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya dan bagaimana kualitasnya, oleh siapa, bagaimana dan di mana; dalam kapasitasnya sebagai pemilih, ia memiliki kewenangan menentukan kebijakan negaranya. Dalam masyarakat pre-kapitalis, mereka yang memiliki kekuasaan untuk memaksa orang-orang yang lebih lemah tunduk pada mereka memiliki posisi dominan. Mekanisme pasar bebas yang dikecam habis-habisan hanya menyisakan satu cara untuk meraih kekayaan, yaitu keberhasilan dalam melayani konsumen dengan cara terbaik dan termurah. Demokrasi pasar ini sejalan dengan sistem representasi pemerintahan dalam hal perilaku bernegara. Kebesaran periode antara Perang Napoleon dan Perang Dunia Pertama terletak pada kenyataan bahwa cita-cita sosial, setelah direalisasikan oleh orang-orang terkemuka yang memperjuangkannya, adalah perdagangan bebas di dunia yang damai yang terdiri dari bangsa-bangsa merdeka. Masa itu adalah ditandai perbaikan tingkat kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah pesatnya peningkatan jumlah penduduk. Masa itu adalah masa liberalisme.

Dewasa ini nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah liberalisme abad ke-19 nyaris terlupakan. Di benua Eropa liberalisme hanya dikenang oleh segelintir orang. Di Inggris, istilah “liberal” digunakan

untuk menjelaskan sebuah program yang berbeda dengan totalitarisme kaum sosialis hanya dalam detilnya.<sup>1</sup> Di Amerika Serikat, dewasa ini "liberal" berarti serangkaian ide dan asumsi politik yang dari segala sisi bertolak belakang dengan liberalisme seperti yang dimaknai oleh generasi-generasi terdahulu. Liberalisme khas Amerika ditujukan pada kekuasaan mutlak pemerintah, penentang gigih perdagangan bebas, dan pendukung seluruh perencanaan oleh penguasa, i.e., sosialisme. Kaum "liberal" ini sangat berkeinginan menekankan bahwa mereka tidak menyetujui kebijakan-kebijakan diktatorial Rusia bukan karena sifatnya yang sosialis atau komunis akan tetapi melulu karena kecenderungan imperialis mereka. Setiap upaya untuk mengambil alih sebagian aset orang-orang yang memiliki kekayaan lebih besar dari kebanyakan orang atau untuk membatasi hak-hak pemilik kekayaan dianggap liberal dan progresif. Praktis kekuasaan tak terbatas diberikan kepada badan-badan pemerintah yang keputusan-keputusannya tertutup bagi peninjauan kembali (konstitusional). Sejumlah kecil anggota masyarakat yang memiliki keberanian mengkritik kecenderungan yang mengarah pada kesewenang-wenangan administratif dicap sebagai ekstrimis, reaksioner, penguasa ekonomi dan industri (*economic royalist*), dan fasis. Ada anggapan bahwa sebuah negara bebas tidak perlu mentolelir kegiatan politik "musuh masyarakat".

Yang mengherankan adalah bahwa di negara ini ide-ide ini dianggap sebagai ide-ide khas Amerika, sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip dan falsafah Leluhur Kaum Pendatang (*Pilgrim Fathers*), para penandatangan Deklarasi Kemerdekaan, dan perancang Undang-undang Dasar dan dokumen Federal. Hanya sejumlah kecil orang menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dianggap progresif ini berasal dari Eropa dan bahwa di abad kesembilan belas Bismarck adalah pendukungnya yang paling cemerlang yang kebijakan-kebijakannya tidak akan dianggap progresif dan liberal oleh orang

---

1 Namun harus disebut di sini fakta bahwa beberapa orang Inggris terkemuka terus memberi dukungan terhadap tujuan liberalisme murni.



Amerika mana pun. Program *Sozialpolitik* Bismarck diluncurkan pada 1881, lebih dari 50 tahun sebelum tiruannya, program *New Deal* (Kesepakatan Baru) F.D. Roosevelt. Mengikuti jejak Kekaisaran Jerman, yang pada waktu itu merupakan negara paling sukses, semua negara-negara industri Eropa mengadopsi sebagian atau seluruh sistem itu yang seolah-olah menguntungkan rakyat banyak dengan mengorbankan sekelompok kecil kaum industrialis yang kasar. Generasi yang mencapai usia memilih setelah Perang Dunia I usai menganggap statisme sesuatu yang sudah seharusnya terjadi dan memiliki kebencian luar biasa terhadap “prasangka kaum borjuis”, kebebasan.

Tiga puluh lima tahun lalu, ketika saya mencoba merumuskan secara ringkas ide-ide serta prinsip-prinsip falsafah sosial yang dulu dikenal dengan nama liberalisme, saya tidak berharap bahwa penjelasan saya akan mampu mencegah bencana yang mengancam yang diakibatkan kebijakan-kebijakan yang dianut negara-negara Eropa. Saya hanya ingin menawarkan kepada sekelompok kecil orang yang menaruh perhatian sebuah kesempatan untuk mempelajari tujuan liberalisme klasik dan semua pencapaiannya dan dengan demikian melapangkan jalan bagi kebangkitan kembali semangat kebebasan setelah bencana datang.

Pada 28 Oktober 1951, Professor J. P. Hamilius dari Luxembourg memesan buku *Liberalismus* dari penerbit Gustav Fischer di Jena (zona Rusia di Jerman). Perusahaan penerbit itu mengatakan, pada 14 November 1951, bahwa buku itu tidak ada lagi, dan menambahkan: “*Die Vorräte dieser Schrift mussten auf Anordnung behördlicher Stellen restlos makuliert werden.*” (Atas perintah penguasa buku itu harus dimusnahkan). Surat itu tidak mengatakan apakah yang dimaksud dengan “penguasa” adalah pihak Nazi Jerman atau penguasa dari Republik Jerman Timur.

Bertahun-tahun setelah *Liberasmus* diterbitkan, saya telah banyak menulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hal itu. Saya menyoroti berbagai isu yang tidak bisa saya bahas di buku yang ukurannya harus dibatasi agar tidak membuat pembaca kecut.

Sebaliknya, saya merujuk pada buku itu berkaitan dengan beberapa hal yang tidak terlalu penting untuk masa sekarang ini. Selain itu, di buku ini ada beberapa hal berkaitan dengan kebijakan yang dibahas dalam cara yang bisa dipahami dan diapresiasi dengan benar hanya jika kita memperhitungkan kondisi ekonomi dan politik pada waktu itu pada saat buku itu ditulis.

Saya tidak melakukan perubahan apa pun terhadap naskah asli buku dan dalam cara apa pun tidak mempengaruhi terjemahan yang dilakukan oleh Dr. Ralph Raico dan penyuntingan yang dilakukan oleh Arthur Goddard. Saya sangat berterimakasih kepada kedua ilmuwan ini yang telah bersusah payah membuat buku ini tersedia untuk kalangan pembaca berbahasa Inggris.

**Ludwig von Mises**  
*New York, April, 1962*

---

## PENDAHULUAN

### 1. Liberalisme

Para filsuf, sosiolog, dan ekonom dari abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas merumuskan program politik yang berfungsi sebagai panduan kebijakan sosial pertama di Inggris dan Amerika Serikat, kemudian di benua Eropa, dan akhirnya di bagian lain dunia yang dihuni. Tapi tidak di satu tempat pun program ini pernah benar-benar dijalankan. Bahkan di Inggris, yang dijuluki tanah kelahiran liberalisme dan model negara liberal, para pendukung kebijakan liberal tidak pernah berhasil memperoleh semua tuntutan mereka. Di bagian lain dunia hanya serpihan-serpihan program liberal yang diadopsi, sementara yang lain, yang tidak kalah penting, sejak awal ditolak atau ditinggalkan dalam waktu singkat. Hanya dengan sedikit melebih-lebihkan dapatlah seseorang mengatakan bahwa dunia pernah melalui era liberal. Liberalisme tak pernah diberi kesempatan untuk berkembang penuh.

Namun, meskipun supremasi ide-ide liberal tidak berlangsung lama dan sangat terbatas, ide-ide itu cukup untuk mengubah wajah bumi. Sebuah perkembangan ekonomi yang luar biasa telah berlangsung. Pengerahan kekuatan produktif manusia melipatgandakan sarana penghidupan, Menjelang Perang Dunia (yang merupakan akibat dari perjuangan panjang dan pahit melawan semangat liberal dan yang mengantarkan periode yang penuh dengan serangan-serangan lebih pahit terhadap prinsip-prinsip liberal), dunia jauh lebih padat dari sebelumnya, dan setiap penduduk bisa hidup jauh lebih baik dari yang dimungkinkan di abad-abad sebelumnya. Kemakmuran yang diciptakan liberalisme telah

menurunkan angka kematian bayi—yang di abad-abad permulaan merupakan momok yang menakutkan—secara menyolok dan, sebagai akibat dari perbaikan kondisi hidup, usia rata-rata hidup diperpanjang.

Kemakmuran tidak hanya mengalir ke sekelompok orang dengan hak-hak istimewa. Menjelang Perang Dunia pekerja di negara-negara industri Eropa, Amerika, dan wilayah-wilayah kekuasaan Inggris di seberang lautan hidup lebih baik dan terhormat dibandingkan dengan para bangsawan yang berasal dari masa yang belum lama berlalu. Tidak hanya ia bisa makan dan minum sesuai dengan keinginannya, ia bisa memberi anak-anaknya pendidikan lebih baik, dia bisa, jika ia menginginkannya, ambil bagian dalam kehidupan intelektual dan budaya bangsanya, dan, jika dia memiliki bakat dan energi cukup, ia bisa, tanpa kesulitan, meningkatkan kedudukan sosialnya. Justru di negara-negara yang sudah melangkah jauh dalam mengadopsi program liberal puncak piramida sosial diduduki, terutama, oleh mereka yang bukan sejak lahir menikmati posisi istimewa berdasarkan kekayaan atau pangkat tinggi orang tua mereka, tetapi oleh mereka yang, dalam kondisi yang menguntungkan, berhasil keluar dari kondisi sulit dengan upaya mereka sendiri. Sekat-sekat yang di abad-abad permulaan memisahkan para tuan dari hamba sahaya telah runtuh. Sekarang hanya ada warga negara dengan hak yang sama. Tak seorang pun dirugikan atau dianiaya karena kebangsaannya, pendapatnya, atau keyakinannya. Penindasan politik dan agama sirna, dan perang internasional mulai jarang terjadi. Orang-orang yang optimis menyambut kelahiran era perdamaian abadi.

Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Pada abad kesembilan belas penentang liberalisme yang tangguh dan garang bermunculan dan berhasil menghapus sebagian besar pencapaian yang diraih oleh kaum liberal. Dunia tak mau lagi tahu tentang liberalisme. Di luar Inggris, istilah “liberalisme” secara terang-terangan dilarang. Di Inggris, kelompok “liberal” masih ada tapi kebanyakan hanya dalam nama saja. Sebenarnya, mereka lebih sosialis moderat daripada

liberal. Di mana-mana dewasa ini kekuasaan politik berada di tangan kelompok antiliberal. Program anti liberalisme melepaskan kekuatan yang memunculkan Perang Dunia yang dahsyat dan, melalui kuota impor dan ekspor, tarif, hambatan migrasi, dan langkah-langkah serupa, membuat bangsa-bangsa saling mengucilkan. Di setiap negara program anti liberalisme berkembang menjadi eksperimen sosialis yang mengakibatkan penurunan produktivitas kerja dan peningkatan kemiskinan dan kesengsaraan. Siapa pun yang secara tidak sengaja menutup mata terhadap fakta-fakta ini harus mengakui bahwa di mana-mana ada tanda-tanda bencana mengancam perekonomian dunia. Antiliberalisme sedang mengarah ke keruntuhan peradaban. Jika seseorang ingin tahu apa liberalisme dan apa tujuannya, ia tidak bisa sekadar berpaling kepada sejarah untuk mendapatkan informasi dan mencari tahu apa yang dipertaruhkan politisi liberal dan apa yang telah mereka capai. Karena, di mana pun liberalisme tidak berhasil melaksanakan programnya seperti yang dimaksudkan.

Bahkan program serta aksi partai-partai yang dewasa ini menyebut diri mereka liberal tidak bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang sifat sejati liberalisme. Telah disebutkan bahwa bahkan di Inggris sekali pun apa yang dipahami sebagai liberalisme dewasa ini lebih mirip dengan Tory-isme dan sosialisme daripada program lama para pedagang bebas (*freetraders*). Jika ada kaum liberal yang merasa bahwa mendukung nasionalisasi kereta api, tambang, dan usaha-usaha lain sesuai dengan faham liberalisme mereka, bahkan termasuk mendukung tarif proteksi, orang dengan mudah akan melihat bahwa dewasa ini tidak ada yang tersisa dari liberalisme selain namanya.

Dewasa ini untuk membentuk ide seseorang tentang liberalisme tidak cukup dilakukan hanya dengan mempelajari tulisan-tulisan para penggagasnya yang termasyhur. Liberalisme bukanlah doktrin yang sempurna atau dogma yang baku. Sebaliknya: liberalisme adalah aplikasi ajaran ilmu pengetahuan untuk kehidupan sosial manusia. Dan seperti ekonomi, sosiologi, dan filsafat tidak berhenti

sejak zaman David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, dan Wilhelm Humboldt, doktrin liberalisme hari ini juga berbeda dari doktrin liberalisme di jaman mereka, meski pun prinsip-prinsip dasarnya tidak berubah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak dilakukan upaya untuk membuat pernyataan singkat dan padat tentang makna doktrin ini. Ini bisa menjadi alasan bagi upaya kita sekarang untuk membuat pernyataan semacam itu.

## 2. Kesejahteraan Material

Liberalisme adalah sebuah doktrin yang ditujukan sepenuhnya bagi perilaku manusia di bumi ini. Sesungguhnya, liberalisme tidak mempunyai tujuan lain selain daripada memajukan kesejahteraan lahiriah dan material manusia dan tidak secara langsung memberi perhatian pada upaya memenuhi kebutuhan spiritual dan metafisik mereka. Liberalisme tidak menjanjikan kebahagiaan dan kesenangan selain kepuasan tertinggi karena semua keinginan duniawi mereka terpenuhi.

Liberalisme seringkali dikecam karena sikapnya yang murni eksternal dan materialistik terhadap segala sesuatu yang bersifat keduniawian dan fana. Dikatakan, kehidupan manusia tidak melulu terdiri dari makan dan minum. Ada kebutuhan yang lebih tinggi dan lebih penting daripada makanan dan minum, tempat tinggal dan pakaian. Bahkan, kekayaan duniawi terbesar pun tidak bisa memberi manusia kebahagiaan; mereka membuat jiwanya tidak puas dan kosong. Kesalahan paling serius liberalisme adalah bahwa ia tidak bisa menawarkan sesuatu untuk aspirasi manusia yang lebih dan mulia

Tetapi para kritikus yang mengeluarkan pernyataan seperti ini hanya menunjukkan bahwa konsep mereka tentang kebutuhan yang lebih tinggi dan lebih mulia sangat tidak sempurna dan materialistik. Kebijakan sosial, dengan sarana yang tersedia untuk mewujudkannya, bisa membuat orang kaya atau miskin, tetapi tidak pernah berhasil membuat mereka bahagia atau memuaskan kerinduan mereka yang terdalam. Dalam hal ini semua upaya

eksternal gagal. Kebijakan sosial hanya bisa menyingkirkan penyebab luar rasa sakit dan penderitaan; kebijakan sosial dapat mendorong sistem yang memberi makan untuk orang-orang yang kelaparan, pakaian untuk orang-orang yang telanjang, dan rumah-rumah untuk kaum tunawisma. Kebahagiaan dan kepuasan hati tidak tergantung pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi, di atas segalanya, pada apa yang dihargai oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Bukan karena liberalisme memandang rendah sifat-sifat kerohanian maka liberalisme hanya memusatkan perhatian pada kesejahteraan material manusia, melainkan karena keyakinan bahwa inspirasi manusia yang paling tinggi dan dalam tidak bisa dicapai oleh peraturan yang bersifat lahiriah. Liberalisme hanya berupaya menciptakan kesejahteraan lahiriah karena ia tahu bahwa kekayaan rohani tidak bisa datang dari luar, tetapi hanya dari dalam hati manusia sendiri. Liberalisme tidak bertujuan menciptakan apa pun selain prasyarat lahiriah bagi pengembangan kehidupan batin. Dan tidak diragukan lagi bahwa individu abad kedua puluh yang relatif makmur dapat dengan lebih mudah memenuhi kebutuhan spiritualnya daripada, katakanlah, individu abad kesepuluh, yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk menarik nafas dan beristirahat sejenak dari rasa cemas karena harus bersusah payah memenuhi kebutuhan hidupnya yang nyaris tidak terpenuhi atau untuk mempertahankan diri dari ancaman musuh-musuhnya.

Yang pasti, untuk mereka yang, seperti kebanyakan pengikut sekte-sekte Kristen Asiatik dan Abad Pertengahan, menerima bulat-bulat doktrin asketisme dan menganggap kehidupan manusia yang ideal adalah kemiskinan dan kebebasan dari rasa ingin memiliki seperti burung-burung di hutan dan ikan di laut, kita tidak bisa memberi jawaban saat mereka mencela sikap materialistis liberalisme. Kita hanya bisa meminta mereka untuk tidak mengganggu kita seperti halnya kita tidak menghalangi mereka mencapai surga dengan cara mereka sendiri. Biarkan mereka mengurung diri di sel mereka, jauh dari manusia dan dunia, dalam kedamaian. Mayoritas orang di jaman kita tidak dapat memahami konsep kehidupan asketis, tapi

begitu seseorang menolak prinsip kehidupan asketis, ia tidak bisa mengecam liberalisme karena mengejar kesejahteraan lahiriah.

### 3. Rasionalisme

Liberalisme biasanya juga dikecam karena rasional. Ia ingin mengatur segala sesuatu dengan cara yang masuk akal dan dengan demikian tidak mampu mengenali kebutuhan untuk memberikan keleluasaan bagi perasaan dan bagi hal-hal yang tidak masuk akal dalam berbagai urusan manusia.

Sebenarnya, liberalisme bukannya tidak menyadari fakta bahwa manusia kadang-kadang bertindak di luar akal sehat. Jika manusia selalu bertindak berdasarkan nalar, sia-sia memaksa agar mereka akal membimbing mereka. Liberalisme tidak mengatakan bahwa manusia selalu bertindak cerdas, melainkan bahwa mereka, demi kepentingan mereka sendiri, harus bertindak cerdas. Dan inilah esensi liberalisme, bahwa ia ingin mengakui kebenaran nalar dalam wilayah kebijakan sosial yang diterima tanpa sedikit pun penolakan di semua aspek dari tindakan manusia.

Dalam setiap wilayah kegiatan praktisnya manusia telah mengembangkan teknik atau teknologi yang menunjukkan bagaimana seseorang harus melangkah jika ia tidak mau berjalan dengan cara yang tidak masuk akal. Secara umum diakui alangkah baiknya jika manusia menguasai teknik-teknik yang dapat dimanfaatkan dalam hidupnya, dan orang yang memasuki bidang yang tekniknya belum ia kuasai akan dipandang rendah sebagai orang yang kurang handal.

Seandainya, setelah mendapat saran dari dokter untuk mengikuti pola hidup yang masuk akal—dengan perkataan lain higienis—seseorang menjawab: “Saya tahu saran Anda masuk akal, namun perasaan saya melarang saya mengikutinya. Saya ingin melakukan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan saya sekali pun itu mungkin tidak masuk akal,” tak seorang pun akan menganggap perilakunya terpuji. Apa pun yang ingin kita lakukan dalam hidup, untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bagi diri kita sendiri kita berupaya untuk melakukannya dengan cara yang masuk akal. Orang



yang ingin menyeberangi rel kereta api tidak akan melakukannya saat kereta melintas. Orang yang ingin menjahit kancing baju akan berusaha agar jarinya tidak tertusuk jarum.

Ada pemikiran bahwa hal sebaliknya harus berlaku di wilayah kebijakan sosial. Di sini, bukan nalar, namun perasaan dan impuls-impuls yang harus memutuskan. Pertanyaan “Bagaimana segala sesuatu harus diatur agar dapat memberikan penerangan yang baik dalam kekelaman?” umumnya dibahas hanya dengan argumen yang masuk akal. Akan tetapi, begitu pembicaraan tiba pada titik di mana harus diputuskan apakah pembangkit listrik dikelola oleh individu atau oleh kotamadya, nalar tidak lagi dianggap sah. Di sini sentimen, pandangan dunia—singkatnya, bukan nalar—yang harus memutuskan. Tak ada gunanya untuk bertanya: Mengapa?

Organisasi masyarakat menurut pola yang paling cocok untuk pencapaian tujuan yang berada tidak jauh di depan adalah masalah umum dan sederhana, sama seperti halnya pembangunan jalan kereta api atau produksi kain atau furnitur. Memang benar bahwa urusan nasional dan pemerintahan lebih penting dari semua masalah praktis lain menyangkut “perilaku manusia, karena tatanan sosial menyediakan dasar bagi semua hal, dan setiap individu dapat meraih kemakmuran dalam upayanya mencapai tujuannya hanya dalam masyarakat yang menghargai pencapaian tujuan mereka. Tapi setinggi apa isu-isu politik dan sosial ditempatkan, isu-isu itu tetap merujuk pada hal-hal yang berada dalam kontrol manusia dan oleh karena itu harus dinilai sesuai dengan hukum penalaran manusia. Dalam hal-hal seperti itu, tak kurang dari segala urusan remeh kita yang lain, mistisisme hanyalah sebuah kejahatan. Kemampuan pemahaman kita sangat terbatas.

Kita tidak akan pernah bisa berharap untuk menemukan rahasia paling utama dan paling dalam dari semesta. Tapi kenyataan bahwa kita tidak pernah dapat memahami makna dan tujuan eksistensi kita tidak menghalangi kita untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari penyakit menular atau untuk memanfaatkan sarana yang tepat untuk menyediakan makanan dan pakaian untuk

diri kita sendiri, atau menghalangi kita mengorganisasi masyarakat sedemikian rupa sehingga tujuan duniawi yang kita perjuangkan dapat dicapai dengan cara paling efektif. Bahkan negara dan sistem hukum, pemerintahan dan administrasi pemerintah tidak terlalu tinggi, terlalu baik, terlalu besar untuk kita bawa ke dalam rentang musyawarah rasional. Masalah kebijakan sosial adalah masalah teknologi sosial, dan solusi terhadap masalah tersebut harus dicari dengan cara dan kiat yang sama yang kita miliki untuk mengatasi masalah teknis lain: oleh refleksi rasional dan dengan meneliti semua kondisi yang ada. Nalar merupakan pengejawantahan manusia dan segala sesuatu yang menempatkan dirinya lebih tinggi dari hewan. Mengapa ia harus mengabaikan akal hanya dalam kaitan dengan kebijakan sosial dan keyakinan demi perasaan dan dorongan impulsif yang tidak jelas?

#### 4. Tujuan Liberalisme

Ada pendapat luas bahwa liberalisme dibedakan dari gerakan politik lain oleh kenyataan bahwa ia menempatkan kepentingan sebagian anggota masyarakat—kelas para pemilik kekayaan, kaum kapitalis, pengusaha—di atas kepentingan kelas-kelas lain. Pernyataan ini benar-benar keliru. Liberalisme hanya menginginkan yang terbaik bagi semua orang, bukan hanya satu kelompok khusus. Inilah yang ingin disampaikan oleh kaum utilitarianis Inggris—meskipun dengan cara yang tidak terlalu tepat—melalui rumus terkenal mereka, “kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar orang.” Secara historis, liberalisme adalah gerakan politik yang pertama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua, bukan kelompok khusus. Liberalisme dibedakan dari sosialisme, yang juga mengaku berjuang untuk kebaikan semua, bukan dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi dari cara yang dipilih untuk mencapai tujuan itu.

Andai dinyatakan bahwa konsekwensi dari kebijakan liberal adalah keharusan mendukung kepentingan khusus dari strata tertentu masyarakat, masih terbuka kemungkinan untuk perdebatan. Inilah salah satu tujuan karya ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa

kecaman itu sama sekali tidak beralasan. Tapi orang tidak bisa menuduh mereka yang mengangkat masalah itu berlaku tidak adil, meskipun kita menganggap pendapatnya salah, bisa saja pendapat itu diajukan dengan niat baik. Bagaimana pun juga, siapa pun yang menyerang liberalisme dengan cara ini mengakui bahwa tujuan liberalisme bersifat netral dan tidak ada tujuan lain di balik pernyataan tentang apa yang menjadi tujuannya.

Lain halnya dengan para kritikus yang mengecam liberalisme karena ingin memajukan kepentingan khusus kelas-kelas tertentu, bukan kesejahteraan umum. Kritikus seperti itu tidak adil dan tidak tahu apa-apa. Dengan memilih modus serangan ini, mereka menunjukkan bahwa, dalam hati, mereka menyadari kelemahan kasus mereka sendiri. Mereka meraih senjata beracun karena jika tidak mereka tidak dapat berharap dapat meraih sukses. Jika dokter menjelaskan kepada pasiennya yang sangat menginginkan makanan yang membahayakan kesehatannya, bahwa keinginannya itu tidak baik bagi kesehatannya, tak seorang pun akan dengan bodohnya mengatakan: "Dokter tidak peduli pada pasiennya; siapa pun yang menginginkan yang terbaik bagi pasiennya tidak akan melarangnya menikmati makanan lezat seperti itu." Semua orang memahami bahwa dokter menyarankan pasiennya untuk melupakan kesenangan yang ditimbulkan oleh kenikmatan makanan yang berbahaya itu semata-mata untuk melindungi kesehatannya. Akan tetapi, begitu masalahnya menyangkut kebijakan sosial, orang cenderung melihatnya dengan cara berbeda. Ketika seorang liberal menyarankan penolakan terhadap langkah-langkah populer tertentu karena ia mengetahui konsekuensi merugikan dari langkah-langkah tersebut, ia dikecam sebagai musuh rakyat, dan pujian diberikan kepada para demagog yang, tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan ditimbulkan, merekomendasikan apa yang tampaknya bijaksana untuk saat itu.

Tindakan yang masuk akal dibedakan dari tindakan yang tidak masuk akal oleh fakta bahwa tindakan yang masuk akal melibatkan pengorbanan sementara. Pengorbanan menyangkut

tindakan yang tidak masuk akal hanya pengorbanan semu karena tidak sebanding dengan konsekwensi yang menguntungkan yang kemudian terjadi. Orang yang menghindari makanan lezat namun tidak sehat membuat pengorbanan sementara. Hasilnya—tidak terjadi gangguan pada kesehatannya—menunjukkan bahwa ia tidak dirugikan tapi diuntungkan. Untuk melakukan hal seperti ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam (wawasan) tentang konsekwensi dari tindakan seseorang. Seorang demagog memanfaatkan fakta ini. Dia menentang kelompok liberal, yang menyerukan pengorbanan yang bersifat sementara dan sebenarnya bukan pengorbanan sesungguhnya, dan mengecam mereka sebagai musuh rakyat yang tidak berperasaan seraya menempatkan dirinya sebagai sahabat kemanusiaan.

Dalam mendukung langkah-langkah yang ia anjurkan, ia tahu benar cara untuk menyentuh hati pendengarnya dan membuat mereka mengucurkan air mata dengan berbagai kiasan tentang kemiskinan dan kesengsaraan. Kebijakan antiliberal adalah kebijakan konsumsi modal. Kebijakan antiliberal menganjurkan agar kebutuhan hari ini tersedia secara melimpah dengan mengorbankan masa depan. Hal ini persis sama dengan kasus pasien yang telah kita bicarakan. Dalam kedua kasus itu kerugian yang cukup memilukan akan terjadi di masa depan sebagai akibat kesenangan sesaat. Membicarakan masalah itu seakan-akan hal itu menyangkut pertentangan antara hati yang tidak memiliki perasaan dan kedermawanan, benar-benar tidak jujur dan tidak benar. Bukan hanya politisi dan pers dari pihak antiliberal yang secara terbuka melakukan kecaman itu. Hampir semua penulis dari aliran Sosialpolitik pernah memanfaatkan metode pertempuran licik ini.

Bahwa di dunia ini ada kemiskinan dan kesengsaraan bukan merupakan sanggahan terhadap liberalisme seperti keyakinan yang umum dianut para pembaca surat kabar yang bodoh. Sebaliknya, justru kemiskinan dan kesengsaraan itulah yang ingin dihapus oleh liberalisme, yang menganggap kiat yang diusulkannya sebagai satu-satunya kiat yang sesuai untuk pencapaian tujuan ini. Biarkan

siapa pun yang percaya bahwa dia tahu cara yang lebih baik atau bahkan untuk mencapai tujuan ini membuktikannya. Pernyataan bahwa kaum liberal tidak berjuang untuk kebaikan semua anggota masyarakat, tetapi hanya untuk kelompok-kelompok khusus, sama sekali tidak mewakili bukti itu.

Fakta bahwa kemiskinan dan penderitaan itu ada bukan merupakan sanggahan terhadap liberalisme bahkan jika dunia saat ini mengikuti kebijakan liberal. Akan selalu menjadi pertanyaan apakah kemiskinan dan kesengsaraan lebih besar tidak akan terjadi jika kebijakan lain diikuti. Mengingat semua cara yang diterapkan di semua lini oleh kebijakan antiliberal dewasa ini untuk mengekang dan menghambat institusi hak milik pribadi, tidak masuk akal (absurd) menyimpulkan segala sesuatu yang menentang kebenaran prinsip-prinsip liberal berdasarkan kenyataan bahwa kondisi ekonomi saat ini sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Untuk menghargai apa yang telah dicapai liberalisme dan kapitalisme, orang harus membandingkan kondisi mereka saat ini dengan kondisi di Abad Pertengahan atau abad-abad permulaan era modern. Apa yang bisa dicapai liberalisme dan kapitalisme seandainya keduanya diberi kebebasan penuh hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan-pertimbangan teoritis.

## **5. Liberalisme dan Kapitalisme**

Sebuah masyarakat di mana prinsip-prinsip liberal diberlakukan biasanya disebut masyarakat kapitalis, dan kondisi masyarakat itu, kapitalisme. Karena praktek kebijakan ekonomi liberalisme di mana-mana mirip, kondisi dunia saat ini hanya dapat memberikan gambaran tak sempurna tentang makna dan kemungkinan yang bisa dicapai kapitalisme seandainya ia berkembang penuh. Namun demikian, tidak salah bila orang menyebut zaman kita zaman kapitalisme, karena semua hal yang menciptakan kekayaan di zaman kita berasal dari lembaga-lembaga kapitalis. Berkat ide-ide liberal yang masih tetap hidup dalam masyarakat kita, berkat segala sesuatu yang masih bertahan dalam sistem kapitalis, mayoritas anggota

masyarakat yang hidup di jaman kita dapat menikmati standar hidup yang jauh di atas standard hidup masyarakat hanya beberapa generasi sebelumnya yang hanya dapat dinikmati golongan kaya dan orang-orang dengan hak-hak istimewa.

Yang pasti, dalam retorika rutin para demagog, fakta-fakta ini disajikan dengan cara yang sangat berbeda. Mendengarkan mereka berbicara, orang akan berpikir bahwa semua kemajuan dalam teknik produksi ditujukan untuk kepentingan eksklusif sekelompok orang terpilih, sedangkan orang kebanyakan semakin tenggelam dalam kesengsaraan. Namun, hanya dibutuhkan refleksi sejenak untuk menyadari bahwa buah dari semua inovasi teknologi dan industri meningkatkan pemuasan kebutuhan bagian terbesar kelompok masyarakat. Semua industri besar yang memproduksi barang-barang konsumen bekerja secara langsung untuk kepentingan mereka; semua industri yang menghasilkan mesin dan barang setengah jadi bekerja untuk mereka secara tidak langsung. Perkembangan industri yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, seperti di abad kedelapan belas, yang dirujuk dengan pilihan frasa yang tidak terlalu memuaskan, "Revolusi Industri," telah menghasilkan, di atas segalanya, kepuasan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Perkembangan industri pakaian, mekanisasi produksi sepatu, dan perbaikan dalam pengolahan dan distribusi bahan makanan telah, sesuai dengan sifatnya, menguntungkan masyarakat luas. Berkat industri inilah maka rakyat banyak memiliki pakaian dan makanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, produksi massal tidak hanya menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi juga kebutuhan lain untuk orang banyak. Pers melayani masyarakat sebanyak industri film, dan bahkan teater dan pusat-pusat kesenian serupa semakin lama semakin merakyat.

Namun demikian, akibat propaganda bersemangat pihak anti-liberal, yang memelintir fakta, dewasa ini orang mengasosiasikan ide-ide liberalisme dan kapitalisme dengan citra sebuah dunia yang semakin lama semakin terpuruk ke dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Yang pasti, tidak ada propaganda negatif dalam

bentuk apa pun yang dapat mengasosiasikan kata-kata “liberal” dan “liberalisme” dengan konotasi rendah seperti yang diharapkan para demagog. Sesungguhnya, tidak mungkin menyampingkan fakta bahwa, terlepas dari semua upaya propaganda antiliberal, ada sesuatu dalam pernyataan-pernyataan itu yang memberi kesan tentang apa yang dirasakan setiap orang normal ketika ia mendengar kata “kebebasan.” Oleh karena itu, propaganda antiliberal menghindari menyebutkan kata “liberalisme” terlalu sering dan lebih menyukai reputasi buruk yang dikaitkan dengan sistem liberal yang diasosiasikan dengan istilah “kapitalisme.” Ini akan mengingatkan orang pada kapitalis kejam yang tidak memikirkan hal lain kecuali memperkaya dirinya sendiri, bahkan jika itu hanya mungkin melalui eksploitasi sesama manusia.

Nyaris tak terpikir oleh siapa pun, ketika ia membentuk gagasan tentang seorang kapitalis, bahwa tatanan sosial yang diselenggarakan atas prinsip-prinsip liberal sejati dibentuk sedemikian rupa sehingga pengusaha dan para kapitalis hanya punya satu cara untuk meraih kekayaan, yaitu dengan cara menyediakan apa yang mereka anggap diperlukan oleh sesama mereka dengan lebih baik lagi. Alih-alih berbicara tentang kapitalisme dalam hubungannya dengan peningkatan luar biasa dalam standar hidup masyarakat, propaganda antiliberal hanya menyebut kapitalisme ketika mengacu pada fenomena yang kemunculannya dimungkinkan semata-mata akibat pengekangan terhadap liberalisme. Tidak ada referensi untuk fakta bahwa kapitalisme telah membuat kemewahan yang menggiurkan serta makanan, dalam bentuk gula, tersedia bagi orang banyak. Kapitalisme disebut dalam kaitannya dengan gula hanya bila harga gula di sebuah negara dinaikkan di atas harga pasar dunia oleh kartel, seakan-akan perkembangan seperti itu terbayang dalam sebuah tatanan sosial di mana prinsip-prinsip liberal diberlakukan. Di negara dengan rezim liberal, di mana tidak ada tarif, tak mungkin ada kartel yang dapat mendorong harga komoditas di atas dunia harga pasar.

Hubungan dalam rantai penalaran di mana demagogi antiliberal

berhasil menimpakan kesalahan pada liberalisme dan kapitalisme untuk semua eksekusi dan konsekuensi buruk kebijakan antiliberal adalah sebagai berikut: Seseorang mulai dengan asumsi bahwa prinsip-prinsip liberal bertujuan memajukan kepentingan-kepentingan kaum kapitalis dan pengusaha dengan mengorbankan kepentingan seluruh penduduk dan bahwa liberalisme adalah sebuah kebijakan yang berpihak pada orang kaya, bukan orang miskin. Kemudian orang mengamati bahwa banyak pengusaha dan kapitalis, dalam kondisi tertentu, menyokong tarif proteksi, dan yang lain—para produsen senjata—mendukung kebijakan “kesiapan nasional”, dan, di luar kendali, orang mengambil kesimpulan bahwa semua itu merupakan kebijakan “kapitalistik”.

Namun demikian, yang terjadi adalah kebalikannya. Liberalisme bukan kebijakan untuk kepentingan kelompok tertentu, namun kebijakan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, salah bila orang mengatakan bahwa pengusaha dan kapitalis memiliki kepentingan khusus dalam mendukung liberalisme. Kepentingan mereka dalam memperjuangkan program liberal persis sama dengan orang lain. Mungkin ada kasus-kasus individual di mana beberapa pengusaha atau kapitalis menyembunyikan kepentingan khusus mereka dalam program liberalisme; tetapi berlawanan dengan mereka adalah kepentingan khusus pengusaha atau kapitalis lain. Permasalahannya tidak sesederhana seperti yang dibayangkan mereka yang di mana-mana mencium aroma “kepentingan” dan “pihak yang berkepentingan”. Bahwa suatu bangsa membebankan tarif besi, misalnya, tidak bisa “hanya” dijelaskan oleh fakta bahwa hal ini menguntungkan para jutawan besi. Ada juga orang-orang yang menentang kepentingan negara, bahkan di antara para pengusaha, dan, betapa pun, mereka yang menerima manfaat dari tarif besi adalah minoritas yang jumlahnya semakin berkurang. Penyuaipan juga bukan sebuah penjelasan, karena orang yang disuap bisa hanya terdiri dari sekelompok minoritas; dan, selain itu, mengapa hanya satu kelompok, kaum proteksionis, yang melakukan penyuaipan, dan bukan lawan mereka, para pedagang bebas?



Faktanya adalah bahwa ideologi yang memungkinkan tarif proteksi tidak dibuat oleh “pihak yang berkepentingan” maupun oleh mereka yang disuap oleh pihak yang berkepentingan itu, tetapi oleh para ideolog, yang memberikan kepada dunia ide-ide yang mengatur jalannya semua urusan manusia. Di jaman kita, di mana ide-ide antiliberal berlaku, hampir semua orang memiliki jalan pikiran serupa, sama seperti ketika seratus tahun yang lalu kebanyakan orang berpikir dalam kerangka ideologi liberal yang berlaku ketika itu. Jika banyak pengusaha saat ini menyokong tarif proteksi, sikap ini tidak lebih dari bentuk yang diambil oleh antiliberalism dalam kasus mereka. Hal ini tidak ada kaitannya dengan liberalisme.

## 6. Akar Psikologis Antiliberalisme

Bukan tugas buku ini untuk membahas masalah kerjasama sosial selain dengan memakai argumen rasional. Akan tetapi akar dari oposisi terhadap liberalisme tidak dapat dijangkau oleh metode yang didasarkan atas nalar. Oposisi ini tidak lahir dari nalar, tetapi dari sikap mental patologis—dari kebencian dan dari kondisi neurasthenia (istilah psiko-patologis yang pertama kali digunakan oleh George Miller Beard pada 1869 untuk menjelaskan kondisi yang ditandai oleh kelelahan, kecemasan, sakit kepala, neuralgia [sakit saraf] dan depresi) yang bisa disebut sebagai kompleks Fourier, mengambil nama sosialis Perancis.

Berkaitan dengan rasa tidak suka dan kedengkian yang disebabkan iri hati, tidak banyak yang perlu dikatakan. Rasa tidak suka merajalela saat seseorang memiliki kebencian luar biasa terhadap orang yang berada dalam kondisi yang jauh lebih menguntungkan sehingga ia siap menanggung kerugian

Banyak dari mereka yang menyerang kapitalisme tahu betul bahwa situasi mereka di bawah sistem ekonomi lain akan kurang menguntungkan. Namun, sekali pun mereka mengetahui hal ini, mereka mendukung reformasi, misalnya sosialisme, karena mereka berharap orang kaya yang membuat mereka iri juga akan menderita di bawah sistem itu. Orang berulang kali mendengar para sosialis

mengatakan bahwa kesulitan materi lebih mudah ditanggung dalam sebuah masyarakat sosialis karena orang menyadari bahwa tak seorang pun bernasib lebih baik dari tetangganya.

Bagaimana pun juga, rasa tidak suka masih bisa diatasi dengan argumen rasional. Hal ini tak lain karena tidak terlalu sulit untuk menjelaskan pada orang yang dipenuhi dengan kebencian bahwa yang terpenting baginya bukanlah memperburuk posisi orang lain tetapi memperbaiki kondisinya sendiri.

Kompleks Fourier jauh lebih sulit diatasi. Kasus ini melibatkan penyakit serius sistem syaraf, atau neurosis, yang lebih memerlukan perhatian seorang psikolog daripada seorang legislator. Namun hal ini tidak dapat diabaikan dalam meneliti masalah-masalah masyarakat modern. Sayangnya, mereka yang berkecimpung di dunia medis sampai sekarang nyaris tidak peduli dengan masalah yang menyangkut kompleks Fourier. Bahkan, masalah itu nyaris tidak diperhatikan oleh Freud, guru besar psikologi, atau oleh para pengikutnya dalam teori neurosis mereka, meskipun kita berutang pada psikoanalisis karena telah membuka jalan bagi pemahaman koheren dan sistematis tentang gangguan mental semacam ini.

Nyaris tidak sampai satu dari sejuta orang berhasil memenuhi ambisi hidupnya. Hasil kerja seseorang jauh dari impiannya semasa muda, sekali pun keberuntungan berpihak padanya. Semua rencana dan keinginan hancur berantakan karena seribu rintangan, dan kekuatan seseorang terbukti terlalu lemah untuk mencapai tujuan yang ingin ia raih dengan sepenuh hatinya. Harapan yang tidak terpenuhi, rencana yang gagal, ketidakmampuannya dalam menghadapi tugas pekerjaan yang telah ia tetapkan—semua ini merupakan pengalaman manusia yang paling menyakitkan. Sesungguhnya, ini merupakan pengalaman manusia pada umumnya.

Ada dua cara untuk bereaksi terhadap pengalaman ini, salah satunya ditunjukkan oleh kearifan praktis Goethe: Anda berharap saya membenci kehidupan, Melarikan diri ke hutan belantara, Karena tidak semua mimpi saya berkembang menjadi kenyataan Prometheus-nya menangis. Dan Faust mengakui di “momen

tertinggi” bahwa “kata-kata arif yang terakhir” adalah: Tak seorang pun berhak atas kebebasan atau hidupnya. Bila ia tidak meraihnya kembali (memperbaruinya) setiap hari.

Kemauan dan semangat seperti itu tidak dapat dikalahkan oleh kemalangan duniawi apa pun. Orang yang menerima kehidupan seperti apa adanya dan tidak pernah membiarkan dirinya kewalahan tidak perlu berlindung di balik “kebohongan yang menyelamatkan” demi melindungi rasa percaya dirinya yang hancur. Jika keberhasilan yang telah lama dinantikan tak kunjung datang, jika perubahan nasib menghancurkan dalam sekejap mata apa yang telah dengan susah payah dibangun oleh kerja keras bertahun-tahun, ia hanya perlu melipatgandakan upayanya. Ia dapat menantang bencana tanpa merasa putus asa.

Para penderita gangguan syaraf (*neurotic*) tidak dapat menghadapi kenyataan hidup, yang terlalu liar, kasar dan dangkal untuk mereka. Tidak seperti orang sehat, ia tidak memiliki kemampuan untuk “melanjutkan hidup terlepas dari apa pun” agar hidup menjadi tertahankan. Itu tidak sesuai dengan kelemahannya. Sebaliknya, ia berlindung di balik delusi. Delusi, menurut Freud, “adalah sesuatu yang didambakan, semacam hiburan”; ciri-ciri delusi adalah “penolakan terhadap serangan logika dan realitas.” Oleh karena itu tidak cukup meujuk pasien agar keluar dari delusinya hanya dengan menunjukkan betapa tak masuk akalnyanya situasi itu. Pasien sendiri yang harus mengatasinya agar ia pulih. Ia harus belajar untuk memahami mengapa ia tidak ingin menghadapi kebenaran dan mengapa ia berlindung di balik delusi.

Hanya teori neurosis yang dapat menjelaskan keberhasilan yang dinikmati oleh Fourierisme, produk gila yang dihasilkan oleh otak yang benar-benar kacau. Ini bukan tempat untuk mengemukakan bukti psikosis Fourier dengan mengutip bagian dari tulisan-tulisannya. Penjelasan itu hanya menarik bagi psikiater dan, mungkin, juga untuk orang-orang yang memperoleh kenikmatan tertentu dari membaca produk dari fantasi tak senonoh itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Marxisme, saat dipaksa meninggalkan retorika

dialektis yang muluk-muluk dan cemoohan serta fitnah terhadap lawannya dan untuk membuat beberapa pernyataan sekenanya berkaitan dengan masalah ini, tak pernah menawarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh Fourier yang “utopis”.

Marxisme juga tak mampu membangun sebuah gambaran masyarakat sosialis tanpa membuat dua asumsi yang sudah dibuat oleh Fourier, yang bertentangan dengan semua pengalaman dan nalar. Di satu sisi, ia menganggap bahwa “bahan dasar” produksi, yang “ada di alam tanpa usaha produktif manusia,” tersedia bagi kita secara berlimpah sehingga tidak perlu dihemat; itulah yang mendasari keyakinan Marxisme terhadap “peningkatan produksi yang tak terbatas.” Di sisi lain, diasumsikan bahwa dalam sebuah masyarakat sosialis kerja akan berubah dari “beban menjadi kesenangan”—bahkan kerja akan menjadi “kebutuhan utama dalam hidup.” Kalau semua barang tersedia secara melimpah dan kerja adalah kesenangan, tak diragukan lagi tak akan sulit membangun negeri Cockaigne (negeri yang berasal dari dongeng Abad Pertengahan, tempat yang penuh dengan segala macam kemewahan, di mana kenyamanan dan kesenangan selalu tersedia).

Marxisme percaya bahwa dari ketinggian “sosialisme ilmiahnya” ia berhak untuk memandang hina romantisme dan kaum romantis. Namun, dalam kenyataan prosedurnya sendiri tidak berbeda dari mereka. Alih-alih menghilangkan rintangan yang menghambat upaya mewujudkan keinginannya, ia memilih membiarkan semua hambatan memudar dalam kabut angan-angan.

Dalam kehidupan seorang neurotik “kebohongan yang menyelamatkan “ memiliki fungsi ganda. Kebohongan itu tidak hanya menghiburnya dari kegagalan masa lalu, tetapi juga menawarkan prospek kesuksesan masa depan. Dalam kasus kegagalan sosial, satu-satunya yang menarik perhatian kita di sini, penghiburan terletak pada keyakinan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk mencapai tujuan mulia yang ia cita-citakan bukan disebabkan oleh ketidakmampuannya sendiri melainkan oleh cacat dalam tatanan sosial.

Mereka yang tidak puas berharap bahwa setelah lawannya digulingkan mereka dapat menikmati keberhasilan yang tidak dapat mereka nikmati akibat sistem yang berlaku.

Akibatnya, sia-sia menjelaskan kepadanya bahwa impiannya yang utopis tidak mungkin menjadi kenyataan dan bahwa satu-satunya landasan yang mungkin bagi masyarakat yang diatur sesuai dengan prinsip pembagian kerja adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi. Para neurotik bergantung pada “kebohongan yang menyelamatkan” mereka dan ketika diharuskan membuat pilihan antara menyangkal kebohongan itu atau logika, ia lebih suka mengorbankan logika. Karena hidup akan tak tertahankan baginya tanpa penghiburan yang ia temukan dalam gagasan sosialisme. Menurut gagasan itu, bukan ia, tapi dunia, yang bersalah karena telah menyebabkan kegagalannya; dan keyakinan ini meningkatkan rasa percaya dirinya yang tertekan dan membebaskannya dari rasa rendah diri yang menyiksa.

Sama seperti halnya orang Kristen yang taat dapat lebih mudah menanggung musibah yang menimpanya di bumi karena dia berharap eksistensi pribadinya akan berlanjut di tempat lain, di dunia yang lebih baik, di mana mereka yang di bumi menjadi yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama, maka, untuk manusia modern, sosialisme menjadi obat mujarab melawan kesulitan duniawi. Namun, kalau keyakinan pada keabadian, pada imbalan di akhirat, dan pada kebangkitan kembali merupakan insentif untuk melakukan kebajikan dalam kehidupan ini, janji sosialis memberi efek yang sangat berbeda. Tak ada kewajiban lain dalam sosialisme selain memberikan dukungan politik kepada partai sosialis, tetapi pada saat yang sama menimbulkan harapan dan tuntutan.

Karena ini merupakan ciri-ciri impian sosialis, dapat dimengerti bahwa setiap pendukung sosialisme mengharapkan justru apa yang selama ini tidak dapat ia nikmati. Para perancang sosialis tidak hanya menjanjikan kekayaan untuk semua tetapi juga kebahagiaan dalam kasih terhadap semua orang, kemajuan fisik dan rohani setiap

individu, terungkapnya bakat artistik dan ilmiah semua manusia, dll. Baru-baru ini Trotsky menyatakan dalam salah satu tulisannya bahwa dalam masyarakat sosialis “manusia rata-rata akan berdiri sama tinggi dengan Aristoteles, Goethe, atau Marx. Dan dari punggung bukit ini akan muncul puncak-puncak baru.”<sup>1</sup> Surga para sosialis adalah kerajaan kesempurnaan, dihuni sepenuhnya oleh manusia-manusia super yang benar-benar bahagia. Semua literatur sosialis penuh dengan omong kosong seperti itu. Tapi, omong kosong itulah yang merebut hati sebagian besar pendukungnya.

Seseorang tidak dapat mengirim setiap orang yang menderita kompleks Fourier ke dokter untuk pengobatan psikoanalitik; jumlah mereka yang menderita gangguan itu terlalu besar. Tidak ada obat lain yang mungkin dalam hal ini selain pengobatan oleh pasien itu sendiri. Dengan pengetahuannya sendiri ia harus belajar untuk bertahan dalam hidup tanpa mencari kambing hitam yang dapat ia salahkan, dan ia harus berusaha untuk memahami hukum dasar kerjasama sosial.



---

1 Leon Trotsky, *Sastra dan Revolusi*, terj. oleh R. Strunsky (London, 1925), hal 256.

---

## BAB 1

# DASAR-DASAR KEBIJAKAN LIBERAL

### 1. Hak Milik

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang bekerjasama. Bertolak belakang dengan tindakan individu yang berdiri sendiri, kerjasama berdasarkan prinsip pembagian kerja memiliki kelebihan karena menghasilkan produktivitas lebih besar. Jika sejumlah orang bekerjasama sesuai dengan prinsip pembagian kerja, mereka akan menghasilkan (dalam kondisi serupa) jauh lebih banyak dari yang bisa mereka produksi sendiri-sendiri sebagai individu mandiri.

Semua peradaban manusia didasarkan pada fakta ini: bahwa pembagian kerjalah yang membuat manusia dibedakan dari binatang. Pembagian kerjalah yang telah menjadikan manusia yang lemah, yang jauh lebih rendah dari kebanyakan binatang dari segi kekuatan fisik, sebagai penguasa bumi dan pencipta keajaiban teknologi.

Tanpa pembagian kerja, kita tidak akan mungkin berada pada tingkat kemajuan seperti saat ini dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai nenek moyang kita seribu atau sepuluh ribu tahun lalu. Kerja manusia saja tidak mampu meningkatkan kesejahteraan kita. Agar memberi hasil, pekerjaan harus diterapkan pada bahan-bahan dan sumber daya bumi yang disediakan alam untuk kita.

Tanah, dengan semua zat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, dan tenaga kerja manusia merupakan dua faktor produksi

yang melalui kerjasama di antara keduanya menghasilkan semua komoditas yang memenuhi semua kebutuhan jasmaniah kita.

Dalam rangka produksi, kita harus mengerahkan tenaga kerja dan faktor-faktor material produksi, termasuk tidak hanya bahan baku dan sumber daya yang kita miliki, yang disediakan oleh alam dan kebanyakan ditemukan di bumi, tetapi juga produk-produk antara yang dihasilkan dari faktor-faktor alamiah utama produksi melalui kerja manusia.

Dalam bahasa ilmu ekonomi kita membedakan tiga faktor produksi berdasarkan urutannya: tenaga kerja, tanah, dan modal. Lahan dipahami sebagai segala sesuatu yang disediakan alam untuk kita dalam bentuk bahan-bahan dan sumber energi di bumi, di bawah, dan di atas permukaan bumi, dalam air, dan di udara; barang-barang modal adalah semua barang setengah jadi yang diproduksi dari bumi dengan bantuan tenaga manusia, yang dibuat untuk menghasilkan produk lanjutan, seperti mesin, peralatan, barang-barang setengah jadi dari berbagai jenis, dan lain-lain.

Sekarang mari kita tinjau dua sistem berbeda dari kerjasama manusia di bawah pembagian tenaga kerja, yaitu yang berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan yang berbasis kepemilikan umum atas alat-alat produksi.

Pembagian kedua disebut sosialisme atau komunisme; yang pertama, liberalisme, atau juga (setelah pada abad kesembilan belas ia menciptakan pembagian kerja yang mencakup seluruh dunia) kapitalisme. Kaum liberal berpendapat bahwa satu-satunya sistem kerjasama manusia yang bisa berjalan dalam masyarakat yang didasarkan pada pembagian kerja adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi.

Mereka berpendapat bahwa sosialisme sebagai sebuah sistem yang komprehensif yang mencakup semua alat-alat produksi tidak bisa dilaksanakan, dan bahwa penerapan prinsip sosialis atas pembagian alat-alat produksi, meskipun bukan tidak mungkin dapat menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja, sehingga alih-alih menciptakan kekayaan yang lebih besar, sosialisme sebaliknya



mengakibatkan berkurangnya kekayaan.

Oleh karena itu program liberalisme, jika diringkaskan dalam satu kata, harus dibaca sebagai kekayaan, yaitu kepemilikan pribadi atas alat produksi (karena dalam hal komoditas siap konsumsi, kepemilikan pribadi adalah soal biasa dan tidak diperdebatkan bahkan oleh kelompok sosialis dan komunis). Semua tuntutan lain liberalisme berasal dari tuntutan pokok ini.

Sejajar dengan kata “kekayaan” dalam program liberalisme, orang mungkin dengan cukup tepat menempatkan kata-kata “kebebasan” dan “perdamaian.” Kata-kata itu ditempatkan bersandingan bukan karena hal itu dilakukan program-program liberalisme terdahulu.

Kita telah mengatakan bahwa program liberalisme masa kini telah melampaui program lama liberalisme, bahwa program liberalisme saat ini didasarkan atas wawasan yang lebih dalam dan pemahaman lebih baik terhadap hubungan timbal balik karena dapat menuai manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Kebebasan dan perdamaian ditempatkan di garis depan program liberalisme, bukan karena banyak kaum liberal yang terdahulu menganggap kebebasan dan perdamaian sederajat dengan prinsip dasar liberalisme itu sendiri, dan bukan sekadar konsekuensi ikutan dari salah satu prinsip fundamental kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi; tetapi semata-mata karena kebebasan dan perdamaian telah menjadi korban serangan yang begitu sengit dari para penentang liberalisme, dan kaum liberal tidak ingin terlihat, melalui penghilangan prinsip-prinsip ini, bahwa mereka mengakui kebenaran dari keberatan yang diajukan terhadap mereka.

## 2. Kebebasan

Ide tentang kebebasan telah mengakar dalam diri kita, sehingga tak seorang pun berani mempertanyakannya. Orang terbiasa berbicara tentang kebebasan dengan takzim; tak heran Lenin menyebutnya “prasangka kaum borjuis”. Meskipun sekarang fakta itu sering dilupakan, semua ini merupakan keberhasilan liberalisme.

Nama liberalisme itu sendiri berasal dari kebebasan, dan nama partai yang berposisi dengan kaum liberal (kedua nama itu muncul dalam pergolakan konstitusional Spanyol masa-masa dasawarsa awal abad ke-19) awalnya adalah “*servile*” (penghambaan).

Sebelum kebangkitan liberalisme bahkan para filsuf yang berhati mulia, pencetus agama, pemuka agama yang didorong semangat niat baik, dan negarawan yang benar-benar mencintai rakyat mereka, memandang perbudakan sebagai bagian dari umat manusia yang merupakan institusi yang adil, secara umum bermanfaat dan sepenuhnya menguntungkan. Ada pandangan bahwa sebagian orang dan bangsa-bangsa ditakdirkan untuk menikmati kebebasan dan sebagian lain terbelenggu. Tidak hanya para tuan yang berpendapat demikian karena lebih banyak lagi para budak yang percaya akan hal itu. Mereka menerima beban status budak mereka tidak hanya karena mereka harus tunduk pada dominasi kekuatan para tuan mereka tetapi juga karena mereka melihat sisi baiknya: para hamba sahaya terbebas dari kewajiban mencari kebutuhan pangan mereka sehari-hari, karena tuan mereka memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika liberalisme memulai gerakan menghapus perbudakan dan penghambaan kaum petani di Eropa serta perbudakan orang-orang Negro di wilayah-wilayah jajahan di seberang lautan pada abad ke-18 dan pada paruh pertama abad ke-19, tidak sedikit kaum humanis sejati yang menentangnya. Para pekerja paksa telah terbiasa dengan belenggu yang mengikat mereka dan tidak menganggapnya sebagai kejahatan. Mereka tidak siap untuk menikmati kebebasan dan tidak tahu bagaimana menikmati kebebasan itu. Kemalangan menanti mereka jika para tuan tidak lagi memberikan perlindungan pada mereka. Mereka tidak akan mampu menangani masalah-masalah mereka selain dari sekadar menjamin tersedianya kebutuhan sehari-hari mereka, dan dalam waktu singkat mereka akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Emansipasi tidak hanya akan gagal menghasilkan sesuatu yang benar-benar bernilai bagi mereka namun juga akan merusak kesejahteraan material mereka.

Yang mencengangkan adalah kenyataan bahwa pandangan ini juga dimiliki oleh sejumlah besar para budak saat hal itu ditanyakan pada mereka. Untuk melawan pandangan-pandangan serupa, banyak kaum liberal yakin bahwa secara umum dan dalam situasi tertentu diperlukan upaya untuk memberi gambaran ekstrim tentang kasus-kasus khusus di mana para hamba dan budak diperlakukan secara kejam. Namun, semua eksekusi ini sama sekali bukan kebenaran mutlak. Memang ada kasus-kasus penyiksaan, dan kasus-kasus semacam itu merupakan alasan lain mengapa sistem ini harus dihapus. Secara keseluruhan, para budak menerima perlakuan manusiawi dan baik dari tuan mereka.

Para penyokong penghapusan perbudakan karena alasan-alasan kemanusiaan tidak bisa memberi tanggapan terhadap pendapat bahwa sistem itu dipertahankan antara lain demi kepentingan para budak. Hanya ada satu argumen di balik penolakan terhadap perbudakan yang dapat dan telah membalikkan semua pandangan lain—yaitu bahwa tak dapat dipungkiri lagi bahwa tenaga kerja bebas jauh lebih produktif dari pekerja paksa. Seorang budak tidak memiliki kepentingan yang dapat mendorongnya untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Ia bekerja hanya sebatas yang diperlukan agar terhindar dari hukuman karena tidak memenuhi standar minimum. Sebaliknya, pekerja bebas memahami bahwa semakin banyak yang ia hasilkan, semakin besar imbalan yang ia terima. Ia mengerahkan segenap kemampuannya untuk meningkatkan pendapatannya. Kita hanya perlu membandingkan tuntutan terhadap pekerja dalam menangani sebuah traktor modern yang hanya membutuhkan kecerdasan dan tenaga yang relatif kecil, dengan industri yang hanya dua generasi sebelumnya dianggap memadai oleh para petani Rusia yang terpukau. Hanya pekerja bebas yang dapat menghasilkan apa yang dituntut dari pekerja industri modern.

Para pembual dungu mungkin akan beradu pepesan kosong tanpa berkesudahan mengenai apakah semua orang ditakdirkan untuk memiliki kebebasan dan apakah mereka semua siap untuk

menikmati kebebasan. Mereka mungkin berkeras bahwa ada ras-ras dan bangsa-bangsa yang secara alamiah ditakdirkan untuk hidup sebagai budak dan bahwa ras para tuan mempunyai kewajiban untuk membelenggu umat manusia di luar kelompok mereka. Kaum liberal tidak akan menentang argumentasi mereka dalam cara apa pun karena pandangan mereka yang menyokong kebebasan untuk semua orang, tanpa perbedaan, sama sekali bertolak belakang. Kami kaum liberal tidak percaya bahwa Tuhan atau alam menginginkan kebebasan bagi semua orang karena kami tidak diajarkan tentang rencana Tuhan atau alam, dan secara prinsip kami menghindari membawa-bawa nama Tuhan atau alam dalam perdebatan tentang hal-hal sepele. Kami hanya ingin mempertahankan pendapat bahwa sebuah sistem yang didasari oleh kebebasan untuk semua pekerja menjamin tingkat produktivitas tertinggi dan oleh karena itu merupakan kepentingan semua orang di muka bumi ini. Kami menentang perbudakan, bukan karena hal itu menguntungkan “para tuan” akan tetapi karena kami yakin bahwa pada akhirnya hal itu merugikan kepentingan semua anggota masyarakat termasuk “para tuan”. Seandainya umat manusia menerapkan praktek perbudakan, baik secara utuh mau pun sebagian, kemajuan perekonomian luar biasa yang dicapai dalam seratus lima puluh tahun terakhir tidak mungkin tercapai. Kita tidak akan memiliki jalan kereta api, mobil, pesawat terbang, kapal laut, lampu dan tenaga listrik; tidak akan ada industri kimia, dan seperti halnya kaum Yunani dan Romawi kuno, dengan segenap kejeniusan mereka, harus hidup tanpa hal-hal tersebut. Cukup dengan menyinggung hal ini semua orang menyadari bahkan para pemilik budak sekali pun memiliki alasan untuk merasa puas dengan berbagai peristiwa yang terjadi setelah perbudakan dihapuskan. Dewasa ini pekerja Eropa menikmati kehidupan yang jauh lebih menyenangkan dan menguntungkan dibandingkan dengan firaun di Mesir sekali pun meski para firaun memiliki ribuan budak, sementara seorang pekerja hanya mengandalkan kekuatan dan ketrampilan tangannya. Seandainya seorang kaya dari masa silam ditempatkan di situasi sekarang di mana

seorang rakyat biasa hidup, ia akan menyatakan tanpa ragu-ragu bahwa hidupnya jauh lebih miskin daripada hidup yang dijalani bahkan oleh seseorang dengan fasilitas sederhana.

Inilah buah pekerja bebas. Pekerja bebas juga mampu menciptakan lebih banyak kekayaan untuk semua orang dari pada yang bisa dihasilkan para budak untuk tuan mereka.

### 3. Perdamaian

Ada orang-orang berhati mulia yang membenci perang karena mengakibatkan kematian dan penderitaan. Sebesar apa pun kekaguman orang pada sikap kemanusiaan mereka, argumentasi mereka menentang perang, yang didasarkan atas alasan-alasan kedermawanan, nyaris tidak berdaya melawan argumentasi kalangan pendukung perang.

Kelompok yang disebut belakangan ini sama sekali tidak membantah bahwa perang mengakibatkan penderitaan dan kesedihan mendalam. Namun, mereka yakin bahwa hanya dengan perang umat manusia bisa membuat kemajuan. Perang adalah induk dari segala hal, kata seorang filsuf Yunani, dan ribuan orang mengamini perkataannya. Orang mengalami kemunduran di saat-saat damai. Hanya perang yang mampu memunculkan bakat-bakat terpendam dalam dirinya dan mengilhaminya dengan ide-ide luhur. Seandainya perang dihapus, umat manusia akan menghadapi kelesuan dan kemandekan.

Sulit atau bahkan mustahil membantah penalaran para pendukung perang kalau satu-satunya keberatan terhadap perang yang bisa diajukan adalah bahwa perang membutuhkan pengorbanan. Bagi para pendukung perang, semua pengorbanan itu tidak sia-sia dan sepadan.

Seandainya benar bahwa perang adalah induk dari segala hal, maka tuntutan akan pengorbanan umat manusia memang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan untuk kemajuan umat manusia. Orang mungkin meratapi pengorbanan demi perang, bahkan mungkin berusaha untuk menguranginya,

namun keinginan mereka untuk menghapus perang dan menciptakan perdamaian abadi tidak bisa dibenarkan.

Kritik kaum liberal terhadap argumen yang mendukung perang, secara prinsip berbeda dari kaum humanis. Kritik itu dimulai dari dasar pemikiran bahwa bukan peperangan, tapi perdamaian, yang merupakan induk dari segala hal. Satu-satunya hal yang memungkinkan manusia untuk maju dan yang membedakan manusia dari hewan adalah kerjasama sosial. Hanya kerja sajalah yang produktif: kerja menciptakan kekayaan dan dengan demikian meletakkan dasar-dasar lahiriah untuk perkembangan batin manusia.

Perang hanya menghancurkan, tidak menciptakan. Perang, pembantaian, perusakan, dan kehancuran adalah hal-hal yang membuat kita sama dengan binatang buas di hutan; kerja yang membangun adalah ciri khas kita, manusia. Kaum liberal membenci perang, bukan, seperti kaum humanis, karena fakta bahwa perang memiliki konsekuensi menguntungkan, tetapi karena perang hanya mengakibatkan kerugian.

Seorang humanis yang cinta damai mendekati penguasa yang kuat dan menegurnya: “Jangan melancarkan perang, meskipun Anda memiliki kemungkinan untuk memajukan kesejahteraan Anda sendiri melalui kemenangan. Jadilah orang yang mulia dan murah hati, dan tolak kemenangan menggoda, bahkan jika itu berarti pengorbanan dan Anda kehilangan keuntungan.”

Orang liberal berpikir sebaliknya. Ia yakin bahwa kejayaan perang adalah kejahatan, bahkan untuk sang pemenang, dan bahwa perdamaian selalu lebih baik daripada peperangan. Perdamaian tidak menuntut pengorbanan dari pihak yang lebih kuat. Perdamaian hanya menuntut agar orang menyadari di mana letak kepentingan sejatinya dan untuk memahami bahwa bagi dirinya, sebagai pihak yang lebih kuat, perdamaian sama menguntungkannya seperti bagi pihak yang lebih lemah.

Ketika sebuah negara yang cinta damai diserang oleh musuh yang suka berperang, negara itu harus memberikan perlawanan dan melakukan apa saja untuk menangkal serangan. Tindakan heroik

yang dilakukan dalam peperangan seperti itu oleh mereka yang berjuang untuk kebebasan mereka dan kehidupan mereka, patut dipuji sepenuhnya, dan tidak salah bila orang memuji kejantanan dan keberanian para pejuang tersebut.

Dalam hal ini, keberanian, kegagahan, dan kebencian terhadap kematian patut dipuji karena digunakan untuk sebuah tujuan baik. Tetapi orang-orang telah melakukan kesalahan dalam menggambarkan kebajikan luhur keprajuritan ini sebagai kebajikan mutlak, sebagai sifat-sifat baik di dalam dan untuk dirinya sendiri, tanpa mempertimbangan tujuan yang diperjuangkan. Siapa pun yang memiliki pandangan seperti ini harus secara konsisten mengakui bahwa keberanian, kegagahan dan kebencian terhadap kematian yang dimiliki perampok juga merupakan nilai-luhur.

Namun, pada kenyataannya, tidak ada yang baik atau buruk dalam dan dari dirinya sendiri. Tindakan manusia menjadi baik atau buruk hanya dilihat dari tujuan yang diperjuangkan, dan akibat yang harus mereka tanggung. Bahkan Leonidas tidak akan layak menerima penghargaan kita jika dia kalah, bukan sebagai pembela tanah airnya, tetapi sebagai pemimpin dari sebuah pasukan penyerbu yang bertujuan merampas kebebasan dan harta benda orang-orang yang hidup dalam damai.

Betapa berbahayanya perang bagi perkembangan peradaban manusia menjadi jelas saat seseorang memahami manfaat yang berasal dari pembagian kerja. Pembagian kerja mengubah individu mandiri menjadi individu yang tergantung pada sesama manusia, makhluk sosial yang dibicarakan Aristoteles. Permusuhan antara satu hewan dengan hewan lain, atau antara satu manusia buas dan manusia buas lain, sama sekali tidak mengubah dasar ekonomi dari keberadaan mereka.

Persoalannya menjadi sangat berbeda ketika sebuah pertikaian yang harus diputuskan dengan mengangkat senjata, pecah di antara para anggota masyarakat yang mengenal pembagian kerja. Dalam masyarakat seperti itu, setiap individu memiliki fungsi khusus; tidak ada seorang pun yang berada dalam posisi untuk hidup mandiri,

karena setiap orang membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain.

Petani mandiri, yang memproduksi dari tanah pertanian mereka sendiri segala sesuatu yang mereka dan keluarga mereka butuhkan, dapat berperang melawan petani lain. Tetapi, ketika desa terpecah ke dalam berbagai kelompok, dengan pandai besi di satu sisi dan pembuat sepatu di sisi lain, satu golongan akan menderita karena ketiadaan sepatu, dan kelompok lain karena ketiadaan peralatan dan senjata. Perang saudara menghancurkan pembagian kerja karena memaksa setiap kelompok untuk merasa puas dengan (hasil) kerja para pengikutnya sendiri.

Jika kemungkinan permusuhan semacam itu dipertimbangkan sejak awal, pembagian kerja tidak akan pernah dibiarkan berkembang ke titik di mana, dalam kasus pertikaian benar-benar pecah, orang akan harus menderita kekurangan. Intensifikasi progresif pembagian kerja hanya mungkin dalam sebuah masyarakat di mana ada jaminan akan perdamaian abadi. Hanya di bawah naungan keamanan tersebut pembagian kerja dapat berkembang. Tanpa prasyarat ini, pembagian kerja tidak meluas melampaui batas-batas desa atau bahkan rumah tangga.

Pembagian kerja antara kota dan desa—petani dari desa-desa sekitar memasok gandum, ternak, susu, dan mentega ke kota, sebagai ganti produk pabrikan yang diproduksi oleh warga kota—mengisyaratkan bahwa perdamaian terjamin setidaknya dalam wilayah tersebut. Jika pembagian kerja bertujuan merangkul seluruh warga bangsa, perang saudara harus berada di luar wilayah kemungkinan; jika pembagian kerja mencakup seluruh dunia, perdamaian abadi antara negara-negara harus terjamin.

Setiap orang dewasa ini akan menganggap benar-benar tidak masuk akal bila sebuah kota besar modern seperti London atau Berlin mempersiapkan diri memerangi penduduk pedesaan yang berbatasan dengan mereka. Namun, selama berabad-abad, kota-kota Eropa terus memelihara kemungkinan ini dan membuat persediaan ekonomi untuk itu. Ada kota-kota benteng yang telah



sejak awal dibangun sedemikian rupa sehingga bila sewaktu-waktu dibutuhkan mereka bisa bertahan untuk sementara waktu dengan berternak dan bercocok tanam padi dalam dinding-dinding kota.

Pada awal abad kesembilan belas, bagian terbesar dunia yang berpenghuni masih terbagi dalam beberapa wilayah ekonomi yang umumnya mandiri. Bahkan di wilayah-wilayah Eropa yang lebih maju sebagian besar kebutuhan daerah dipenuhi oleh produksi daerah itu sendiri. Perdagangan yang melampaui batas-batas sempit daerah wilayah sekitar relatif tidak signifikan dan umumnya hanya terdiri dari komoditas yang tidak bisa diproduksi di daerah itu sendiri karena kondisi iklim.

Namun, di bagian terbesar dunia produksi desa itu sendiri memenuhi hampir semua kebutuhan penghuninya. Bagi para penduduk desa ini, gangguan dalam hubungan perdagangan yang disebabkan oleh perang umumnya tidak menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi mereka. Tetapi, bahkan penduduk negara-negara Eropa yang lebih maju tidak menderita terlalu parah pada saat perang.

Jika Sistem Kontinental, yang diterapkan oleh Napoleon I di Eropa untuk melarang barang-barang Inggris dan barang-barang yang datang dari seberang lautan melalui Inggris, diberlakukan lebih ketat lagi, penduduk benua Eropa tidak akan terlalu menderita dibuatnya. Tentu saja mereka harus hidup tanpa kopi dan gula, kapas dan bahan katun, rempah-rempah, dan berbagai jenis kayu langka, namun semua hal itu hanya memainkan peran tambahan di rumah-rumah kebanyakan orang.

Pengembangan jaringan hubungan ekonomi internasional yang kompleks adalah produk liberalisme dan kapitalisme abad kesembilan belas. Jaringan itulah yang memungkinkan spesialisasi di segala bidang produksi modern seiring kemajuan di bidang teknologi.

Dalam rangka menyediakan segala sesuatu yang dikonsumsi dan diinginkan oleh keluarga seorang pekerja Inggris, setiap bangsa dari lima benua bekerja sama. Teh untuk sarapan disediakan oleh

Jepang atau Srilanka, kopi oleh Brasil atau Jawa, gula oleh Hindia Barat, daging oleh Australia atau Argentina, kapas dari Amerika atau Mesir, jangat untuk kulit dari India atau Rusia, dan sebagainya.

Dan dalam pertukaran barang-barang ini, barang-barang Inggris menyebar ke seluruh penjuru dunia, ke desa-desa dan tanah-tanah pertanian yang paling jauh dan paling terpencil. Perkembangan ini mungkin dan dimungkinkan hanya karena, melalui keunggulan prinsip-prinsip liberal, orang tidak lagi menganggap serius gagasan bahwa perang besar bisa pecah lagi. Pada zaman keemasan liberalisme, perang antara anggota ras putih umumnya dianggap telah berlalu.

Namun yang terjadi kemudian ternyata sangat berbeda. Ide-ide dan program-program liberal digantikan oleh sosialisme, nasionalisme, proteksionisme, imperialisme, etatisme, dan militerisme. Meskipun Kant dan Von Humboldt, Bentham dan Cobden, memuji-muji perdamaian abadi, juru bicara dari generasi yang kemudian tidak pernah lelah mengagung-agungkan perang, baik perang saudara maupun perang antarnegara. Dan keberhasilan perang mereka datang terlalu cepat. Hasilnya adalah Perang Dunia, yang telah memberikan semacam obyek pelajaran kepada generasi kita mengenai ketidakcocokan antara perang dan pembagian kerja.

#### **4. Persamaan**

Tidak ada yang dapat menunjukkan perbedaan antara pemikiran liberalisme yang lebih tua dan neoliberalisme sejelas dan semudah sikap mereka terhadap masalah kesetaraan. Kaum liberal abad kedelapan belas, dituntun oleh gagasan mengenai hukum alam dan Pencerahan, menuntut kesetaraan hak politik dan hak sipil bagi semua orang karena mereka menganggap semua orang sama.

Tuhan menciptakan manusia setara, menganugerahkan kepada mereka kemampuan dan bakat yang pada dasarnya sama, dan meniupkan nafas rohnya ke dalam jiwa mereka. Semua perbedaan di antara manusia hanyalah buatan, produk sosial manusia yang bisa dikatakan bersifat fana.

Apa yang kekal dalam manusia—rohnya—tidak diragukan lagi sama, baik dalam diri orang kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat biasa, kulit putih dan kulit berwarna. Namun, tidak ada yang pernyataan yang lebih tidak berdasar dari penegasan tentang kesetaraan manusia. Manusia sama sekali tidak setara. Bahkan di antara saudara pun terdapat perbedaan mencolok dari segi fisik dan mental.

Alam tidak pernah mengulang ciptaannya; alam tidak membuat produksi massal atau menerapkan standar untuk produk yang dihasilkannya. Setiap orang yang meninggalkan ruang kerjanya membawa jejak individual, unik, tidak akan pernah terulang. Manusia tidak sama, dan tuntutan bagi kesetaraan di bawah hukum tidak bisa didasarkan atas pendapat bahwa karena semua orang sama, mereka harus mendapat perlakuan sama.

Ada dua alasan berbeda mengapa semua orang harus menerima perlakuan sama di bawah hukum. Salah satunya telah disebutkan ketika kita membahas tentangan terhadap perbudakan. Agar kerja manusia menghasilkan produktivitas tertinggi yang dapat dicapainya, pekerja harus bebas, karena hanya pekerja bebas, yang menikmati dalam bentuk upah hasil keringatnya, yang akan mengerahkan semua kemampuannya. Pertimbangan kedua dalam mendukung kesetaraan di bawah hukum terpeliharanya ketenangan sosial.

Telah dijelaskan bahwa semua gangguan terhadap perkembangan pembagian kerja yang berlangsung damai harus dihindari. Tetapi hampir mustahil memelihara perdamaian abadi di masyarakat di mana hak dan kewajiban masing-masing golongan berbeda. Siapa pun yang menyangkal hak sebagian penduduk harus selalu siap untuk menghadapi serangan serentak oleh kelompok yang dirugikan terhadap kelompok yang menikmati hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa golongan harus lenyap agar konflik mengenai hal itu reda.

Oleh karena itu, sama sekali tidak berdasar untuk mencari-cari kelemahan mengenai cara yang dipakai liberalisme dalam menerapkan aksioma (pandangannya) tentang persamaan dengan

alasan apa yang diciptakan hanyalah persamaan di hadapan hukum, dan bukan kesetaraan sejati. Semua kekuatan manusia tidak akan cukup untuk membuat manusia benar-benar setara. Manusia tidak sama dan tidak akan pernah sama. Adalah berbagai pertimbangan serius mengenai manfaat seperti yang telah kami sajikan di sini yang mendasari argumen yang mendukung kesetaraan di bawah hukum.

Liberalisme tidak menginginkan lebih dari ini, juga tidak meminta lebih. Adalah di luar kekuasaan manusia untuk mengubah seorang Negro menjadi seorang kulit putih. Akan tetapi orang Negro bisa mendapatkan hak yang sama seperti orang kulit putih, dan dengan demikian memperoleh kesempatan untuk memperoleh sebanyak yang dia hasilkan.

Tetapi, kaum sosialis berpendapat hal itu tidak cukup untuk membuat manusia sama di hadapan hukum. Agar mereka benar-benar sama, mereka harus mendapat penghasilan yang sama. Tidak cukup hanya dengan menghapuskan hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran (keturunan) dan pangkat. Seseorang harus menyelesaikan pekerjaan dan menyingkirkan hak istimewa terbesar dan terpenting dari semuanya, yaitu apa yang diberikan oleh hak milik pribadi. Hanya dengan demikian program liberal akan benar-benar tercapai, dan liberalisme yang konsisten pada akhirnya akan mengarah pada sosialisme, pada penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Hak istimewa adalah pengaturan kelembagaan yang menguntungkan beberapa individu atau kelompok tertentu dengan mengorbankan yang lain. Hak istimewa ada, meskipun hal itu merugikan sebagian orang—kemungkinan kelompok mayoritas—dan tidak menguntungkan seorang pun kecuali mereka untuk siapa keuntungan itu diciptakan. Dalam tatanan feodal Abad Pertengahan, penguasa tertentu memiliki hak turun temurun untuk memegang jabatan hakim. Mereka menjadi hakim karena mereka mewarisi posisi itu, terlepas dari apakah mereka memiliki kemampuan dan kualitas karakter yang cocok untuk menjadi seorang hakim. Di mata mereka, jabatan itu tak lebih dari sumber pendapatan yang

menguntungkan. Dalam hal ini jabatan hakim adalah hak istimewa kelas bangsawan.

Namun, seandainya, seperti di negara-negara modern, para hakim berasal dari lingkungan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hukum, ini bukan merupakan hak istimewa yang menguntungkan para pengacara. Pilihan jatuh kepada para ahli hukum bukan untuk kepentingan mereka tetapi demi kebaikan masyarakat, karena orang umumnya berpendapat bahwa pengetahuan tentang yurisprudensi merupakan syarat mutlak untuk jabatan hakim.

Masalah apakah pengaturan kelembagaan tertentu dianggap atau tidak dianggap sebagai hak istimewa yang diberikan kepada kelompok, golongan, atau orang tertentu, tidak diputuskan berdasarkan kenyataan apakah hal itu menguntungkan atau tidak bagi kelompok, golongan, atau orang tersebut, tetapi berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat umum.

Fakta bahwa di sebuah kapal di laut hanya ada satu kapten dan sisanya awak kapal yang tunduk pada perintahnya, jelas menguntungkan sang kapten. Namun, bukanlah hak istimewa sang kapten jika ia memiliki kemampuan untuk mengemudikan kapal di antara batu-batu karang saat badai, dan dengan demikian berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh awak kapal.

Untuk menentukan apakah pengaturan kelembagaan harus dianggap sebagai hak istimewa individu atau golongan, pertanyaan yang harus diajukan bukanlah apakah hal itu bermanfaat bagi individu atau golongan tertentu tetapi apakah hal itu bermanfaat bagi masyarakat umum. Jika kita sampai pada kesimpulan bahwa hanya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang memungkinkan pengembangan kesejahteraan masyarakat, jelas ini sama dengan mengatakan bahwa hak milik pribadi bukanlah hak istimewa pemilik kekayaan, tetapi hak istimewa sebuah lembaga sosial untuk kebaikan dan keuntungan semua, meskipun kemungkinan pada saat yang sama hal itu sesuai dengan keinginan dan menguntungkan beberapa orang.

Liberalisme mendukung pelestarian kepemilikan pribadi bukan untuk kepentingan para pemilik kekayaan. Juga bukan karena penghapusan kepemilikan pribadi melanggar hak-hak kepemilikan yang ingin dilestarikan kaum liberal. Jika mereka menganggap penghapusan kepemilikan pribadi merupakan kepentingan semua orang, mereka akan mendukungnya, betapa pun merugikannya kebijakan seperti itu bagi kepentingan para pemilik kekayaan.

Namun, pelestarian kepemilikan pribadi merupakan kepentingan semua lapisan masyarakat. Bahkan orang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, hidup jauh lebih baik dalam masyarakat kita dibandingkan dengan seandainya ia hidup dalam masyarakat yang akan terbukti tidak mampu menghasilkan sepersekian dari jumlah yang kita hasilkan.

## **5. Kesenjangan Kekayaan dan Pendapatan**

Hal yang paling banyak dikecam dalam tatanan sosial kita adalah kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Ada yang kaya dan ada yang miskin; ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Jalan keluarnya tidak sulit: pemerataan distribusi seluruh kekayaan. Keberatan pertama terhadap usulan ini adalah bahwa hal itu tidak akan banyak memperbaiki keadaan karena orang dengan kekayaan rata-rata jauh lebih banyak daripada orang kaya sehingga dengan pembagian kekayaan semacam itu setiap individu hanya dapat mengharapkan kenaikan tak berarti dalam standar hidupnya. Pendapat ini tentu saja benar, namun penjelasannya tidak lengkap.

Mereka yang menganjurkan kesetaraan dalam distribusi pendapatan mengabaikan hal terpenting, yaitu bahwa jumlah yang tersedia untuk dibagikan, produk tahunan kerja sosial, tidak terlepas dari cara pembagiannya. Fakta bahwa produk tersebut saat ini sama baiknya dengan sebelumnya bukanlah fenomena alam atau teknologi yang terlepas dari semua kondisi sosial tetapi sepenuhnya dihasilkan lembaga-lembaga sosial kita.

Hanya karena kesenjangan kekayaan mungkin terjadi dalam tatanan sosial kita, hanya karena kesenjangan itu merangsang setiap

orang untuk memproduksi sebanyak yang ia bisa dan dengan biaya terendah, manusia saat ini memiliki kekayaan total tahunan yang siap dikonsumsi. Andaikata insentif itu dihapus, produktivitas akan berkurang banyak sampai pada titik di mana bagian yang dapat diberikan kepada setiap individu berdasarkan azas pemerataan akan jauh berkurang dari yang saat ini diterima oleh orang yang paling miskin sekali pun.

Namun, kesenjangan distribusi pendapatan tetap merupakan fungsi kedua terpenting, seperti halnya fungsi yang telah disebutkan tadi: kesenjangan itu memungkinkan orang kaya menikmati kemewahan. Banyak hal-hal bodoh tentang kemewahan telah diucapkan dan ditulis.

Mereka yang keberatan terhadap konsumsi kemewahan mengatakan tidak adil apabila beberapa orang menikmati keadaan berlimpah ruah sementara orang lain kekurangan. Penjelasan ini tampaknya memiliki kebenaran, meskipun sebenarnya tidak demikian. Sebab, jika terbukti bahwa konsumsi kemewahan menjalankan fungsi yang bermanfaat dalam sistem kerjasama sosial, maka penjelasan itu tidak lagi dapat diterima. Inilah yang ingin kita buktikan.

Pembelaan kita terhadap konsumsi kemewahan tentu saja bukan penjelasan yang terkadang didengar orang, yaitu bahwa konsumsi kemewahan menyebarkan uang di tengah masyarakat. Jika orang kaya tidak memanjakan diri dalam kemewahan, kaum miskin tidak akan mendapat penghasilan. Ini benar-benar omong kosong. Seandainya tidak ada konsumsi kemewahan, modal dan tenaga kerja yang dikerahkan untuk memproduksi barang-barang mewah akan menghasilkan barang-barang lain: barang-barang untuk konsumsi massal, barang-barang kebutuhan dan bukan barang yang “tidak berguna”.

Untuk memperoleh gambaran tepat mengenai makna sosial konsumsi kemewahan, pertama-tama seseorang harus menyadari bahwa konsep mengenai kemewahan adalah konsep yang sangat relatif.

Kemewahan merupakan cara hidup yang sangat kontras dengan apa yang dijalani oleh sebagian besar orang. Oleh karena itu, gambaran tentang kemewahan pada dasarnya berhubungan dengan sejarah. Banyak hal yang bagi kita saat ini tampak sebagai kebutuhan sebelumnya dianggap sebagai kemewahan.

Ketika pada Abad Pertengahan seorang wanita bangsawan Bizantium yang menikah dengan hakim kepala Venesia memanfaatkan peralatan dari emas, yang bisa disebut sebagai cikal bakal garpu, bukan jari-jarinya, untuk makan, orang-orang Venesia memandang hal itu sebagai kemewahan kaum kafir, dan mereka menganggap wanita itu mendapat hukuman setimpal saat ia terserang penyakit yang mengerikan; dalam benak mereka, penyakit itu merupakan hukuman setimpal dari Tuhan atas pemborosan di luar kewajaran seperti itu.

Dua atau tiga generasi lalu, bahkan di Inggris, kamar mandi di dalam rumah dianggap sebagai kemewahan; sekarang, rumah setiap pekerja Inggris dari golongan menengah memiliki kamar mandi di dalam. Tiga puluh lima tahun yang lalu tidak ada mobil; dua puluh tahun yang lalu, kepemilikan kendaraan semacam itu merupakan ciri khusus gaya hidup mewah; saat ini di Amerika Serikat bahkan para pegawai memiliki Ford. Inilah perjalanan sejarah ekonomi.

Kemewahan saat ini merupakan kebutuhan masa depan. Setiap kemajuan awalnya merupakan kemewahan bagi segelintir orang kaya, namun setelah beberapa waktu akan menjadi kebutuhan yang harus tersedia untuk semua orang. Konsumsi kemewahan merupakan stimulus bagi industri untuk menemukan dan memperkenalkan hal-hal baru. Konsumsi kemewahan itu adalah salah satu faktor dinamis dalam perekonomian kita. Berkat inovasi progresif standar hidup semua strata dalam masyarakat berhasil ditingkatkan secara perlahan-lahan.

Hampir semua orang tidak suka pada orang kaya pemalas, yang menghabiskan hidupnya dalam kesenangan tanpa pernah melakukan pekerjaan apa pun. Tapi bahkan ia pun menjalankan fungsi dalam kehidupan makhluk sosial. Ia memberi contoh tentang



kemewahan yang membangunkan kesadaran banyak orang tentang kebutuhan-kebutuhan baru, dan memberikan insentif kepada industri untuk memenuhinya. Ada suatu masa ketika kunjungan ke luar negeri merupakan sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya.

Schiller tidak pernah melihat pegunungan Swiss, yang ia puja dalam *Wilhelm Tell*, meskipun pegunungan itu berbatasan dengan tanah airnya, Swabia. Goethe tidak pernah berkunjung ke Paris, Wina atau London. Namun, saat ini, ratusan ribu orang bepergian dan tak lama lagi, jutaan orang lain akan melakukan hal yang sama.

## 6. Hak Milik Pribadi dan Etika

Dalam upaya menunjukkan fungsi sosial dan perlunya kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang mengiringinya, kita, pada saat bersamaan, memberikan bukti tentang kebenaran moral dari milik pribadi dan tatanan sosial kapitalis yang berdasar atasnya.

Moralitas adalah kepatuhan terhadap berbagai persyaratan bagi sebuah eksistensi sosial yang dituntut dari setiap individu sebagai anggota masyarakat. Seorang manusia yang hidup dalam keterasingan tidak memiliki aturan moral yang harus ditaati. Ia tidak perlu ragu-ragu melakukan apa pun yang menurutnya menguntungkan baginya, karena ia tidak perlu mempertimbangkan apakah ia akan merugikan orang lain dengan perbuatannya. Tapi sebagai anggota masyarakat, seseorang, dalam melakukan apa pun, harus mempertimbangkan bukan saja keuntungan langsung untuk dirinya sendiri, namun juga tuntutan untuk mengukuhkan keberadaan masyarakat.

Kehidupan seseorang dalam masyarakat hanya mungkin bila ada kerja sama sosial, dan setiap orang akan sangat dirugikan jika organisasi sosial yang mengatur kehidupan dan produksi rusak. Dalam mewajibkan seseorang untuk mempertimbangkan masyarakat dalam setiap tindakannya, bahwa ia harus membatalkan sebuah tindakan yang, walaupun menguntungkan baginya, dapat

mengganggu kehidupan sosial; masyarakat tidak menuntutnya untuk mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Pengorbanan yang diwajibkan hanya pengorbanan yang bersifat sementara: penolakan atas sebuah keuntungan langsung dan relatif kecil, demi manfaat akhir yang jauh lebih besar.

Kelangsungan masyarakat sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan sama dalam hidup, merupakan kepentingan setiap orang. Barangsiapa melepaskan keuntungan sesaat untuk menghindari membahayakan kelangsungan hidup masyarakat sesungguhnya mengorbankan keuntungan lebih kecil demi keuntungan lebih besar.

Makna dari perhatian terhadap kepentingan umum sering disalahpahami. Nilai moral penghormatan dianggap terletak pada fakta tentang pengorbanan itu sendiri, pada penolakan terhadap sebuah kepuasan langsung. Orang menolak untuk melihat bahwa apa yang berharga secara moral bukanlah pengorbanan itu, tapi tujuan yang dicapai oleh pengorbanan itu, dan orang berkeras bahwa pengorbanan, penolakan itu sendiri mengandung nilai moral. Namun pengorbanan mengandung nilai moral hanya ketika pengorbanan itu dilakukan untuk sebuah tujuan moral. Ada perbedaan yang besar sekali antara seseorang yang mempertaruhkan hidup dan harta bendanya untuk tujuan yang baik, dengan orang yang mengorbankan keduanya tanpa menguntungkan masyarakat dalam hal apa pun.

Segala sesuatu yang berfungsi melestarikan tatanan sosial memiliki nilai moral; segala sesuatu yang merugikan tatanan sosial adalah amoral. Dengan demikian, ketika kita berkesimpulan bahwa sebuah institusi bermanfaat bagi masyarakat, orang tidak dapat mengajukan keberatan bahwa hal itu amoral. Mungkin ada perbedaan pendapat tentang apakah lembaga tertentu secara sosial bermanfaat atau berbahaya. Tetapi sekali sebuah institusi dinilai menguntungkan, orang tidak bisa berpendapat bahwa, karena beberapa alasan yang tak bisa dipahami, institusi itu harus dikecam sebagai institusi yang tidak bermoral.

## 7. Negara dan Pemerintah

Ketaatan terhadap hukum moral merupakan kepentingan nomor satu setiap individu, karena semua orang mendapat keuntungan dari pelestarian kerjasama sosial; namun ketaatan itu menuntut pengorbanan setiap orang, meskipun hanya pengorbanan yang bersifat sementara, yang diimbangi oleh keuntungan yang lebih besar.

Bagaimanapun, untuk memahami hal ini, dibutuhkan pengetahuan khusus yang mendalam mengenai hubungan antara berbagai hal. Dituntut kemauan kuat untuk menyelaraskan tindakan seseorang dengan sudut pandang ini.

Mereka yang tidak memiliki persepsi, atau, memiliki persepsi namun tidak memiliki kemauan kuat yang dibutuhkan untuk menerapkan persepsi itu, tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan hukum moral secara sukarela. Situasi ini tidak berbeda dari situasi yang mewajibkan ketaatan individu terhadap aturan-aturan tentang kebersihan yang harus ditaati demi kepentingan kesehatannya sendiri.

Seseorang dapat membiarkan dirinya takluk pada perbuatan sia-sia yang tidak sehat, seperti kegemaran akan narkotika, entah karena ia tidak tahu akibatnya, atau karena ia menganggap narkotika tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan penolakan terhadap kesenangan sesaat itu, atau karena ia tidak memiliki kemauan kuat yang diperlukan untuk menyelaraskan perilakunya dengan pengetahuannya.

Ada orang yang menganggap bahwa masyarakat boleh mengambil tindakan-tindakan pemaksaan untuk mengembalikan orang-orang seperti itu ke jalan yang benar, dan memperbaiki siapa saja yang karena kelalaiannya membahayakan hidup dan kesehatannya sendiri. Mereka menganjurkan agar pecandu alkohol dan narkoba dipaksa meninggalkan kebiasaan buruk mereka, dan diwajibkan untuk melindungi kesehatan mereka.

Pertanyaan apakah paksaan benar-benar menjawab tujuan dalam

kasus seperti itu, akan kita tunda untuk dibahas kemudian. Apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah sesuatu yang sangat berbeda, yaitu, pertanyaan apakah orang yang tindakannya membahayakan eksistensi masyarakat harus dipaksa menahan diri untuk tidak melakukannya.

Para pecandu alkohol dan narkotika hanya merugikan diri mereka sendiri melalui perbuatannya; orang yang melanggar aturan-aturan moral yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi semua orang. Hidup dalam masyarakat akan sangat mustahil, jika orang-orang yang menginginkan kelangsungannya, dan orang-orang yang perilakunya sesuai dengan tuntutan itu harus mengurungkan penggunaan kekerasan dan pemaksaan terhadap mereka yang siap merusak masyarakat dengan perilaku mereka.

Sejumlah kecil individu antisosial, yaitu orang-orang yang tidak mau atau tidak mampu membuat pengorbanan sementara yang dituntut masyarakat dari mereka, bisa membuat seluruh hubungan sosial menjadi mustahil. Tanpa tekanan dan pemaksaan terhadap musuh-musuh masyarakat, tidak akan ada kehidupan dalam masyarakat.

Kita menyebut perangkat sosial untuk melakukan tekanan dan pemaksaan yang menyebabkan orang-orang mematuhi aturan hidup dalam masyarakat sebagai negara; aturan-aturan yang melandasi jalannya negara sebagai hukum; dan organ-organ yang dibebani tanggung jawab untuk mengatur aparat penegakan hukum sebagai pemerintah.

Tentu saja ada mazhab yang percaya bahwa seseorang dapat dengan aman melepaskan diri dari setiap bentuk paksaan, dan mendasarkan masyarakat sepenuhnya atas ketaatan sukarela kepada aturan-aturan moral. Kaum anarkis menganggap negara, hukum, dan pemerintah sebagai lembaga yang tidak berguna dalam tatanan sosial yang benar-benar melayani kepentingan semua orang, bukan hanya kepentingan khusus beberapa orang yang memiliki hak istimewa. Hanya karena tatanan sosial pada saat ini didasarkan pada

kepemilikan pribadi atas alat produksi, diperlukan tekanan dan pemaksaan untuk melindunginya. Jika hak milik pribadi dihapus, maka semua orang, tanpa kecuali, secara spontan akan mematuhi aturan-aturan yang dituntut oleh kerjasama sosial.

Telah dijelaskan bahwa doktrin ini keliru, sejauh menyangkut karakter kepemilikan pribadi atas alat produksi. Bahkan, di luar itu sekalipun, doktrin itu sama sekali tidak dapat dipertahankan.

Kelompok anarkis, dengan cukup tepat, tidak menyangkal bahwa setiap bentuk kerjasama manusia dalam masyarakat yang didasarkan atas pembagian kerja, menuntut ketaatan terhadap beberapa aturan perilaku, yang tidak selalu menyenangkan bagi setiap individu, karena aturan itu memaksanya melakukan pengorbanan; hanya sementara, memang, namun semua pengorbanan itu, setidaknya pada saat itu, menyakitkan. Tapi kaum anarkis melakukan kesalahan karena menganggap bahwa setiap orang, tanpa kecuali, akan bersedia mematuhi aturan-aturan ini secara sukarela.

Ada penderita dispepsia (maag) yang, meskipun mereka tahu betul bahwa memanjakan diri dengan makanan tertentu dalam waktu singkat akan menyebabkan mereka sakit parah, bahkan nyaris tidak tertahankan, tetap saja tidak bisa hidup tanpa kenikmatan hidangan lezat.

Menelusuri hubungan timbal balik dalam kehidupan di masyarakat tidak semudah melacak dampak fisiologis dari makanan, atau konsekuensi yang langsung mengikutinya, dan, di atas semuanya, sangat nyata, bagi pelakunya.

Oleh karena itu, dapatkah diasumsikan, tanpa terjebak ke dalam kekonyolan, bahwa, terlepas dari semua hal ini, setiap individu dalam sebuah masyarakat anarkis memiliki kemampuan melihat ke depan yang lebih besar dan kemauan yang lebih kuat dari seorang penderita dispepsia yang rakus? Dalam sebuah masyarakat anarkis, dapatkah sepenuhnya diabaikan kemungkinan bahwa seseorang, karena kecerobohnya, membuang korek api yang menyala dan memicu kebakaran, atau, dalam luapan kemarahan, kecemburuan, atau balas dendam, melukai sesamanya? Anarkisme tidak memahami

sifat asli manusia. Pandangan mereka hanya dapat diterapkan hanya dalam dunia yang sepenuhnya terdiri dari malaikat dan orang suci.

Liberalisme bukan anarkisme, juga tak ada hubungannya sama sekali dengan anarkisme. Kaum liberal memahami dengan sangat jelas, bahwa tanpa paksaan, keberadaan masyarakat akan terancam, dan bahwa di balik aturan-aturan mengenai perilaku yang menuntut ketaatan anggota masyarakat untuk menjamin kerjasama manusia yang damai, harus ada ancaman paksaan kalau seluruh tatanan masyarakat tidak ingin terus bergantung pada belas kasihan salah satu anggotanya.

Seseorang harus berada dalam posisi yang bisa memaksa orang yang tidak menghormati kehidupan, kesehatan, kebebasan pribadi, atau milik pribadi orang lain, untuk tunduk, tanpa protes, pada aturan kehidupan dalam masyarakat. Ini adalah fungsi yang dilimpahkan doktrin liberal kepada negara: perlindungan terhadap hak milik, kebebasan, dan perdamaian.

Sosialis Jerman, Ferdinand Lassalle, mencoba untuk membuat pembentukan pemerintahan khusus untuk tujuan ini terlihat konyol, dengan menyebut negara yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip liberal sebagai “negara penjaga malam.”

Tetapi sulit untuk memahami mengapa negara penjaga malam lebih konyol atau lebih buruk daripada negara yang hanya menyibukkan diri dengan pembuatan acar kubis, dengan pembuatan kancing celana, atau dengan penerbitan surat kabar.

Untuk memahami kesan yang dicoba dibuat oleh Lassalle dengan gurauan ini, orang harus mengingat bahwa Jerman pada zamannya belum melupakan kondisi di bawah kerajaan yang memerintah dengan sewenang-wenang, dengan keanekaragaman fungsi administratif dan peraturan, dan bahwa mereka masih sangat dipengaruhi filsafat Hegel, yang telah menaikkan posisi negara hingga sejajar dengan posisi sebuah institusi suci.

Jika seseorang, seperti Hegel, memandang negara sebagai “substansi moral yang sadar-diri,” sebagai “Semesta dalam dan untuk dirinya sendiri, rasionalitas dari kehendak”, maka tentu

saja orang akan memandang setiap upaya untuk membatasi fungsi negara menjadi fungsi penjaga malam sebagai bentuk hujatan.

Hanya dengan demikian seseorang dapat memahami mengapa orang mungkin bertindak jauh dan menyalahkan liberalisme karena sikap “bermusuhan” atau kebenciannya terhadap negara. Jika saya berpendapat bahwa tak ada gunanya menugaskan pemerintah mengoperasikan kereta api, hotel, atau tambang, saya bukan “musuh negara” sama seperti halnya saya tidak bisa dicap sebagai musuh asam sulfat karena saya berpendapat bahwa meskipun mungkin asam sulfat berguna untuk berbagai tujuan, namun asam sulfat tidak cocok untuk diminum ataupun mencuci tangan.

Tidaklah benar menggambarkan sikap liberalisme terhadap negara dengan mengatakan bahwa liberalisme ingin membatasi lingkup kegiatan negara atau bahwa liberalisme, pada prinsipnya, membenci semua kegiatan negara dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Penafsiran seperti ini benar-benar tidak mungkin.

Pandangan liberalisme sehubungan dengan masalah fungsi negara adalah konsekuensi langsung dari pembelaan liberalisme terhadap kepemilikan pribadi atas alat produksi. Jika seseorang mendukung yang terakhir, ia tentu saja tidak dapat mendukung kepemilikan umum atas alat-alat produksi, dengan kata lain, menempatkan kepemilikan umum di bawah pengaturan pemerintah dan bukan dalam pengaturan pribadi. Dengan demikian, pembelaan terhadap kepemilikan pribadi atas alat produksi menyiratkan batasan yang sangat tegas tentang fungsi yang diberikan kepada negara.

Kaum sosialis sering mencela liberalisme yang dianggap kurang konsisten. Mereka berkeras bahwa tidak logis membatasi aktivitas negara dalam bidang ekonomi hanya untuk melindungi kekayaan. Sulit untuk memahami mengapa, jika negara tidak benar-benar netral, intervensinya harus dibatasi pada perlindungan hak-hak pemilik kekayaan.

Kecaman ini dapat dibenarkan hanya jika oposisi liberalisme terhadap semua kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang melampaui perlindungan kekayaan bersumber dari penolakan

secara prinsip terhadap semua aktivitas negara. Tapi bukan itu masalahnya di sini.

Alasan mengapa liberalisme menentang perluasan lingkup kegiatan pemerintah justru karena perluasan ini pada dasarnya akan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Dan dalam milik pribadi, kaum liberal melihat prinsip yang paling sesuai bagi organisasi kehidupan manusia dalam masyarakat.

## 8. Demokrasi

Liberalisme oleh karena itu sama sekali tidak memperdebatkankan perlunya mesin-mesin negara, sistem hukum, dan pemerintah. Salah besar jika liberalism dikaitkan, dalam cara apa pun, dengan pemikiran tentang anarkisme. Bagi kaum liberal, negara merupakan sebuah keharusan mutlak, karena tugas paling penting diemban oleh negara: perlindungan tidak hanya terhadap hak milik pribadi, tetapi juga terhadap perdamaian, karena tanpa perdamaian, keuntungan penuh hak milik pribadi tidak dapat dituai.

Pertimbangan ini saja cukup untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi sebuah negara agar sesuai dengan cita-cita liberal. Negara tidak hanya harus mampu melindungi hak milik pribadi, tetapi juga dibangun sedemikian rupa, sehingga bisa berjalan mulus dan damai dan perkembangannya tidak akan pernah terganggu oleh perang saudara, revolusi, atau pemberontakan. Banyak orang masih dihantui oleh gagasan, yang berasal dari zaman praliberal, bahwa kenengratan dan martabat tertentu melekat pada pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Hingga baru-baru ini, bahkan sampai saat ini pun, pejabat publik di Jerman menikmati gengsi yang dikaitkan dengan karir yang dianggap paling terhormat, yaitu pegawai negeri. Posisi sosial yang dinikmati seorang “juru taksir”<sup>1</sup> atau letnan muda jauh melampaui posisi sosial seorang pengusaha atau seorang pengacara yang hingga sampai usia tua menekuni pekerjaan yang halal. Di tanah air mereka

---

1 Seseorang yang telah melewati ujian negara kedua.—Editor.



sendiri penulis, cendekiawan, dan seniman yang ketenaran dan kejayaannya telah jauh melampaui wilayah Jerman hanya menikmati rasa hormat yang setara dengan kedudukan tingkat menengah mereka di hierarki birokrasi.

Tidak ada alasan rasional bagi penilaian berlebihan terhadap kegiatan yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah. Ini adalah bentuk atavisme, sebuah peninggalan dari masa ketika penduduk desa harus merasa takut kepada pangeran dan para ksatrianya yang setiap saat bisa menjarahnya. Dalam hal ini tidak lebih baik, lebih mulia, atau lebih terhormat menghabiskan satu hari di sebuah kantor pemerintah mengisi berbagai dokumen, dibandingkan, misalnya, dengan bekerja di ruang cetak biru sebuah pabrik mesin. Pekerjaan pemungut pajak bukan pekerjaan yang terhormat lebih terhormat dibandingkan dengan pekerjaan mereka yang secara langsung menciptakan kekayaan—sebagian dari kekayaan itu diambil dalam bentuk pajak untuk membiayai aparat pemerintah.

Gagasan tentang keistimewaan dan martabat khusus yang melekat pada pelaksanaan semua fungsi pemerintahan mendasari teori demokrasi semu tentang negara. Menurut doktrin ini, memalukan bagi siapa pun untuk membiarkan dirinya diperintah oleh orang lain. Cita-cita doktrin ini adalah sebuah konstitusi di mana semua orang mengatur dan memerintah. Ini, tentu saja, belum pernah, tidak pernah, dan tidak akan pernah mungkin, bahkan dalam kondisi yang berlaku di sebuah negara kecil sekali pun.

Awalnya diduga bahwa cita-cita ini telah diwujudkan di negara-kota Yunani kuno dan di wilayah-wilayah kecil di pegunungan Swiss. Ini juga sebuah kesalahan. Di Yunani, hanya sebagian rakyat, yaitu warga bebas, yang memiliki hak dalam pemerintahan; kaum *metic*<sup>2</sup> dan budak tidak punya hak apa pun. Di kalangan suku-suku di Swiss, hanya persoalan tertentu yang sepenuhnya bersifat lokal saja yang telah dan masih diselesaikan dengan prinsip konstitusional

---

2 Pendatang/orang asing yang tidak memiliki izin tinggal & hak kependudukan di Yunani.

demokrasi langsung; semua urusan yang melampaui batas wilayah yang sempit ini dikelola oleh Federasi, yang pemerintahnya sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi langsung.

Sama sekali bukan hal yang memalukan bagi seseorang untuk membiarkan dirinya diperintah oleh orang lain. Pemerintah dan pemerintahan, penegakan peraturan kepolisian dan peraturan-peraturan serupa, juga memerlukan banyak spesialis: pegawai negeri sipil profesional dan politisi profesional. Prinsip pembagian kerja tidak berhenti hanya pada fungsi pemerintah. Seseorang tidak bisa menjadi insinyur dan seorang polisi pada saat bersamaan. Kenyataan bahwa saya bukan seorang polisi, sama sekali tidak akan mengurangi martabat, kesejahteraan, atau kebebasan saya. Melindungi orang lain tidak bisa dikategorikan sebagai tidak demokratis seperti halnya membuat sepatu untuk orang lain tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak demokratis.

Tidak ada sedikit pun alasan untuk menolak para politisi profesional dan para pegawai negeri sipil profesional jika lembaga-lembaga negara demokratis. Tetapi demokrasi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan oleh para pengkhayal romantis yang mengoceh tentang demokrasi langsung. Pemerintahan oleh segelintir orang—dan penguasa selalu merupakan kelompok minoritas terhadap mereka yang diperintah seperti halnya para pembuat sepatu merupakan kelompok minoritas yang berhadapan dengan konsumen sepatu—tergantung pada kesepakatan mereka yang diperintah, dengan kata lain, tergantung kepada penerimaan mereka terhadap pemerintahan yang ada.

Mereka mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang tidak terlalu jahat, atau sebagai sesuatu yang jahat namun tidak dapat dihindari, namun mereka pasti berpendapat bahwa perubahan terhadap keadaan tidak memiliki tujuan. Tapi begitu mayoritas kelompok yang diatur yakin bahwa perlu dan mungkin untuk mengubah bentuk pemerintahan, dan untuk mengganti rezim lama dan personil lama dengan rezim baru dan personil baru, maka rezim lama dan personil lama tinggal menghitung hari.

Kelompok mayoritas akan memiliki kekuatan untuk menjalankan keinginannya dengan kekerasan sekali pun hal itu bertentangan dengan kehendak rezim lama. Dalam jangka panjang, tidak ada pemerintah yang dapat mempertahankan kekuasaannya jika tidak didukung opini publik, yaitu jika mereka yang diperintah tidak yakin bahwa pemerintah itu baik. Pemerintah dapat menggunakan kekerasan untuk membuat kelompok yang memiliki semangat pemberontakan tunduk hanya selama kelompok mayoritas tidak bersatu kokoh dalam sebuah oposisi.

Oleh karena itu, dalam setiap bentuk pemerintahan, ada sarana untuk membuat pemerintah setidaknya pada akhirnya tergantung pada kehendak kelompok yang diatur, yaitu perang saudara, revolusi, pemberontakan. Tapi jalan inilah yang ingin dihindari liberalisme. Kemajuan ekonomi tidak akan langgeng jika kegiatan yang berjalan dengan damai terus diganggu oleh pertikaian internal. Situasi politik seperti yang terjadi di Inggris saat Perang Mawar akan menjerumuskan Inggris modern selama beberapa tahun ke dalam kesengsaraan yang paling dalam dan paling mengerikan.

Tingkat perkembangan ekonomi seperti saat ini tidak akan pernah tercapai jika tidak ada jalan keluar bagi upaya mencegah pecahnya perang saudara terus-menerus. Pertarungan yang menyebabkan sesama saudara saling membunuh seperti dalam Revolusi Perancis pada tahun 1789 menelan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar. Perekonomian kita saat ini tidak bisa lagi menahan ledakan-ledakan seperti itu. Penduduk kota besar modern akan mengalami penderitaan begitu besar yang menakutkan dari pemberontakan revolusioner yang bisa menghambat impor makanan dan batu bara, dan memotong aliran listrik, gas, dan air, sehingga bahkan kekhawatiran terhadap kemungkinan gangguan tersebut pun akan melumpuhkan kehidupan kota.

Di sinilah fungsi sosial yang dijalankan oleh demokrasi menemukan titik penerapannya. Demokrasi adalah bentuk peraturan politik yang memungkinkan penyesuaian diri pemerintah terhadap keinginan kelompok yang diperintah tanpa harus melalui

perjuangan dengan cara kekerasan. Jika pemerintahan di negara demokratis tidak lagi dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas penduduk, tidak perlu ada perang saudara untuk menunjuk mereka yang bersedia bekerja memenuhi keinginan mayoritas ke dalam pemerintahan. Melalui pemilihan dan pengaturan parlemen, perubahan pemerintahan dilakukan dengan mulus dan tanpa gesekan, kekerasan, atau pertumpahan darah.

## 9. Kritik terhadap Doktrin Kekerasan

Para pejuang demokrasi abad kedelapan belas berpendapat bahwa hanya raja dan menteri-menteri mereka yang berakhlak buruk, tidak bijaksana, dan jahat. Sebaliknya, rakyat pada umumnya baik, murni, dan mulia, dan selain itu memiliki karunia-karunia intelektual yang dibutuhkan untuk selalu mengetahui dan melakukan hal yang benar. Ini, tentu saja, omong kosong belaka, sama seperti sanjungan menjilat para anggota istana yang menganggap semua kualitas yang baik dan mulia berasal dari pemimpin mereka. Rakyat adalah keseluruhan warga negara, dan jika ada beberapa individu yang tidak cerdas dan mulia, maka secara keseluruhan mereka semua tidak cerdas dan tidak mulia.

Karena manusia memasuki era demokrasi dengan harapan setinggi langit, tidak mengherankan jika kekecewaan segera muncul. Dengan cepat diketahui bahwa demokrasi melakukan kesalahan setidaknya sama banyaknya dengan kesalahan yang dibuat oleh sistem monarki dan aristokrasi. Perbandingan yang dibuat antara orang-orang yang oleh demokrasi ditempatkan di pucuk pemerintahan dengan orang-orang yang oleh para kaisar dan raja, dalam menjalankan kekuasaan mutlak mereka, diangkat ke posisi itu, terbukti sama sekali tidak menguntungkan bagi pemegang tampuk kekuasaan yang baru.

Orang-orang Perancis biasa berbicara tentang “membunuh dengan ejekan.” Dan memang, para negarawan yang mewakili demokrasi segera membuatnya tampak aneh. Orang-orang dari rezim lama menampilkan martabat aristokrat khusus, setidaknya

dalam sikap lahiriah mereka. Orang-orang dari rezim baru yang menggantikan mereka membuat diri mereka hina dengan perilaku mereka. Tidak ada yang lebih membahayakan demokrasi di Jerman dan Austria daripada arogansi kosong dan kesombongan yang tidak pada tempatnya, yang ditunjukkan para pemimpin Sosial-Demokrat yang naik ke kekuasaan setelah kekaisaran runtuh. Jadi, di mana pun demokrasi meraih kemenangan, sebuah doktrin antidemokrasi segera muncul untuk melawannya.

Dikatakan, tidak ada gunanya membiarkan kelompok mayoritas memerintah. Yang terbaiklah yang seharusnya memerintah, bahkan jika mereka merupakan kelompok minoritas. Hal ini begitu jelas sehingga jumlah pendukung gerakan antidemokrasi dari semua jenis terus meningkat. Semakin rendah orang-orang yang karena demokrasi menduduki posisi puncak menunjukkan diri mereka, semakin besar jumlah musuh demokrasi.

Namun, ada kesalahan serius dalam doktrin antidemokrasi. Bagaimanapun juga, apalah artinya berbicara tentang “orang terbaik” atau “orang-orang terbaik”? Republik Polandia menempatkan pemain piano di kepala pemerintahan karena mereka menganggapnya orang Polandia terbaik pada zaman itu. Tapi kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin negara sangat berbeda dari kualitas yang dimiliki seorang musisi. Yang dimaksud oleh para penentang demokrasi saat mereka memakai ungkapan “yang terbaik” tidak lain dari orang atau orang-orang yang paling sesuai untuk menjalankan urusan pemerintahan, bahkan jika mereka hanya tahu sedikit atau sama sekali tidak tahu tentang musik. Namun ini menimbulkan masalah politik yang sama: Siapa yang paling layak? Disraeli atau Gladstone? Kelompok Tory (Konservatif) menganggap Disraeli yang terbaik; kelompok Whig (monarki konstitusional), menganggap Gladstone yang terbaik. Siapa yang harus memutuskan ini jika bukan kelompok mayoritas?

Maka sampailah kita pada titik yang menentukan dari semua doktrin antidemokrasi, baik yang didukung oleh kelompok bangsawan lama dan pendukung monarki turun-temurun, atau oleh

kelompok sindikalis<sup>3</sup>, Bolshevik, dan sosialis, yaitu doktrin kekuatan. Para penentang demokrasi memperjuangkan hak kelompok minoritas untuk merebut kendali atas negara dengan kekerasan dan untuk menguasai kelompok mayoritas. Diperkirakan, cara ini mendapat pembenaran moral dari kekuatan untuk benar-benar merebut kendali pemerintahan.

Orang mengakui bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kemampuan (kompetensi) untuk memerintah dan memimpin berdasarkan kemampuan yang mereka tunjukkan dalam memaksakan peraturan mereka pada kelompok mayoritas, berlawanan dengan kehendak mereka. Dalam hal ini ajaran *l'Action Française* sejalan dengan doktrin kelompok sindikalis, dan doktrin Ludendorff dan Hitler sejalan dengan doktrin Lenin dan Trotzky.

Banyak pendapat yang bisa diminta untuk mendukung dan menentang doktrin-doktrin ini, tergantung keyakinan religius dan filosofis seseorang, namun mengharapkan kesepakatan merupakan hal yang mustahil. Ini bukan tempat untuk menyampaikan dan membahas pendapat pro dan kontra, karena pendapat-pendapat itu tidak memiliki kesimpulan. Satu-satunya pertimbangan yang bisa menjadi faktor yang menentukan adalah pertimbangan yang didasari oleh argumen mendasar yang mendukung demokrasi. Jika setiap kelompok yang yakin bahwa mereka mampu memaksakan aturan pada kelompok lain diberi kesempatan mencoba melakukan upaya itu, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi rangkaian perang saudara yang tak putus-putus. Namun kondisi seperti itu tidak sesuai dengan kondisi yang diciptakan oleh pembagian kerja seperti yang kita telah capai saat ini.

Masyarakat modern yang berbasis pada pembagian kerja hanya dapat dipertahankan dalam kondisi perdamaian abadi. Jika kita harus mempersiapkan kemungkinan perang saudara dan

---

3 Sebuah gerakan politik radikal yang membawa pendukung industri dan pemerintah di bawah kendali federasi serikat buruh dengan menggunakan tindakan langsung, seperti pemogokan umum dan sabotase.

perjuangan internal yang berkelanjutan, kita harus mundur ke tahap primitif dalam pembagian kerja sehingga masing-masing provinsi, jika tidak setiap desa, hampir sepenuhnya mandiri (*autarkic*), yaitu mampu memberi makan dan memelihara diri mereka sendiri untuk beberapa waktu, sebagai kesatuan ekonomi mandiri tanpa mengimpor apa pun dari luar. Ini berarti kemerosotan luar biasa dalam produktivitas tenaga kerja sehingga bumi hanya bisa memberi makan sebagian kecil penduduk yang ditunjungnya saat ini.

Cita-cita kelompok antidemokrasi mengarah ke tatanan ekonomi yang dikenal sejak Abad Pertengahan dan zaman purbakala. Setiap kota, setiap desa, bahkan tempat tinggal setiap orang, dibentengi dan dilengkapi dengan fungsi pertahanan, dan setiap provinsi sedapat mungkin tidak tergantung pada dunia luar dalam menyediakan kebutuhan pokoknya.

Seorang demokrat juga berpendapat bahwa orang terbaiklah yang harus memerintah. Namun ia percaya bahwa kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah ditunjukkan dengan lebih baik jika mereka berhasil meyakinkan sesama warga negara mereka tentang kualifikasi yang mereka miliki untuk posisi itu, sehingga mereka secara sukarela dipercaya untuk melaksanakan urusan publik, dibandingkan jika mereka menggunakan kekuatan untuk memaksa orang lain mengakui klaim mereka. Siapa pun yang tidak berhasil mencapai posisi kepemimpinan berdasarkan kekuatan argumennya dan keyakinan yang dikobarkannya tidak memiliki alasan untuk mengeluh bahwa warganya lebih memilih orang lain daripada memilihnya.

Yang pasti, tidak boleh dan tidak perlu dipungkiri bahwa ada satu situasi di mana godaan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip liberalisme yang demokratis menjadi sangat besar. Jika orang-orang bijak melihat bangsa mereka, atau semua bangsa di dunia, sedang menuju kehancuran, dan jika mereka merasa tidak mungkin memaksa sesama warganya untuk mengindahkan nasihat mereka, mereka mungkin cenderung berpikir tidak ada salahnya untuk menggunakan cara apa pun sejauh hal itu mungkin dan bisa

mencapai tujuan mereka untuk menyelamatkan semua orang dari bencana.

Maka gagasan mengenai kediktatoran oleh kaum elite, tentang pemerintahan oleh kelompok minoritas yang ditegakkan oleh kekerasan dan yang memerintah demi kepentingan semua orang, mungkin timbul dan mendapat pendukung. Namun kekerasan tidak pernah menjadi sarana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Tirani kelompok minoritas tidak akan pernah dapat bertahan kecuali jika mereka berhasil meyakinkan kelompok mayoritas tentang kebutuhan akan atau manfaat pemerintahannya. Tapi saat itu kelompok minoritas sudah tidak membutuhkan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Ada banyak bukti mencolok dalam sejarah yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, bahkan kebijakan penindasan yang paling kejam sekali pun tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pemerintahan yang berkuasa. Salah satunya, yang terbaru dan yang paling terkenal: ketika kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia, mereka adalah minoritas kecil, dan program mereka hanya mendapat sedikit dukungan dari penduduk yang jumlahnya begitu besar di negara mereka. Ini karena kaum petani, yang merupakan bagian terbesar rakyat Rusia, tidak mau terlibat dalam kebijakan Bolshevik tentang pertanian kolektif.

Yang mereka inginkan adalah pembagian tanah di antara “pemilik tanah yang miskin”, nama yang dipakai kelompok Bolshevik menyebut kelompok penduduk ini. Dan memang program kaum petani, bukan program para pemimpin Marxist, yang sebenarnya dijalankan. Agar tetap berkuasa, Lenin dan Trotsky tidak hanya menerima reformasi agraria ini, tetapi bahkan membuatnya menjadi bagian dari program mereka sendiri, yang mereka jalankan untuk mempertahankan diri dari semua serangan, dalam dan luar negeri.

Hanya dengan demikianlah maka kelompok Bolshevik dapat merebut kepercayaan rakyat banyak di Rusia. Karena mereka menerapkan kebijakan pembagian tanah, pemerintahan kaum Bolshevik tidak lagi melawan kehendak rakyat banyak, melainkan



mendapat restu dan dukungan mereka. Hanya ada dua pilihan bagi mereka: memilih program mereka atau mengorbankan kontrol atas pemerintahan. Mereka memilih yang pertama dan tetap berkuasa. Kemungkinan ketiga, melaksanakan program mereka dengan kekerasan untuk melawan kehendak rakyat banyak, tidak pernah ada.

Seperti setiap kelompok minoritas yang penuh tekad dan dipimpin dengan baik, kaum Bolshevik mampu merebut kendali dengan kekerasan dan mempertahankannya untuk waktu singkat. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, mereka tidak akan mampu untuk mempertahankannya lebih baik dari kelompok minoritas lain. Berbagai upaya kelompok Putih untuk menggulingkan kaum Bolshevik gagal karena rakyat Rusia menentang mereka. Namun, sekali pun mereka berhasil, pihak pemenang juga harus menghormati keinginan mayoritas penduduk. Mustahil bagi mereka untuk mengubah dengan cara apa pun kenyataan bahwa pembagian tanah telah dilaksanakan dan untuk mengembalikan pada tuan tanah apa yang telah dirampas dari mereka.

Hanya kelompok yang dapat mengandalkan restu dari kelompok yang diperintah yang dapat mempertahankan sebuah rezim abadi. Siapa pun yang ingin melihat dunia diatur sesuai dengan gagasannya sendiri harus berjuang keras untuk menguasai pikiran manusia. Dalam jangka panjang, tidak mungkin memaksa orang, di luar kehendak mereka, tunduk pada rezim yang mereka tolak. Siapa pun yang mencoba untuk melakukannya dengan kekerasan pada akhirnya akan menemui kegagalan, dan perjuangan yang dipicu oleh usahanya hanya akan membuat lebih banyak kerusakan daripada kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah terburuk namun yang berdasarkan persetujuan rakyat yang diperintah. Orang tidak akan bahagia jika kehendak mereka dilawan.

## 10. Argumen Fasisme

Jika liberalisme tidak mendapat dukungan penuh di mana pun, keberhasilan liberalisme pada abad kesembilan belas mencapai tingkat di mana prinsip-prinsipnya yang terpenting dianggap tak

terbantahkan. Sebelum 1914, bahkan lawan-lawan liberalisme yang paling keras kepala dan paling sengit pun harus merelakan prinsip-prinsip liberal diakui tanpa perlawanan.

Di Rusia sekali pun, di mana liberalisme tak lebih dari cahaya remang-remang yang menembus negeri itu, para pendukung despotisme (kezaliman) tsar dalam menganiaya lawan mereka tetap harus mempertimbangkan pendapat liberal negara-negara Eropa; dan selama Perang Dunia, kelompok negara-negara yang berperang, terlepas dari semangat mereka yang berkobar-kobar, harus bersikap moderat dalam menghadapi perlawanan internal.

Hanya ketika kelompok Sosial-Demokrat yang Marxis berada di atas angin dan mengambil alih kekuasaan dengan keyakinan bahwa era liberalisme dan kapitalisme telah berlalu selamanya, maka berakhirlah konsesi yang sebelumnya dianggap harus diberikan kepada ideologi liberal.

Anggota Partai Internasional Ketiga (Third International, asosiasi partai-partai komunis) menganggap semua cara dibolehkan jika cara itu memberi harapan bagi tercapainya tujuan perjuangan mereka. Barang siapa tidak mengakui tanpa syarat semua ajaran mereka sebagai satu-satunya paham yang benar, dan mempertahankannya dalam susah dan senang, menurut pendapat mereka, patut mendapat hukuman mati; dan mereka tidak ragu-ragu untuk memusnahkannya dan seluruh keluarganya, termasuk bayi, kapan saja dan di mana saja jika memungkinkan secara fisik.

Dukungan terang-terangan terhadap kebijakan untuk menghancurkan lawan dan pembunuhan yang dilakukan dalam rangka menegakkan kebijakan itu melahirkan gerakan oposisi. Tiba-tiba lawan-lawan liberalisme yang non komunis melihat kebenaran di hadapan mereka. Sampai saat itu, mereka percaya bahwa dalam perjuangan melawan musuh yang sangat dibenci sekali pun seseorang tetap harus menghormati prinsip-prinsip liberal tertentu.

Dengan terpaksa mereka mencoret pembunuhan dan pembantaian dari daftar tindakan yang bisa diambil dalam rangka perjuangan politik. Mereka harus menerima kenyataan bahwa sekarang mereka

tidak bisa memperlakukan pers oposisi secara semena-mena dan membungkam suara-suara yang menentang mereka.

Tiba-tiba mereka menyaksikan lawan-lawan mereka yang bermunculan sama sekali tidak mengindahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan menganggap segala cara cukup baik untuk mengalahkan musuh mana pun. Musuh-musuh militeristik dan nasionalistis Partai Internasional Ketiga merasa tertipu oleh liberalisme.

Mereka mengira liberalisme tidak akan bertindak saat muncul keinginan untuk menghantam partai-partai revolusioner selagi ada kesempatan. Seandainya liberalisme tidak menghalangi mereka, mereka percaya bahwa mereka telah menumpas gerakan revolusioner secara kejam saat gerakan itu baru muncul.

Ide-ide revolusioner mampu berakar dan berkembang hanya karena toleransi lawan-lawan mereka yang kemauannya dilemahkan oleh rasa hormat terhadap prinsip-prinsip liberal yang di kemudian hari terbukti tidak diperlukan.

Jika ide itu muncul bertahun-tahun sebelumnya, bahwa menghancurkan setiap gerakan revolusioner tanpa ampun dibolehkan, kemenangan yang diraih Partai Internasional Ketiga sejak tahun 1917 tidak akan pernah mungkin terjadi. Ini karena kelompok militeris dan nasionalis yakin bahwa dalam hal menembak dan bertempur, mereka adalah penembak jitu yang selalu mengenai sasaran dan pejuang yang paling lihai.

Ide mendasar gerakan-gerakan ini—yang, dari nama yang paling besar dan paling disiplin di antara mereka, orang-orang Italia, mungkin secara umum ditakdirkan sebagai Fasis—dibangun dari usulan untuk menggunakan metode-metode tidak bermoral serupa dalam perjuangan melawan Partai Internasional Ketiga, yang juga menggunakannya dalam menghadapi lawan-lawan mereka.

Partai Internasional Ketiga berupaya untuk memusnahkan musuh-musuh mereka serta ide-idenya dengan cara sama yang digunakan oleh seorang pakar kebersihan (higiene) dalam memusnahkan basil-basil pembawa wabah; mereka tidak merasa terikat

sama sekali oleh ketentuan setiap perjanjian yang mungkin mereka tanda tangani dengan lawan mereka, dan mereka menganggap semua kejahatan, kebohongan, dan fitnah dibolehkan dalam perjuangan mereka.

Kaum fasis, setidaknya dalam prinsip, menyatakan tujuan yang sama. Bahwa mereka belum berhasil sepenuhnya seperti kaum Bolshevik di Rusia dalam membebaskan diri mereka dari rasa hormat terhadap gagasan-gagasan liberal dan ide-ide serta aturan-aturan etika tradisional, semata-mata adalah karena kaum fasis melakukan upaya mereka di antara bangsa-bangsa di mana warisan intelektual dan moral dari peradaban yang berusia ribuan tahun tidak bisa dihancurkan dengan satu pukulan mematikan, dan bukan di antara orang-orang barbar di kedua sisi Pegunungan Ural, yang bersentuhan dengan peradaban hanya saat mereka, sama seperti para pengelana hutan dan padang pasir terbiasa melakukan serangan dari waktu ke waktu terhadap wilayah-wilayah yang dihuni peradaban untuk menjarah.

Karena perbedaan ini, fasisme tidak akan pernah berhasil sepenuhnya seperti Bolshevisme Rusia dalam membebaskan diri dari kekuatan ide-ide liberal. Hanya karena ingatan segar atas pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh para pendukung Sovietlah maka Jerman dan Italia mampu menghilangkan ingatan tentang kendali tradisional, yaitu keadilan dan moralitas, dan menemukan dorongan untuk melakukan serangan balik yang berdarah.

Tindakan kaum fasis dan pihak-pihak yang terkait dengan mereka merupakan refleksi emosional yang ditimbulkan oleh kemarahan atas tindakan kaum Bolshevik dan komunis. Begitu luapan kemarahan berlalu, kebijakan mereka berubah menjadi lebih moderat dan mungkin akan semakin moderat seiring dengan berlalunya waktu.

Sikap moderat ini muncul dari fakta bahwa pandangan liberal tradisional masih memiliki pengaruh yang tidak disadari atas kaum fasis. Tapi sejauh mana pun hal ini berlangsung, seseorang tidak

boleh melupakan bahwa ketika partai-partai kanan mengubah taktik dan menerapkan taktik fasisme, perjuangan melawan liberalisme mencapai keberhasilan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Banyak orang mendukung metode fasisme meskipun program ekonominya sama sekali antiliberal, dan kebijakannya sangat interventionis karena fasisme tidak menerapkan metode pemusnahan yang tidak masuk akal dan tak terkendali yang telah membuat kaum komunis dicap sebagai musuh bebuyutan peradaban.

Namun, kelompok lain, terlepas dari pemahaman mereka tentang keburukan kebijakan ekonomi fasis, menganggap fasisme tidak seburuk Bolshevisme dan Sovietisme. Bagi sebagian besar pendukung dan orang-orang yang secara diam-diam mengagumi fasisme, daya tarik fasisme justru terletak pada metode kekerasannya.

Tidak dapat disangkal bahwa satu-satunya cara untuk melakukan perlawanan yang efektif terhadap tindakan kekerasan adalah dengan jalan kekerasan. Dalam menghadapi senjata kaum Bolshevik, senjata harus digunakan sebagai balasan, dan salah besar menunjukkan kelemahan kepada para pembunuh. Kaum liberal tidak pernah meragukan hal ini.

Apa yang membedakan taktik politik liberal dari taktik politik fasis bukan perbedaan dalam pandangan mengenai perlu atau tidaknya menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi para penyerang bersenjata, tetapi perbedaan dalam penilaian mendasar tentang peran kekerasan dalam perjuangan untuk memperoleh kekuasaan.

Bahaya besar yang mengancam kebijakan dalam negeri dari sisi fasisme terletak pada keyakinan penuh pada kekuatan mutlak kekerasan. Untuk memastikan keberhasilan, seseorang harus mempunyai keinginan untuk meraih kemenangan dan untuk selalu menggunakan kekerasan dalam melangkah. Ini merupakan prinsip tertinggi.

Namun, apa yang terjadi saat seseorang menghadapi lawan yang sama-sama dijiwai oleh keinginan untuk keluar sebagai pemenang dan bertindak sama kerasnya? Yang terjadi hanyalah pertempuran,

perang saudara. Pemenang terakhir yang muncul dari konflik seperti itu adalah golongan yang terkuat dari segi jumlah. Dalam jangka panjang, kelompok minoritas—bahkan jika kelompok itu terdiri dari orang-orang yang paling mampu dan energik—tidak akan berhasil melawan kelompok mayoritas.

Oleh karena itu, pertanyaan yang menentukan tetap sama: Bagaimana seseorang memperoleh dukungan mayoritas untuk partainya? Bagaimanapun, ini adalah murni masalah intelektual. Kemenangan hanya bisa diraih dengan senjata intelektual, tidak akan pernah bisa dengan kekerasan. Penindasan oposisi dengan kekerasan semata merupakan cara yang paling tidak sesuai untuk menggalang pengikut bagi tujuan seseorang.

Penggunaan kekerasan murni—tanpa pembenaran pendapat intelektual yang diterima oleh publik—hanya menghasilkan sekutu bagi pihak yang ingin ditumpas. Dalam pertempuran antara kekerasan dan gagasan, yang terakhir selalu menang.

Fasisme berjaya saat ini karena kemarahan universal atas kekejaman yang dilakukan oleh kaum sosialis dan komunis telah menimbulkan simpati luas terhadap fasisme. Tapi ketika ingatan segar tentang kejahatan kaum Bolshevik memudar, program kaum sosialis sekali lagi akan menggunakan kekuatannya untuk menarik massa.

Karena fasisme tidak melakukan apa pun untuk memerangi sosialisme kecuali dengan menekan gagasan-gagasan sosialis dan menganiaya orang-orang yang menyebarkannya. Jika fasisme benar-benar ingin memerangi sosialisme, ia harus menentangnya dengan pemikiran. Namun, hanya ada satu gagasan yang dapat menentang sosialisme dengan efektif, yaitu gagasan mengenai liberalisme.

Telah sering dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memajukan sebuah gerakan dengan cara lebih baik selain menciptakan martir untuk pergerakan itu. Ini tidak sepenuhnya benar. Yang memperkuat tujuan kelompok yang teraniaya bukan pengorbanan penganutnya sebagai martir tetapi kenyataan bahwa mereka diserang oleh kekerasan dan bukan oleh senjata intelektual.

Penindasan dengan kekerasan selalu berarti pengakuan atas ketidakmampuan untuk menggunakan senjata yang lebih baik, yaitu senjata intelektual. Disebut lebih baik karena hanya senjata itu yang menjanjikan keberhasilan. Ini merupakan kesalahan mendasar fasisme, dan yang akhirnya akan menyebabkan keruntuhannya. Kemenangan fasisme di sejumlah negara hanyalah sebuah episode dari rangkaian panjang perjuangan tentang kekayaan.

Episode berikutnya adalah kemenangan komunisme. Bagaimanapun, hasil akhir dari perjuangan tidak ditentukan oleh senjata tetapi oleh gagasan. Gagasanlah yang menghimpun orang-orang ke dalam kelompok-kelompok perang, yang meletakkan senjata ke tangan mereka, dan yang menentukan terhadap siapa dan untuk siapa senjata digunakan. Merekalah, bukan senjata, yang pada akhirnya membalikkan keadaan.

Itulah akhir kebijakan dalam negeri fasisme. Bahwa kebijakan luar negerinya, yang didasarkan atas prinsip kekuatan dalam hubungan internasional, selalu menimbulkan rangkaian perang tanpa akhir yang menghancurkan semua peradaban modern, tidak perlu dibahas lebih lanjut.

Untuk mempertahankan dan untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi kita sekarang ini, perdamaian antara bangsa-bangsa harus terjamin. Tapi bangsa-bangsa tidak bisa hidup bersama dengan damai jika prinsip dasar ideologi yang memerintah mereka adalah keyakinan bahwa negara dapat menjamin tempatnya dalam komunitas bangsa-bangsa hanya dengan jalan kekerasan.

Tidak dipungkiri lagi bahwa fasisme dan gerakan-gerakan serupa yang bertujuan membentuk kediktatoran dipenuhi dengan niat baik dan bahwa campur tangan mereka telah, untuk saat ini, menyelamatkan peradaban Eropa.

Pujian yang diraih fasisme akan hidup abadi dalam sejarah. Tapi, meskipun kebijakan fasisme membawa keselamatan untuk saat ini, kebijakan itu bukanlah kebijakan yang menjanjikan sukses berkelanjutan. Fasisme adalah cadangan untuk keadaan darurat. Menganggapnya lebih dari itu merupakan kesalahan fatal.

## 11. Lingkup Kegiatan Pemerintah

Dalam pandangan kaum liberal, tugas negara semata-mata dan secara khusus adalah melindungi nyawa, kesehatan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi dari serangan kekerasan. Lebih dari itu adalah kejahatan. Pemerintah yang alih-alih melaksanakan tugasnya malah melakukan tindakan yang melanggar keamanan pribadi menyangkut nyawa dan kesehatan, kebebasan, dan hak milik adalah pemerintah yang buruk.

Namun, seperti dikemukakan Jacob Burckhardt, kekuasaan adalah kejahatan itu sendiri, tidak penting siapa yang menggunakannya. Kekuasaan cenderung korup dan menimbulkan penyalahgunaan. Tidak hanya para penguasa absolut dan para bangsawan, namun juga massa, yang oleh demokrasi dipercaya memegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, dengan mudah terdorong ke arah eksekse berlebihan. Di Amerika Serikat, pembuatan dan penjualan minuman beralkohol dilarang.

Negara-negara lain tidak bertindak sejauh itu, tapi hampir di mana pun diberlakukan pembatasan bagi penjualan opium, kokain, dan narkotika sejenis. Secara umum, melindungi setiap orang dari diri mereka sendiri dianggap sebagai salah satu tugas undang-undang dan pemerintah. Bahkan mereka yang umumnya ragu dalam memperluas lingkup kegiatan pemerintah menganggap bahwa cukup tepat untuk membatasi kebebasan individu dalam hal ini, dan mereka berpendapat bahwa hanya para penganut doktrin kaku yang kolot yang menentang larangan semacam itu.

Sesungguhnya, masyarakat sangat menerima intervensi semacam ini dari pihak yang berwenang dalam hidup setiap orang sehingga mereka yang menentang liberalisme secara prinsip cenderung mendasarkan pendapat mereka pada pengakuan yang seolah-olah tak terbantahkan bahwa larangan tersebut diperlukan, dan yang menyimpulkan bahwa kebebasan penuh adalah kejahatan, dan bahwa langkah-langkah untuk membatasi kebebasan individu harus diambil oleh pemerintah dalam kapasitas mereka sebagai penjaga



kesejahteraan mereka.

Pertanyaannya bukanlah apakah pihak yang berwenang harus memberlakukan larangan atas kebebasan setiap orang, tapi hanya seberapa jauh mereka bisa melakukannya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa semua jenis narkoba berbahaya. Pertanyaan mengenai apakah alkohol dalam jumlah kecil berbahaya, atau apakah bahaya itu hanya merupakan akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol, tidak dipersoalkan di sini. Adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa alkoholisme, kokainisme, dan morfinisme adalah musuh kehidupan, kesehatan, dan kapasitas untuk bekerja dan untuk menikmati kesenangan yang mematikan; dan oleh sebab itu, para penganut *utilitarian* harus menganggap mereka sebagai kejahatan.

Namun, ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa pihak yang berwenang harus campur tangan untuk menekan kejahatan ini melalui larangan perdagangan. Selain itu tidak ada bukti bahwa intervensi semacam itu benar-benar dapat menekan kejahatan tersebut, dan bahkan sekali pun tujuannya tercapai, akan membuka kotak Pandora yang berisi ancaman-ancaman lain yang tidak kurang jahat dari alkoholisme dan morphinism.

Siapa pun yang percaya bahwa kesenangan atau kesenangan berlebihan yang ditimbulkan semua racun ini bersifat merusak tidak dihalangi untuk makan dan minum secukupnya atau untuk menjalani kehidupan secukupnya. Persoalan ini tidak bisa dihadapi hanya dengan mengacu pada alkoholisme, morfinisme, kokainisme, dan lain-lain, yang diakui sebagai kejahatan oleh semua orang yang berpikiran sehat. Karena jika mayoritas penduduk, pada prinsipnya, menyerahkan hak untuk menentukan jalan hidup mereka kepada kelompok minoritas, mustahil larangan hanya akan terbatas pada kesenangan akan alkohol, morfin, kokain, dan racun-racun sejenis.

Mengapa apa yang berlaku untuk semua racun ini tidak diberlakukan juga untuk nikotin, kafein, dan sejenisnya? Mengapa negara tidak menentukan makanan apa yang boleh dinikmati dan mana yang harus dihindari karena merugikan? Juga dalam olahraga,

banyak orang memiliki kecenderungan untuk memuaskan diri mereka jauh dari yang dimungkinkan oleh kekuatan fisik mereka. Mengapa negara tidak campur tangan di sini? Tidak banyak orang tahu bagaimana mengendalikan kehidupan seksual mereka dan tampaknya sangat sulit bagi orang tua untuk memahami bahwa mereka harus berhenti menikmati kesenangan seperti itu, atau setidaknya, melakukannya dengan hati-hati dan terukur. Tidakkah negara harus ikut campur dalam masalah ini?

Yang lebih berbahaya dari semua kenikmatan ini, menurut banyak orang, adalah membaca bacaan yang merusak. Apakah pers yang bertujuan memuaskan naluri manusia yang paling rendah dibiarkan merusak jiwa manusia? Tidakkah pameran gambar-gambar porno, pertunjukan-pertunjukkan cabul, singkatnya, semua daya tarik perbuatan-perbuatan asusila, seharusnya dilarang? Dan bukankah penyebaran doktrin-doktrin sosiologis palsu sama berbahayanya bagi manusia dan bangsa-bangsa?

Bolehkah manusia dibiarkan mendorong orang lain melancarkan perang saudara dan peperangan melawan negara-negara lain? Dan bolehkah serangan keji dan pidato-pidato kecaman yang berisi penghinaan kepada Tuhan dibiarkan untuk mengurangi rasa hormat kepada Tuhan dan gereja? Kita lihat bahwa begitu kita melepaskan prinsip bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam semua persoalan yang menyangkut jalan hidup seseorang, kita mendapati diri kita mengatur dan membatasi semua hal itu sampai pada detail terkecil.

Kebebasan pribadi manusia dicabut. Ia menjadi budak masyarakat, dipaksa untuk mematuhi semua perintah kelompok mayoritas. Tak ada gunanya membahas secara panjang lebar berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyalahgunakan kekuasaan sebesar itu oleh orang-orang jahat di dalam pemerintah. Penggunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berniat baik sekali pun menjerumuskan dunia ke tempat pembuangan hantu.

Setiap kemajuan umat manusia dicapai sebagai hasil prakarsa sekelompok kecil kaum minoritas yang menyimpang dari gagasan-

gagasan dan adat-istiadat kaum mayoritas sampai akhirnya contoh yang mereka berikan menggugah orang lain untuk menerima inovasi tersebut secara sukarela. Memberikan kelompok mayoritas hak untuk menentukan apa yang harus dipikirkan, dibaca dan dilakukan kaum minoritas sama dengan menghentikan kemajuan.

Semoga tak seorang pun menyangkal bahwa perjuangan melawan morfinisme dan perjuangan melawan bacaan “merusak” adalah dua hal yang sangat berbeda. Satu-satunya perbedaan di antara kedua hal itu adalah bahwa sebagian orang yang mendukung larangan terhadap morfinisme tidak menyetujui larangan terhadap bacaan “merusak”. Di Amerika Serikat, kelompok Metodis dan Fundamentalis, segera setelah undang-undang yang melarang pembuatan dan penjualan minuman beralkohol disahkan, berjuang untuk memberangus teori evolusi dan mereka berhasil mengenyahkan Darwinisme dari sekolah-sekolah di beberapa negara bagian.

Di Soviet Rusia, setiap pendapat bebas opini ditekan. Boleh tidaknya sebuah buku diterbitkan tergantung pada kebijaksanaan sejumlah orang fanatik yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dengan wewenang untuk menangani masalah-masalah seperti itu.

Kecenderungan orang-orang di jaman kita untuk menuntut larangan pemerintah begitu sesuatu yang tidak berkenan bagi mereka muncul, dan kesiapan mereka untuk mengajukan permohonan larangan seperti itu, bahkan jika apa yang dilarang menyenangkan mereka, menunjukkan bahwa semangat mengabdikan masih sangat tinggi dan telah mendarah-daging dalam diri mereka. Dibutuhkan bertahun-tahun bagi seseorang untuk mendidik dirinya sendiri sampai ia berubah menjadi seorang warga negara. Seorang manusia bebas harus bisa menerima tindakan dan gaya hidup sesamanya meskipun hal itu bertentangan dengan apa yang ia anggap layak. Ia harus membebaskan dirinya dari kebiasaan memanggil polisi setiap kali sesuatu yang tidak menyenangkan baginya muncul.

## 12. Toleransi

Liberalisme membatasi perhatiannya semata-mata pada kehidupan dan upaya-upaya duniawi. Sebaliknya, kerajaan agama bukan dari dunia ini. Dengan demikian, baik liberalisme maupun agama dapat hidup berdampingan tanpa saling bersinggungan. Ketika pada akhirnya mereka bertabrakan bukan karena kesalahan liberalisme. Liberalisme tidak melanggar batas wilayahnya; liberalisme tidak mencampuri wilayah keyakinan agama atau ajaran metafisik.

Namun, liberalisme memandang gereja sebagai kekuatan politik yang menuntut hak untuk mengatur sesuai dengan penilaiannya bukan hanya hubungan antara manusia dan dunia yang akan datang, tetapi juga urusan-urusan di dunia ini. Pada titik inilah garis pertempuran harus ditarik.

Kemenangan luar biasa yang diraih liberalisme dalam pertikaian ini memaksa gereja melepaskan untuk selama-lamanya semua hak yang telah dijaga dengan sekuat tenaga selama ribuan tahun. Pembakaran orang-orang bidat, penganiayaan melalui pengadilan, dan perang agama sekarang hanya tinggal sejarah. Tak seorang pun dapat memahami bagaimana orang-orang yang dengan tenang menjalankan keyakinan yang mereka anggap benar di balik dinding rumah mereka diseret ke pengadilan, dipenjara, menjadi martir, dan dibakar. Namun, sekali pun tidak ada lagi kayu bakar yang dinyalakan “Untuk Keagungan Allah”, sikap tidak toleran masih sering dijumpai.

Bagaimanapun, liberalisme harus bersikap tidak toleran terhadap setiap sikap tidak toleran. Jika seseorang memandang kerjasama penuh kerukunan sesama manusia sebagai tujuan evolusi sosial, ia tidak bisa membiarkan ketenangan itu diganggu oleh para pendeta dan orang-orang fanatik. Liberalisme menyerukan toleransi terhadap setiap keyakinan beragama dan setiap keyakinan metafisik, bukan karena ketidakpedulian terhadap hal-hal yang bersifat “lebih tinggi” tetapi karena keyakinan bahwa perdamaian di masyarakat harus didahulukan dari segala hal dan semua orang. Oleh karena

liberalisme menuntut toleransi dari semua pandangan dan semua gereja dan sekte, liberalisme harus meminta agar mereka kembali ke batas-batas wilayah mereka setiap kali mereka melewati batas-batas itu dengan cara yang tidak toleran.

Dalam sebuah tatanan sosial yang didasarkan atas kerjasama yang rukun, tidak ada ruang bagi tuntutan gereja untuk memonopoli pengajaran dan pendidikan kaum muda. Gereja akan mendapatkan apa pun selama itu disetujui oleh pendukungnya atas kehendak mereka sendiri; gereja tidak diperkenankan melakukan apa pun terhadap orang-orang yang tidak ingin berurusan dengan gereja.

Sulit dimengerti bagaimana prinsip-prinsip liberalisme ini menciptakan musuh di antara para anggota tetap gereja dengan keyakinan berbeda-beda. Jika mereka menghalangi gereja memaksa orang berpindah agama dengan cara kekerasan, baik kekerasan oleh gereja sendiri maupun melalui sarana yang disediakan negara, di sisi lain mereka melindungi gereja dari upaya gereja atau sekte lain mengubah keyakinan mereka secara paksa. Apa yang diambil oleh liberalisme dari gereja dengan satu tangan, dikembalikan dengan tangan lain. Bahkan pengikut agama yang fanatik sekali pun harus mengakui bahwa liberalisme tidak mengambil apa pun yang menjadi hak agama.

Yang pasti, gereja-gereja dan sekte-sekte yang, saat mereka berada di atas angin, tidak pernah puas menganiaya orang-orang ingkar, menuntut toleransi, setidaknya untuk mereka sendiri, ketika mereka berada dalam kelompok minoritas. Namun, tuntutan bagi toleransi ini sama sekali berbeda dengan tuntutan bagi toleransi kaum liberal. Liberalisme menuntut toleransi karena alasan prinsip, bukan karena memanfaatkan kesempatan (oportunis). Liberalisme menuntut toleransi bahkan terhadap ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, bentuk-bentuk penyimpangan agama yang konyol, dan takhayul-takhayul bodoh yang kekanak-kanakan. Liberalisme menuntut toleransi terhadap doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat yang mereka anggap merusak dan merugikan masyarakat dan bahkan terhadap gerakan-gerakan yang mereka lawan tanpa kenal lelah.

Apa yang mendorong liberalisme menuntut toleransi dan bersikap toleran bukan pertimbangan agar muatan doktrin tersebut mendapatkan toleransi, namun pemahaman bahwa hanya toleransi yang dapat menciptakan dan menjaga perdamaian sosial dan tanpa perdamaian itu umat manusia akan terperosok kembali ke era barbarisme dan kemiskinan dari abad-abad yang lampau.

Dalam melawan kebodohan, hal-hal yang tidak masuk akal dan jahat, liberalisme menggunakan pikiran, bukan kekuatan seekor hewan dan penindasan, sebagai senjatanya.

### 13. Negara dan Perilaku Antisozial

Negara adalah aparat yang bertugas melakukan pemaksaan. Ini berlaku tidak hanya bagi negara “penjaga malam”, tapi juga untuk hampir semua negara dan hampir semua negara sosialis. Semua yang dilakukan negara, dilakukan melalui tekanan dan penerapan kekerasan. Menekan perilaku yang membahayakan keberadaan tatanan sosial adalah hakikat kegiatan negara; di komunitas sosialis, fungsi ini dilengkapi dengan kendali atas alat produksi.

Logika sederhana orang-orang Romawi mengemukakan kenyataan ini secara simbolis dengan memakai kapak dan seikat batang kayu sebagai lambang negara. Ilmu kebatinan yang sulit dimengerti, yang menyebut dirinya filsafat, telah melakukan semua yang mungkin dilakukan di zaman modern untuk mengaburkan kebenaran.

Bagi Schelling, negara adalah gambaran langsung dan nyata dari kehidupan mutlak, sebuah tahap dalam pengungkapan hal-hal yang absolut atau dunia roh. Negara ada hanya untuk dirinya sendiri, dan kegiatannya secara khusus diarahkan pada pelestarian hakikat dan bentuk keberadaannya.

Bagi Hegel, Nalar Absolut mengungkapkan dirinya dalam negara, dan Semangat Objektif merealisasi dirinya dalam negara. Ini adalah pikiran etis yang berkembang menjadi sebuah realita organik-realita dan gagasan etis sebagai hasrat penting yang terungkap yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Penganut falsafah idealis

mengalahkan bahkan guru-guru mereka dalam pemujaan mereka terhadap negara.

Yang pasti, tidak ada yang lebih mendekati kebenaran jika seseorang, dalam menanggapi doktrin ini dan doktrin-doktrin serupa, menyebut negara dengan sebutan yang digunakan Nietzsche, yaitu monster yang paling tidak berperasaan dibandingkan dengan monster-monster lain yang tidak berperasaan. Negara tidak memiliki perasaan atau kehangatan, karena negara adalah sebuah gagasan abstrak yang atas namanya manusia—alat negara, pemerintah—bertindak. Semua kegiatan negara adalah kegiatan manusia, kejahatan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Tujuannya—pelestarian masyarakat—membenarkan tindakan alat-alat negara, namun akibat buruk yang diakibatkannya tidak berkurang bagi mereka yang menderita di bawahnya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya merugikan keduanya—bukan hanya orang yang menjadi korban kejahatan itu namun juga orang yang melakukannya. Tak ada yang merusak seseorang lebih dari ketika ia menjadi alat hukum dan membuat manusia menderita. Korban pelaku kejahatan hidup dalam kegelisahan, semangatnya adalah semangat seorang budak, dan pemujaan yang bersifat menjilat; namun kemunafikan, keangkuhan, dan arogansi seorang majikan sama buruknya.

Liberalisme berusaha menghilangkan kepedihan dari hubungan antara pegawai pemerintah dan penduduk. Dalam melakukan hal itu liberalisme tidak mengikuti jejak kaum romantis yang membela perilaku antisosial para pelanggar hukum dan mengutuk tidak saja hakim dan polisi, namun juga tatanan sosial yang berlaku. Liberalisme tidak berharap dan juga tidak mau menyangkal bahwa kekuatan pemerintah untuk memaksa dan hukuman yang sah atas kejahatan adalah lembaga yang, dalam keadaan apa pun, dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun, kaum liberal percaya bahwa tujuan hukuman adalah semata-mata untuk menyingkirkan perilaku berbahaya dari masyarakat. Hukuman tidak boleh bersifat dendam atau pembalasan.

Para penjahat layak mendapat hukuman yang dibuat oleh undang-undang, tapi tidak kebencian dan sadisme dari para hakim, polisi, dan penghakiman massa yang haus darah.

Yang paling merusak dari kekuatan memaksa yang mendapat pembenaran atas nama “negara” adalah bahwa, karena merupakan kebutuhan yang mendapat dukungan kelompok mayoritas, negara mengarahkan serangannya terhadap inovasi yang berkembang. Masyarakat tidak bisa berjalan tanpa aparat negara, namun kemajuan umat manusia harus dicapai melalui perlawanan terhadap penolakan dan oposisi terhadap negara dan kekuatan memaksanya.

Tak heran bila orang yang memiliki sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada umat manusia tidak menemukan satu pun hal baik tentang negara mau pun undang-undangnya. Para penganut aliran mistik etatis yang fanatik dan para pemuja negara mungkin akan menyalahkan mereka; kelompok liberal memahami posisi mereka sekali pun mungkin tidak menyetujuinya. Namun setiap penganut liberal harus menentang ketidaksukaan yang sebenarnya bisa dipahami ini terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sipir penjara dan polisi jika rasa tidak suka itu berlanjut menjadi harga diri yang berlebihan sehingga mereka menyatakan setiap orang berhak untuk memberontak melawan negara.

Penggunaan kekerasan dalam melawan kekuatan negara merupakan upaya terakhir kelompok minoritas dalam usahanya membebaskan diri dari penindasan kelompok mayoritas. Kelompok minoritas yang ingin melihat gagasannya berhasil harus menempuh perjuangan intelektual untuk menjadi kelompok mayoritas. Negara harus dibangun sedemikian rupa sehingga lingkup hukumnya menyisakan ruang gerak bagi setiap orang sehingga mereka dapat bergerak dengan leluasa. Kegiatan warga negara tidak boleh dibatasi sehingga jika ia memiliki pemikiran yang berbeda dengan para penguasa satu-satunya pilihan baginya adalah musnah atau menghancurkan mesin-mesin negara.



---

## BAB 2

# KEBIJAKAN EKONOMI LIBERAL

### 1. Organisasi Ekonomi

Pengaturan kerjasama individu dalam masyarakat berdasarkan pembagian kerja dapat dibedakan menjadi lima sistem berbeda: sistem kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, yang dalam perkembangannya kita sebut kapitalisme; sistem kepemilikan pribadi atas alat produksi dengan pengambilalihan kekayaan dan pembagian kekayaan secara berkala; sistem sindikalisme; sistem kepemilikan umum atas alat produksi, yang dikenal sebagai sosialisme atau komunisme; dan yang terakhir, sistem intervensionisme.

Sejarah kepemilikan pribadi atas alat produksi berjalan seiring dengan sejarah perkembangan umat manusia dari keadaan seperti binatang ke pencapaian tertinggi dalam peradaban modern. Para penentang kepemilikan pribadi telah bersusah payah menunjukkan bahwa pada awalnya hak milik pribadi belum menemukan bentuknya yang utuh karena sebagian lahan yang diolah akan dibagi ulang secara berkala.

Dari pengamatan ini, yang menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi hanyalah sebuah “kategori historis”, mereka mencoba untuk menarik kesimpulan bahwa kepemilikan pribadi dapat sekali lagi dengan aman disingkirkan. Kekeliruan logika di balik alasan ini terlalu menyolok untuk diperdebatkan lebih jauh. Bahwa kerjasama sosial telah ada di jaman purbakala, bahkan di tengah ketiadaan

sistem hak milik pribadi yang diwujudkan secara utuh, tidak bisa membuktikan sedikit pun bahwa seseorang dapat hidup dengan baik dalam tingkatan peradaban yang lebih tinggi tanpa hak milik pribadi.

Jika sejarah dapat memberikan bukti dalam bentuk apa pun untuk masalah ini, pembuktian itu hanya menunjukkan bahwa tanpa hak milik pribadi tidak ada masyarakat mana pun yang mampu mengangkat dirinya ke luar dari kemiskinan dan kebuasan menecem yang nyaris tidak bisa dibedakan dari kehidupan binatang.

Para penentang awal sistem kepemilikan pribadi atas alat produksi tidak menyerang kepemilikan pribadi sebagai sebuah institusi namun kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Mereka menganjurkan penghapusan kesenjangan pendapatan dan kekayaan melalui sistem pembagian keseluruhan komoditas secara berkala, atau setidaknya tanah, yang pada saat itu sebenarnya merupakan satu-satunya faktor produksi yang diperhitungkan.

Di negara-negara yang secara teknologi terbelakang, di mana produksi pertanian secara primitif masih berlangsung, gagasan tentang pemerataan pembagian kepemilikan masih berlaku hingga saat ini. Orang biasa menyebutnya sebagai sosialisme agraris, meskipun sebutan ini tidak seluruhnya tepat karena sistem ini tidak berhubungan dengan sosialisme. Revolusi kaum Bolshevik di Rusia, yang dimulai sebagai revolusi sosialis, tidak mendirikan sosialisme pertanian—yaitu kepemilikan bersama atas tanah—namun, sebaliknya, mendirikan sosialisme agraris. Di banyak tempat lain di Eropa Timur, pembagian tanah-tanah perkebunan yang luas di antara petani-petani kecil, atas nama reformasi pertanian, merupakan cita-cita yang didukung partai-partai politik yang berpengaruh.

Diskusi lebih jauh mengenai sistem ini tidaklah diperlukan. Bahwa sistem itu pasti mengakibatkan penurunan produksi yang dihasilkan tenaga kerja manusia nyaris tidak terbantahkan. Hanya di mana tanah masih diolah secara primitiflah seseorang tidak bisa melihat penurunan produktivitas yang diakibatkan pembagian dan distribusinya. Semua orang akan mengakui bahwa tidak ada gunanya

sama sekali untuk membagi-bagi perusahaan susu yang dilengkapi dengan peralatan teknologi modern ke dalam beberapa bagian kecil. Menerapkan prinsip pembagian dan distribusi ini ke industri atau perusahaan komersial benar-benar mustahil. Jalan kereta api, pabrik penggilingan baja, atau pabrik pembuat mesin tidak bisa dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian kecil.

Seseorang dapat melaksanakan pembagian kembali kekayaan secara berkala hanya jika ia pertama-tama sepenuhnya menghapus perekonomian yang didasarkan atas pembagian kerja dan pasar yang bebas, dan kembali kepada sistem perekonomian di mana tanah beserta rumah-rumah pertanian hidup mandiri berdampingan tanpa saling berhubungan.

Gagasan mengenai sindikalisme mewakili upaya menyelaraskan cita-cita tentang pemerataan kekayaan dengan kondisi industri modern bersala besar. Sindikalisme mencoba untuk menginvestasikan kepemilikan atas alat-alat produksi, tidak di individu atau masyarakat, namun di para pekerja yang dipekerjakan di setiap industri atau cabang produksi.

Karena proporsi gabungan bahan-bahan dan faktor-faktor pribadi dari produksi berbeda di cabang-cabang produksi yang berbeda, pemerataan distribusi kekayaan tidak dapat dicapai dengan cara ini. Sejak awal, para pekerja akan menerima bagian kekayaan lebih besar di beberapa cabang industri dibandingkan dengan cabang-cabang produksi lain. Seseorang hanya perlu mempertimbangkan kesulitan yang pasti timbul dari kebutuhan, yang selalu ada dalam setiap perekonomian, untuk perpindahan modal dan tenaga kerja dari satu cabang produksi ke cabang produksi lain.

Apakah mungkin untuk menarik modal dari satu cabang industri untuk melengkapi cabang industri lain? Apakah mungkin untuk memindahkan para pekerja dari satu cabang produksi dan mengirim mereka ke cabang produksi lain di mana jatah modal per pekerja lebih kecil? Perpindahan semacam itu benar-benar mustahil dan membuat persemakmuran kaum sindikalis sebagai sebuah bentuk organisasi sosial sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak

mungkin diterapkan.

Namun jika kita menganggap bahwa di atas kelompok-kelompok individu terdapat sebuah pusat kekuatan yang berhak melakukan pemindahan seperti itu, kita tidak lagi berhadapan dengan sindikalisme, namun dengan sosialisme. Pada kenyataannya, sindikalisme adalah cita-cita sosial yang sangat mustahil, sehingga hanya orang-orang dungu yang tidak memikirkan masalah ini matang-matang yang menganjurkannya sebagai sebuah prinsip.

Sosialisme atau komunisme adalah organisasi masyarakat yang kekayaannya—kekuasaan untuk mengerahkan semua alat-alat produksi—diberikan kepada masyarakat, yaitu, dalam sebuah negara, sebagai aparat sosial untuk melakukan pemaksaan dan tekanan. Bagi sebuah masyarakat sosialis, tidak ada bedanya apakah pembagian keuntungan sosial dibagikan secara merata atau menurut prinsip-prinsip lain.

Juga tidak penting apakah sosialisme disebabkan oleh pemindahan secara formal kepemilikan atas alat-alat produksi kepada negara, aparat sosial yang melakukan pemaksaan dan tekanan, atau apakah pemilik alat-alat produksi mempertahankan kepemilikan mereka hanya dalam nama dan sosialisasi didasarkan atas kenyataan bahwa semua “pemilik” ini berhak untuk menggunakan alat-alat produksi di tangan mereka hanya kalau hal itu dilakukan sesuai perintah negara.

Jika pemerintah memutuskan apa yang harus diproduksi dan bagaimana memproduksinya, dan kepada siapa hasil produksi itu dijual, dan berapa harganya, maka hak milik pribadi hanya ada dalam nama saja; pada kenyataannya, semua kepemilikan telah dijadikan milik masyarakat, karena dorongan utama atas kegiatan ekonomi tidak lagi mencari keuntungan sebagai bagian dari pengusaha dan kaum kapitalis, namun kebutuhan untuk memenuhi tugas yang dibebankan dan untuk mematuhi perintah.

Akhirnya, kita masih harus berbicara tentang intervensionisme. Menurut pandangan umum, di antara sosialisme dan kapitalisme terdapat kemungkinan ketiga untuk organisasi sosial: sistem milik

pribadi yang diatur, diawasi, dan dipandu oleh ketentuan otoriter yang berdiri sendiri (tindakan intervensi).

Sistem pembagian kembali kekayaan secara berkala dan sistem sindikalisme tidak akan didiskusikan lebih lanjut. Kedua sistem ini secara umum bukan masalah. Tidak ada seorang pun yang akan menganjurkan salah satu dari keduanya dengan serius. Yang harus menjadi perhatian kita adalah sosialisme, intervensionisme, dan kapitalisme.

## **2. Hak Milik Pribadi dan Penentangnya**

Hidup manusia bukanlah suatu keadaan yang melulu berisi kebahagiaan murni. Bumi bukanlah surga. Walau ini bukan kesalahan lembaga-lembaga sosial, orang terbiasa menganggap mereka bertanggung jawab atas hal ini. Landasan peradaban mana pun, termasuk peradaban kita, adalah kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin mengkritik peradaban modern mulai dengan hak milik pribadi. Hak milik pribadi dituding bertanggung jawab atas semua hal yang tidak memuaskan para penentangnya, terutama berbagai keburukan yang bermula dari kenyataan bahwa hak milik pribadi dihambat dan dibatasi dalam berbagai hal sehingga potensi sosialnya tidak bisa dikembangkan secara penuh.

Prosedur yang biasa dipakai oleh para kritikus adalah membayangkan betapa menyenangkan jika ia bisa melakukan semua sesuai dengan caranya sendiri. Dalam mimpinya, ia menyingkirkan semua kehendak yang berlawanan dengan kehendaknya dengan mengangkat dirinya, atau seseorang yang keinginannya serupa dengan keinginannya sendiri, menjadi penguasa dunia yang absolut. Semua orang yang berkhotbah tentang hak-hak pihak yang lebih kuat, menganggap dirinya sebagai pihak yang lebih kuat.

Ia yang mendukung lembaga perbudakan tidak akan pernah berhenti membayangkan kemungkinan bahwa bisa saja ia pun menjadi seorang budak. Ia yang menuntut pembatasan terhadap kebebasan hati nurani menuntut hal itu bagi orang lain, bukan

demisendiri. Ia yang menganjurkan bentuk pemerintahan oligarki selalu mengikutsertakan dirinya ke dalam kelompok oligarki itu, dan ia yang merasakan keagungan besar dari pemikiran tentang despotisme (kezaliman) atau kediktatoran yang tercerahkan, cukup tidak tahu diri untuk memainkan peran, dalam lamunannya, sebagai penguasa lalim, atau seorang diktator yang tercerahkan, atau, setidaknya, untuk mengharapkan bahwa ia akan menjadi penguasa yang lalim di atas semua penguasa lalim, atau seorang diktator di atas semua diktator.

Seperti halnya tak seorang pun ingin melihat dirinya berada dalam posisi yang lebih lemah, atau sebagai pihak yang tertindas, yang dikuasai, yang mendapat hak-hak negatif, warga negara yang tidak memiliki hak, demikian pula di bawah sosialisme tak ada seorang pun yang menghendaki dirinya selain dalam peran sebagai direktur umum atau penasihat direktur umum. Dalam mimpi dan khayalan sosialisme, tidak ada kehidupan lain yang lebih layak dijalani.

Tulisan-tulisan antikapitalis telah menciptakan pola tetap untuk khayalan para pemimpi ini dalam pertentangan lazim antara keuntungan dan produktivitas. Apa yang terjadi di tatanan masyarakat kapitalis dikontraskan dalam pemikiran dengan apa yang—sesuai dengan keinginan para kritikus—akan dicapai dalam masyarakat sosialis yang ideal.

Segala sesuatu yang menyimpang dari gambaran ideal ini dinyatakan sebagai tidak produktif. Bahwa keuntungan terbesar bagi perorangan dan produktivitas terbesar bagi masyarakat tidak selalu seiring, telah lama dianggap sebagai umpatan paling serius terhadap sistem kapitalis. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ini tumbuh pemahaman bahwa dalam kebanyakan kasus sebuah komunitas sosialis dapat berlangsung dengan cara yang sama seperti para individu dalam sebuah komunitas kapitalis.

Tapi, kalau pun oposisi ternyata benar-benar ada, tak dapat serta merta dianggap bahwa sebuah masyarakat sosialis pasti akan melakukan hal yang benar dan bahwa tatanan masyarakat kapitalis

akan selalu dikutuk jika mereka melakukan hal lain. Gagasan tentang produktivitas sepenuhnya bersifat subyektif; gagasan itu tidak akan pernah menjadi titik awal bagi sebuah kritik yang obyektif.

Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya menyibukkan diri kita dengan renungan diktator pemimpi kita. Dalam bayangannya, semua orang rela dan patuh, siap untuk menjalankan perintahnya dengan segera dan dengan cermat. Namun, lain halnya bila semua hal itu harus muncul dalam masyarakat sosialis yang nyata, dan bukan hanya dalam khayalan. Anggapan bahwa distribusi merata atas keseluruhan hasil tahunan perekonomian kapitalis di antara semua anggota masyarakat cukup untuk memastikan semua orang hidup berkecukupan, seperti ditunjukkan oleh perhitungan statistik yang sederhana, benar-benar salah.

Jadi, sebuah masyarakat sosialis nyaris hampir tidak dapat mencapai peningkatan standar hidup masyarakat dengan cara ini. Jika masyarakat sosialis menunda kemungkinan kesejahteraan, bahkan kekayaan, untuk semua, masyarakat itu dapat melakukannya hanya dengan asumsi bahwa tenaga kerja dalam masyarakat sosialis akan menjadi lebih produktif dibandingkan dengan bila mereka berada di bawah kapitalisme dan bahwa sistem sosialis akan mampu meniadakan beberapa pengeluaran tak perlu—dan karenanya—tidak produktif.

Dalam kaitan dengan isu kedua, orang akan berpikir, contohnya, tentang penghapusan semua biaya yang berasal dari biaya pemasaran barang, persaingan, dan iklan. Jelas bahwa tidak ada ruang dalam komunitas sosialis bagi pengeluaran seperti itu. Namun, orang tidak boleh melupakan bahwa aparat sosialis yang bertanggung jawab untuk distribusi juga melibatkan biaya yang tidak sedikit, bahkan mungkin lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perekonomian kapitalis. Tapi ini bukanlah unsur yang menentukan dalam penilaian kami tentang makna penting dari pengeluaran-pengeluaran itu.

Kaum sosialis menganggap, tanpa keraguan, sebuah kewajaran bahwa dalam sistem sosialis, produktivitas tenaga kerja setidaknya

setara dengan produktivitas tenaga kerja dalam masyarakat kapitalis, dan ia berusaha untuk membuktikan bahwa produktivitas tenaga kerja dalam sistem sosialis lebih besar lagi. Namun, anggapan pertama tidak dengan sendirinya terbukti seperti keyakinan para penyokong sosialisme. Jumlah yang diproduksi dalam masyarakat kapitalis tidak terlepas dari cara produksi.

Perbedaan paling menentukan adalah bahwa dalam setiap tahapan dalam setiap cabang produksi, minat khusus orang-orang yang terlibat di dalamnya terkait erat dengan produktivitas pembagian kerja tertentu. Setiap pekerja harus mengerahkan kemampuannya yang terbaik karena upahnya ditentukan oleh hasil pekerjaannya, dan setiap pengusaha harus berusaha untuk memproduksi dengan biaya lebih murah—yaitu dengan pengeluaran modal dan tenaga kerja yang lebih sedikit—dari pesaingnya.

Hanya karena insentif inilah perekonomian kapitalis mampu menghasilkan kekayaan yang berada dalam kekuasaannya. Merasa tersinggung atas tuduhan biaya berlebihan yang dikeluarkan untuk aparat pemasaran kapitalis sama dengan memandang persoalan dari sudut pandang sempit.

Siapa pun yang mencela kapitalisme karena pemborosan sumber daya karena ada banyak pedagang kelontong yang bersaing dan bahkan lebih banyak lagi penjual tembakau di bisnis jalanan yang ramai, tidak melihat bahwa organisasi penjualan ini hanyalah hasil akhir dari aparat produksi yang menjamin produktivitas terbesar dari tenaga kerja.

Semua kemajuan produksi tercapai hanya karena pada dasarnya aparat ini selalu membuat kemajuan. Hanya karena semua pengusaha selalu bersaing dan akan disingkirkan tanpa ampun jika mereka tidak memproduksi dengan cara yang paling menguntungkanlah maka sistem produksi terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan. Jika insentif ini hilang, tidak akan ada kemajuan dalam produksi dan tidak ada upaya untuk melakukan penghematan dalam penerapan sistem tradisional.

Akibatnya, benar-benar tidak masuk akal untuk mengajukan



pertanyaan tentang berapa banyak yang bisa dihemat jika biaya iklan ditiadakan. Seseorang seharusnya lebih baik bertanya berapa banyak yang bisa diproduksi jika persaingan di antara para produsen ditiadakan. Jawaban atas pertanyaan ini tidak diragukan lagi.

Manusia dapat mengkonsumsi hanya jika mereka bekerja, dan hanya sebanyak yang bisa dihasilkan pekerjaan mereka. Adalah sifat utama sistem kapitalis untuk memberikan insentif kepada setiap anggota masyarakat untuk melakukan pekerjaannya dengan tingkat efisiensi tertinggi dan dengan demikian mencapai hasil tertinggi. Dalam masyarakat sosialis, tidak ada hubungan langsung antara kerja individu dengan barang dan jasa yang mungkin akan dinikmatinya. Dorongan untuk bekerja tidak diperoleh dari kemungkinan menikmati buah perkerjaan seseorang, namun dari perintah penguasa untuk bekerja dan dari perasaan wajib dalam diri seseorang. Contoh nyata bahwa organisasi tenaga kerja ini tidak layak akan diberikan di bab lain.

Hal yang selalu dikecam dalam sistem kapitalis adalah kenyataan bahwa pemilik alat-alat produksi menduduki posisi istimewa. Mereka dapat hidup tanpa bekerja. Jika seseorang melihat tatanan sosial dari sebuah sudut pandang individualistis, ia pasti melihat hal ini sebagai kelemahan kapitalisme yang serius. Mengapa seseorang bernasib lebih baik daripada yang lain? Namun, siapa pun yang mempertimbangkan berbagai hal bukan dari sudut pandang orang per orang, namun dari sudut pandang keseluruhan tatanan sosial, akan menemukan bahwa pemilik alat-alat produksi dapat melestarikan kedudukan mereka yang menyenangkan itu semata-mata karena mereka memberikan layanan yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Kaum kapitalis dapat mempertahankan kedudukan istimewa mereka hanya dengan mengalihkan alat-alat produksi untuk aplikasi yang paling penting bagi masyarakat.

Jika ia tidak melakukan ini—jika ia menanam kekayaannya dengan cara tidak bijak—ia akan mengalami kerugian, dan jika ia tidak memperbaikinya pada waktunya, ia akan segera disingkirkan dari posisi istimewanya tanpa kenal ampun. Ia bukan lagi seorang

kapitalis, dan orang lain dengan kualitas lebih baik akan merebut tempatnya. Dalam masyarakat kapitalis, pengerahan alat-alat produksi selalu berada di tangan pihak-pihak yang paling pantas untuk itu; dan apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka harus terus menerus menjaga agar alat-alat produksi itu dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan hasil terbesar.

### 3. Hak Milik Pribadi dan Pemerintah

Semua orang yang memiliki kekuasaan politik, semua pemerintah, semua raja, dan semua penguasa republik selalu memandang hak milik pribadi dengan rasa curiga. Ada kecenderungan melekat dalam setiap pemerintah untuk menolak pengekan dalam menjalankan tugasnya dan untuk sedapat mungkin memperluas jangkauan kekuasaannya. Untuk mengontrol segala sesuatu, untuk tidak memberikan ruang bagi apa pun untuk terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan penguasa—adalah tujuan yang secara diam-diam ingin dicapai oleh setiap penguasa.

Kalau saja hak milik pribadi bukan penghalang! Hak milik pribadi menciptakan ruang bagi individu di mana ia bebas dari negara. Hak milik pribadi membatasi ruang gerak penguasa. Hak milik pribadi memungkinkan kekuatan lain muncul berdampingan dengan dan dalam pertentangan dengan kekuatan politik. Dengan demikian hak milik pribadi menjadi landasan dari segala kegiatan yang bebas dari campur tangan negara yang penuh kekerasan. Hak milik pribadi adalah lahan di mana benih-benih kebebasan dipelihara, dan di mana kemandirian perseorangan, dan akhirnya semua kemajuan intelektual dan material berakar. Dalam pengertian ini, hak milik pribadi bahkan dinyatakan sebagai prasyarat dasar bagi pengembangan individu. Namun, hanya dengan berbagai syaratlah rumusan yang terakhir ini dapat diterima, karena pertentangan yang lazim terjadi antara perorangan dan kelompok, antara individualisme dan gagasan dan tujuan bersama, atau bahkan antara ilmu pengetahuan yang bersifat individualistis dan ilmu pengetahuan yang bersifat universalistis, hanyalah semboyan kosong.

Jadi, tak pernah ada kekuatan politik yang dengan sukarela berhenti menghambat pengembangan dan pengoperasian kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi secara bebas. Pemerintah membiarkan hak milik pribadi ketika mereka dipaksa melakukannya, namun mereka tidak mengakui secara sukarela bahwa alat-alat produksi itu penting. Bahkan para politisi liberal, setelah meraih kekuasaan, biasanya mengenyampingkan prinsip-prinsip liberal mereka. Kecenderungan untuk memaksakan pembatasan yang bersifat menindas terhadap hak milik pribadi, untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan penolakan untuk menghargai atau mengakui setiap wilayah bebas di luar atau di balik wilayah kekuasaan negara, sudah berurat akar dalam mentalitas mereka yang menguasai aparatur negara yang bertugas melakukan penekanan dan pemaksaan sehingga sulit bagi mereka untuk menolaknya dengan sukarela.

Pemerintah yang liberal adalah sebuah pertentangan di dalam dirinya sendiri. Pemerintah harus dipaksa untuk menerapkan liberalisme melalui kekuatan yang diraih berdasarkan kesepakatan bersama oleh rakyat; mereka tidak dapat diharapkan menjadi liberal secara sukarela. Mudah untuk melihat apa yang mencegah pemerintah mengakui hak-hak kepemilikan warga negara mereka dalam masyarakat yang seluruhnya terdiri dari para petani yang sama kaya. Dalam tatanan masyarakat seperti itu, setiap upaya mengurangi hak-hak kepemilikan akan menemui perlawanan dari seluruh warga negara yang bersatu menentang pemerintah dan mengakibatkan kejatuhan pemerintah.

Bagaimanapun, situasinya berbeda dalam masyarakat yang tidak hanya memproduksi produk-produk pertanian tapi juga produk-produk industri, dan terutama di mana ada perusahaan-perusahaan bisnis besar yang melibatkan penanaman modal skala besar dalam industri, pertambangan, dan perdagangan. Dalam masyarakat seperti itu, secara politis tidak ada yang lebih menguntungkan bagi pemerintah selain serangan terhadap hak milik pribadi karena tidak sulit untuk menghasut massa melawan pemilik tanah dan modal. Oleh karena itu, sejak zaman dulu para penguasa mutlak, penguasa

lalim dan tirani telah memiliki gagasan untuk bersekutu dengan “rakyat” melawan kelas pemilik kekayaan.

Kekaisaran Kedua Louis Napoleon bukanlah satu-satunya rezim yang didirikan atas prinsip Caesarisme. Penguasa negara bagian Hohenzollerns dari Prussia juga mengambil gagasan itu, yang diperkenalkan oleh Lasalle kepada politik Jerman selama pertikaian konstitusional Prussia, untuk merebut massa pekerja dalam peperangan melawan kaum borjuis liberal melalui kebijakan estatisme dan intervensionisme. Ini merupakan prinsip dasar “kerajaan sosial” yang dipuji setinggi langit oleh Schmoller dan alirannya. Namun, terlepas dari semua upaya untuk mengenyahkannya, hak milik pribadi tetap bertahan. Baik rasa permusuhan pemerintah, kampanye bernusuhan yang dikobarkan terhadap hak milik pribadi oleh para penulis dan moralis dan oleh gereja dan agama, kebencian massa—yang semuanya berakar dalam rasa iri yang muncul secara naluriah—tak mampu melenyapkannya.

Setiap upaya untuk mengganti hak milik pribadi dengan metode lain dalam mengatur produksi dan distribusi selalu dengan sendirinya terbukti tidak layak dan cenderung konyol. Orang terpaksa harus mengakui bahwa hak milik pribadi tidak tergantikan dan suka atau tidak mereka harus kembali pada hak milik pribadi. Namun, bahkan karena semua alasan di atas pun mereka tetap menolak untuk mengakui bahwa alasan kembalinya mereka kepada kepemilikan pribadi yang bebas atas alat-alat produksi ini terletak pada kenyataan bahwa sebuah sistem ekonomi yang menyediakan kebutuhan dan tujuan hidup manusia dalam masyarakat pada prinsipnya tidak dapat dilaksanakan kecuali atas dasar ini.

Orang tidak mampu mengambil keputusan untuk membebaskan diri mereka dari sebuah ideologi yang telah mengikat mereka, yaitu keyakinan bahwa hak milik pribadi adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa, setidaknya untuk saat ini, disingkirkan selama manusia belum berevolusi secara etis. Walau pemerintah—bertolak belakang dengan tujuan mereka, tentu saja, dan dengan kecenderungan yang melekat dari semua pusat kekuasaan yang terorganisir—telah

menyesuaikan diri dengan keberadaan hak milik pribadi, tetap terus memegang teguh—bukan hanya di permukaan, tapi juga dalam pemikiran mereka—ideologi yang memusuhi hak-hak kepemilikan. Sesungguhnya, mereka menganggap perlawanan terhadap hak milik pribadi sebuah prinsip yang benar dan setiap penyimpangan di pihak mereka semata-mata disebabkan kelemahan mereka sendiri atau karena mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok yang kuat.

#### **4. Sosialisme Sebuah Kemustahilan atau Sosialisme Mustahil Terlaksana**

Orang terbiasa menganggap sosialisme tidak mungkin terlaksana karena mereka berpikir manusia tidak memiliki kualitas moral yang dituntut oleh sebuah masyarakat sosialis. Ada kekhawatiran bahwa di bawah sosialisme kebanyakan orang tidak akan menunjukkan semangat yang sama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari mereka dalam tatanan sosial berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Dalam masyarakat kapitalis, setiap individu tahu bahwa ia sendiri yang akan menikmati hasil kerjanya, bahwa penghasilannya bertambah atau berkurang sesuai dengan besar-kecilnya produktivitas kerjanya. Dalam masyarakat sosialis, setiap individu berpikir tidak ada ketergantungan besar pada efisiensi kerjanya karena ia sudah mendapat porsi pekerjaan yang tetap dan hasil akhir keseluruhan tidak akan berkurang jauh akibat kemalasan satu orang. Seandainya, seperti yang ditakuti, keyakinan itu menjadi keyakinan umum, produktivitas tenaga kerja di komunitas sosialis menurun jauh.

Keberatan yang diajukan terhadap sosialisme benar-benar masuk akal tetapi tidak menyentuh inti permasalahan. Seandainya masyarakat sosialis dapat memastikan hasil kerja setiap individu dengan ketepatan yang sama dengan yang dilakukan pada setiap pekerja melalui perhitungan ekonomi sistem kapitalis, pelaksanaan

sosialisme tidak akan tergantung pada niat baik setiap individu. Dalam batas-batas tertentu masyarakat akan berada dalam posisi untuk menentukan jatah hasil total (*total output*) yang harus dialokasikan pada setiap pekerja berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap produksi. Apa yang membuat sosialisme tidak dapat terlaksana justru kenyataan bahwa perhitungan semacam ini tidak mungkin dalam sebuah masyarakat sosialis.

Dalam sistem kapitalis, perhitungan profitabilitas (keuntungan) merupakan panduan yang menunjukkan kepada individu apakah perusahaan tempat ia bekerja harus, dalam situasi tertentu, layak beroperasi dan apakah perusahaan itu dijalankan seefisien mungkin, yaitu berdasarkan biaya paling kecil dalam hal faktor-faktor produksi. Jika suatu usaha terbukti tidak menguntungkan, ini berarti bahwa bahan baku, barang setengah jadi, dan tenaga kerja yang dibutuhkannya dipekerjakan oleh perusahaan lain untuk tujuan yang, dari sudut pandang konsumen, lebih mendesak dan lebih penting, atau untuk tujuan sama, tetapi dengan cara lebih ekonomis (misalnya, dengan pengeluaran modal dan tenaga kerja lebih kecil). Ketika, misalnya, tenun tangan tidak lagi menguntungkan, ini menandakan bahwa modal dan tenaga kerja yang digunakan untuk menenun dengan mesin menghasilkan produksi (*output*) yang lebih besar dan oleh karena itu tidak ekonomis untuk berpegang pada metode produksi di mana modal dan tenaga kerja yang sama menghasilkan produksi yang lebih kecil.

Dalam merencanakan sebuah perusahaan baru, seseorang dapat menghitung terlebih dulu apakah perusahaan itu dapat dibuat menguntungkan dan dengan cara bagaimana. Jika, misalnya, seseorang berniat membangun jalur kereta api, ia bisa, dengan memperkirakan lalu lintas yang diharapkan dan kemampuan penggunaannya untuk membayar tarif angkutan, menghitung apakah modal dan tenaga kerja untuk usaha itu akan menguntungkan. Jika hasil perhitungannya menunjukkan bahwa proyek kereta api yang direncanakan itu tidak menjanjikan keuntungan, ini sama saja dengan mengatakan bahwa ada pekerjaan lain yang lebih mendesak untuk

modal dan tenaga kerja itu dibandingkan dengan yang diperlukan oleh proyek kereta api itu; dunia belum kaya cukup untuk membiayai pengeluaran semacam itu. Tetapi perhitungan nilai dan profitabilitas (keuntungan) sangat menentukan tidak saja saat muncul pertanyaan apakah suatu usaha akan dimulai; perhitungan itu mengontrol setiap langkah yang diambil pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.

Perhitungan ekonomi kapitalis, yang memungkinkan produksi rasional, didasarkan pada perhitungan moneter. Hanya karena harga semua barang dan jasa di pasar dapat dinyatakan dalam bentuk uang maka semua harga, sekali pun beragam, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan yang melibatkan unit-unit pengukuran yang homogen. Dalam masyarakat sosialis, di mana semua alat-alat produksi dimiliki oleh masyarakat, dan di mana, sebagai akibatnya, tidak ada pasar dan tidak ada pertukaran barang dan jasa produktif, tidak akan ada harga uang untuk barang-barang dan jasa dari tatanan yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya, sistem sosial seperti itu tidak memiliki sarana untuk manajemen rasional usaha-usaha bisnis, yaitu perhitungan ekonomi. Ini karena perhitungan ekonomi tidak dapat terjadi tanpa angka sebutan sama (*common denominator*) yang bisa dipakai untuk menjabarkan semua barang-barang dan jasa yang beragam (heterogen).

Mari kita bahas sebuah kasus yang cukup sederhana. Untuk pembangunan rel kereta api dari A ke B ada beberapa rute yang bisa dipertimbangkan. Mari kita andaikan ada gunung di antara A dan B. Rel kereta api dapat dibuat melewati gunung, mengelilingi gunung, atau menembus gunung melalui terowongan. Dalam masyarakat kapitalis, sangat mudah untuk menghitung jalur mana yang paling menguntungkan. Seseorang memastikan biaya yang diperlukan dalam membangun masing-masing dari tiga jalur itu dan perbedaan dalam biaya operasi yang harus dikeluarkan berdasarkanantisipasi lalu lintas di masing-masing jalur. Dari jumlah ini tidaklah sulit untuk menentukan jalur yang paling menguntungkan. Sebuah masyarakat sosialis tidak bisa membuat perhitungan semacam itu. Ini

karena tidak ada cara yang mungkin membuat standar pengukuran seragam untuk semua kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dipertimbangkan. Dihadapkan pada masalah biasa sehari-hari yang muncul dalam pengelolaan ekonomi, sebuah masyarakat sosialis tidak berdaya karena ia tidak memiliki cara untuk membuat catatan tentang pengeluaran dan pemasukannya.

Kemakmuran yang telah memungkinkan lebih banyak orang menghuni bumi saat ini dibandingkan dengan di era pra-kapitalis semata-mata karena metode rantai panjang produksi kapitalis yang memerlukan perhitungan moneter. Ini tidak mungkin di bawah sosialisme. Sia-sia para penulis sosialis bersusah payah membuktikan bagaimana orang bisa hidup tanpa perhitungan moneter dan harga. Semua upaya mereka dalam hal ini telah menemui kegagalan.

Dengan demikian kepemimpinan masyarakat sosialis akan dihadapkan pada masalah yang tidak mungkin mereka pecahkan. Mereka tidak akan mampu memutuskan yang mana dari berbagai cara yang tak terhitung banyaknya yang paling rasional. Kekacauan yang ditimbulkan dalam perekonomian akan memuncak dengan cepat dan tanpa bisa dibendung menjadi pemiskinan universal dan kemunduran ke kondisi primitif di mana nenek moyang kita pernah hidup.

Cita-cita sosialis, menurut kesimpulan logis, akan terwujud dalam tatanan sosial di mana semua alat produksi dimiliki oleh masyarakat. Produksi akan sepenuhnya berada di tangan pemerintah, pusat kekuasaan dalam masyarakat. Pemerintahlah yang akan menentukan apa yang harus diproduksi dan bagaimana, dan dengan cara apa barang siap konsumsi itu akan didistribusikan. Tak ada bedanya apakah kita membayangkan negara sosialis masa depan ini sebagai negara demokratis atau sebaliknya. Bahkan negara sosialis demokratis memiliki birokrasi yang terorganisir ketat di mana setiap orang, selain pejabat tertinggi, meskipun ia sangat mungkin, dalam kapasitasnya sebagai pemilih, berpartisipasi dalam cara tertentu dalam merumuskan petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh otoritas pusat, dalam kepatuhan kepada administrator mau



tidak mau harus melaksanakannya dengan patuh.

Negara sosialis semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan milik negara, tidak peduli seberapa besar skala mereka, seperti yang kita lihat berkembang dalam beberapa dekade terakhir di Eropa, terutama di Jerman dan Rusia. Perusahaan negara berkembang maju beriringan dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Mereka melakukan transaksi komersial dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikelola kaum kapitalis, dan menerima berbagai rangsangan dari perusahaan-perusahaan tersebut yang memperkuat operasi mereka. Perusahaan kereta api milik negara, misalnya, mendapat pasokan aparat dari pemasok (*supplier*), yaitu produsen lokomotif, gerbong, instalasi sinyal, dan peralatan lain, yang terbukti berhasil di tempat lain dalam pengoperasian kereta api swasta. Sejak saat itu mereka menerima insentif untuk memulai inovasi agar bisa mengikuti kemajuan di bidang teknologi dan dalam metode manajemen bisnis yang berlangsung di sekeliling mereka.

Telah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan-perusahaan nasional dan perusahaan milik pemerintah kota secara keseluruhan gagal, bahwa mereka mahal dan tidak efisien, dan harus disubsidi dengan dana pajak hanya agar bisa tetap beroperasi. Tentu saja, jika sebuah perusahaan publik memiliki posisi monopoli—seperti, misalnya, pada umumnya fasilitas transportasi kota dan pembangkit listrik—konsekuensi buruk inefisiensi tidak selalu terlihat dalam bentuk kegagalan keuangan. Dalam keadaan tertentu hal itu dapat ditutupi dengan memanfaatkan kesempatan yang terbuka bagi pemegang monopoli untuk menaikkan harga produk dan jasa cukup tinggi sehingga perusahaan-perusahaan itu, meskipun manajemen mereka tidak ekonomis, masih menguntungkan. Produktivitas yang lebih rendah dari metode produksi sosialis hanya memanifestasikan dirinya secara berbeda di sini dan tidak begitu mudah terlihat sebagai keadaan yang bertolak belakang; namun, pada hakekatnya masalahnya tetap sama.

Tapi tak satu pun percobaan dalam pengelolaan perusahaan

secara sosialis memberi kita alasan untuk menilai apa artinya seandainya cita-cita sosialis bagi kepemilikan bersama atas semua sarana produksi diwujudkan. Dalam masyarakat sosialis masa depan, yang tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kegiatan bebas perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi berdampingan dengan perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara, dewan perencanaan pusat sama sekali tidak memiliki alat pengukur yang tersedia untuk seluruh ekonomi oleh pasar dan harga pasar. Di pasar, di mana semua barang dan jasa diperdagangkan, rasio pertukaran, yang dinyatakan dengan harga uang, dapat ditentukan untuk semua yang dibeli dan dijual. Dalam suatu tatanan sosial yang didasarkan atas hak milik pribadi, dimungkinkan untuk memakai perhitungan moneter untuk memeriksa hasil semua kegiatan ekonomi. Produktivitas sosial setiap transaksi ekonomi dapat diuji oleh metode pembukuan dan akuntansi biaya. Masih harus dibuktikan bahwa perusahaan publik tidak mampu memanfaatkan akuntansi biaya dalam cara yang sama seperti perusahaan swasta. Namun, perhitungan moneter menyediakan landasan bagi perusahaan pemerintah dan perusahaan publik (milik bersama) untuk melakukan penilaian tentang keberhasilan atau kegagalan manajemen mereka. Dalam sistem ekonomi yang sepenuhnya sosialis, ini sangat mustahil, karena dengan tidak adanya kepemilikan pribadi atas alat produksi, tidak akan ada pertukaran barang modal di pasar dan akibatnya tidak ada harga uang atau perhitungan moneter. Manajemen umum masyarakat sosialis murni tidak memiliki sarana untuk menyederhanakan menjadi angka sebutan sama (*common denominator*) biaya produksi semua komoditas heterogen yang direncanakan untuk diproduksi.

Hal ini juga tidak bisa dicapai dengan menetapkan pengeluaran dalam bentuk komoditas terhadap tabungan dalam bentuk komoditas. Seseorang tidak bisa menghitung apakah tidak mungkin menyederhanakan jam kerja berbagai tingkatan, besi, batu bara, berbagai jenis bahan-bahan bangunan, mesin-mesin, dan semua hal yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan manajemen berbagai

perusahaan berbeda ke dalam sebuah media ekspresi. Perhitungan hanya mungkin ketika seseorang dapat menyederhanakan semua barang-barang yang dipertimbangkan ke dalam istilah-istilah moneter. Tentu saja, perhitungan moneter tidak sempurna dan memiliki kekurangan, tapi tidak ada yang lebih baik yang dapat dipakai sebagai gantinya.

Perhitungan moneter memadai untuk alasan praktis selama sistem moneter itu masuk akal. Jika kita menolak perhitungan moneter, semua perhitungan ekonomi menjadi benar-benar mustahil.

Ini merupakan keberatan yang menentukan yang diajukan ilmu ekonomi terhadap kemungkinan sebuah masyarakat sosialis. Ia harus melupakan pembagian kerja intelektual yang dibangun di atas kerjasama semua pengusaha, pemilik tanah, dan pekerja sebagai produsen dan konsumen dalam pembentukan harga pasar. Tapi tanpa itu, rasionalitas, yaitu kemungkinan perhitungan ekonomi, benar-benar mustahil.

## 5. Intervensionisme

Cita-cita kaum sosialis semakin ditinggalkan pengikutnya. Merembaknya berbagai penelitian ekonomi dan sosiologi tentang berbagai permasalahan sosialisme yang memperlihatkan bahwa sosialisme tidak mungkin diterapkan bukannya tidak berdampak, dan kegagalan eksperimen kaum sosialis di mana-mana menimbulkan kebingungan bahkan di antara para pendukungnya yang paling antusias sekali pun. Perlahan-lahan orang mulai menyadari kembali bahwa masyarakat tidak dapat berjalan tanpa hak milik pribadi. Namun kritik penuh permusuhan terhadap sistem kepemilikan pribadi atas sarana produksi selama beberapa dasawarsa telah menyisakan prasangka kuat terhadap sistem kapitalis, yang, terlepas dari pengetahuan mereka tentang kelemahan dan ketidakpraktisan sosialisme, membuat orang tetap tidak mampu mengubah pikiran mereka dan mengakui secara terbuka bahwa mereka harus kembali ke sudut pandang liberal tentang kekayaan.

Sudah barang tentu diakui bahwa sosialisme—kepemilikan

bersama atas sarana produksi—sama sekali, atau setidaknya untuk saat ini, tidak dapat diterapkan. Namun, di sisi lain, ditegaskan bahwa kepemilikan pribadi atas sarana produksi yang tidak dibatasi juga merupakan kejahatan. Itu sebabnya orang ingin menciptakan cara ketiga, sebuah bentuk masyarakat yang berdiri di tengah, di antara kepemilikan pribadi atas sarana produksi di satu sisi, dan kepemilikan bersama atas sarana produksi di sisi lain. Hak milik pribadi dibolehkan, namun cara para pengusaha, pemilik modal, dan pemilik tanah memanfaatkan sarana produksi akan diatur, diarahkan, dan dikendalikan oleh ketetapan dan larangan penguasa. Dengan cara ini, seseorang membentuk gambaran konseptual tentang pasar yang diatur, tentang kapitalisme yang dibatasi oleh peraturan penguasa, tentang hak milik pribadi yang telah dilucuti dari sifat-sifatnya yang ditengarai membahayakan, melalui campur tangan penguasa.

Cara terbaik untuk memperoleh wawasan mengenai makna dan sifat sistem ini adalah dengan menyimak beberapa contoh akibat campur tangan pemerintah. Tindakan campur tangan penting yang harus kita hadapi bertujuan menetapkan harga barang dan jasa pada tingkat yang berbeda dari harga yang akan ditetapkan oleh pasar bebas.

Dalam hal harga ditentukan oleh pasar bebas, atau ditentukan tanpa campur tangan pemerintah, biaya produksi ditutup oleh pendapatan. Jika pemerintah menetapkan harga yang lebih rendah, pendapatan akan lebih kecil dari biaya. Oleh karena itu, pedagang dan produsen akan menahan barang dagangan mereka dengan harapan ada waktu yang lebih menguntungkan, mungkin dengan harapan bahwa susunan pemerintah akan segera berubah, kecuali jika menyimpan barang dapat mengakibatkan nilai mereka anjlok. Jika penguasa tidak ingin barang tersebut menghilang dari pasar sebagai akibat campur tangan mereka, mereka tidak dapat hanya membatasi diri dengan hanya menetapkan harga; pada saat bersamaan mereka harus menetapkan bahwa semua persediaan yang ada harus dijual dengan harga yang telah ditentukan.

Namun ini pun tidak cukup. Bila harga ditetapkan oleh pasar bebas, akan ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Karena harga ditetapkan oleh pemerintah, permintaan meningkat, sementara persediaan tidak berubah. Persediaan yang ada tidak memadai untuk memuaskan semua orang yang bersedia membayar harga yang ditetapkan. Sebagian permintaan tidak akan terpenuhi. Mekanisme pasar, yang cenderung menyeimbangkan penawaran dan permintaan melalui fluktuasi harga, berhenti bekerja. Orang yang bersedia membayar harga yang ditetapkan penguasa harus meninggalkan pasar dengan tangan kosong. Mereka yang telah antri lebih dulu, atau mereka yang berada dalam posisi untuk memanfaatkan hubungan pribadi dengan penjual, menguasai seluruh persediaan; yang lain harus pergi meski permintaan mereka tidak terpenuhi. Jika pemerintah ingin menghindari akibat dari campur tangannya ini, yang bertolak belakang dengan tujuan tindakannya, pemerintah harus menerapkan penjatahan di samping mengontrol harga dan mewajibkan penjualan: peraturan pemerintah harus menentukan berapa banyak barang dagangan yang disediakan bagi setiap pemohon pada harga yang telah ditetapkan.

Namun, saat persediaan yang ada di bawah campur tangan pemerintah habis, masalah yang jauh lebih sulit akan muncul. Karena produksi tidak lagi menguntungkan jika barang dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, produksi akan dikurangi atau dihentikan seluruhnya. Jika pemerintah ingin agar produksi terus berjalan, pemerintah harus memaksa produsen untuk memproduksi, dan, untuk tujuan ini, pemerintah juga harus menetapkan harga bahan baku dan barang setengah jadi dan gaji tenaga kerja. Peraturan pemerintah untuk mengatur semua ini, bagaimanapun juga, tidak dapat dibatasi hanya untuk salah satu atau beberapa cabang produksi yang ingin diatur oleh penguasa, karena mereka menganggap bahwa produk mereka sangat penting. Aturan itu harus mencakup seluruh cabang produksi. Mereka harus mengatur harga seluruh jenis barang dan gaji. Singkatnya, mereka harus mengendalikan tindakan pengusaha, pemilik modal, pemilik tanah,

dan pekerja.

Jika beberapa cabang produksi dibiarkan bebas, modal dan tenaga kerja akan mengalir ke cabang-cabang produksi tersebut, dan pemerintah akan menemui kegagalan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan campur tangannya. Namun, sasaran penguasa adalah produksi berlimpah di cabang industri yang, karena produknya dianggap penting, dijadikan sasaran peraturan mereka. Ini sama sekali bertentangan dengan rancangan mereka: justru sebagai akibat campur tangan mereka cabang produksi ini seharusnya diabaikan.

Oleh sebab itu, jelas bahwa upaya pemerintah untuk mencampuri pengoperasian sistem perekonomian yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas sarana produksi gagal mencapai tujuan yang diharapkan oleh para perancangannya. Dari sudut pandang para perancangannya hal itu tidak hanya sia-sia, namun benar-benar bertentangan dengan tujuannya, karena upaya itu justru memperbesar “kejahatan” yang seharusnya mereka perangi. Sebelum aturan tentang kontrol harga ditetapkan, komoditas itu dianggap terlalu mahal oleh pemerintah; sekarang seluruh komoditas itu menghilang dari pasar. Ini, bagaimanapun, bukan hasil yang diharapkan oleh pemerintah, yang ingin membuat komoditas terjangkau oleh konsumen dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, dari sudut pandang pemerintah, ketiadaan barang, upaya sia-sia untuk mengamatkannya, lebih buruk. Dalam pengertian ini, seseorang dapat mengatakan bahwa campur tangan pemerintah sia-sia dan bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan bahwa sistem kebijakan ekonomi yang berusaha dijalankan melalui tindakan campur tangan seperti itu tidak dapat diterapkan dan mustahil serta bertentangan dengan logika ekonomi.

Jika pemerintah tidak segera memperbaiki hal ini dengan menghentikan campur tangannya, yaitu dengan menghapuskan ketentuan tentang pengendalian harga, maka pemerintah harus melanjutkan langkah pertama dengan langkah-langkah lain. Selain larangan terhadap permintaan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah

ditetapkan, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah yang memaksa penjualan seluruh persediaan yang ada melalui sistem penjatahan, namun juga menetapkan batas tertinggi harga barang-barang dari kelas yang lebih tinggi, pengendalian gaji, dan, akhirnya, wajib kerja untuk pengusaha dan pekerja. Dan peraturan ini tidak dapat dibatasi pada satu atau beberapa cabang produksi, namun harus mencakup semua cabang. Tidak ada pilihan lain selain ini: menghindari campur tangan dalam permainan pasar bebas, atau mendelegasikan seluruh pengelolaan produksi dan distribusi kepada pemerintah. Kapitalisme atau sosialisme: tidak ada jalan tengah.

Mekanisme rangkaian kejadian yang baru saja digambarkan sudah dikenal baik oleh setiap orang yang menyaksikan upaya pemerintah mematok harga di saat perang dan selama periode inflasi. Setiap orang tahu bahwa kontrol harga oleh pemerintah tidak menghasilkan apa pun selain menghilangnya barang-barang tersebut dari pasar. Di mana pun pemerintah berusaha menetapkan harga, hasilnya selalu sama. Misalnya, saat pemerintah menetapkan batas tertinggi sewa rumah, maka kekurangan rumah akan segera muncul. Di Austria, Partai Sosial Demokrat menghapus sewa rumah. Akibatnya, di Wina, misalnya, meskipun jumlah penduduk telah menurun secara drastis sejak awal Perang Dunia dan ribuan rumah baru telah dibangun oleh pemerintah kota, ribuan orang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal.

Mari kita ambil contoh lain: penetapan tingkat upah minimum. Ketika hubungan antara majikan dan karyawan berjalan tanpa gangguan undang-undang atau langkah-langkah keras serikat buruh, upah yang dibayarkan oleh majikan untuk setiap jenis kerja persis sama dengan nilai yang ditambahkan ke bahan-bahan produksi. Upah tidak bisa naik lebih tinggi karena, jika itu terjadi, majikan tidak mendapat keuntungan dan dengan demikian akan terpaksa menghentikan jajaran produksi yang tidak menghasilkan. Namun, upah juga tidak boleh turun lebih rendah lagi, karena jika demikian karyawan akan pindah ke cabang industri lain di mana mereka akan dihargai lebih baik, sehingga majikan terpaksa menghentikan

produksi karena kekurangan tenaga kerja.

Oleh karena itu, dalam perekonomian selalu ada tingkat upah yang membuat semua pekerja menemukan pekerjaan, dan setiap pengusaha yang ingin menjalankan perusahaan yang tetap menguntungkan dengan tingkat upah itu menemukan pekerja. Tingkat upah ini lazim disebut oleh para pakar ekonomi sebagai upah “statis” atau “alami”. Upah meningkat bila jumlah pekerja dikurangi sementara hal-hal lain tidak berubah; upah menurun jika modal yang tersedia bagi setiap pekerjaan di dalam produksi itu mengalami penyusutan sementara hal-hal lain tetap sama. Bagaimana pun, seseorang harus, pada saat bersamaan, memperhatikan bahwa tidak terlalu tepat untuk berbicara hanya mengenai “upah” dan “tenaga kerja”. Jasa tenaga kerja beragam dalam hal kualitas dan jumlah (dihitung per satuan waktu), begitu juga dengan upah tenaga kerja.

Jika perekonomian tidak berubah dari keadaan statis, maka dalam bursa tenaga kerja yang bebas dari campur tangan pemerintah atau oleh tekanan serikat pekerja, tidak akan ada pengangguran. Namun keadaan statis masyarakat hanyalah khayalan teori ekonomi, tujuan intelektual yang diperlukan pemikiran kita, yang memungkinkan kita, kebalikannya, untuk membentuk gambaran jelas mengenai proses yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian yang berlangsung di sekitar kita dan di mana kita tinggal. Hidup—untungnya, cepat-cepat kita tambahkan—tidak pernah berhenti.

Perekonomian tidak pernah berhenti, namun selalu berubah, bergerak, melakukan inovasi, tak henti mendorong kemunculan hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, selalu ada cabang produksi yang ditutup atau dikurangi karena permintaan terhadap produk mereka jatuh, dan cabang produksi lain dikembangkan atau bahkan dimulai. Jika kita hanya berpikir mengenai beberapa dekade terakhir, kita dapat langsung menyebutkan sejumlah besar industri-industri baru yang bermunculan: misalnya, industri mobil, industri pesawat terbang, industri film, industri rayon, industri barang-barang kalengan, dan industri siaran radio. Dewasa ini cabang-cabang produksi ini mempekerjakan jutaan



pekerja, hanya beberapa dari mereka berasal dari penambahan jumlah penduduk.

Dua ratus tahun yang lalu atau jauh sebelum itu, ketika seorang anak laki-laki mempelajari sebuah keahlian, belajar kerajinan tangan, ia bisa berharap untuk memanfaatkan keahliannya seumur hidupnya tanpa rasa takut sedikit pun akan dirugikan oleh sikap konservatifnya. Situasi sudah berubah saat ini. Para pekerja juga harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang berubah, menambah pengetahuannya, atau mulai belajar lagi. Ia harus meninggalkan pekerjaan yang tidak membutuhkan jumlah pekerja yang sama seperti sebelumnya dan memasuki pekerjaan yang baru saja diciptakan atau yang membutuhkan lebih banyak pekerja dari sebelumnya. Namun, seandainya ia tetap dalam pekerjaan lamanya, ia harus belajar teknik-teknik baru bila keadaan menuntut.

Semua hal ini mempengaruhi pekerja dalam bentuk perubahan dalam tingkat upah. Jika cabang bisnis tertentu mempekerjakan terlalu banyak pekerja, cabang itu melepaskan beberapa pekerja, dan para pekerja yang dilepaskan itu tidak akan mudah menemukan pekerjaan baru dalam cabang bisnis yang sama. Tekanan terhadap pasar kerja yang dilakukan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan melemahkan upah dalam cabang produksi ini. Hal ini, pada gilirannya, mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan di cabang produksi yang bermaksud menarik pekerja baru dan oleh karena itu siap untuk membayar upah lebih tinggi.

Dari sini, jelaslah apa yang harus dilakukan untuk memuaskan hasrat para pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan untuk mendapatkan upah tinggi. Secara umum upah tidak bisa didorong ke tingkat yang biasanya mereka capai dalam pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah mau pun tekanan lembaga lain tanpa menciptakan efek samping tertentu yang pasti tidak diinginkan para pekerja. Upah dapat didorong naik dalam satu industri atau negara jika perpindahan pekerja dari industri lain atau migrasi pekerja dari negara lain dilarang. Kenaikan upah seperti itu dilakukan dengan mengorbankan pekerja yang dilarang masuk. Upah mereka sekarang

lebih rendah dari yang bisa mereka terima seandainya kebebasan mereka berpindah tempat tidak dihalangi.

Dengan demikian, peningkatan upah di satu kelompok tercapai dengan mengorbankan kelompok lain. Kebijakan menghalangi kebebasan bergerak para pekerja hanya menguntungkan para pekerja di negara dan industri yang menderita kekurangan tenaga kerja. Dalam sebuah industri atau negara yang tidak memiliki masalah ini, satu-satunya hal yang dapat meningkatkan upah: kenaikan produktivitas tenaga kerja secara umum, baik karena peningkatan ketersediaan modal atau karena peningkatan dalam proses teknologi produksi.

Namun, jika pemerintah, melalui undang-undang, menetapkan upah minimum di atas upah statis atau upah wajar, maka para majikan tidak lagi berada dalam posisi untuk tetap berhasil dalam melanjutkan usaha-usaha yang menguntungkan saat upah lebih rendah. Akibatnya, mereka akan mengurangi produksi dan memecat pekerja. Kenaikan upah yang tidak wajar, yaitu yang dibebankan kepada pasar dari luar, akan menyebabkan meluasnya pengangguran. Dewasa ini tentu saja tidak ada upaya untuk menetapkan tingkat upah minimum dalam skala besar melalui undang-undang. Namun, posisi yang dimiliki serikat buruh memungkinkan mereka mengatur upah minimum sekali pun tidak ada undang-undang positif yang mendukungnya.

Kenyataan bahwa para pekerja membentuk serikat yang bertujuan melakukan tawar-menawar dengan majikan, tidak dalam dan untuk dirinya sendiri, perlu memancing kekacauan dalam operasi pasar. Bahkan kenyataan bahwa mereka berhasil merebut hak untuk membatalkan, tanpa pemberitahuan terlebih dulu, kontrak yang mereka tanda tangani dan hak untuk meletakkan peralatan mereka (berhenti bekerja), tidak akan secara otomatis menciptakan kekacauan lebih lanjut dalam pasar tenaga kerja. Yang menciptakan kondisi baru dalam pasar tenaga kerja adalah unsur paksaan dalam pemogokan dan kewajiban menjadi anggota serikat yang hingga saat ini berlaku di sebagian besar negara industri di Eropa.

Karena pekerja yang bersatu dalam serikat menolak orang-orang yang bukan anggota serikat akses ke pekerjaan, dan menggunakan kekerasan secara terbuka dalam pemogokan untuk mencegah pekerja lain mengambil posisi mereka selama pemogokan berlangsung, tuntutan upah yang diajukan serikat kepada majikan memiliki kekuatan yang persis sama dengan peraturan pemerintah yang menetapkan tingkat upah minimum. Para majikan harus, jika ia berharap untuk tidak menutup seluruh usahanya, memenuhi tuntutan serikat itu. Ia harus membayar upah yang jumlahnya membuat volume produksi harus diturunkan, karena barang yang membutuhkan biaya besar untuk diproduksi tidak akan menemukan pasar sebesar pasar untuk barang yang diproduksi dengan biaya lebih rendah. Jadi, upah lebih tinggi yang dituntut serikat buruh menyebabkan pengangguran.

Pengangguran yang bersumber dari sini berbeda dalam lingkup dan lamanya dari pengangguran yang timbul akibat perubahan terus menerus dalam jenis dan kualitas tenaga kerja yang dituntut pasar. Kalau pengangguran disebabkan semata-mata oleh kemajuan terus menerus dalam perkembangan industri, masalah itu tidak akan berkembang semakin besar atau berlangsung lama. Pekerja yang tidak lagi dipekerjakan dalam satu cabang produksi segera menemukan pekerjaan baru di cabang produksi lain yang sedang berkembang atau baru dibuka. Ketika pekerja menikmati kebebasan bergerak dan berpindah dari satu industri ke industri lain tanpa hambatan hukum dan hambatan-hambatan lain yang serupa, penyesuaian terhadap kondisi baru akan berlangsung tanpa banyak kesulitan dan dengan cukup cepat. Untuk pekerja lain, pertukaran tenaga kerja akan membantu mengurangi pengangguran jenis ini.

Namun pengangguran yang disebabkan campur tangan lembaga-lembaga yang melakukan penekanan terhadap operasi pasar tenaga kerja bukanlah peristiwa sementara yang berulang kali muncul dan menghilang. Pengangguran tak dapat dihilangkan selama penyebab yang menimbulkannya terus berlangsung, yaitu, selama undang-undang atau tidak kekerasan oleh serikat pekerja mencegah

penurunan upah, oleh tekanan para pengangguran yang mencari pekerjaan, ke tingkat yang dapat mereka capai seandainya tidak ada campur tangan pemerintah atau serikat buruh, yaitu tingkat yang dapat dicapai oleh semua orang yang benar-benar ingin bekerja.

Dukungan pemerintah atau serikat pekerja kepada para pengangguran hanya memperburuk keadaan. Jika masalahnya hanyalah pengangguran yang timbul akibat perubahan dinamis dalam perekonomian, maka tunjangan bagi para pengangguran hanya menunda penyesuaian pekerja ke keadaan baru. Para pekerja yang menganggur yang menerima bantuan tidak merasa perlu mencari pekerjaan baru jika ia tidak mendapatkan posisi lamanya; setidaknya, ia membiarkan lebih banyak waktu berlalu sebelum ia memutuskan untuk pindah ke pekerjaan baru atau tempat baru atau sebelum ia menurunkan tuntutan atas tingkat upahnya ke tingkat yang memungkinkannya menemukan pekerjaan. Jika tunjangan pengangguran tidak ditetapkan terlalu rendah, seseorang dapat mengatakan bahwa selama mereka mendapat tunjangan itu, pengangguran tidak akan pernah hilang.

Namun, seandainya pengangguran disebabkan kenaikan tingkat upah semu sebagai akibat campur tangan langsung pemerintah atau toleransi pemerintah terhadap tindakan-tindakan pemaksaan serikat pekerja, maka pertanyaan satu-satunya adalah siapa yang akan menanggung biaya yang ditimbulkan, majikan atau pekerja. Negara, pemerintah, dan masyarakat tidak pernah menanggung beban itu; mereka membebaskan biaya itu baik kepada majikan atau pekerja, atau kepada keduanya. Jika beban itu jatuh kepada pekerja, maka mereka kehilangan seluruh atau sebagian dari hasil kenaikan upah semu yang mereka dapatkan; mereka bahkan bisa dipaksa menanggung lebih banyak lagi biaya-biaya ini dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari kenaikan upah semu mereka.

Majikan dapat dibebani dengan tunjangan pengangguran sampai batas tertentu melalui keharusan membayar pajak yang sesuai dengan jumlah total upah yang ia bayar. Dalam kasus ini, asuransi pengangguran, dengan menaikkan biaya tenaga kerja,

memiliki dampak sama dengan peningkatan upah yang jauh di atas tingkat statis; keuntungan pemakaian tenaga kerja dikurangi, dan secara bersamaan jumlah pekerja yang dapat memberikan keuntungan menurun. Jadi, pengangguran meluas. Majikan juga dapat dikenakan biaya tunjangan pengangguran melalui pajak keuntungan atau modal mereka, tanpa memperhitungkan jumlah pekerja yang mereka pekerjakan. Namun, ini juga cenderung memperluas pengangguran. Karena ketika modal digunakan atau ketika pembentukan modal baru setidaknya melambat, kondisi yang menciptakan pekerjaan bagi para pekerja menjadi, hal-hal lain tetap sama, kurang menguntungkan.

Sia-sia berupaya menghapus pengangguran melalui program pekerjaan umum yang sebenarnya tidak akan pernah dibuat. Sumber daya yang dibutuhkan untuk rencana seperti itu harus diperoleh dari pajak atau pinjaman yang seharusnya digunakan untuk tujuan lain. Dengan cara ini, pengangguran di satu industri dapat dikurangi hanya sebesar kenaikan jumlah pengangguran di industri lain. Dari sisi mana pun intervensionisme dilihat, jelas bahwa apa yang dihasilkan sistem itu bukan yang diharapkan para perancang dan penganjurinya, dan bahwa, bahkan dari kaca mata mereka sekali pun, sistem ini pasti terlihat seperti sebuah sistem yang tidak masuk akal, merusak diri sendiri, merupakan kebijakan yang konyol (*absurd*).

## 6. Kapitalisme:

### Satu-satunya Sistem Organisasi Sosial yang Mungkin

Setiap telaah terhadap berbagai kemungkinan yang diperkirakan dapat mengatur masyarakat atas dasar pembagian kerja selalu membuahkan hasil yang sama: hanya ada pilihan antara kepemilikan bersama dan kepemilikan pribadi atas sarana produksi. Semua bentuk organisasi sosial di antara keduanya tidak membawa hasil dan dalam prakteknya terbukti gagal total. Jika seseorang menyadari lebih lanjut bahwa sosialisme juga tidak mungkin terlaksana, maka

mau tidak mau ia harus mengakui bahwa kapitalisme adalah satu-satunya sistem organisasi sosial yang mungkin yang berdasarkan atas pembagian kerja.

Hasil penelaahan teoritis ini tidak mengejutkan bagi para sejarawan atau filsuf sejarah. Jika kapitalisme berhasil bertahan sekali pun ia selalu menghadapi sikap bermusuhan baik dari pemerintah mau pun rakyat, jika kapitalisme tidak diwajibkan membuka jalan bagi bentuk-bentuk lain kerjasama sosial yang mendapat simpati lebih besar dari para teoretikus dan dari para industrialis, hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak ada sistem organisasi sosial lain yang mungkin.

Selain itu tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang mengapa mustahil bagi kita untuk kembali ke bentuk organisasi sosial dan ekonomi dengan karakteristik Abad Pertengahan. Di seluruh wilayah yang sekarang dihuni negara-negara Eropa modern, sistem ekonomi Abad Pertengahan hanya mampu mendukung sebagian kecil penduduk yang saat ini menghuni wilayah itu. Sistem itu juga tidak menyediakan barang-barang kebutuhan manusia sebanyak yang disediakan oleh sistem produksi kapitalis saat ini. Kembali ke Abad Pertengahan tidaklah mungkin jika seseorang tidak siap untuk mengurangi jumlah penduduk sebanyak sepuluh atau duapuluh kali dari jumlah penduduk sekarang dan, lebih jauh lagi, memaksa setiap orang untuk merasa puas dengan jumlah yang begitu kecil yang tak terbayangkan oleh manusia modern.

Semua penulis yang menyuarakan kembalinya Abad Pertengahan, atau, dalam istilah mereka, Abad Pertengahan yang “baru”, sebagai satu-satunya cita-cita sosial yang layak diperjuangkan mencela era kapitalis terutama karena sikap dan mentalitas materialistiknya. Namun mereka sendiri memiliki komitmen yang jauh lebih besar terhadap pandangan materialistik daripada yang mereka yakini. Mengira, seperti yang dilakukan para penulis ini, bahwa setelah kembali bentuk-bentuk organisasi ekonomi dan politik dengan ciri-ciri Abad Pertengahan, masyarakat masih akan mampu mempertahankan semua kemajuan teknologi dalam produksi yang

diciptakan oleh kapitalisme dan dengan demikian menjaga tingkat produksi yang tinggi dari kerja manusia yang telah dicapai di era kapitalis, tidak lebih dari materialisme dalam bentuk yang paling kasar. Produktivitas yang didasarkan atas metode produksi kapitalis adalah buah mentalitas kapitalis dan pendekatan kapitalis terhadap manusia dan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia; produktivitas merupakan hasil teknologi modern hanya sejauh perkembangan teknologi merupakan buah mentalitas kapitalis.

Tidak ada yang lebih tidak masuk akal dari prinsip dasar penafsiran sejarah materialis Marx: “kincir tangan membentuk masyarakat feodal; pabrik uap menciptakan masyarakat kapitalis.” Masyarakat kapitalislah yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk melahirkan konsep asli pabrik uap agar bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Kapitalismelah yang menciptakan teknologi itu, bukan sebaliknya. Namun, yang tidak kalah mustahil ialah pendapat bahwa peralatan teknologi dan material tambahan dalam perekonomian kita dapat dipertahankan bahkan ketika landasan intelektual yang mendasarinya dihancurkan. Kegiatan ekonomi tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang masuk akal begitu mentalitas yang berlaku kembali pada tradisionalisme dan keyakinan kepada penguasa. Pengusaha sebagai agen katalis perekonomian kapitalis dan teknologi modern tak mungkin ada dalam lingkungan di mana semua orang hanya memiliki hasrat untuk kehidupan yang kontemplatif.

Jika seseorang menganggap mustahil sistem selain sistem yang berdasarkan atas kepemilikan pribadi atas sarana produksi, maka kepemilikan pribadi harus dipertahankan sebagai dasar kerjasama dan asosiasi sosial dan setiap usaha untuk melenyapkannya harus dilawan habis-habisan. Untuk alasan inilah liberalisme membela kepemilikan pribadi terhadap setiap upaya untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, ketika orang-orang menyebut kaum liberal sebagai pembela kepemilikan pribadi, mereka dibenarkan sepenuhnya, karena kata “*apologist*” (pembela) yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti yang sama dengan “*defender*”. Tentu saja lebih baik

jika penggunaan kata asing dihindari dan jika orang merasa puas menggunakan bahasa Inggris biasa untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena untuk banyak orang, ungkapan “*apology*” (maaf) dan “*apologist*” (pembela) memberi konotasi bahwa yang dibela tidak adil.

Bagaimana pun, jauh lebih penting dari penolakan terhadap konotasi merendahkan yang mungkin ada di balik penggunaan ungkapan ini adalah pandangan bahwa hak milik pribadi tidak membutuhkan pembelaan, pembenaran, dukungan atau penjelasan. Kelangsungan masyarakat tergantung pada hak milik pribadi dan karena manusia membutuhkan masyarakat mereka harus mempertahankan hak milik pribadi sekuat tenaga agar mereka tidak merugikan kepentingan mereka sendiri serta kepentingan orang lain. Ini karena masyarakat hanya dapat berjalan atas dasar hak milik pribadi. Siapa pun yang mendukung hak milik pribadi mendukung pelestarian ikatan sosial yang menyatukan umat manusia, pelestarian kebudayaan dan peradaban. Ia adalah pembela dan pejuang masyarakat, kebudayaan dan peradaban, dan karena ia menginginkan hal-hal itu sebagai tujuan akhir, ia juga harus menginginkan dan membela satu-satunya sarana yang membawanya ke sana, yaitu hak milik pribadi.

Menganjurkan kepemilikan pribadi atas sarana produksi tidak sama dengan menyatakan bahwa sistem sosial kapitalis yang didasarkan atas hak milik pribadi adalah sistem yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan dalam sistem kapitalis, sesuatu atau hal lain, banyak hal atau bahkan segala hal, mungkin tidak benar-benar sesuai dengan keinginan setiap individu. Namun inilah satu-satunya sistem yang mungkin. Seseorang boleh berupaya mengubah satu atau dua hal selama tidak mempengaruhi esensi dan dasar dari seluruh tatanan sosial, yaitu hak milik pribadi. Namun secara umum kita harus menyesuaikan diri kita dengan sistem ini karena sama sekali tidak ada sistem lain yang mungkin.

Di alam pun ada banyak hal yang tidak kita sukai. Namun kita tidak bisa mengubah sifat-sifat dasar peristiwa-peristiwa alam.



Jika, misalnya, seseorang berpendapat—dan ada yang berpendapat sama—bahwa cara manusia menelan makanannya, mencernanya, dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang menjijikan, tak seorang pun dapat memperdebatkan hal itu dengannya. Harus ada seseorang yang mengatakan kepadanya: Hanya ada cara ini, atau kelaparan. Tidak ada cara ketiga. Hal yang sama berlaku untuk hak milik: hanya ada satu pilihan—kepemilikan pribadi atas sarana produksi atau kelaparan dan penderitaan bagi semua orang. Para penentang liberalisme biasa menyebut doktrin ekonomi liberalisme sebagai “optimistis.” Mereka menggunakan julukan ini dengan tujuan mencela atau mengolok-olok cara berpikir kaum liberal.

Jika dengan menyebut doktrin liberal “optimistis” seseorang mengartikan bahwa liberalisme menganggap dunia kapitalis sebagai yang terbaik di seluruh dunia, maka ini tidak lain dari omong kosong belaka. Bagi ideologi yang, seperti liberalisme, didasarkan atas landasan ilmiah, pertanyaan seperti apakah sistem kapitalis baik atau buruk, apakah ada sistem yang lebih baik, dan apakah ideologi itu harus ditolak karena alasan filosofis atau metafisis, benar-benar tidak relevan. Liberalisme berasal dari ilmu murni ekonomi dan sosiologi yang tidak membuat penilaian apa pun tentang nilai-nilai dalam lingkup mereka sendiri dan tidak mengatakan apa pun tentang apa yang seharusnya terjadi atau apa yang baik dan apa yang buruk, namun, sebaliknya, hanya memastikan apa dan bagaimana sesuatu terjadi. Ketika ilmu pengetahuan ini menunjukkan kepada kita bahwa dari semua alternatif yang dapat dipikirkan untuk mengatur masyarakat, hanya satu, yaitu sistem yang berdasarkan atas kepemilikan pribadi atas sarana produksi, yang bisa dilaksanakan karena semua sistem lain yang terpikir tidak mungkin dipraktekkan, tidak ada yang bisa membenarkan sebutan “optimistis” ini. Bahwa kapitalisme dapat dipraktekkan dan dilaksanakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan optimisme.

Sudah tentu para penentang liberalisme berpendapat bahwa masyarakat ini sangat buruk. Sejauh pernyataan ini bersifat

penilaian, tentu saja pendapat itu tidak terbuka untuk diskusi yang melampaui pendapat yang sangat subyektif dan karena itu tidak ilmiah. Bagaimana pun, sejauh hal itu didasarkan atas pemahaman yang salah tentang apa yang berlangsung dalam sistem kapitalis, ilmu ekonomi dan sosiologi dapat memperbaikinya. Ini juga bukan optimisme. Terlepas dari semua hal, bahkan ditemukannya berbagai kekurangan dalam sistem kapitalis tidak akan berdampak sedikit pun terhadap masalah kebijakan sosial selama hal itu belum dibuktikan, bukan karena sistem sosial yang berbeda akan lebih baik, namun karena sistem itu bisa dilaksanakan. Namun hal itu belum dibuktikan. Ilmu pengetahuan berhasil membuktikan bahwa semua sistem organisasi sosial yang dapat dibayangkan sebagai pengganti sistem kapitalis adalah sistem yang kontradiktif dan tidak berguna sehingga sistem itu tidak bisa memberikan hasil yang diinginkan para pendukungnya.

Bahwa dalam kaitan ini seseorang hampir tidak dibenarkan untuk berbicara tentang “optimisme” dan “pesimisme”, dan seberapa jauh penggambaran karakter liberalisme sebagai “optimistis” ditujukan untuk membungkusnya dengan aura tidak bersahabat dengan memasukkan pertimbangan tentang hal-hal di luar ilmu pengetahuan yang bersifat emosional, ditunjukkan dengan sangat baik oleh kenyataan bahwa seseorang dapat, dengan adil, menyebut orang-orang itu “orang-orang optimis” yang memiliki keyakinan bahwa pembangunan persemakmuran sosialis atau intervensionis dapat dilaksanakan.

Sebagian besar penulis yang menyibukkan diri mereka dengan masalah-masalah ekonomi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menimpakan penyalahgunaan yang tidak masuk akal dan kekanak-kanakan pada sistem kapitalis dan memuji dengan penuh semangat baik sosialisme maupun intervensionisme, atau bahkan sosialisme agraris dan sindikalisme, sebagai institusi yang ulung. Di sisi lain, ada beberapa penulis yang, bahkan dalam istilah yang jauh lebih lunak, menyanyikan pujian terhadap sistem kapitalis. Seseorang dapat, jika ia mau, menyebut penulis-penulis ini “optimistis.”

Namun jika ia melakukannya, maka ia ribuan kali lebih dibenarkan dengan menyebut para penulis antiliberal sebagai “terlalu optimis” tentang sosialisme, intervensionisme, sosialisme agraris, dan sindikalisme. Kenyataan bahwa hal ini tidak terjadi, namun, sebaliknya, hanya para penulis liberal seperti Bastiat yang disebut “optimis”, menunjukkan dengan jelas bahwa dalam hal ini, yang kita hadapi bukanlah upaya untuk melakukan klasifikasi ilmiah melainkan tidak lebih dari karikatur partisan.

Liberalisme, kami ulangi, sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa kapitalisme baik hanya dari sudut pandang tertentu. Liberalisme hanya ingin mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan manusia, hanya sistem kapitalis yang cocok, dan bahwa setiap usaha untuk mewujudkan masyarakat sosialis, intervensionis, sosialis agraris, atau sindikalis, pasti tidak berhasil. Para penderita gangguan syaraf (neurotis) yang tidak mampu menghadapi kebenaran ini menyebut ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang suram. Namun ilmu ekonomi dan sosiologi tidak suram karena keduanya telah menunjukkan kepada kita dunia yang sesungguhnya lebih dari yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan lain—ilmu mekanika, contohnya, karena ilmu itu mengajarkan bahwa pergerakan terus menerus itu mustahil, atau biologi, karena ilmu itu mengajarkan kepada kita kefanaan makhluk hidup.

## 7. Kartel, Monopoli, dan Liberalisme

Para penentang liberalisme menegaskan bahwa prasyarat yang dibutuhkan bagi penerapan program liberal telah punah dari muka bumi. Liberalisme masih bisa diterapkan saat ada banyak perusahaan berukuran sedang terlibat dalam persaingan tajam di masing-masing industri. Dewasa ini, sejak perwalian (*trust*), kartel, dan perusahaan monopoli sepenuhnya menguasai pasar, liberalisme telah usai. Bukan politik yang menghancurkannya, namun kecenderungan yang melekat dalam perkembangan tak terelakkan dari sistem usaha bebas.

Pembagian kerja memberi fungsi khusus pada setiap satuan

produktif dalam perekonomian. Proses ini tidak akan pernah berhenti selama perkembangan ekonomi berlanjut. Periode di mana satu pabrik membuat semua jenis mesin telah lama kita tinggalkan. Saat ini, pabrik mesin yang tidak membatasi dirinya secara khusus untuk pembuatan mesin-mesin jenis tertentu tidak akan mampu menghadapi persaingan.

Dengan perkembangan spesialisasi, wilayah yang dilayani pemasok perorangan harus terus diperluas. Pasar yang dipasok oleh pabrik tekstil yang memproduksi hanya beberapa macam kain harus lebih besar dari pasar yang dilayani oleh penenun yang menenun semua jenis kain. Tidak diragukan bahwa perkembangan spesialisasi produksi ini cenderung mengarah pada perkembangan setiap bidang usaha yang memiliki seluruh dunia sebagai pasar mereka. Jika perkembangan ini tidak ditentang oleh langkah-langkah kaum proteksionis dan anti kapitalis lain, jumlah perusahaan di setiap cabang produksi relatif lebih sedikit, atau bahkan hanya akan ada satu perusahaan, yang bertekad memproduksi dengan spesialisasi tingkat tinggi dan untuk memasok seluruh dunia.

Tentu saja saat ini kita masih sangat jauh dari kondisi ini, karena kebijakan semua pemerintah bertujuan memenggal wilayah perekonomian dunia yang merupakan satu kesatuan menjadi wilayah-wilayah kecil di mana, di bawah perlindungan tarif dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk tujuan serupa, perusahaan yang tidak lagi mampu menghadapi persaingan dalam pasar bebas dunia dipertahankan secara artifisial atau bahkan didirikan untuk pertama kalinya. Selain pertimbangan kebijakan perdagangan, langkah-langkah seperti ini, yang diarahkan untuk menentang pemusatan bisnis, mendapat pembelaan dengan alasan hanya perusahaan itu yang melindungi konsumen dari eksploitasi oleh gabungan produsen yang bersifat memonopoli.

Untuk menilai keabsahan pendapat ini, kita harus menganggap bahwa pembagian kerja di seluruh dunia telah sedemikian maju sehingga produksi setiap barang yang ditawarkan untuk dijual dipusatkan di sebuah perusahaan sehingga para konsumen sebagai

pembeli selalu dihadapkan dengan penjual tunggal. Dalam keadaan seperti itu, menurut doktrin ekonomi yang tidak dipikirkan dengan matang, produsen akan berada dalam posisi mematok harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang biasa ia dapatkan, dan dengan demikian memperburuk taraf hidup konsumen. Tidak sulit untuk melihat bahwa gagasan ini benar-benar salah.

Harga monopoli, jika tidak dimungkinkan oleh campur tangan tertentu pemerintah, dapat diterapkan selamanya hanya berdasarkan kontrol atas barang tambang dan sumber daya alam lain. Sebuah monopoli dalam industri manufaktur yang menghasilkan keuntungan lebih besar daripada yang dihasilkan oleh industri lain di mana pun akan merangsang pembentukan perusahaan pesaing yang persaingannya akan menghancurkan monopoli dan mengembalikan harga dan keuntungan ke tingkat normal.

Bagaimana pun, monopoli dalam industri manufaktur tidak bisa berlaku umum, karena di setiap tingkatan kekayaan tertentu dalam perekonomian, jumlah keseluruhan modal yang ditanam dan ketersediaan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam produksi—dan akibatnya juga jumlah produk sosial—sudah ditentukan besarnya. Dalam setiap cabang produksi tertentu, atau dalam beberapa cabang produksi, jumlah modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan dapat dikurangi untuk meningkatkan harga per satuan dan keseluruhan keuntungan pelaku monopoli atau beberapa pelaku monopoli dengan cara membatasi produksi. Modal dan tenaga kerja yang oleh karenanya dilepaskan akan mengalir ke industri lain. Namun, seandainya semua industri mencoba mengurangi produksi untuk menaikkan harga, mereka tanpa ragu-ragu akan melepaskan tenaga kerja dan modal yang, karena ditawarkan dengan harga lebih rendah, akan memberikan dorongan kuat bagi pembentukan usaha-usaha baru yang harus, lagi-lagi, menghancurkan posisi monopolistik usaha-usaha lain.

Oleh karena itu, gagasan tentang kartel universal dan monopoli dalam industri manufaktur benar-benar tidak dapat dipertahankan.

Monopoli murni dapat diterapkan hanya melalui penguasaan atas tanah atau sumber daya mineral. Pendapat bahwa semua tanah subur di bumi dapat dikonsolidasikan ke dalam satu monopoli dunia tidak perlu dibahas lebih lanjut; satu-satunya monopoli yang harus kita pertimbangkan di sini adalah monopoli yang berasal dari penguasaan atas mineral-mineral bermanfaat. Monopoli jenis ini, pada kenyataannya, benar-benar ada di beberapa barang tambang dengan manfaat kecil, dan bagaimana pun juga mungkin saja upaya-upaya untuk memonopoli mineral-mineral lain kelak berhasil.

Ini berarti bahwa pemilik tambang dan galian dapat menarik sewa tanah yang lebih tinggi dan konsumen akan membatasi konsumsi serta mencari pengganti untuk bahan-bahan yang sekarang menjadi lebih mahal. Monopoli minyak dunia akan meningkatkan permintaan untuk listrik hidroelektrik, batu bara, dan lain-lain. Dari sudut pandang perekonomian dunia dan dari sudut pandang universal, ini berarti kita harus lebih menghemat penggunaan bahan-bahan mahal tersebut yang bisa kita habiskan namun tidak dapat kita gantikan. Dengan begitu kita akan menyisakan lebih banyak bahan-bahan tersebut untuk generasi mendatang dibandingkan dengan perekonomian yang bebas dari monopoli.

Momok monopoli yang selalu menghantui saat seseorang berbicara tentang perkembangan ekonomi tanpa hambatan tidak perlu menjadi kekhawatiran kita. Monopoli dunia yang benar-benar dapat dilaksanakan hanya menyangkut beberapa jenis barang produksi utama. Apakah dampaknya menguntungkan atau tidak, tidak dapat diputuskan dengan mudah. Dalam pandangan mereka yang, dalam menangani persoalan-persoalan ekonomi, tidak dapat membebaskan diri dari perasaan iri, monopoli tampak sebagai sesuatu yang buruk karena monopoli meningkatkan keuntungan pemiliknya. Siapa pun yang melakukan pendekatan terhadap masalah itu tanpa prasangka akan memahami bahwa monopoli seperti itu akan mendorong penghematan penggunaan sumber daya mineral yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Jika seseorang benar-benar iri terhadap keuntungan para pelaku monopoli, ia dapat,

tanpa membahayakan dan tanpa mengharapkan akibat buruknya terhadap perekonomian, menuntut agar keuntungan itu dialirkan ke kas publik melalui pajak hasil tambang.

Bertentangan dengan monopoli dunia adalah monopoli nasional dan internasional, yang secara praktis sangat berguna saat ini karena keduanya tidak berasal dari kecenderungan perkembangan alamiah dari sistem ekonomi yang berlangsung tanpa hambatan melainkan buah dari kebijakan ekonomi antiliberal. Upaya untuk mendapatkan monopoli untuk barang-barang tertentu mungkin dilakukan hampir dalam semua kasus hanya karena tarif telah membagi pasar dunia menjadi pasar-pasar nasional yang kecil. Di samping itu, satu-satunya kartel lain yang penting adalah kartel yang bisa dibentuk oleh pemilik sumber-sumber daya alam tertentu karena biaya transportasi yang tinggi melindungi mereka dari persaingan para produsen dari wilayah lain yang tidak jauh dari daerah mereka sendiri.

Merupakan kesalahan mendasar, dalam menilai akibat dari pemasokan satu jenis barang ke pasar oleh *trust*, kartel, dan perusahaan-perusahaan, untuk berbicara mengenai “kontrol” pasar dan “pendiktean harga” oleh para pelaku monopoli. Para pelaku monopoli tidak menerapkan kontrol apa pun, dan ia juga tidak berada dalam posisi untuk mendikte harga. Seseorang dapat berbicara mengenai kontrol pasar atau pendiktean harga hanya jika barang yang dipermasalahkan merupakan, dalam pengertian yang paling ketat dan paling harfiah, kebutuhan hidup dan sama sekali tidak tergantikan. Tidak ada komoditas ekonomi yang kepemilikannya benar-benar diperlukan untuk menjamin keberadaan orang-orang yang siap membelinya di pasar.

Apa yang membedakan penetapan harga monopoli dari penetapan harga yang bersaing adalah kenyataan bahwa, dalam kondisi sangat khusus, pelaku monopoli dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari penjualan dengan jumlah yang lebih kecil dengan harga yang lebih tinggi (yang kita sebut harga monopoli) dibandingkan dengan menjualnya dengan harga yang ditetapkan

pasar jika ada lebih banyak penjual yang bersaing (harga yang bersaing). Kondisi khusus yang diperlukan bagi harga monopoli adalah bahwa tanggapan konsumen terhadap kenaikan harga tidak menyebabkan anjloknya permintaan yang mencegah keuntungan total yang lebih besar dari penjualan yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Seandainya seseorang bisa meraih monopoli pasar dan menggunakannya untuk mendapatkan harga monopoli, maka keuntungan yang lebih besar akan diperoleh dalam cabang industri tersebut.

Mungkin saja, kendati keuntungannya lebih besar, perusahaan baru sejenis tidak didirikan karena kekhawatiran bahwa, setelah menurunkan harga monopoli ke harga bersaing, mereka terbukti tidak menguntungkan. Meskipun demikian, seseorang harus memperhitungkan kemungkinan bahwa industri terkait, yang berada dalam posisi memproduksi barang-barang kartel dengan biaya yang relatif lebih kecil, mungkin muncul sebagai pesaing; dan, bagaimana pun juga, industri yang memproduksi komoditas pengganti akan segera bermunculan untuk memanfaatkan keadaan menguntungkan itu untuk mengembangkan produksi mereka.

Semua unsur ini menyebabkan monopoli benar-benar langka di industri manufaktur yang tidak didasarkan atas monopoli bahan mentah tertentu. Monopoli seperti itu hanya dimungkinkan oleh langkah-langkah legislatif khusus, seperti hak paten dan hak-hak istimewa lain, peraturan tarif, hukum pajak, dan sistem perijinan. Beberapa dasawarsa lalu, orang biasa membicarakan monopoli transportasi. Sejauh mana monopoli itu didasarkan atas sistem perijinan tidak pernah terungkap.

Saat ini, umumnya orang tidak terlalu menghiraukan hal ini. Mobil dan pesawat telah menjadi pesaing yang berbahaya bagi kereta api. Namun, bahkan sebelum kemunculan para pesaing ini, kemungkinan untuk transportasi air telah membatasi tarif layanan kereta api di beberapa jalur.

Bukan hanya berlebihan, namun menyalahi fakta, untuk mengatakan, seperti yang biasa dilakukan orang saat ini, bahwa



pembentukan monopoli telah menghapuskan prasyarat utama bagi perwujudan cita-cita liberal dalam masyarakat kapitalis. Seseorang bisa memutarbalikkan dan membelokkan persoalan monopoli, namun ia selalu kembali pada kenyataan bahwa harga monopoli hanya mungkin ketika ada kontrol atas sumber daya alam tertentu atau ketika perundang-undangan dan pemerintahan mereka menciptakan kondisi yang dibutuhkan bagi pembentukan monopoli.

Dalam perekonomian yang berkembang tanpa hambatan, dengan perkecualian pertambangan dan cabang produksi lain, tidak ada kecenderungan untuk meniadakan persaingan. Keberatan yang biasa disampaikan mengenai liberalisme, bahwa kondisi persaingan seperti yang berlangsung ketika ilmu ekonomi klasik dan gagasan liberal dikembangkan untuk pertama kali tidak berlaku lagi, tidak dapat dibenarkan. Hanya beberapa tuntutan liberal (yaitu perdagangan bebas dalam dan di antara negara-negara) yang perlu diwujudkan untuk menciptakan kembali semua kondisi ini.

## **8. Birokratisasi**

Masih ada pemahaman lain di mana sering dikatakan bahwa kondisi yang diperlukan bagi perwujudan cita-cita liberal masyarakat tak mungkin diperoleh lagi. Dalam bisnis besar yang menjadi kebutuhan akibat kemajuan dalam pembagian kerja, jumlah pegawai yang dipekerjakan harus terus meningkat. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis mereka, perusahaan-perusahaan ini harus lebih menyerupai birokrasi pemerintah yang menjadi sasaran kritik kaum liberal.

Semakin lama mereka menjadi semakin tidak praktis dan kurang terbuka terhadap pembaruan. Seleksi pegawai untuk kedudukan eksekutif tidak lagi dilakukan berdasarkan keahlian yang telah dibuktikan dalam pekerjaan, namun melalui pertimbangan kriteria resmi semata, seperti latar belakang pendidikan atau senioritas, dan seringkali hanya berdasarkan sikap pilih kasih pribadi. Demikianlah maka ciri khusus perusahaan swasta, yang bertolak belakang dengan

perusahaan publik, akhirnya menghilang. Jika masih dibenarkan dalam era liberalisme klasik untuk menentang kepemilikan pemerintah dengan alasan bahwa hal itu melumpuhkan semua prakarsa bebas dan membunuh kenikmatan bekerja, hal ini tidak berlaku lagi saat perusahaan swasta dijalankan dengan tidak kalah birokratis, teoritis, dan formal dari perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh publik (negara).

Untuk dapat menilai keabsahan keberatan ini, seseorang pertama-tama harus memahami apa sebenarnya birokrasi dan cara birokratis dalam menjalankan bisnis, dan bagaimana hal ini dibedakan dari perusahaan dagang dan cara komersial dalam menjalankan bisnis. Pertentangan antara mentalitas komersial dan mentalitas birokratis mirip dengan wilayah intelektual dari pertentangan antara kapitalisme—kepemilikan pribadi atas sarana produksi—dan sosialisme—kepemilikan umum atas sarana produksi.

Siapa pun yang memiliki unsur-unsur produksi, baik miliknya sendiri atau yang dipinjamkan oleh pemiliknya dengan imbalan, harus selalu berhati-hati menggunakannya sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang, dalam situasi yang telah ditentukan, paling mendesak. Jika tidak, ia akan mengalami kerugian, dan pertama-tama harus mengurangi kegiatannya sebagai pemilik dan pengusaha, sebelum pada akhirnya tersingkir dari posisi itu. Ia bukan lagi pemilik atau pengusaha dan terperosok ke tingkatan mereka yang hanya memiliki tenaga untuk dijual dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan produksi ke jalur yang, dari sudut pandang konsumen, tepat.

Dalam perhitungan laba-rugi, yang merupakan hakekat pembukuan dan akuntansi pebisnis, para pengusaha dan pemilik modal memiliki metode yang memungkinkan mereka untuk memeriksa, dengan tingkat ketepatan terbesar yang bisa dicapai, setiap prosedur hingga ke detail terkecil, dan jika memungkinkan, untuk melihat pengaruh setiap transaksi individual dalam operasi mereka terhadap total hasil usaha mereka.

Perhitungan moneter dan akuntansi biaya merupakan perangkat

intelektual terpenting pengusaha kapitalis, dan tidak kurang dari Goethe sendiri menyatakan bahwa sistem pembukuan ganda merupakan “salah satu penemuan terbaik pikiran manusia.” Goethe bisa mengatakan ini karena ia bebas dari rasa benci yang dimiliki para penulis picik terhadap para pengusaha. Merekalah yang membentuk paduan suara yang mengulang-ulang lagu yang sama bahwa perhitungan moneter dan perhatian pada untung dan rugi adalah dosa yang paling memalukan.

Perhitungan moneter, pembukuan, dan statistik dalam penjualan dan operasi memungkinkan perusahaan dagang paling besar dan paling rumit sekali pun untuk melakukan pemeriksaan tepat tentang hasil yang dicapai setiap departemen, dan dengan demikian menilai sejauh mana kepala tiap departemen menyumbang bagi keberhasilan total perusahaan. Jadi, ada panduan yang dapat diandalkan untuk menentukan perlakuan terhadap para manajer dari berbagai departemen. Seseorang bisa mengetahui seberapa bernilainya mereka dan berapa gaji yang akan mereka terima. Promosi ke kedudukan yang lebih tinggi dan dengan tanggung jawab yang lebih besar dicapai melalui keberhasilan yang tidak diragukan lagi yang ditunjukkan dalam ruang lingkup yang terbatas. Dan seperti halnya seseorang bisa memeriksa kegiatan manajer masing-masing departemen melalui akuntansi biaya, ia juga bisa meneliti kegiatan perusahaan dalam setiap bidang operasi, serta dampak dari langkah-langkah organisatoris tertentu dan langkah-langkah lain yang serupa.

Sudah barang tentu ada batasan-batasan untuk upaya kontrol ini. Seseorang tidak bisa menilai keberhasilan atau kegagalan setiap individu dalam suatu departemen seperti ia menilai manajer departemen tersebut. Di samping itu, ada departemen yang sumbangannya terhadap keseluruhan penghasilan tidak dapat dipahami melalui perhitungan seperti itu: apa yang dicapai oleh departemen riset, biro hukum, sekretariat, jasa statistik, dan lain-lain, tidak bisa dinilai dengan cara yang sama dengan, misalnya, kinerja penjualan tertentu atau departemen produksi.

Kinerja penjualan dapat dengan aman diserahkan pada perkiraan orang yang bertanggung jawab atas departemen itu, dan kinerja departemen produksi diserahkan pada pemimpinnya; karena kondisi dapat dilihat dengan relatif jelas, dan mereka yang ditugaskan membuat penilaian itu (baik manajemen umum dan pemimpin setiap departemen) memiliki kepentingan pribadi dalam membuat penilaian yang benar, karena pendapatan mereka sendiri dipengaruhi oleh produktivitas operasi yang menjadi tanggung jawab mereka.

Kebalikan dari jenis perusahaan ini, yang setiap transaksinya diawasi oleh perhitungan laba-rugi, digambarkan oleh aparat administrasi negara. Apakah seorang hakim (dan yang berlaku untuk hakim berlaku untuk semua pejabat tinggi administratif) telah melaksanakan tugasnya dengan cara yang lebih baik atau lebih buruk tidak dapat dinilai berdasarkan perhitungan apa pun. Tidak ada cara yang mungkin untuk menentukan dengan ukuran yang obyektif, apakah sebuah distrik atau provinsi dikelola dengan baik atau buruk, dengan biaya murah atau mahal. Dengan demikian, penilaian atas kegiatan pejabat publik merupakan masalah pendapat subyektif, dan oleh karena itu, sewenang-wenang.

Bahkan pertanyaan apakah biro tertentu dibutuhkan, apakah biro itu memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit pegawai, dan apakah organisasinya sesuai atau tidak dengan tujuannya, diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan yang melibatkan unsur-unsur subyektivitas. Hanya ada satu bidang administrasi publik yang ukuran keberhaslilan atau kegagalannya tidak diragukan lagi: perang. Tapi, bahkan di bidang ini pun satu-satunya hal yang pasti adalah apakah operasi berhasil. Pertanyaan mengenai seberapa jauh distribusi kekuatan menentukan masalah itu bahkan sebelum pertempuran dimulai, dan seberapa banyak hasil yang dicapai dikaitkan dengan kemampuan atau ketidakmampuan para pemimpin dalam melaksanakan tugas mereka, dan kelayakan langkah-langkah yang mereka ambil, tidak dapat dijawab dengan tepat.

Ada jenderal-jenderal yang dielu-elukan karena berhasil meraih

kemenangan yang, dalam kenyataan, melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk membantu pihak musuh meraih kemenangan dan yang menikmati keberhasilan semata-mata karena keadaan yang sangat menguntungkan yang menganulir kesalahan mereka. Dan pemimpin yang kalah kadangkala dikutuk meskipun dengan kejeniusannya mereka telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menghindari kekalahan yang tak terelakkan.

Manajer perusahaan swasta hanya memberikan satu perintah kepada para pekerja yang mendapat tugas berbeda darinya: menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Semua perintahnya terangkum dalam satu perintah ini, dan pemeriksaan akuntansi memungkinkan penilaian mudah dan tepat sejauh mana mereka telah mengikutinya. Manajer departemen birokrasi berada dalam situasi yang sangat berbeda. Ia bisa memberitahu bawahannya apa yang harus mereka capai, namun ia tidak berada dalam posisi untuk memastikan apakah cara yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut merupakan cara yang paling sesuai dan paling ekonomis dalam situasi saat itu. Jika ia tidak berada di semua kantor dan biro yang dibawahnya pada saat yang bersamaan, ia tidak bisa menilai apakah hasil yang sama tidak akan mungkin dicapai dengan pemakaian tenaga kerja dan bahan-bahan yang lebih sedikit.

Kenyataan bahwa hasil itu sendiri juga tidak bisa diubah dengan pengukuran numerik tapi hanya dengan perkiraan, tidak perlu dibahas di sini. Kita tidak menelaah teknik administrasi dari sudut pandang akibat internalnya, melainkan hanya dari pengaruhnya terhadap operasi internal aparat birokrasi; oleh karena itu, kita peduli dengan hasil yang dicapai hanya dalam kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena mustahil menentukan hubungan ini dengan perhitungan pembukuan dagang, manajer organisasi birokrasi memberi perintah yang wajib diikuti oleh bawahannya. Semua perintah ini berisi ketentuan tentang tujuan-tujuan bisnis yang umum dan lumrah. Namun, dalam kasus khusus, sebelum biaya dikeluarkan, pertamanya izin harus diperoleh dari otoritas yang lebih tinggi—prosedur

membosankan dan tidak terlalu efektif namun harus diakui sebagai satu-satunya metode yang mungkin dilakukan.

Jika setiap biro rendahan, setiap kepala departemen, setiap kantor cabang diberikan hak untuk membuat pengeluaran yang mereka anggap perlu, biaya administrasi akan segera melonjak tanpa kendali. Seseorang tidak boleh menipu dirinya sendiri tentang kenyataan bahwa sistem ini memiliki banyak kekurangan dan sangat tidak memuaskan. Banyak pengeluaran berlebihan, dan banyak pengeluaran yang penting tidak dibuat karena aparat birokrasi tidak dapat, sesuai dengan sifatnya, menyesuaikan dirinya dengan keadaan seperti yang dilakukan oleh organisasi komersial.

Pengaruh birokrasi paling jelas terlihat pada orang-orang yang mewakilinya—para birokrat. Di perusahaan swasta, tenaga kerja dipekerjakan bukan karena kemurahan hati namun sebagai transaksi bisnis yang menguntungkan kedua belak pihak, majikan dan pekerja. Majikan harus berusaha keras untuk membayar gaji sesuai dengan nilai yang dihasilkan para pekerja. Jika tidak, ia akan menghadapi resiko kehilangan pekerja yang meninggalkannya untuk bekerja pada pesaing yang memberi upah lebih baik. Agar tidak kehilangan pekerjaannya, para pekerja berusaha keras melaksanakan tugas yang diembannya dengan cukup baik agar ia layak menerima gajinya. Karena pekerjaan tidak didasarkan atas kemurahan hati melainkan sebuah transaksi bisnis, para pekerja tidak perlu takut akan dipecat jika ia tidak disukai oleh orang yang mempekerjakannya. Pengusaha yang memecat pekerja yang berguna dan layak menerima gajinya karena alasan pribadi hanya merugikan dirinya sendiri dan bukan pegawainya, yang bisa menemukan posisi serupa di tempat lain.

Sama sekali tidak sulit memberikan kewenangan kepada kepala departemen untuk menerima dan memecat pegawai; karena di bawah tekanan pengawasan atas kegiatannya melalui pembu-  
kuan dan akuntansi biaya, ia harus memastikan bahwa departemennya menunjukkan keuntungan sebesar mungkin, dan demi kepentingannya sendiri, ia harus berhati-hati agar dapat mempertahankan pekerja terbaiknya. Jika karena kebencian ia memecat

seseorang yang seharusnya tidak ia pecat, jika tindakannya didorong oleh pertimbangan pribadi dan bukan pertimbangan obyektif, maka ia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Gangguan apa pun terhadap keberhasilan departemen yang dipimpinya pada akhirnya hanya menambah kerugiannya. Dengan demikian, penggabungan unsur non-material, yaitu tenaga kerja, ke dalam proses produksi terjadi tanpa friksi.

Situasinya berbeda dalam organisasi birokratis. Karena sumbangan produktif dari masing-masing departemen, dan dengan demikian masing-masing pegawai, bahkan ketika ia menempati kedudukan eksekutif, tidak bisa dipastikan, maka terbuka kesempatan untuk sikap pilih kasih dan prasangka pribadi, baik dalam hal penugasan dan pemberian imbalan. Kenyataan bahwa campur tangan orang-orang berpengaruh memainkan peran tersendiri dalam pengisian posisi resmi di kantor layanan publik bukan disebabkan oleh sifat jahat orang-orang yang bertanggung jawab mengisi posisi tersebut, namun oleh kenyataan bahwa sejak awal tidak ada standar obyektif untuk menentukan kemampuan individu dalam penugasan mereka. Tentu saja yang paling mampulah yang harus dipekerjakan, namun pertanyaannya adalah: siapa yang paling mampu? Jika pertanyaan ini dapat dijawab semudah menjawab pertanyaan tentang gaji yang layak diterima seorang pembuat barang-barang besi dan penyusun huruf, tidak akan ada masalah. Namun karena masalahnya bukan itu, unsur kesewenang-wenangan pasti ada dalam membandingkan kemampuan tiap-tiap individu yang berbeda.

Untuk mencegah hal-hal di atas, seseorang berupaya menetapkan persyaratan formal untuk penugasan dan promosi. Posisi tertentu hanya bisa diraih dengan memenuhi berbagai persyaratan pendidikan tertentu, kelulusan ujian, dan karir tak terputus dalam jangka waktu tertentu di posisi lain; promosi ditentukan oleh lamanya waktu kerja di pekerjaan sebelumnya. Tentu saja, semua kebijakan ini tidak bisa menggantikan kemungkinan mencari orang terbaik yang ada untuk semua jabatan melalui perhitungan laba-rugi. Akan sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa sekolah, ujian, dan

senioritas sama sekali menjamin bahwa seleksi dilakukan dengan benar.

Sebaliknya: sistem ini sejak awal mencegah orang-orang yang penuh energi dan memiliki kemampuan menduduki posisi yang sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Tak pernah terjadi sebelumnya orang yang benar-benar layak naik ke posisi puncak melalui program pembelajaran dan promosi yang baku pada waktunya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Bahkan di Jerman, yang percaya kepada para birokratnya seperti kepercayaan orang-orang saleh, ungkapan “fungsionaris yang sempurna” dipakai untuk merujuk pada orang-orang pengecut dan tidak berguna, terlepas dari niat baik mereka.

Jadi, ciri khas pengelolaan birokratis adalah tidak ada pedoman pertimbangan laba-rugi dalam menilai keberhasilan operasinya dalam kaitan dengan biaya yang dikeluarkan, dan sebagai akibatnya harus, dalam upaya menutup kekurangan ini, mengambil tindakan yang benar-benar tidak memadai agar pelaksanaan tugas-tugasnya dan penerimaan pegawai mengikuti aturan formal yang telah ditentukan. Semua hal-hal buruk yang biasa dikaitkan dengan pengelolaan birokratis—kaku, tidak kreatif, dan tidak berdaya saat dihadapkan pada persoalan yang dapat dipecahkan dengan mudah dalam perusahaan yang berorientasi keuntungan—merupakan akibat kelemahan mendasar ini.

Selama kegiatan negara dibatasi dalam lingkup sempit yang ditetapkan liberalisme, kelemahan-kelemahan birokrasi tidak boleh terlihat terlalu jelas. Kelemahan-kelemahan itu akan menimbulkan masalah serius bagi perekonomian hanya ketika negara—dan tentu saja hal yang sama berlaku bagi perkotaan dan pemerintahan lokal lain—melanjutkan sosialisasi sarana produksi dan terlibat aktif di dalamnya atau bahkan dalam perdagangan.

Perusahaan publik yang dijalankan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan sudah barang tentu dapat memanfaatkan perhitungan moneter selama sebagian besar usaha dimiliki secara pribadi, dan dengan demikian pasar tetap ada dan harga pasar ditentukan. Satu-



satunya hambatan bagi operasi dan pengembangannya adalah kenyataan bahwa pengelolanya, sebagai fungsionaris negara, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keberhasilan atau kegagalan usaha yang menjadi ciri khas pengelolaan perusahaan pribadi. Oleh karena itu, direkturnya tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan penting. Karena ia tidak akan menanggung kerugian yang bisa terjadi, dalam situasi tertentu, akibat kebijakan bisnisnya, pengelolaan usahanya dapat dengan mudah diarahkan untuk menanggung resiko yang tidak akan diambil oleh direktur yang, karena ia harus ikut menanggung kerugian, sungguh-sungguh bertanggung jawab. Oleh karena itu, kewenangannya harus dibatasi.

Baik karena terikat oleh seperangkat peraturan yang kaku atau keputusan dewan pengendali atau persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi, manajemen birokratis terus menderita akibat kesulitan dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang menyebabkan perusahaan publik di mana-mana terus menerus menemui kegagalan.

Namun, dalam kenyataan sangat jarang perusahaan publik yang tidak memiliki tujuan lain selain keuntungan dan melupakan semua pertimbangan lain. Secara umum, perusahaan publik dituntut untuk tidak melupakan pertimbangan “nasional” dan sebagainya. Perusahaan publik diharapkan, umpamanya, dalam kebijakan pengadaan dan penjualan, untuk mendukung produk dalam negeri dan bukan produk luar negeri. Perusahaan kereta api negara dituntut untuk menyusun jadwal tarif yang melayani kebijakan perdagangan khusus pemerintah, membangun dan memelihara jalur yang tidak dapat dioperasikan secara menguntungkan hanya untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah-wilayah tertentu, dan mengoperasikan jalur khusus lain untuk alasan strategis atau alasan serupa. Ketika unsur-unsur seperti itu memainkan peranan dalam bisnis, semua kontrol melalui metode akuntansi biaya dan perhitungan laba-rugi mustahil dilakukan.

Direktur perusahaan kereta api negara yang memberi laporan neraca keuangan yang tidak menguntungkan pada akhir tahun bisa

mengatakan: “Jalur kereta api yang berada di bawah pengawasan saya sudah pasti beroperasi dengan kerugian jika dilihat semata-mata dari sudut pandang komersial perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan; namun jika seseorang mempertimbangkan unsur-unsur seperti perekonomian nasional dan kebijakan militer kita, ia tidak boleh melupakan bahwa jalur-jalur itu telah menghasilkan banyak hal yang tidak termasuk dalam perhitungan laba-rugi.” Dalam keadaan seperti itu, perhitungan laba-rugi jelas kehilangan maknanya dalam menilai keberhasilan sebuah perusahaan, sehingga—bahkan di luar faktor lain yang memiliki kecenderungan yang sama—perusahaan itu harus dikelola sebirokratis mungkin seperti, misalnya, pengelolaan penjara atau biro pajak.

Tidak ada perusahaan swasta, besar atau kecil, menjadi birokratis selama perusahaan itu sepenuhnya dan semata-mata dijalankan atas dasar pertimbangan keuntungan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mencapai keuntungan tertinggi memungkinkan bahkan perusahaan terbesar sekali pun untuk memastikan peran yang dimainkan oleh setiap transaksi dan oleh kegiatan setiap departemen dalam menyumbang hasil keseluruhan. Selama perusahaan hanya melihat keuntungan, mereka menjadi bukti yang menentang semua keburukan birokratisme.

Birokratisasi dalam perusahaan swasta yang kita lihat terjadi di mana-mana saat ini adalah murni akibat dari intervensionisme, yang memaksa mereka memperhitungkan faktor-faktor yang, jika mereka bebas untuk memutuskan kebijakan mereka sendiri, tidak akan memainkan peran apa pun dalam menjalankan usaha mereka. Ketika perusahaan harus mengindahkan prasangka politik dan berbagai macam sensibilitas untuk menghindari gangguan terus menerus dari berbagai organ negara, perusahaan itu tidak lagi berada dalam posisi untuk mendasarkan perhitungannya sepenuhnya atas dasar laba-rugi. Misalnya, beberapa perusahaan fasilitas umum di Amerika Serikat, untuk menghindari perselisihan dengan opini publik dan dengan organ-organ legislatif, peradilan, dan administratif pemerintah yang dipengaruhinya, membuat

kebijakan untuk tidak mempekerjakan penganut Katolik, Yahudi, ateis, Darwinis, orang-orang Negro, Irlandia, Jerman, Italia, dan imigran yang baru tiba.

Dalam negara intervensionis, setiap bisnis harus menyesuaikan diri dengan keinginan penguasa untuk menghindari hukuman yang memberatkan. Hasilnya adalah pertimbangan ini dan berbagai pertimbangan yang tidak dikenal dalam prinsip mencari keuntungan dari pengelolaan kewirausahaan memainkan peranan yang semakin penting dalam menjalankan bisnis, sementara peran kalkulasi dan akuntansi biaya pada saat bersamaan berkurang dengan signifikan, dan perusahaan swasta semakin banyak menggunakan cara pengelolaan perusahaan publik, dengan perangkat peraturan dan perundang-undangan yang rumit. Dengan perkataan lain, perusahaan itu mengalami birokratisasi.

Demikianlah maka kemajuan birokratisasi dalam bisnis besar sama sekali bukan akibat dari kecenderungan yang tak bisa ditawar yang melekat dalam perkembangan perekonomian kapitalis. Hal itu tidak lain merupakan akibat dari penerapan kebijakan intervensionis. Tanpa campur tangan pemerintah terhadap operasi mereka, bahkan perusahaan terbesar pun dapat dijalankan sepraktis perusahaan kecil.

1. Sindikalisme sebagai tujuan akhir gagasan sosial tidak boleh dicampuradukkan dengan sindikalisme sebagai taktik serikat buruh (“tindakan langsung” oleh kaum sindikalis Perancis). Tentu saja, yang disebut terakhir dapat menjadi sarana dalam perjuangan mewujudkan cita-cita sindikalis, namun ia juga dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang bertentangan dengan cita-cita itu. Seseorang dapat berjuang, misalnya—dan inilah yang sebenarnya yang diharapkan oleh kaum sindikalis Perancis—untuk meraih (tujuan) sosialisme melalui taktik sindikalis.
2. Bahkan jika gaji dinaikkan secara artifisial (dengan campur tangan pemerintah atau dengan paksaan anggota serikat buruh) secara

bersamaan di seluruh dunia dan di semua cabang produksi, yang terjadi hanyalah konsumsi modal, dan akhirnya, sebagai dampak lanjutan, laggi-lagi penurunan gaji. Saya telah menyinggung masalah ini secara rinci dalam tulisan-tulisan di lampiran.



---

## BAB 3

# KEBIJAKAN LUAR NEGERI LIBERAL

### 1. Batas-batas Negara

Kaum liberal tidak mempertentangkan kebijakan dalam dan luar negeri, dan pertanyaan yang sangat sering muncul dan dibahas panjang lebar, tentang apakah pertimbangan kebijakan luar negeri lebih penting dari kebijakan dalam negeri atau sebaliknya, di mata mereka merupakan pertanyaan iseng. Karena liberalisme adalah, sejak awal, sebuah konsep politik yang mencakup seluruh dunia, dan ide-ide yang ingin diwujudkan di satu wilayah terbatas juga berlaku untuk wilayah lain yang lebih luas dalam politik dunia. Jika kaum liberal membedakan kebijakan dalam dan luar negeri, hal itu dilakukan semata-mata untuk memudahkan dan membuat klasifikasi, untuk membagi cakupan masalah-masalah politik yang luas ke dalam beberapa tipe besar, dan bukan karena keyakinan bahwa ada prinsip berbeda untuk keduanya.

Tujuan utama kebijakan dalam negeri liberalisme sama dengan kebijakan luar negerinya: perdamaian. Kebijakan luar negeri liberalisme ditujukan pada kerjasama yang damai, baik antarnegara mau pun dalam sebuah negara. Titik tolak pemikiran liberal adalah pengakuan tentang pentingnya kerjasama manusia, dan keseluruhan kebijakan dan program liberalisme dirancang untuk menjaga kerjasama saling menguntungkan di antara umat manusia dan mengembangkannya lebih jauh lagi.

Tujuan utama yang dibayangkan oleh liberalisme adalah kerjasama sempurna seluruh umat manusia, yang terjadi dengan damai dan tanpa friksi. Pemikiran liberal mencakup seluruh umat manusia, bukan sebagian. Pemikiran liberal tidak berhenti pada kelompok terbatas; tidak berakhir di batas desa, atau propinsi, negara, atau benua. Pemikirannya bersifat kosmopolitan dan menyeluruh, mengikutsertakan seluruh umat manusia dan seantero dunia. Liberalisme adalah, dalam pengertian ini, humanisme; dan kaum liberal, warga dunia, adalah kaum kosmopolitan.

Dewasa ini, saat dunia didominasi oleh ide-ide antiliberal, kosmopolitanisme dicurigai oleh sebagian besar anggota masyarakat. Di Jerman ada kelompok patriot fanatik yang menolak memaafkan para penyair besar Jerman, terutama Goethe, yang pemikiran dan perasaannya, berorientasi kosmopolitan dan tidak dikungkung oleh batas-batas nasional. Ada pendapat bahwa ada konflik yang tak mungkin diselesaikan antara kepentingan negara dan kepentingan umat manusia dan bahwa orang yang mengarahkan aspirasi dan usahanya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dianggap mengabaikan kepentingan negaranya sendiri. Tidak ada keyakinan yang lebih menyesatkan dari keyakinan ini.

Orang Jerman yang bekerja untuk kebaikan umat manusia tidak merugikan kepentingan sesama warga Jerman—i.e., mereka yang hidup di negara yang sama dan memakai bahasa yang sama dan dengan siapa seringkali ia membentuk sebuah komunitas etnik dan spiritual, sama halnya mereka yang bekerja demi kepentingan seluruh Jerman tidak merugikan kepentingan kampung halamannya sendiri. Ini karena setiap individu berkepentingan agar seluruh dunia sejahtera, sama seperti ia menginginkan agar komunitas di mana ia tinggal berkembang dan mencapai kemakmuran.

Kaum nasionalis yang dogmatis (*chauvinistic*) yang berpendapat bahwa ada konflik yang tak mungkin diselesaikan antara berbagai negara dan menginginkan penerapan kebijakan yang menjaga, bila perlu dengan kekerasan, supremasi negaranya atas negara lain, biasanya paling bersemangat dalam memaksakan pendapat bahwa

persatuan nasional itu penting dan bermanfaat. Semakin besar penekanan mereka pada pentingnya perang melawan negara-negara lain, semakin gencar mereka mengimbuai perdamaian dan harmoni di antara sesama warga negara mereka sendiri. Kaum liberal sama sekali tidak menentang tuntutan bagi persatuan nasional. Sebaliknya: tuntutan bagi perdamaian internal di setiap negara merupakan buah pemikiran liberal dan meraih tempat utama hanya ketika ide-ide liberal di abad ke kedelapanbelas telah diterima secara luas.

Sebelum falsafah liberal, yang memuja perdamaian tanpa syarat, menguasai pikiran manusia, perang tidak terbatas hanya pada konflik antarnegara. Negara-negara juga terkoyak-koyak oleh perlawanan sipil yang tak kunjung padam dan pertikaian internal yang penuh dengan pertumpahan darah.

Di abad kedelapanbelas orang Inggris masih berperang melawan sesama orang Inggris di Culloden, dan bahkan pada akhir abad kesembilanbelas, di Jerman, selagi Prusia berperang melawan Austria, negara-negara bagian Jerman lain bergabung dalam peperangan itu di kedua belah sisi. Saat itu Prusia tidak menganggap berperang di sisi Itali melawan Jerman Austria sebagai sesuatu yang salah, dan, pada 1870, hanya karena peristiwa berkembang dengan sangat cepat maka Austria tidak bergabung dengan tentara Perancis dalam perang melawan Prusia dan sekutunya. Berbagai kemenangan yang membanggakan tentara Prusia diperoleh dengan mengalahkan tentara Prusia dari negara-negara bagian Jerman lain. Liberalismelah yang pertama kali menganjurkan kepada negara-negara untuk mempertahankan perdamaian dalam kegiatan internal mereka dan dalam hubungan mereka dengan negara-negara lain.

Berdasarkan fakta pembagian kerja internasional itulah maka liberalisme menyimpulkan argumentasi tak terbantahkan dan menentukan yang menentang perang. Pembagian kerja telah sejak lama melewati batas-batas negara. Dewasa ini tidak satu pun negara beradab yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sebagai komunitas mandiri dari produksinya sendiri.

Semua negara mau tidak mau harus mengimpor barang-

barang dari luar negeri dan membayarnya dengan mengekspor produk domestik. Apa pun yang menghalangi atau menghentikan pertukaran internasional barang-barang akan menimbulkan kerusakan luar biasa pada seluruh peradaban manusia dan menggerogoti kesejahteraan, bahkan hakekat keberadaan berjuta-juta orang. Di era di mana bangsa-bangsa memiliki ketergantungan pada produk asing, perang tidak lagi bisa dilancarkan.

Karena penghentian arus impor bisa menentukan akhir sebuah perang yang dilancarkan oleh sebuah negara yang terlibat dalam pembagian kerja internasional, kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan kemungkinan perang harus ditujukan untuk membuat perekonomian nasional mandiri, i.e., kebijakan itu harus, bahkan dalam keadaan damai, bertujuan untuk membuat pembagian kerja internasional berakhir di batas-batas negaranya. Kalau Jerman berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya langsung dari produksi domestik, produk tahunan total Jerman akan berkurang, dan oleh karena itu kesejahteraan, standar hidup, dan tingkat kebudayaan warga Jerman akan mengalami kemerosotan cukup besar.

## 2. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, sebuah negara bisa menikmati perdamaian dalam negeri hanya ketika konstitusi demokratis menjamin bahwa pengaturan pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat berlangsung tanpa gesekan. Tidak ada hal lain yang dibutuhkan selain penerapan prinsip yang sama secara konsisten untuk menjamin perdamaian internasional.

Kaum liberal di masa lalu mengira semua orang di dunia pada dasarnya cinta damai dan bahwa hanya kalangan monarki yang menginginkan perang untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan mereka dengan menaklukkan provinsi-provinsi. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa untuk menjamin perdamaian abadi yang diperlukan hanyalah mengganti pemerintahan para pangeran kerajaan dengan pemerintahan yang bertumpu pada rakyat.



Jika sebuah republik demokratis mendapati bahwa batas-batas negaranya, yang dibentuk oleh sejarah sebelum transisi ke liberalisme, tidak lagi memenuhi keinginan politik rakyat, batas-batas itu harus diganti dengan jalan damai agar sesuai dengan hasil referendum yang mencerminkan keinginan rakyat. Kemungkinan harus tetap terbuka untuk menggeser batas-batas negara jika penduduk suatu wilayah menyatakan secara tegas keinginan mereka untuk bergabung dengan negara selain negara di mana mereka saat itu berada.

Di abad ketujuhbelas dan kedelapan belas, para tsar Rusia menggabungkan ke dalam kerajaan mereka berbagai wilayah luas yang penduduknya tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi bagian Rusia. Bahkan jika Kekaisaran Rusia mengadopsi konstitusi yang benar-benar demokratis, keinginan penduduk di wilayah-wilayah itu tetap tidak terpenuhi karena mereka benar-benar tidak ingin mengasosiasikan diri mereka dalam ikatan politik apa pun dengan orang-orang Rusia.

Tuntutan demokratis mereka adalah: bebas dari Kekaisaran Rusia; pembentukan Polandia, Finlandia, Latvia, Lithuania dsb yang independen. Kenyataan bahwa semua tuntutan ini dan tuntutan serupa dari bangsa-bangsa lain (e.g., Italia, Jerman di Schleswig-Holstein, orang-orang Slavia di Kerajaan Habsburg) hanya bisa dipenuhi melalui pengerahan senjata merupakan penyebab utama dari semua perang di Eropa sejak Kongres Wina.

Dengan demikian hak untuk menentukan nasib sendiri berkaitan dengan status keanggotaan dalam sebuah negara berarti: kapan pun penduduk sebuah wilayah, baik sebuah desa, seluruh distrik, atau sekumpulan distrik yang saling berdekatan, menyatakan secara terbuka melalui sebuah referendum yang diselenggarakan secara bebas, bahwa mereka sudah tidak ingin lagi bersatu dalam negara di mana saat itu mereka menjadi anggota, namun berharap untuk membentuk negara independen atau bergabung dengan negara lain, keinginan mereka harus dihormati dan ditaati. Ini merupakan satu-satunya cara yang efektif dan mungkin untuk mencegah revolusi,

perang saudara dan perang internasional.

Menyebut hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai “hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri” merupakan kekeliruan. Hak menentukan nasib sendiri bukan hak sebuah unit nasional yang terbatas untuk menentukan nasibnya sendiri melainkan hak para penduduk setiap wilayah untuk menentukan dengan negara mana mereka ingin bergabung. Kesalahpahaman ini lebih menyedihkan lagi saat ungkapan “hak bangsa-bangsa menentukan nasib sendiri” diartikan sebagai hak negara untuk melepaskan dan menggabungkan wilayah negara lain di luar kehendak penduduknya ke dalam negara itu. Berdasarkan pengertian hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri maka kaum Fasis Italia mencoba untuk mendapatkan pembenaran atas tuntutan mereka agar wilayah (kanton) Tessin dan bagian-bagian wilayah lain dilepaskan dari Swiss dan digabungkan dengan Italia meskipun para penduduk wilayah-wilayah itu tidak berkeinginan untuk bergabung. Sikap serupa diambil oleh beberapa pendukung Pan-Jermanisme berkaitan dengan wilayah Swiss yang berbahasa Jerman dan Belanda.

Meskipun begitu, hak menentukan nasib sendiri yang kita bicarakan bukanlah hak bangsa untuk menentukan nasibnya, namun hak menentukan nasib sendiri penduduk dari setiap wilayah yang cukup besar untuk membuat sebuah unit administrasi independen. Jika memungkinkan, setiap individu diberikan hak menentukan nasib sendiri. Ini tidak bisa dilakukan hanya karena pertimbangan teknis yang tidak bisa diabaikan, yang menuntut agar sebuah wilayah dijalankan sebagai sebuah unit administrasi tunggal dan hak menentukan nasib sendiri dibatasi pada keinginan mayoritas penduduk wilayah yang cukup besar untuk dianggap sebagai unit teritorial dalam administrasi negara.

Sejauh hak menentukan nasib sendiri diakui, dan di mana pun hak itu diberikan, di abad kesembilanbelas dan kedua puluh, pengakuan itu akan melahirkan atau berujung pada pembentukan negara-negara yang terdiri dari satu jenis kebangsaan (i.e., orang-

orang yang berbicara dalam bahasa yang sama) dan bubarnya negara-negara yang terdiri dari berbagai kebangsaan, walau hanya sebagai konsekuensi pilihan bebas mereka yang berhak ambil bagian dalam referendum.

Pembentukan negara yang semua anggotanya berasal dari satu kelompok nasional merupakan akibat dari hak menentukan nasib sendiri, bukan tujuan hak itu. Seandainya beberapa anggota suatu bangsa merasa lebih bahagia bila mereka secara politik bebas dan tidak menjadi bagian sebuah negara yang warganya berasal dari kelompok linguistik yang sama, mungkin orang akan berusaha untuk mengubah ide-ide politik mereka melalui persuasi agar mereka menganut prinsip kebangsaan yang menyatakan semua anggota kelompok linguistik yang sama harus membentuk sebuah negara yang independen.

Seandainya seseorang mencoba untuk menentukan takdir politik mereka melawan keinginan mereka dengan menerapkan hak negara yang lebih tinggi, orang itu melanggar hak menentukan nasib sendiri sama efektifnya dengan seandainya orang itu mempraktekkan bentuk-bentuk penindasan lain. Pembagian Swiss di antara Jerman, Perancis, dan Italia, bahkan jika dilakukan berdasarkan batas-batas linguistik, tetap merupakan pelanggaran berat atas hak menentukan nasib sendiri, sama seperti terpecahnya Polandia.

### **3. Landasan Politik Perdamaian**

Seseorang akan berpikir bahwa setelah pengalaman Perang Dunia kesadaran akan pentingnya perdamaian abadi semakin berkembang menjadi kesadaran umum. Meskipun begitu, masih belum disadari bahwa perdamaian abadi hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan program liberal secara umum dan mempertahankannya secara terus menerus dan konsisten, dan bahwa Perang Dunia tidak lebih dari konsekuensi kebijakan antiliberal dalam beberapa abad terakhir.

Menurut slogan yang tidak masuk akal dan asal-asalan, kapitalismelah yang bertanggung jawab memicu awal peperangan. Jelas ada hubungan antara yang kedua dengan kebijakan proteksionisme,

dan akibat ketidaktahuan tentang fakta tersebut, tarif protektif diidentifikasi sebagai kapitalisme. Orang lupa bahwa belum lama berselang semua publikasi nasionalistis dipenuhi dengan serangan tajam terhadap modal internasional (“*finance capital*” [modal dalam bentuk uang] dan “*international gold trust* [dewan emas internasional]”) karena tidak mengenal negara, karena melawan tarif protektif, karena membenci perang dan karena kecenderungan pada perdamaian. Ini sama konyolnya dengan menuduh industri persenjataan bertanggung jawab atas pecahnya perang. Industri senjata tumbuh dan berkembang menjadi besar karena pemerintah dan orang-orang yang berniat perang menuntut senjata. Benar-benar tidak masuk akal untuk menganggap bahwa negara-negara menganut kebijakan imperialistis untuk membantu para pembuat senjata.

Industri senjata, seperti halnya industri lain, hadir untuk memenuhi tuntutan. Jika bangsa-bangsa memilih hal lain selain peluru dan peledak, maka pemilik pabrik akan memproduksi barang-barang itu dan bukan kebutuhan perang. Seseorang dapat menganggap bahwa keinginan untuk perdamaian dewasa ini bersifat universal. Namun, penduduk dunia tidak tahu persis kondisi seperti apa yang harus dipenuhi untuk menjamin perdamaian.

Jika kita tidak ingin perdamaian terganggu, semua insentif untuk agresi harus ditiadakan. Tatanan dunia harus disusun sedemikian rupa sehingga negara-negara dan kelompok-kelompok nasional puas dengan kondisi hidup mereka dan dengan demikian mereka tidak terpancing untuk melancarkan perang. Kelompok liberal tidak berharap dapat menghapus perang dengan berkhotbah atau bersikap sebagai moralis. Mereka berupaya menciptakan kondisi sosial yang dapat menghilangkan penyebab perang.

Syarat utama untuk hal ini adalah hak milik pribadi. Ketika hak milik pribadi wajib dihargai bahkan di saat perang, saat pemenang tidak merasa berhak merampas kekayaan individu untuk dirinya sendiri, dan pengambilalihan kekayaan publik tidak berdampak besar karena kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi

merupakan hal yang umum di mana-mana, sebuah motif penting untuk melancarkan perang telah disingkirkan. Namun, ini jauh dari cukup untuk menjamin perdamaian. Agar penerapan hak untuk menentukan nasib sendiri tidak berubah menjadi lelucon, institusi-institusi politik harus dibangun sedemikian rupa agar pemindahan kekuasaan atas sebuah wilayah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain tidak lebih dari sebuah peristiwa yang sangat tidak penting, tidak menguntungkan atau merugikan siapa pun. Orang tidak memiliki konsepsi yang benar mengenai apa yang dibutuhkan untuk hal ini. Oleh karena itu diperlukan beberapa contoh untuk menjelaskannya.

Coba simak peta linguistik dan kelompok nasional di Eropa Timur atau Tengah dan perhatikan seberapa sering, misalnya, di Bohemia utara dan barat, wilayah perbatasan keduanya dilalui jalur kereta api. Di sini, di bawah kondisi intervensionisme dan etatisme, tidak ada cara untuk menyesuaikan batas negara dengan batas linguistik. Percuma mengoperasikan kereta api Ceko di tanah Jerman, dan lebih percuma lagi untuk mengoperasikan jalur kereta api bila setiap beberapa mil jalur itu dikelola manajemen berbeda.

Demikian pula, tidak mungkin mengenakan hambatan tarif beserta segala formalitasnya untuk setiap beberapa menit atau seperempat jam perjalanan kereta api. Mudah dimengerti mengapa para etatis (pendukung kekuasaan negara) dan intervensionis sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan “geografis” dan “ekonomis” wilayah-wilayah seperti itu tidak boleh “dipecah” dan bahwa wilayah dimaksud harus berada di bawah kekuasaan satu “penguasa” tunggal. (Jelas, setiap negara berupaya untuk membuktikan bahwa ia pantas dan mampu memainkan peran sebagai penguasa dalam kondisi tersebut.) Liberalisme tidak memiliki masalah dalam hal ini. Jalur kereta api pribadi, jika cukup bebas dari gangguan pemerintah, dapat melintasi wilayah berbagai negara tanpa masalah. Jika tidak ada hambatan tarif dan tidak ada pembatasan terhadap perpindahan orang, binatang, atau barang-barang, maka tidak penting apakah perjalanan kereta api dalam beberapa jam melintasi batas negara

lebih sering atau kurang sering.

Peta linguistik juga mengungkapkan keberadaan kantong-kantong nasional. Karrena tidak ada wilayah berkebangsaan sama yang menghubungkan mereka dengan kelompok utama orang-orang sebangsanya, teman sebangsa tinggal bersama dalam permukiman tertutup atau pulau linguistik. Di bawah kondisi politik saat ini, mereka tidak dapat digabungkan ke dalam negara asal mereka. Fakta bahwa wilayah yang tercakup dalam negara sekarang dilindungi oleh tembok tarif membuat kontinuitas wilayah (teritori) yang tidak terputus sebuah keharusan politik. Sebuah “wilayah jajahan” yang kecil, yang terisolasi dari wilayah yang berbatasan langsung dengannya akibat proteksionisme dan tindakan-tindakan proteksionis lain, akan menghadapi pencekikan ekonomi (*economic strangulation*, pemutusan hubungan dagang). Namun, dengan adanya perdagangan bebas dan karena negara membatasi diri pada pelestarian hak milik pribadi, tidak ada yang lebih mudah selain dari penyelesaian masalah ini. Tidak ada pulau linguistik yang harus merelakan pelanggaran atas hak-haknya sebagai bangsa karena ia tidak terhubung dengan kelompok utama orang-orang sebangsanya oleh jembatan teritorial yang dihuni orang-orang berkebangsaan sama.

“Masalah koridor” yang terkenal buruk hanya muncul dalam sistem imperialis-etatisintervensionis. Sebuah negara pedalaman percaya bahwa ia membutuhkan “koridor” yang menuju ke laut untuk menjaga agar perdagangan luar negerinya bebas dari pengaruh kebijakan intervensionis dan etatis dari negara-negara yang wilayahnya memisahkannya dari laut. Jika perdagangan bebas merupakan hal yang umum berlaku, akan sulit untuk melihat manfaat kepemilikan “koridor” itu oleh negara pedalaman.

Transfer dari satu “zona ekonomi” (dalam pemahaman etatis) ke zona ekonomi lain memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Seseorang hanya perlu mengingat, contohnya, industri kapas di Alsatia, yang telah mengalami hal ini sebanyak dua kali, atau industri tekstil Polandia di Silesia Atas, dsb. Jika perubahan

afiliasi politik sebuah wilayah mengakibatkan keuntungan atau kerugian bagi penduduknya, maka kebebasan mereka untuk memilih negara mereka pada hakekatnya terbatas. Seseorang dapat berbicara mengenai hak penentuan nasib sendiri yang sejati hanya jika keputusan setiap individu berasal dari keinginan bebasnya sendiri, dan bukan dari rasa takut kehilangan atau harapan untuk mendapatkan keuntungan.

Dunia kapitalis yang diorganisir berdasarkan prinsip liberal tidak mengenal pembagian zona “ekonomi”. Dalam dunia seperti itu, seluruh permukaan bumi merupakan satu kesatuan wilayah ekonomi. Hak menentukan nasib sendiri hanya menguntungkan mereka yang mengorbankan mayoritas. Agar kelompok minoritas juga mendapat perlindungan, diperlukan langkah-langkah domestik dan dari langkah-langkah itu akan kita bahas langkah-langkah menyangkut kebijakan nasional tentang pendidikan.

Dewasa ini hampir semua negara menerapkan wajib belajar, atau setidaknya mewajibkan belajar di rumah (*private instruction*). Orang tua diwajibkan mengirim anak-anak mereka ke sekolah selama beberapa tahun, atau, sebagai gantinya, memberi pelajaran di rumah. Percuma membahas alasan yang diajukan untuk mendukung atau menolak wajib belajar saat masalahnya masih menjadi isu hidup. Alasan-alasan itu sama sekali tidak berhubungan dengan permasalahan yang ada sekarang. Hanya ada satu argumen yang relevan, viz., bahwa ketaatan terhadap kebijakan wajib belajar benar-benar tidak sesuai dengan upaya menciptakan perdamaian abadi.

Penduduk London, Paris, dan Berlin pasti menganggap pernyataan itu tidak masuk akal. Apa kaitan antara wajib belajar dengan perang dan perdamaian? Namun, seseorang tidak boleh menilai permasalahan ini, seperti ia menilai hal-hal lain, semata-mata dari kacamata orang-orang Eropa Barat. Di London, Paris, dan Berlin, masalah wajib belajar dapat dengan mudah diatasi. Penduduk yang tinggal di kota-kota tersebut dan yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah secara umum dapat dianggap sebagai bangsa yang homogen. Namun, bahkan orang-orang yang tidak berbahasa

Inggris yang tinggal di London mengetahui pelajaran diberikan dalam bahasa Inggris, dan bukan bahasa lain, semata-mata untuk kepentingan anak-anak, dan hal sama berlaku di Paris dan Berlin.

Meskipun begitu, masalah wajib belajar sama sekali berbeda di wilayah-wilayah luas di mana penduduk yang berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda hidup berdampingan dan berbaur dalam sebuah poliglot yang sangat beragam. Di sini pertanyaan tentang bahasa apa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah menjadi penting. Sebuah keputusan mau tidak mau, seiring dengan waktu, menentukan kebangsaan seluruh wilayah. Sekolah bisa mengucilkan anak-anak dari kebangsaan orang tua mereka dan dapat digunakan sebagai alat untuk menindas orang-orang dari berbagai kebangsaan. Siapa pun yang mengontrol sekolah memiliki kekuatan untuk merugikan orang-orang dari kebangsaan lain dan menguntungkan dirinya sendiri.

Usulan agar setiap anak dikirim ke sekolah yang menggunakan bahasa orang tuanya bukan usulan yang dapat menyelesaikan masalah. Pertama-tama, bahkan di luar masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak dengan latar belakang lingustik yang berbeda-beda, tidak selalu mudah menentukan apa bahasa orang tua mereka sebenarnya. Dalam wilayah-wilayah poliglot (lebih dari satu bahasa) banyak orang diwajibkan oleh profesi mereka untuk menggunakan semua bahasa yang digunakan di negara itu.

Lagipula, biasanya tidak mungkin bagi individu—lagi-lagi karena pertimbangan mata pencariannya—untuk menyatakan identitas kebangsaannya secara terbuka. Dalam sistem intervensionisme, hal itu bisa membuatnya kehilangan konsumen yang berasal dari kebangsaan lain atau pekerjaan dengan pengusaha dari kebangsaan berbeda. Lagi pula, banyak orang tua lebih memilih mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang berbeda kebangsaan karena mereka menghargai manfaat bilingualisme atau asimilasi dengan orang-orang berkebangsaan lain dibandingkan kesetiaan pada orang-orang sebangsa. Jika seseorang membiarkan orang tua memilih sekolah untuk anak-anak mereka, maka ia menghadapi



mereka pada segala kemungkinan koersi politik. Di semua wilayah dengan keragaman kebangsaan, sekolah merupakan imbalan politik yang paling berharga. Sekolah tidak bisa dilepaskan dari sifat politisnya selama ia menjadi institusi publik dan wajib. Dalam kenyataan, hanya ada satu jalan keluar: negara, pemerintahan, dan hukum tidak boleh dalam cara apa pun terlibat dalam pengajaran atau pendidikan. Dana publik tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Pengasuhan dan pendidikan orang-orang muda harus diserahkan sepenuhnya kepada orang tua dan institusi serta asosiasi swasta.

Lebih baik bagi sekelompok anak laki-laki untuk tumbuh tanpa pendidikan formal daripada menikmati manfaat sekolah hanya untuk menghadapi resiko, begitu mereka dewasa, dibunuh atau cacat. Lebih baik buta huruf tetapi sehat daripada berpendidikan tetapi cacat. Namun, meski pun kita menghilangkan pemaksaan spiritual melalui wajib belajar, kita sama sekali belum melakukan semua yang harus dilakukan untuk menghapus semua sumber-sumber friksi di antara orang-orang kebangsaan berbeda yang hidup di wilayah dengan berbagai bahasa (politglot).

Sekolah merupakan sarana untuk menindas orang-orang berkebangsaan lain—mungkin yang paling berbahaya, dalam pemikiran kita—namun bukan satu-satunya alat penindasan. Semua campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat menjadi alat untuk menghukum orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda dari kelompok yang memerintah. Oleh karena itu, demi menjaga perdamaian, aktivitas pemerintah harus dibatasi di lingkup di mana, dalam pengertian yang paling ketat, aktivitas pemerintah diperlukan.

Tanpa aparat pemerintah kita tidak bisa melindungi dan melestarikan kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kesehatan individu. Namun, bahkan aktivitas peradilan dan polisi yang dilakukan untuk tujuan-tujuan di atas pun dapat membahayakan di wilayah-wilayah di mana apa pun bisa dijadikan alasan untuk mendiskriminasi satu kelompok dengan kelompok lain dalam kegiatan resmi pemerintah.

Hanya di negara di mana tidak ada insentif khusus untuk sikap memihak tidak ada alasan untuk takut bahwa pejabat pengadilan (*magistrate*) yang bertugas menegakkan hukum untuk melindungi kehidupan, kebebasan, kekayaan, dan kesehatan akan bertindak berat sebelah (bias). Namun, di mana perbedaan agama, kebangsaan, atau perbedaan semacam itu membuat penduduk terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam sehingga tidak ada ruang untuk denyut keadilan atau kemanusiaan dan tidak ada ruang tersisa selain untuk kebencian, situasinya benar-benar berbeda. Maka hakim yang dengan sadar, atau lebih sering di luar kesadarannya, bersikap memihak mengira ia memenuhi panggilan tugas yang lebih tinggi saat ia menggunakan kekuasaan dan hak prerogatif kedudukannya untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Sejauh aparat pemerintahan tidak memiliki fungsi lain selain menjaga kehidupan, kebebasan, kekayaan, dan kesehatan, pada dasarnya mungkin membuat peraturan yang membatasi secara ketat wilayah di mana otoritas administrasi dan pengadilan bebas bertindak sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuat penilaian atau keputusan sesuai kehendak mereka sendiri atau sewenang-wenang atau subyektif. Namun, begitu pemerintah diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian (terlibat) dalam manajemen produksi, begitu aparat pemerintah diminta untuk menentukan pembagian barang-barang dari tatanan yang lebih tinggi, mustahil menuntut pejabat administratif mengikuti seperangkat peraturan dan regulasi yang mengikat yang menjamin hak-hak tertentu setiap warga negara.

Hukum pidana yang dirancang untuk menghukum pembunuh, setidaknya sampai batas tertentu, membuat garis yang jelas antara apa yang bisa dianggap sebagai pembunuhan dan apa yang bukan merupakan pembunuhan dan dengan demikian membatasi wilayah di mana pejabat pengadilan bebas membuat pertimbangannya sendiri. Tentu saja, setiap pengacara tahu benar bahwa hukum yang terbaik sekali pun bisa diselewengkan (dipelintir), dalam kasus-

kasus kongkrit, dalam interpretasi, penerapan, dan administrasi. Namun, dalam kasus biro pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola fasilitas transportasi, tambang, atau tanah masyarakat (publik), sejauh apa pun seseorang membatasi kebebasannya bertindak di bidang lain (yang telah dibahas di bagian ke-2), yang paling banyak bisa dilakukan oleh seseorang untuk membuatnya tetap tidak memihak berkaitan dengan masalah-masalah kontroversial menyangkut kebijakan nasional adalah dengan memberi petunjuk yang ditulis dalam bentuk generalisasi tanpa makna. Seseorang harus memberikan kelonggaran dalam banyak hal karena seseorang tidak dapat mengetahui sebelumnya dalam keadaan bagaimana biro pemerintah itu akan bertindak. Oleh sebab itu kesempatan dibiarkan terbuka lebar untuk kesewenang-wenangan, pemihakan, dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Bahkan di wilayah yang dihuni orang-orang dari berbagai kebangsaan ada kebutuhan untuk sebuah kesatuan administrasi. Seseorang tidak bisa menugaskan di setiap sudut jalan polisi Jerman dan Ceko pada saat yang bersamaan, masing-masing bertugas melindungi orang-orang sebangsanya saja. Dan sekali pun ini bisa dilakukan, masih ada pertanyaan tentang siapa yang akan melakukan intervensi seandainya warga dari dua kebangsaan yang berbeda itu berada dalam situasi yang membutuhkan intervensi. Kerugian yang muncul akibat kebutuhan bagi sebuah kesatuan administrasi di wilayah-wilayah ini tidak bisa dihindari. Namun, jika kesulitan sudah terlanjur ada bahkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kesehatan, seseorang tidak bisa meningkatkan proporsinya di luar kewajaran dengan memperluas cakupan kegiatan negara di bidang-bidang lain di mana, sudah menjadi kewajaran, untuk memberi ruang bagi penilaian sewenang-wenang.

Wilayah-wilayah dunia yang luas sudah dihuni, bukan oleh warga satu bangsa, satu ras atau satu agama saja, namun oleh gabungan berbagai macam orang. Sebagai akibat migrasi yang mengikuti perubahan lokasi produksi, banyak wilayah terus menerus

dihadapkan pada masalah yang disebabkan oleh keragaman penduduk. Jika seseorang tidak bermaksud memperparah secara artifisial gesekan yang terjadi saat kelompok-kelompok yang berbeda hidup berdampingan, ia harus membatasi tugas-tugas negara pada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh negara.

#### 4. Nasionalisme

Selama negara diperintah oleh penguasa monarki yang lalim, ide untuk menyesuaikan batas-batas negara dengan batas-batas kebangsaan tidak bisa diterima. Jika seorang penguasa ingin memasukkan sebuah provinsi ke dalam wilayah kekuasaannya, ia tidak peduli sedikit pun apakah penduduknya—orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya—menyetujui pergantian pemimpin atau tidak. Satu-satunya pertimbangan yang dianggap relevan adalah apakah kekuatan militer yang ada cukup untuk menduduki dan mempertahankan wilayah tersebut. Seseorang membenarkan tindakannya secara terbuka melalui klaim legal yang sedikit banyak artifisial. Kebangsaan penduduk wilayah itu sama sekali tidak diperhitungkan.

Dengan munculnya liberalisme maka pertanyaan tentang bagaimana batas-batas negara harus dibuat untuk pertama kali menjadi masalah yang terlepas dari pertimbangan militer, sejarah, dan hukum. Liberalisme, yang mendirikan negara berdasarkan keinginan mayoritas orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, melarang semua pertimbangan militer yang sebelumnya menentukan batas-batas negara. Liberalisme menolak hak untuk menaklukkan. Liberalisme menganggap tidak masuk akal pembicaraan tentang "*strategic frontiers*" (wilayah perbatasan strategis) dan menganggap tuntutan agar sebidang tanah dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara semata-mata untuk menguasai *glacis* (istilah teknik militer, lereng buatan yang terbuat dari tanah di benteng-benteng pertahanan Eropa yang memungkinkan pihak yang menjaga benteng melancarkan serangan tak putus terhadap para penyerang) sebagai tuntutan yang tidak bisa

dipahami. Liberalism tidak mengakui hak historis seorang pangeran untuk mewarisi sebuah provinsi. Dalam pandangan seorang liberal, seorang raja hanya berkuasa atas penduduk, bukan wilayah di mana penduduk yang tinggal di dalamnya hanya dianggap sebagai pelengkap. Monarki, berdasarkan anugerah Tuhan, memiliki gelar yang berhubungan dengan wilayah, e.g., “Raja Perancis”. Rajaraja yang dipilih oleh liberalisme memperoleh gelar yang tidak berhubungan dengan nama wilayah melainkan dengan orang-orang yang berada di bawah pemerintahan mereka sebagai pemimpin monarki konstitusional. Demikianlah maka Louis Philippe memiliki gelar “Raja Perancis”; selain itu juga ada “Raja Belgia” sebagaimana dulu ada “Raja Hellenes.”

Liberalisme juga menciptakan sistem hukum yang dapat mengekspresikan keinginan sekumpulan orang untuk menjadi bagian atau untuk tidak menjadi bagian negara tertentu, yaitu sistem yang disebut referendum. Pilihan penduduk suatu wilayah atas negara yang ingin mereka jadikan negara mereka harus dikukuhkan melalui pemilihan umum. Namun, bahkan jika kondisi politik dan ekonomi yang dibutuhkan (misalnya kebijakan nasional yang menyangkut pendidikan) dipenuhi agar plebisit tidak berkembang menjadi sebuah lelucon, bahkan jika jajak pendapat terhadap penduduk setiap komunitas untuk menentukan negara mana yang mereka inginkan dianggap cukup, dan pemilihan diulang setiap kali terjadi perubahan situasi, ada beberapa masalah yang tidak dapat dipecahkan yang tetap akan menjadi sumber gesekan di antara bangsa-bangsa yang berbeda. Situasi yang memaksa seseorang menjadi anggota negara tertentu di luar keinginannya, sekali pun hal itu diputuskan dalam pemilihan, sama buruknya dengan akibat yang harus ditanggung sebagai konsekwensi pendudukan militer. Namun kondisi itu dua kali lebih sulit bagi individu yang hubungannya dengan mayoritas sesama warganya terputus oleh kendala bahasa.

Menjadi anggota manoritas sebuah bangsa selalu berarti menjadi warga negara kelas dua. Pembahasan masalah-masalah politik tentu saja harus dilakukan melalui bahasa tertulis mau pun lisan—

dalam pidato-pidato, artikel koran, dan buku. Namun, sarana pencerahan dan debat politik ini tidak tersedia bagi kaum linguistik minoritas sebagaimana halnya untuk mereka yang bahasa ibunya—bahasa yang digunakan sehari-hari—adalah bahasa yang dipakai dalam diskusi-diskusi itu. Bagaimana pun juga, pemikiran politik sebuah bangsa merupakan refleksi ide-ide yang terdapat dalam kepastakaan politiknya. Tertuang dalam hukum tertulis, hasil diskusi politik memiliki arti penting langsung bagi warga negara yang berbicara dalam bahasa asing karena ia harus mentaati hukum; namun ia memiliki perasaan bahwa ia tidak diikutsertakan dalam partisipasi efektif dalam membentuk keinginan penguasa legislatif atau setidaknya ia tidak diijinkan untuk bekerjasama dalam membentuknya seperti halnya mereka yang bahasa aslinya sama dengan bahasa mayoritas yang memerintah. Dan ketika ia muncul di hadapan seorang hakim atau pejabat administrasi dalam sebuah tuntutan hukum atau petisi, ia berdiri di hadapan orang-orang yang pikiran politiknya asing baginya karena dikembangkan di bawah pengaruh ideologi yang berbeda.

Namun, terlepas dari semua itu kewajiban bagi anggota minoritas untuk tampil di hadapan sidang pengadilan dan pejabat administratif menggunakan bahasa yang asing bagi mereka merugikan mereka dalam berbagai hal. Ada perbedaan besar, saat seseorang diadili, antara kemampuan untuk berbicara secara langsung kepada hakim dan keharusan menggunakan jasa penerjemah. Di setiap kesempatan, anggota minoritas suatu bangsa dibuat merasa bahwa ia hidup di antara orang asing dan bahwa ia, bahkan sekali pun hal itu tidak diakui oleh hukum, adalah warga kelas dua.

Semua faktor-faktor yang tidak menguntungkan ini dirasakan sebagai sebuah penindasan bahkan dalam negara dengan konstitusi liberal di mana aktivitas pemerintahan dibatasi hanya untuk melindungi nyawa dan harta benda warganya. Namun semua faktor-faktor yang tidak menguntungkan itu tidak bisa ditolerir di negara yang intervensionis atau sosialis. Kalau penguasa administratif berhak untuk campur tangan di mana saja sesuai keinginan mereka,

jika hakim dan pejabat diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam membuat keputusan sehingga terbuka kemungkinan bagi praduga politik, maka anggota minoritas sebuah bangsa akan menjadi korban keputusan pengadilan yang semena-mena dan penindasan oleh fungsionaris publik yang menjadi bagian dari mayoritas yang memerintah. Apa yang terjadi ketika sekolah dan gereja bukan saja tidak independen, namun juga diatur oleh pemerintah, telah dibahas sebelumnya.

Inilah saatnya seseorang harus mencari akar nasionalisme agresif yang kita saksikan hari ini. Upaya untuk menelusuri penyebab alamiah dan bukan penyebab politik dari antagonisme penuh kekerasan yang hidup di antara bangsa-bangsa dewasa ini sepenuhnya salah. Semua tanda-tanda antipati yang disinyalir senantiasa hadir di antara bangsa-bangsa yang biasanya disodorkan sebagai bukti juga ada dalam setiap bangsa.

Orang-orang Bavaria membenci orang-orang Prusia dan sebaliknya. Tak kalah dalam kebencian yang ada di antara kelompok-kelompok individu di Perancis dan Polandia. Akan tetapi, orang-orang Jerman, Polandia, dan Perancis dapat hidup dengan damai dalam negara mereka sendiri. Yang memberikan makna politik pada antipati orang-orang Polandia terhadap orang Jerman dan orang Jerman terhadap orang Polandia adalah aspirasi kedua bangsa itu untuk menguasai kendali politik di wilayah-wilayah perbatasan di mana orang-orang Jerman dan Polandia hidup berdampingan dan menggunakannya untuk menindas warga bangsa masing-masing. Hal yang memicu kebencian di antara bangsa-bangsa menjadi api yang menghanguskan adalah kenyataan bahwa orang ingin menggunakan sekolah untuk membuat anak-anak tercerabut dari bahasa nenek moyang mereka dan untuk menggunakan pengadilan dan kantor administratif, langkah-langkah politik dan ekonomi, dan perampasan harta benda untuk menghukum mereka yang berbicara dalam bahasa asing.

Karena orang siap menggunakan kekerasan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masa depan politik negara

mereka sendiri, mereka membuat sebuah sistem penindasan di wilayah-wilayah poliglot (wilayah dengan banyak bahasa) yang mengancam perdamaian dunia. Selama program liberal tidak sepenuhnya dijalankan di wilayah yang dihuni campuran berbagai bangsa, kebencian di antara warga negara yang berbeda kebangsaan semakin lama semakin mendalam dan akan berlanjut untuk menyulut perang dan pemberontakan baru.

## 5. Imperialisme

Hasrat menaklukkan yang dimiliki para raja dengan kekuasaan absolute di abad-abad lampau ditujukan untuk memperluas cakupan kekuasaan mereka dan menambah kekayaan mereka. Tidak ada pangeran yang cukup kuat karena hanya dengan kekuatan senjata ia bisa mempertahankan kekuasaannya dari musuh internal dan eksternal. Tidak ada pangeran yang cukup kaya karena ia membutuhkan uang untuk merawat tentaranya dan membiayai para pengikutnya.

Bagi negara liberal, pertanyaan apakah batas-batas wilayahnya akan diperluas atau tidak merupakan pertanyaan yang tidak penting. Kekayaan tidak dapat diraih dengan cara menduduki provinsi-provinsi baru, karena “pendapatan” yang diperoleh dari sebuah wilayah harus digunakan untuk menutup biaya administrasinya. Bagi negara liberal, yang tidak memiliki rencana agresif, meningkatkan kekuatan militernya bukan hal penting. Demikianlah maka parlemen liberal menolak semua upaya untuk meningkatkan potensi perang negara mereka dan menentang semua kebijakan yang bertujuan agresi dan mencaplok wilayah lain.

Namun kebijakan liberal tentang perdamaian yang, di awal tahun enampuluhan di abad yang lampau, saat liberalisme meraih kemenangan demi kemenangan, dianggap sudah kokoh, setidaknya di Eropa, didasarkan atas asumsi bahwa penduduk setiap wilayah memiliki hak untuk memutuskan dengan negara mana mereka ingin bergabung. Akan tetapi, untuk memastikan terjaminnya hak ini, mengingat kekuatan-kekuatan yang bersifat absolut tidak



berkeinginan melepaskan hak-hak istimewa mereka secara damai, pertama-tama harus ada perang dan revolusi serius terlebih dulu. Berakhirnya dominasi asing di Italia, kelangsungan orang-orang Jerman di Schleswig-Holstein saat dihadapkan pada ancaman denasionalisasi, pembebasan Polandia dan Slavia Selatan, hanya dapat diupayakan dengan kekuatan senjata. Hanya di satu tempat dari berbagai tempat di mana tatanan politik yang ada dihadapkan pada tuntutan untuk hak menentukan nasib sendiri masalahnya bisa diselesaikan secara damai: Inggris yang liberal memerdekakan kepulauan Ionan. Di tempat lain situasi yang sama berakhir dengan perang dan revolusi. Perjuangan menyatukan Jerman berkembang menjadi konflik modern Perancis-Jerman yang membawa malapetaka; masalah Polandia tetap tak terpecahkan karena tsar menumpas pemberontakan demi pemberontakan; hanya sebagian masalah Balkan terselesaikan; dan kemustahilan pemecahan masalah monarki Hapsburg melawan keinginan dinasti yang memerintah pada akhirnya berujung pada insiden yang menjadi akibat langsung Perang Dunia.

Imperialisme modern dibedakan dari kecenderungan ekspansionis pemerintahan absolut para pangeran oleh kenyataan bahwa semangat yang menggerakkannya bukanlah anggota dinasti yang memerintah, bukan juga kalangan bangsawan, birokrasi, atau korps perwira angkatan bersenjata yang bertekad meraih kekayaan dan kejayaan pribadi dengan menjarah sumber daya wilayah yang diduduki, melainkan rakyat banyak, yang melihatnya sebagai sarana yang tepat untuk melestarikan kemerdekaan bangsa. Mengingat sistem kebijakan antiliberal yang rumit, yang sejauh ini telah meluaskan fungsi negara sehingga hanya sedikit bidang kegiatan manusia bebas dari campur tangan pemerintah, sia-sia mengharapkan bahkan solusi yang cukup memuaskan bagi masalah politik di wilayah di mana warga dari beberapa kebangsaan hidup berdampingan. Jika pemerintahan dari semua wilayah ini tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sepenuhnya liberal, tidak perlu dipertanyakan lagi soal penerapan hak untuk berbagai

kelompok-kelompok kebangsaan untuk mendapat perlakuan sama. Yang ada hanyalah yang memerintah dan yang yang diperintah. Satu-satunya pilihan adalah menjadi palu atau paron. Demikianlah maka perjuangan untuk membuat negara sekuat mungkin—yang bisa meluaskan kontrolnya ke semua wilayah dengan berbagai kebangsaan—menjadi syarat mutlak bagi pelestarian bangsa.

Namun permasalahan wilayah dengan bahasa campuran tidak terbatas hanya pada negara-negara yang sudah berdiri lama. Kapitalisme membuka wilayah baru yang menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk produksi dari sebagian besar wilayah negara-negara yang sudah lama dihuni. Modal dan tenaga kerja mengalir ke lokasi yang paling menguntungkan. Perpindahan penduduk yang mengikuti aliran modal dan tenaga kerja melampaui perpindahan penduduk dunia sebelumnya. Hanya segelintir negara bisa mengusahakan agar imigran mereka dapat pindah ke wilayah di mana kekuatan politik berada di tangan orang-orang setanah air. Bila kondisi semacam ini tidak ada, migrasi menimbulkan konflik yang biasanya muncul di wilayah dengan lebih dari satu bahasa. Dalam kasus-kasus tertentu, yang tidak akan kita bahas di sini, permasalahan di daerah kolonisasi di seberang lautan berbeda dengan masalah yang ada di negara-negara Eropa yang sudah lama berdiri. Namun, konflik yang lahir dari situasi yang kurang memuaskan bagi kelompok minoritas pada dasarnya sama. Di satu sisi, hasrat setiap negara untuk melindungi warganya dari nasib seperti itu berakhir dengan perjuangan untuk mengakuisisi koloni yang cocok untuk dihuni oleh orang-orang Eropa, dan di sisi lain pada penerapan kebijakan bea impor untuk melindungi produksi dalam negeri yang beroperasi dalam kondisi yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan keunggulan industri luar negeri, dengan harapan perpindahan pekerja tidak diperlukan. Bahkan, untuk memperluas pasar yang dilindungi seluas-luasnya, berbagai upaya dilakukan untuk mengambil alih wilayah yang dianggap tidak cocok untuk dihuni orang-orang Eropa. Kita bisa mencatat era tahun tujuh puluhan di akhir abad yang lampau sebagai

awal imperialisme modern, saat negara-negara industri Eropa mulai meninggalkan kebijakan perdagangan bebas dan memulai persaingan untuk menguasai “pasar” kolonial di Afrika dan Asia..

Istilah “imperialisme” awalnya merujuk pada Inggris “untuk menjelaskan ciri-ciri kebijakan modern perluasan wilayah. Imperialisme Inggris awalnya ditujukan tidak semata-mata untuk menguasai wilayah-wilayah baru namun sebagai upaya untuk menciptakan wilayah dengan kebijakan perdagangan seragam dari berbagai kepemilikan yang berada di bawah kekuasaan raja Inggris. Ini merupakan akibat dari situasi yang tidak biasa di mana Inggris tiba-tiba menjadi negara asal dari berbagai wilayah koloni yang paling luas di dunia. Namun, tujuan akhir kaum imperialis Inggris dalam menciptakan sistem cukai yang seragam yang berlaku di negara jajahan dan tanah air mereka sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh akuisisi kolonial Jerman, Italia, Perancis, Belgia, dan negara-negara Eropa lain, yaitu untuk menciptakan pasar ekspor yang terjaga.

Tak satu pun sasaran komersial penting yang dituju oleh kebijakan imperialisme tercapai. Impian tentang sistem cukai yang sepenuhnya mengacu pada sistem Inggris tetap tidak terwujud. Wilayah yang dicaplok oleh negara-negara Eropa dalam beberapa dekade terakhir, mau pun semua wilayah di mana mereka bisa mendapatkan “konsesi”, memainkan peran yang bersifat sangat subordinat dalam menyediakan bahan baku dan barang-barang setengah jadi untuk pasar dunia dan dalam konsumsi mereka untuk produk-produk industri sehingga tidak ada perubahan mendasar untuk kondisi tersebut yang dapat dihasilkan dari pengaturan semacam itu. Guna mencapai tujuan yang disasar imperialisme, tidaklah cukup bagi negara-negara Eropa untuk menduduki wilayah yang dihuni oleh orang-orang liar yang tidak mampu melawan. Mereka harus menggapai wilayah-wilayah yang berada dalam penguasaan orang-orang yang siap dan dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Dan di sinilah kebijakan imperialisme kandas atau tak lama lagi akan kandas. Di Abyssinia, Meksiko, di Kaukasus,

Persia, di Cina—di mana-mana kita menyaksikan agresi imperialis mundur teratur atau setidaknya menghadapi masalah besar.

## 6. Politik Penjajahan

Pertimbangan dan tujuan yang menjadi pedoman politik penjajahan kekuatan-kekuatan Eropa sejak era berbagai penemuan besar sangat bertolak belakang dengan semua prinsip liberalisme. Gagasan dasar penjajahan adalah memanfaatkan keunggulan militer ras kulit putih atas anggota ras lain. Bangsa Eropa, dilengkapi dengan senjata dan semua penemuan yang dihasilkan peradaban, berangkat untuk menundukkan bangsa-bangsa yang lebih lemah, menjarah harta benda mereka, dan memperbudak mereka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperhalus dan menyembunyikan motif politik penjajahan yang sebenarnya dengan memberi alasan bahwa satu-satunya tujuan penjajahan adalah untuk membuat orang-orang primitif ikut menikmati hikmat dari peradaban Eropa.

Bahkan dengan menganggap itu adalah tujuan sebenarnya dari pemerintah yang mengirim para penakluk ke belahan dunia yang jauh, kaum liberal tetap tidak bisa melihat alasan apa pun untuk menerima penjajahan seperti ini sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan. Jika, seperti keyakinan kita, peradaban Eropa benar-benar lebih unggul dari peradaban suku-suku primitif di Afrika, atau bahkan peradaban Asia—sekali pun peradaban Asia mungkin dalam cara mereka sendiri layak dihargai—peradaban Eropa harus mampu membuktikan keunggulannya dengan cara mengilhami mereka agar menerima peradaban Eropa atas keinginan mereka sendiri. Adakah bukti kemandulan peradaban Eropa yang lebih menyedihkan dari kenyataan bahwa ia hanya bisa disebarakan melalui api dan pedang?

Tidak ada babak sejarah yang begitu berdarah selain sejarah penjajahan. Darah ditumpahkan dengan sia-sia dan tanpa alasan. Tanah subur dicabik-cabik; bangsa-bangsa dihancurkan dan dibinasakan. Tak ada yang bisa memperlunak atau membenarkan semua ini. Kekuasaan orang-orang Eropa di Afrika dan daerah-daerah penting

di Asia bersifat mutlak. Ini sangat bertolak belakang dengan semua prinsip liberalisme dan demokrasi, dan tidak ada keraguan lagi bahwa kita harus berjuang menghapuskannya. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana keadaan yang tidak bisa diterima ini dilenyapkan dengan cara yang paling tidak membahayakan.

Penyelesaian paling sederhana dan radikal adalah bagi pemerintah Eropa untuk menarik pejabat, tentara, dan polisinya dari wilayah-wilayah ini dan membebaskan penduduknya dari kontrol mereka. Tidak penting apakah hal ini dilakukan dengan segera atau melalui pemungutan suara yang diselenggarakan secara bebas oleh kaum pribumi sebelum penyerahan daerah-daerah jajahan. Ini karena hampir tidak ada keraguan tentang hasil pemilihan yang benar-benar bebas. Pemerintahan Eropa di wilayah-wilayah jajahan di seberang lautan negeri tidak bisa mengandalkan kesepakatan rakyatnya.

Akibat langsung dari penyelesaian radikal ini adalah, jika bukan anarki, setidaknya konflik berkepanjangan di wilayah yang ditinggalkan oleh orang-orang Eropa. Bisa dikatakan bahwa sampai saat ini penduduk pribumi hanya mempelajari kebiasaan buruk orang-orang Eropa, bukan kebiasaan baiknya. Ini bukan kesalahan penduduk pribumi, melainkan kesalahan para penakluk Eropa, yang hanya mengajarkan hal-hal buruk kepada mereka. Mereka membawa segala macam senjata dan mesin pemusnah ke daerah jajahan; mereka mengirimkan orang-orang paling jahat dan paling brutal sebagai pejabat dan petugas; dengan pedang mereka mendirikan pemerintahan kolonial yang kekejamannya menyaingi sistem despot kaum Bolshevik.

Bangsa Eropa seharusnya tidak terkejut jika contoh buruk yang mereka berikan kepada daerah jajahan kini menghasilkan buah kejahatan. Bagaimana pun juga, mereka tidak berhak mengeluh dengan penuh kemunafikan tentang rendahnya moralitas para penduduk pribumi. Mereka juga tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa orang-orang pribumi belum cukup matang untuk kemerdekaan dan bahwa mereka masih membutuhkan setidaknya beberapa tahun pendidikan di bawah lecutan penguasa asing

sebelum mereka mampu berdiri sendiri. “Pendidikan” itu sendiri setidaknya ikut bertanggung jawab atas keadaan mengerikan yang saat ini terjadi di daerah-daerah jajahan, meskipun akibatnya tidak akan terlihat jelas sampai setelah penarikan pasukan dan pejabat Eropa.

Namun, mungkin akan muncul pendapat bahwa merupakan tugas bangsa Eropa, sebagai anggota ras unggul, guna menghindari anarki yang diperkirakan akan meletus setelah mereka mengosongkan wilayah jajahan, untuk mempertahankan kekuasaan mereka demi kepentingan dan kebaikan penduduk pribumi semata. Untuk memperkuat pendapat ini, akan dilukiskan gambaran mengerikan tentang keadaan Afrika Tengah dan berbagai wilayah Asia sebelum pemerintahan Eropa didirikan. Seseorang bisa mengingat perburuan budak yang dilakukan orang-orang Arab di Afrika Tengah dan kebiadaban yang dilakukan para despot India. Tentu saja, argumen semacam ini penuh kemunafikan, dan orang tidak boleh lupa, misalnya, bahwa perdagangan budak di Afrika maju hanya karena keturunan orang-orang Eropa di wilayah-wilayah jajahan di Amerika memasuki pasar budak sebagai pembeli. Namun, kita tidak perlu terlibat dalam pro dan kontra mengenai jalan pikiran seperti ini.

Jika semua pendapat yang dikemukakan untuk mendukung pelestarian kekuasaan Eropa di wilayah jajahan berdalih untuk kepentingan pribumi, maka seseorang harus mengatakan bahwa akan lebih baik jika kekuasaan itu diakhiri selamanya. Tak seorang pun berhak ikut campur dalam urusan orang lain untuk kepentingannya sendiri, dan tak seorang pun boleh, demi kepentingannya sendiri, berpura-pura bertindak tanpa pamrih semata-mata demi kepentingan orang lain.

Namun, ada pendapat lain yang mendukung pelestarian kekuasaan dan pengaruh Eropa di wilayah-wilayah jajahan. Jika orang-orang Eropa tidak pernah menaklukkan wilayah-wilayah jajahan di daerah tropis, jika sistem perekonomian mereka tidak memiliki ketergantungan cukup besar pada impor bahan baku tropis dan produk

pertanian luar negeri yang mereka bayar dengan barang-barang industri, masih tetap mungkin untuk membahas dengan kepala dingin apakah lebih baik atau tidak untuk menarik wilayah-wilayah ini ke dalam jaringan pasar dunia. Tetapi, karena penjajahan telah memaksa seluruh wilayah ini masuk ke dalam kerangka komunitas perekonomian dunia, keadaannya menjadi sangat berbeda.

Sebagian besar perekonomian Eropa saat ini tergantung pada keterlibatan Afrika dan sebagian besar wilayah Asia dalam perekonomian dunia sebagai pemasok segala jenis bahan baku. Bahan baku ini tidak diambil dari penduduk pribumi wilayah itu dengan kekerasan. Mereka tidak diangkut sebagai upeti, namun diserahkan secara sukarela sebagai ganti produk-produk industri Eropa. Jadi, hubungan tidak didasarkan atas keuntungan bagi satu pihak; sebaliknya, hubungan itu saling menguntungkan, dan penghuni wilayah jajahan memperoleh keuntungan sebanyak yang diperoleh penduduk Inggris atau Swiss. Menghentikan hubungan dagang ini akan menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Eropa dan perekonomian wilayah jajahan, dan akan menurunkan tingkat hidup orang banyak secara tajam.

Jika perluasan hubungan ekonomi yang berjalan lambat di seluruh dunia dan pembangunan perekonomian secara bertahap merupakan salah satu sumber terpenting kekayaan yang semakin meningkat dalam 150 tahun terakhir, pembalikan kecenderungan ini akan menimbulkan bencana ekonomi dalam proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cakupan dan dampak bencana ini akan jauh melampaui krisis yang merupakan konsekuensi ekonomi Perang Dunia. Haruskah kesejahteraan Eropa, dan pada saat yang bersamaan, kesejahteraan wilayah jajahan dibiarkan merosot lebih jauh guna memberikan kesempatan kepada penduduk pribumi untuk memutuskan nasib politik mereka kalau, bagaimana pun juga, hal itu tidak akan membawa mereka pada kemerdekaan melainkan tak lebih dari pergantian penguasa?

Pertimbangan ini harus bersifat menentukan dalam menilai masalah politik penjajahan. Pejabat, tentara, dan polisi Eropa

harus tetap berada di wilayah-wilayah itu, sejauh keberadaan mereka diperlukan untuk menjaga kondisi hukum dan politik yang dibutuhkan untuk menjamin keikutsertaan wilayah jajahan dalam perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian di wilayah jajahan, pemanfaatan pertambangan, dan pengangkutan produk negara itu melalui jalur kereta api dan angkutan sungai, ke pesisir dan dari sana, ke Eropa dan Amerika, harus tetap berjalan. Hal ini harus terus berlangsung demi kepentingan semua orang, bukan hanya penduduk Eropa, Amerika, dan Australia, namun juga penduduk pribumi Asia dan Afrika itu sendiri. Selama negara penjajah tidak memperlakukan wilayah jajahan mereka lebih dari ini, tak ada yang bisa menyatakan keberatan atas kegiatan mereka bahkan dari sudut pandang liberal sekali pun.

Namun semua orang mengetahui betapa seriusnya pelanggaran yang telah dilakukan oleh semua kekuatan penjajah terhadap prinsip ini. Kita tidak perlu mengingat kengerian yang terjadi di wilayah jajahan Belgia di Kongo yang dilaporkan para wartawan Inggris yang bisa dipercaya. Anggap saja kekejaman ini tidak direncanakan oleh pemerintah Belgia dan merupakan eksekusi dan sifat jahat para pejabat yang dikirim ke Kongo. Namun, kenyataan bahwa hampir semua penjajah membangun sistem perdagangan yang memberikan posisi istimewa bagi barang-barang dari tanah air mereka di negeri yang berada dalam kekuasaan mereka menunjukkan bahwa politik penjajahan masa kini didominasi oleh pertimbangan yang sama sekali berbeda dari pertimbangan yang seharusnya berlaku.

Untuk menyelaraskan kepentingan bangsa Eropa dan ras kulit putih dengan kepentingan ras berwarna di wilayah jajahan berkaitan dengan semua permasalahan kebijakan ekonomi, Liga Bangsa-Bangsa harus diberikan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan semua wilayah kekuasaan di luar negeri yang tidak memiliki sistem pemerintahan parlementer. Liga Bangsa-Bangsa harus memastikan bahwa otonomi diberikan sesegera mungkin kepada negara yang belum memilikinya, dan bahwa kekuasaan negara asal dibatasi hanya pada perlindungan harta benda, hak-hak warga negara asing,



dan hubungan perdagangan. Penduduk pribumi serta warga negara kekuatan-kekuatan besar lain harus diberikan hak untuk membuat pengaduan secara langsung kepada Liga Bangsa-Bangsa jika langkah yang diambil oleh negara asal melampaui kebutuhan untuk menjamin keamanan perdagangan dan perniagaan dan kegiatan ekonomi secara umum di wilayah-wilayah ini, dan Liga Bangsa-Bangsa harus diberi hak untuk membuat penyelesaian yang efektif terhadap keluhan semacam itu.

Pada hakekatnya, penerapan prinsip ini berarti bahwa semua wilayah kekuasaan Eropa di luar negeri awalnya akan berubah menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa. Namun, bahkan hal ini pun harus dilihat sebagai tahap peralihan. Tujuan akhirnya tetap pembebasan penuh wilayah jajahan dari pemerintahan sewenang-wenang yang mengatur hidup mereka saat ini.

Melalui penyelesaian seperti ini untuk sebuah masalah sulit—yang menjadi lebih sulit dengan berlalunya waktu—tidak hanya bangsa Eropa dan Amerika yang tidak memiliki wilayah jajahan, namun juga negara penjajah dan penduduk pribumi harus merasa puas. Negara penjajah harus menyadari bahwa dalam jangka panjang mereka tidak akan dapat mempertahankan kekuasaan mereka atas wilayah-wilayah jajahan. Ketika kapitalisme memasuki wilayah kekuasaan ini, para penduduk pribumi telah menjadi mandiri; tidak ada lagi perbedaan budaya antara golongan atas mereka petugas dan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atas nama negara asal.

Secara militer dan politik, distribusi kekuasaan saat ini sangat berbeda bahkan dari satu generasi sebelumnya. Upaya negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang memperlakukan Cina sebagai sebuah wilayah jajahan terbukti gagal. Di Mesir, Inggris bahkan sudah mundur; di India, mereka berada dalam posisi bertahan. Sudah diketahui umum bahwa Belanda tidak mampu mempertahankan Hindia Belanda dari serangan yang sangat serius. Hal yang persis sama terjadi di wilayah jajahan Perancis di Afrika dan Asia. Amerika tidak puas dengan Filipina dan bersiap-siap

untuk melepaskannya begitu ada kesempatan.

Penyerahan wilayah jajahan ke tangan Liga Bangsa-Bangsa memberi jaminan pada negara penjajah bahwa modal yang mereka tanam tidak akan berkurang dan mereka tidak harus melakukan pengorbanan untuk memadamkan pemberontakan pribumi. Penduduk pribumi juga akan sangat bersyukur karena usulam itu menjamin kemerdekaan melalui evolusi damai dan jaminan bahwa tidak ada negara tetangga yang berniat menaklukkan mereka yang akan mengancam kemerdekaan politik mereka di masa depan.

## 7. Perdagangan Bebas

Bukti teoretis tentang semua konsekwensi tarif proteksi dan perdagangan bebas merupakan dasar ilmu ekonomi klasik. Bukti itu sangat jelas, sangat nyata, dan sangat tak terbantahkan sehingga para penentangannya tidak mampu mengemukakan pendapat apa pun untuk melawannya tanpa mendapat sanggahan bahwa argumen mereka benar-benar keliru dan tidak masuk akal.

Meski demikian, saat ini kita menyaksikan tarif proteksi—sesungguhnya, bahkan seringkali larangan terhadap impor—di seluruh dunia. Bahkan di Inggris, negara asal perdagangan bebas, proteksionisme sedang berada di atas angin. Setiap hari prinsip autarki nasional memperoleh pendukung baru. Bahkan negara dengan beberapa juta penduduk saja, seperti Hongaria dan Cekoslowakia, berusaha tidak tergantung pada dunia melalui kebijakan tarif tinggi dan pelarangan impor. Gagasan dasar kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat adalah menerapkan bea impor untuk seluruh barang yang diproduksi di luar negeri dengan biaya lebih rendah untuk menutup selisih itu.

Apa yang membuat situasi ini tidak masuk akal adalah kenyataan bahwa semua negara ingin mengurangi impor mereka, namun pada saat yang bersamaan meningkatkan ekspor mereka. Akibat dari kebijakan ini adalah campur tangan dalam pembagian kerja internasional dan dengan demikian secara umum menurunkan produktivitas tenaga kerja. Satu-satunya alasan mengapa akibat ini

tidak terlihat lebih jelas adalah karena kemajuan sistem kapitalis selama ini cukup untuk mengatasinya. Bagaimana pun, tidak diragukan lagi bahwa semua orang bisa lebih kaya saat ini jika tarif proteksi tidak membuat produksi pindah secara artifisial dari daerah yang lebih menguntungkan ke daerah yang kurang menguntungkan.

Dalam sistem perdagangan yang benar-benar bebas, modal dan tenaga kerja akan digunakan kapan pun keadaannya menguntungkan untuk produksi. Daerah lain akan digunakan selama masih memungkinkan untuk memproduksi di mana pun dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Sejauh, sebagai hasil perkembangan sarana transportasi, kemajuan dalam teknologi, dan eksplorasi yang lebih cermat terhadap negara-negara yang baru saja dibuka untuk perdagangan, diketahui bahwa ada beberapa lokasi yang lebih menguntungkan untuk produksi daripada lokasi yang saat itu digunakan, produksi pindah ke lokasi itu. Modal dan tenaga kerja cenderung pindah dari wilayah yang keadaannya kurang menguntungkan untuk produksi ke daerah yang lebih menguntungkan.

Namun perpindahan modal dan tenaga kerja mensyaratkan bukan hanya kebebasan perdagangan, namun juga ketiadaan hambatan sama sekali dalam pergerakan mereka dari satu negara ke negara lain. Ini sangat berbeda dari masa ketika doktrin klasik perdagangan bebas pertama kali dikembangkan. Serangkaian hambatan menghadang pergerakan bebas modal dan tenaga kerja. Karena ketidaktahuan tentang kondisi, perasaan tidak aman yang umum terjadi dalam kaitan dengan undang-undang dan ketertiban, dan sejumlah alasan lain serupa, para pemilik modal enggan menanamkan modal mereka di luar negeri. Sementara itu mustahil bagi para pekerja meninggalkan negara asal mereka, bukan hanya karena mereka tidak menguasai bahasa asing, namun karena masalah-masalah hukum, agama, dan berbagai kesulitan lain.

Yang pasti, pada awal abad ke-19, secara umum modal dan tenaga kerja dapat bergerak bebas di masing-masing negara, namun hambatan menghalangi pergerakan mereka dari satu negara ke

negara lain. Satu-satunya pembenaran untuk membedakan dalam teori ekonomi, antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, ditemukan dalam kenyataan bahwa dalam kasus pertama (perdagangan dalam negeri) ada pergerakan bebas modal dan tenaga kerja, sementara hal itu tidak terjadi dalam perdagangan antarnegara.

Jadi, masalah yang harus dipecahkan oleh teori klasik dapat dinyatakan sebagai berikut: Apa dampak perdagangan bebas barang-barang konsumsi antara satu negara dengan negara lain jika pergerakan modal dan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain dilarang? Doktrin Ricardo menyediakan jawaban untuk pertanyaan ini. Cabang-cabang produksi mendistribusikan diri mereka sendiri di antara masing-masing negara dalam cara sedemikian rupa sehingga setiap negara mencurahkan sumber dayanya untuk industri di mana ia paling unggul dibandingkan dengan negara-negara lain. Para penganut paham merkantilisme khawatir jika sebuah negara dengan kondisi yang kurang menguntungkan untuk produksi mengimpor lebih banyak dari yang diekspornya, sehingga negara itu akan kehabisan uang; dan mereka mendesak tarif proteksi dan pelarangan impor sesegera mungkin untuk mencegah situasi yang menyedihkan itu. Doktrin klasik menunjukkan bahwa ketakutan kaum merkantilis ini tidak berdasar.

Bahkan sebuah negara dengan kondisi yang kurang menguntungkan untuk produksi dalam setiap cabang industri dibandingkan dengan kondisi di negara lain tidak perlu merasa takut ekspornya akan lebih kecil dari impornya. Doktrin klasik menunjukkan, dengan cemerlang dan dengan cara tak terbantahkan yang belum pernah digugat oleh siapa pun, bahwa bahkan negara dengan kondisi yang relatif menguntungkan untuk produksi akan mendapati bahwa lebih menguntungkan untuk mengimpor dari negara-negara dengan kondisi yang relatif kurang menguntungkan bagi produksi komoditas yang lebih siap diproduksi di negara mereka, tetapi tidak sebaik kesiapan mereka dalam memproduksi komoditas yang menjadi spesialisasi mereka.

Jadi, apa yang dikatakan teori klasik perdagangan bebas kepada negarawan adalah: Ada negara-negara dengan kondisi alamiah yang relatif menguntungkan untuk produksi, dan ada negara-negara yang relatif tidak menguntungkan untuk produksi. Bila tidak ada campur tangan pemerintah, pembagian kerja internasional akan dengan sendirinya menyebabkan setiap negara mencari tempatnya sendiri dalam perekonomian dunia, bagaimana pun kondisinya untuk produksi dibandingkan dengan kondisi di negara lain. Tentu saja, negara dengan kondisi produksi yang relatif lebih menguntungkan akan lebih kaya dari negara lain, namun ini merupakan kenyataan yang tidak dapat diubah oleh langkah-langkah politik. Ini hanyalah konsekwensi perbedaan faktor-faktor alamiah produksi.

Ini adalah kondisi yang dihadapi liberalisme terdahulu, dan kondisi ini mereka tanggapi dengan doktrin klasik perdagangan bebas. Namun, sejak era Ricardo, kondisi dunia telah berubah banyak, dan persoalan yang harus dihadapi doktrin perdagangan bebas dalam 60 tahun terakhir sebelum meletusnya Perang Dunia sama sekali berbeda dari kondisi yang mereka hadapi di penghujung abad ke-18 dan awal abad ke-19. Abad ke-19 menghapuskan sebagian hambatan yang pada awalnya menghalangi perpindahan modal dan tenaga kerja. Di paruh kedua abad ke-19, jauh lebih mudah bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di luar negeri daripada di era Ricardo.

Hukum dan ketertiban dibangun di atas dasar yang jauh lebih kuat; pengetahuan mengenai negara-negara asing, sopan santun, dan adat istiadat telah tersebar; dan perusahaan yang dimiliki beberapa pemegang saham (*jointstock company*) menawarkan kemungkinan untuk membagi resiko perusahaan asing di antara banyak orang, dan dengan demikian mengurangi resiko tersebut. Tentu saja, akan berlebihan untuk mengatakan bahwa pada awal abad ke-20, modal bergerak dari satu negara ke negara lain selincah pergerakannya di dalam wilayah negaranya sendiri. Perbedaan-perbedaan tertentu jelas masih ada; namun anggapan bahwa modal harus tetap berada dalam batas-batas negara tidak berlaku lagi.

Ini juga tidak berlaku lagi bagi tenaga kerja. Dalam paruh kedua abad ke-19, jutaan orang meninggalkan Eropa untuk menemukan kesempatan kerja lebih baik di luar negeri. Sejauh keadaan yang diandaikan oleh doktrin klasik perdagangan bebas, yaitu keadaan modal dan tenaga kerja yang tidak bergerak, tidak lagi ada, perbedaan antara akibat yang ditimbulkan perdagangan bebas di dalam negeri dan di luar negeri juga sudah tentu kehilangan keabsahannya. Jika modal dan tenaga kerja dapat berpindah dari satu negara ke negara lain sebebaskan perpindahannya dalam wilayah negara masing-masing, maka tidak ada pembenaran lebih jauh untuk membuat perbedaan antara akibat yang ditimbulkan perdagangan bebas di dalam negeri dan di luar negeri. Karena apa yang dikatakan berkaitan dengan pernyataan pertama berlaku juga untuk yang kedua: apa yang dihasilkan perdagangan bebas adalah bahwa hanya wilayah-wilayah yang relatif menguntungkan bagi produksilah yang akan digunakan untuk produksi, sementara wilayah lain yang relatif tidak menguntungkan tidak akan pernah terpakai.

Modal dan tenaga kerja mengalir dari negara-negara dengan kondisi yang tidak menguntungkan untuk produksi ke negara yang kondisinya lebih menguntungkan untuk produksi, atau lebih tepatnya, dari negara-negara Eropa yang berpenduduk padat dan telah lama dihuni, menuju Amerika dan Australia, sebagai wilayah yang menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk produksi. Bagi negara-negara Eropa yang memiliki, di luar wilayah lama pemukiman di Eropa, wilayah di luar negeri yang lebih cocok untuk penjajahan bangsa Eropa, ini berarti tidak lebih dari bahwa sekarang mereka menempatkan sebagian penduduk mereka di luar negeri. Dalam kasus Inggris, misalnya, sebagian warganya sekarang tinggal di Kanada, Australia, atau Afrika Selatan. Para emigran yang meninggalkan Inggris dapat mempertahankan kewarganegaraan dan kebangsaan Inggris mereka di rumah baru mereka. Namun, kasus Jerman sangat berbeda.

Orang-orang Jerman yang beremigrasi berakhir di wilayah kekuasaan negara asing dan mendapati dirinya di tengah-tengah

bangsa asing. Ia menjadi warga negara asing, dan diharapkan setelah satu, dua, atau paling banyak tiga generasi, ikatannya dengan orang-orang Jerman akan terputus dan proses pembaurannya sebagai anggota negara asing akan rampung. Jerman dihadapkan pada masalah apakah bersikap tidak peduli sementara sebagian modal dan penduduknya beremigrasi ke luar negeri.

Seseorang tidak boleh membuat kesalahan dengan menganggap bahwa permasalahan kebijakan perdagangan yang harus dihadapi oleh Inggris dan Jerman pada paruh kedua abad ke-19 merupakan masalah yang sama. Untuk Inggris, pertanyaannya adalah apakah ia harus mengizinkan atau melarang sejumlah warganya beremigrasi ke wilayah kekuasaan (dominion) Kerajaan Inggris, dan tidak ada alasan untuk menghalangi emigrasi mereka dengan cara apa pun. Bagi Jerman, bagaimana pun, masalahnya adalah apakah ia harus berdiri diam sementara warga negaranya beremigrasi ke wilayah-wilayah jajahan Inggris, Amerika Selatan, dan negara-negara lain yang mengharap para emigran ini, dengan berjalannya waktu, meninggalkan kewarganegaraan dan kebangsaan mereka seperti yang telah dilakukan oleh ratusan ribu, bahkan, jutaan orang yang telah beremigrasi sebelumnya.

Karena tidak ingin hal ini terjadi, Kekaisaran Jerman, yang selama tahun 1960-an dan 1970-an telah semakin mendekati kebijakan perdagangan bebas, sekarang beralih, menjelang akhir 1970-an, ke kebijakan proteksionisme dengan mengenakan bea masuk yang dirancang untuk melindungi pertanian dan industri Jerman dari persaingan dengan negara asing. Di bawah perlindungan tarif ini, pertanian Jerman sampai batas tertentu mampu menghadapi persaingan Eropa Timur dan luar negeri dari pertanian yang beroperasi di lahan yang lebih baik, dan industri Jerman dapat membentuk kartel yang menjaga harga di dalam negeri di atas harga pasar dunia, memungkinkannya menggunakan keuntungan untuk menjual dengan harga yang lebih rendah dari para pesaingnya di luar negeri.

Namun tujuan akhir yang ingin dicapai dengan menerapkan kembali proteksionisme tidak tercapai. Semakin tinggi biaya

hidup dan biaya produksi di Jerman sebagai akibat langsung tarif proteksi ini, semakin sulit posisi dagangnya. Yang pasti, Jerman mungkin saja membuat kemajuan industri yang luar biasa besar dalam tiga dasawarsa pertama dari era baru kebijakan perdagangan itu. Namun, kemajuan ini akan terjadi bahkan tanpa tarif proteksi karena kemajuan itu terutama dihasilkan oleh penerapan metode baru dalam industri besi dan kimia Jerman, yang memungkinkan mereka memanfaatkan dengan lebih baik sumber daya alam negara mereka yang melimpah.

Kebijakan antiliberal, dengan menghapuskan pergerakan bebas tenaga kerja dalam perdagangan internasional dan membatasi bahkan pergerakan modal, sampai tingkat tertentu telah menghapuskan perbedaan yang ada dalam kondisi perdagangan bebas di antara awal dan akhir abad ke-19, dan telah kembali ke kondisi yang berlaku saat doktrin perdagangan bebas dirumuskan pertama kalinya. Sekali lagi pergerakan modal dan, di atas semuanya, tenaga kerja, dihalangi. Dalam kondisi saat ini, perdagangan bebas barang-barang konsumsi tidak akan mendorong peningkatan migrasi. Sekali lagi, hal ini akan menciptakan kondisi umum di mana setiap individu di seluruh dunia akan terlibat dalam tipe dan cabang produksi di mana kondisi yang relatif terbaik untuk keduanya ada di negara mereka sendiri.

Namun, apa pun prasyarat bagi pengembangan perdagangan internasional, tarif proteksi hanya menghasilkan satu hal: mencegah produksi di tempat yang kondisi alamiah dan sosialnya paling menguntungkan, dan menyebabkan produksi diselenggarakan di tempat yang kondisinya lebih buruk. Oleh karena itu, proteksionisme selalu berakhir dengan penurunan produktivitas tenaga kerja manusia.

Para pelaku perdagangan bebas sama sekali tidak menyangkal bahwa kejahatan yang ingin diperangi oleh negara-negara di seluruh dunia melalui kebijakan proteksionisme benar-benar sebuah kejahatan. Apa yang ia pertahankan hanyalah bahwa cara yang dianjurkan oleh para penganut imperialisme dan proteksionisme tidak dapat menghapuskan kejahatan itu. Oleh karena itu ia mengemukakan



cara yang berbeda. Untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi, salah satu ciri kondisi internasional saat ini yang ingin diubah oleh kaum liberal adalah kenyataan bahwa para emigran dari negara-negara seperti Jerman dan Italia, yang diperlakukan seperti anak tiri dalam pembagian dunia, harus tinggal di wilayah di mana, karena penerapan kebijakan antiliberal, mereka harus kehilangan kewarganegaraan mereka.

## 8. Kebebasan untuk Bepergian

Liberalisme kadangkala dikritik dengan alasan bahwa kebanyakan programnya bersifat negatif. Ditegaskan, ini tentu saja sejalan dengan sifat kebebasan, yang hanya dapat dipahami sebagai kebebasan *dari* sesuatu, karena tuntutan bagi kebebasan pada dasarnya merupakan penolakan terhadap suatu klaim. Sebaliknya, ada pendapat bahwa program partai-partai yang otoriter adalah program yang positif. Karena penilaian baik dan buruk yang sangat tegas umumnya dikonotasikan dengan ungkapan “negatif” dan “positif”, cara berbicara seperti ini melibatkan upaya sembunyi-sembunyi untuk menjelek-jelekkkan program politik liberalisme.

Tidak perlu diulangi lagi di sini bahwa program liberal—masyarakat yang berdasarkan atas kepemilikan pribadi atas sarana produksi—tidak kurang positif dari program politik lain yang dapat dibayangkan. Yang negatif dari program liberal adalah penyangkalan, penolakan, dan perlawanan terhadap semua hal yang menentang program positif ini. Dengan sikap bertahannya ini, program liberalisme—dan, dengan demikian, program untuk setiap gerakan—tergantung pada posisi yang diambil oleh para penentangannya. Di mana terdapat oposisi paling kuat, serangan terhadap liberalisme juga paling kuat; di mana oposisi relatif lemah atau bahkan tidak ada, maka dalam situasi itu beberapa kata singkat dianggap cukup. Dan karena oposisi yang dihadapi oleh liberalisme berubah seiring dengan perjalanan sejarah, aspek bertahan dari program liberal juga mengalami banyak perubahan.

Hal ini paling jelas terlihat dari sikapnya dalam menghadapi

masalah kebebasan untuk bepergian. Kelompok liberal menuntut agar semua orang mempunyai hak untuk hidup di mana pun sesuai keinginannya. Ini bukanlah tuntutan yang "negatif". Tuntutan itu merupakan bagian dari hakekat inti sebuah masyarakat yang berdasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, bahwa setiap orang dapat bekerja dan menghabiskan penghasilannya di tempat yang menurutnya terbaik. Prinsip ini memperlihatkan karakter negatif hanya ketika dihadapkan pada kekerasan yang bertujuan membatasi kebebasan bepergian. Dalam aspek negatif ini, seiring dengan berjalannya waktu, hak atas kebebasan untuk bepergian mengalami perubahan total.

Ketika liberalisme muncul pada abad ke-18 dan 19, ia harus berjuang demi kebebasan beremigrasi. Dewasa ini, liberalisme memperjuangkan kebebasan berimigrasi. Pada waktu itu, liberalisme harus melawan undang-undang yang menghalangi para penduduk pedesaan untuk pindah ke kota dan yang memberi ancaman hukuman berat bagi siapa pun yang ingin meninggalkan tanah airnya untuk memperbaiki hidupnya di tanah asing. Namun, saat itu secara umum imigrasi berlangsung bebas dan tanpa hambatan.

Saat ini, seperti telah diketahui, banyak hal telah berubah. Kecenderungan ini dimulai beberapa dasawarsa lalu dengan undang-undang yang melarang imigrasi kuli-kuli Cina. Saat ini, di setiap negara di dunia yang mungkin terlihat menarik untuk imigrasi, ada undang-undang yang sedikit banyak keras, baik untuk melarang imigrasi, atau setidaknya membatasinya dengan ketat. Kebijakan ini harus ditinjau dari dua sudut pandang: pertama, sebagai kebijakan serikat buruh, dan kedua sebagai kebijakan proteksionisme nasional.

Selain langkah-langkah paksaan seperti kebijakan yang menutup akses ke pekerjaan bagi orang-orang yang bukan anggota serikat buruh (*closed shop*), wajib mogok, dan tindakan keras untuk mereka yang bersedia bekerja, satu-satunya cara agar serikat buruh dapat memiliki pengaruh dalam pasar tenaga kerja adalah dengan membatasi persediaan tenaga kerja. Namun, karena mengurangi jumlah pekerja di dunia berada di luar kekuasaan serikat buruh,

satu-satunya kemungkinan yang tersisa bagi mereka adalah menutup akses ke pekerjaan, dan dengan demikian mengurangi jumlah pekerja, di satu cabang industri atau di satu negara, dengan mengorbankan para pekerja di industri atau negara lain. Untuk alasan politik praktis, hal itu hanya mungkin dilakukan secara terbatas oleh kelompok yang bekerja di sebuah cabang industri tertentu dengan melarang pekerja lain di negara itu masuk ke cabang industri tersebut. Di sisi lain, secara politis tidak sulit memaksakan pembatasan seperti itu dalam penerimaan tenaga kerja asing.

Kondisi alamiah untuk produksi, dan secara bersamaan, produktivitas tenaga kerja, lebih menguntungkan, dan akibatnya, tingkat gaji lebih tinggi, di Amerika Serikat daripada di sebagian besar wilayah Eropa. Tanpa hambatan imigrasi, para pekerja Eropa akan beremigrasi ke Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk mencari pekerjaan. Hukum imigrasi Amerika membuat hal ini luar biasa sulit. Jadi, gaji pekerja di Amerika Serikat dipertahankan di atas tingkat yang seharusnya bisa mereka capai jika ada kebebasan migrasi penuh, sedangkan di Eropa gaji itu ditekan di bawah tingkat ini. Di satu sisi, pekerja Amerika untung; di sisi lain, pekerja Eropa rugi.

Namun, dampak dari hambatan imigrasi tidak bisa dilihat semata-mata dari sudut pandang pengaruh langsungnya terhadap upah. Dampaknya lebih jauh dari itu. Sebagai akibat kelebihan tenaga kerja secara relatif di wilayah yang kondisinya kurang menguntungkan untuk produksi, dan kekurangan tenaga kerja secara relatif di wilayah yang kondisi produksinya relatif menguntungkan, produksi terus dikembangkan di wilayah dengan kondisi yang kurang menguntungkan dan lebih dibatasi di wilayah dengan kondisi produksi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan seandainya ada kebebasan penuh untuk migrasi. Jadi, pembatasan terhadap kebebasan ini memiliki dampak sama dengan tarif proteksi. Di satu bagian dunia, kondisi yang relatif menguntungkan untuk produksi tidak dimanfaatkan sementara di bagian lain dengan kondisi yang kurang menguntungkan, produksi dieksploitasi.

Dari sudut pandang kemanusiaan, hasilnya adalah penurunan produktivitas tenaga kerja manusia, penurunan persediaan barang-barang yang siap digunakan.

Oleh karena itu, upaya untuk membenarkan kebijakan untuk membatasi imigrasi atas dasar ekonomi sejak awal ditakdirkan untuk gagal. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hambatan migrasi mengurangi produktivitas tenaga kerja manusia. Ketika serikat buruh Amerika Serikat dan Australia menghalangi imigrasi, mereka menentang bukan saja kepentingan para pekerja dari seluruh negara dunia, namun juga kepentingan semua orang agar mereka dapat mempertahankan hak-hak istimewa mereka. Terlepas dari semua itu, masih belum jelas apakah peningkatan produktivitas tenaga kerja secara umum akibat penegakan kebebasan penuh migrasi tidak akan terlalu besar untuk mengimbangi sepenuhnya kerugian yang diderita anggota serikat buruh Amerika Serikat dan Australia akibat imigrasi tenaga kerja asing.

Pekerja Amerika Serikat dan Australia tidak akan berhasil dalam memperjuangkan hambatan imigrasi jika mereka belum memiliki alasan lain yang dapat dipakai untuk mendukung kebijakan mereka. Bagaimana pun juga, bahkan pada saat ini kekuatan prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan liberal tertentu begitu besar sehingga seseorang tidak dapat melawannya jika ia tidak menempatkan pertimbangan yang lebih tinggi dan lebih penting di atas kepentingan pencapaian produktivitas maksimal. Telah kita saksikan bagaimana “kepentingan nasional” dipakai sebagai alasan untuk mengenakan tarif proteksi. Pertimbangan yang sama juga diajukan untuk hambatan imigrasi.

Ada pendapat bahwa tanpa hambatan migrasi apa pun, kelompok-kelompok imigran dari wilayah-wilayah Eropa yang relatif kelebihan penduduk akan membanjiri Australia dan Amerika. Mereka akan datang dalam jumlah besar sehingga tidak mungkin mengharapkan mereka membaaur (berasimiliasi). Jika di masa lalu imigran yang menuju Amerika langsung menggunakan bahasa Inggris dan tata cara serta adat istiadat Amerika, hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka tidak datang sekaligus

dalam jumlah besar. Kelompok-kelompok kecil imigran yang menyebar ke wilayah yang luas dengan cepat menyatu ke jantung rakyat Amerika. Setiap imigran sudah setengah berasimilasi ketika para imigran berikutnya tiba di Amerika. Salah satu alasan terpenting di balik asimilasi nasional kilat ini adalah kenyataan bahwa para imigran dari negara-negara asing tidak datang dalam jumlah yang terlalu besar. Ada keyakinan ini akan berubah, dan ada bahaya nyata bahwa pengaruh penting—atau lebih tepat, dominion (kekuasaan) eksklusif—orang-orang Anglo-Saxon di Amerika akan dihancurkan. Inilah yang khususnya ditakutkan dalam kasus imigrasi besar-besaran orang-orang Mongol dari Asia.

Ketakutan ini mungkin dibesar-besarkan dalam kaitan dengan Amerika Serikat. Tidak demikian halnya dengan Australia. Australia memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih sama seperti Austria; namun, wilayahnya seratus kali lebih besar dari Austria, dan sumber daya alamnya tentu saja jauh lebih kaya. Jika Australia terbuka lebar untuk imigrasi, dapat dipastikan dalam beberapa tahun sebagian besar penduduknya akan terdiri dari orang-orang Jepang, Cina, dan Melayu. Kebencian yang dirasakan orang-orang saat ini terhadap warga negara asing, dan khususnya terhadap orang-orang dari ras lain, jelas terlalu besar untuk menerima penyelesaian damai bagi antagonisme semacam itu. Hampir tidak mungkin mengharapkan orang-orang Australia dengan sukarela mengizinkan imigrasi orang-orang Eropa yang tidak berkebangsaan Inggris, dan sama sekali tidak mungkin mengharapkan mereka mengizinkan orang-orang Asia untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal permanen di benua mereka.

Bangsa Australia keturunan Inggris bersikeras bahwa kenyataan bahwa orang Inggrislah yang pertama kali membuka tanah ini untuk pemukiman memberikan orang Inggris hak kepemilikan khusus seluruh benua untuk selamanya. Namun, warga negara bangsa-bangsa lain sama sekali tidak berniat menggugat hak bangsa Australia untuk menduduki tanah yang telah mereka manfaatkan di Australia. Mereka hanya berpikir bahwa tidak adil bagi

Australia untuk melarang pemanfaatan kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan untuk produksi yang saat ini dibiarkan tak terjamah, dan memaksa mereka menyelenggarakan produksi dalam kondisi yang kurang menguntungkan di negara mereka sendiri.

Masalah ini memiliki arti yang luar biasa penting bagi masa depan dunia. Sesungguhnya, nasib peradaban tergantung pada penyelesaian terbaik untuk masalah itu. Di satu sisi ada banyak, bahkan ratusan juta bangsa Eropa dan Asia, yang terpaksa bekerja dalam kondisi produksi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang dapat mereka temukan di wilayah yang tertutup bagi mereka. Mereka menuntut agar gerbang surga yang terlarang itu dibuka bagi mereka sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja mereka dan dengan demikian dapat meraih taraf hidup yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada orang-orang yang cukup beruntung untuk menyebut wilayah dengan kondisi produksi yang lebih menguntungkan sebagai milik mereka. Mereka tidak ingin—selama mereka tak lebih dari pekerja, bukan pemilik sarana produksi—melepaskan upah lebih tinggi yang dijamin oleh posisi ini. Namun, seluruh warga bangsa bersatu dalam kekhawatiran mereka akan banjirnya orang-orang asing. Para penghuni wilayah-wilayah yang menguntungkan saat ini khawatir bahwa suatu saat mereka akan menjadi minoritas di negara mereka sendiri, dan bahwa mereka kemudian akan mengalami semua penderitaan yang mengerikan akibat penganiayaan oleh negara yang, misalnya, saat ini dialami oleh orang-orang Jerman di Cekoslowakia, Italia, dan Polandia.

Tak dapat disangkal bahwa ketakutan ini beralasan. Karena kekuatan besar yang saat ini dimiliki negara, kaum kebangsaan minoritas harus mengharapkan yang terburuk dari sebuah mayoritas dengan kebangsaan berbeda. Selama negara mendapat kekuasaan luas yang dimilikinya saat ini dan yang dianggap benar oleh pendapat umum, pemikiran untuk hidup di negara yang pemerintahnya dikuasai oleh warga asing sungguh mengerikan. Sangat mengerikan hidup di negara yang dalam setiap kesempatan membuat seseorang dihadapkan pada penganiayaan—dengan kedok peradilan—oleh

mayoritas yang memerintah. Mengerikan untuk dibuat tak berdaya bahkan sebagai seorang anak di sekolah karena kebangsaannya dan untuk berada di pihak yang salah di hadapan kekuasaan peradilan dan administratif hanya karena seseorang berasal dari kelompok kebangsaan minoritas.

Jika seseorang meninjau pertentangan itu dari sudut pandang di atas, kelihatannya satu-satunya cara untuk memecahkan masalah itu adalah perang. Jika demikian, bisa diperkirakan negara yang jumlah penduduknya lebih kecil akan dikalahkan, sehingga, misalnya, bangsa-bangsa Asia yang berjumlah ratusan juta, akan berhasil menghalau keturunan ras kulit putih dari Australia. Namun, kita tidak ingin membuat dugaan semacam itu. Ini karena sudah pasti bahwa perang seperti itu—dan kita harus beranggapan bahwa masalah dunia dengan skala seperti itu tidak dapat diselesaikan secara tuntas hanya dalam satu peperangan—akan mengakibatkan malapetaka yang paling mengerikan bagi peradaban.

Jelas masalah imigrasi tidak dapat dipecahkan jika seseorang menganut cita-cita negara intervesionis, yang mencampuri setiap bidang kegiatan manusia, atau menganut cita-cita negara sosialis. Hanya penerapan program liberal yang dapat membuat masalah imigrasi, yang saat ini kelihatannya tidak terpecahkan, benar-benar lenyap. Di Australia yang berada di bawah pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip liberal, kesulitan macam apa yang mungkin timbul dari kenyataan bahwa di beberapa bagian benua itu orang-orang Jepang, dan di bagian lain benua itu, orang-orang Inggris merupakan mayoritas?

## 9. Eropa Serikat

Amerika Serikat adalah negara terkuat dan terkaya di dunia. Tidak ada negara lain selain Amerika Serikat di mana kapitalisme dapat berkembang dengan lebih bebas dan dengan lebih sedikit campur tangan pemerintah. Tak heran penduduk Amerika Serikat jauh lebih kaya dari penduduk negara mana pun di bumi. Selama lebih dari 60 tahun mereka tidak pernah terlibat dalam perang.

Seandainya mereka tidak mengobarkan perang untuk memusnahkan penduduk asli benua itu, jika mereka tidak mengobarkan perang sia-sia melawan Spanyol pada tahun 1898, dan jika mereka tidak berpartisipasi dalam Perang Dunia, hanya segelintir orangtua di antara mereka yang tersisa saat ini yang bisa bercerita tentang makna perang berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Diragukan apakah bangsa Amerika sendiri mengakui kenyataan bahwa kebijakan liberalisme dan kapitalisme lebih banyak diterapkan di negara mereka dibandingkan dengan negara lain. Bahkan orang asing pun tidak tahu apa yang telah membuat republik itu kaya dan berkuasa sehingga menimbulkan kecemburuan. Namun—terlepas dari mereka yang, karena dipenuhi kebencian, memandang rendah “materialisme” dalam budaya Amerika—semua sepakat bahwa tidak ada yang lebih mereka inginkan untuk negara mereka selain menjadi sekaya dan sekuat Amerika Serikat.

Berbagai kalangan menyarankan bahwa cara paling mudah untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membentuk “Eropa Serikat”. Secara individu, negara-negara di benua Eropa memiliki terlalu sedikit penduduk, dan tidak memiliki cukup lahan yang siap mereka gunakan untuk mempertahankan diri mereka sendiri dalam perjuangan internasional untuk meraih supremasi melawan Amerika Serikat yang semakin lama semakin kuat, melawan Rusia, melawan Kerajaan Inggris, melawan Cina, dan melawan kelompok negara-negara sebesar mereka yang mungkin terbentuk di masa depan, mungkin di Amerika Selatan. Oleh karena itu mereka harus bergabung dalam kesatuan militer dan politik, ke dalam aliansi defensif dan ofensif, yang secara mandiri mampu menjamin bahwa di abad-abad mendatang Eropa akan tetap memainkan peran penting dalam politik dunia seperti yang telah mereka nikmati di masa lampau.

Dukungan khusus terhadap ide Pan-Eropa Serikat datang dari kesadaran yang semakin hari semakin kuat dalam diri setiap orang, bahwa tidak ada yang lebih konyol daripada kebijakan tarif proteksi yang saat ini dianut oleh negara-negara Eropa. Hanya jika pembagian



kerja internasional dikembangkan terus maka kesejahteraan dapat ditingkatkan dan barang-barang yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup tersedia dengan melimpah, dan dengan demikian tingkat budaya masyarakat juga akan meningkat. Kebijakan ekonomi semua negara, terutama negara-negara Eropa yang kecil, justru bertujuan untuk menghancurkan pembagian kerja internasional.

Jika kondisi di mana industri Amerika beroperasi, dengan potensi pasar lebih dari seratus dua puluh juta konsumen kaya, tanpa dihalangi oleh tarif atau hambatan serupa, dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi industri di Jerman, Cekoslowakia, atau Hongaria, akan semakin jelas kekonyolan semua upaya untuk menciptakan wilayah-wilayah ekonomi kecil yang mandiri (*autarkic*).

Tak perlu diragukan lagi bahwa kebusukan-kebusukan yang ingin ditumpas oleh para pendukung gagasan Eropa Serikat memang ada, dan semakin cepat mereka dibasmi, semakin baik. Tapi pembentukan Eropa Serikat bukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan ini.

Reformasi dalam hubungan internasional harus bertujuan menghapus situasi di mana setiap negara berusaha dengan segala cara untuk memperluas wilayahnya dengan mengorbankan negara-negara lain. Masalah batas-batas internasional, yang dianggap begitu penting dewasa ini, harus kehilangan seluruh maknanya. Bangsa-bangsa harus menyadari bahwa masalah yang paling penting dalam kebijakan luar negeri adalah menciptakan perdamaian abadi, dan mereka harus memahami bahwa perdamaian dapat terjamin di seluruh dunia hanya jika cakupan kegiatan negara dibatasi sesempit mungkin. Dengan demikian, ukuran dan cakupan wilayah yang berada dalam kedaulatan negara tidak lagi dianggap sedemikian penting sehingga warga negara itu merasa wajar-wajar saja, sekarang seperti halnya di masa lalu, jika terjadi pertumpahan darah dalam pertikaian mengenai batas-batas negara. Pemikiran sempit yang tidak melihat apa pun di luar negara dan bangsanya sendiri

dan yang tidak memiliki konsepsi tentang pentingnya kerjasama internasional harus diganti dengan pandangan kosmopolitan. Namun, hal ini hanya mungkin jika masyarakat bangsa-bangsa, negara super internasional, dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada bangsa mana pun dan individu mana pun yang menjadi korban penindasan karena sebab-sebab yang berkaitan dengan kebangsaan atau kekhasan nasional.

Kebijakan nasionalis, yang selalu dimulai dengan niat menghancurkan negara tetangga, hanya akan berakhir dengan kehancuran semua. Untuk mengatasi provinsialisme tersebut dan menggantinya dengan kebijakan yang benar-benar berorientasi kosmopolitan, pertama-tama bangsa-bangsa dunia perlu menyadari bahwa kepentingan mereka tidak bertentangan dan bahwa cara terbaik bagi setiap bangsa untuk mencapai tujuan mereka adalah dengan mendukung kemajuan semua bangsa dan menolak ikut serta dalam setiap upaya untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain atau bagian dari bangsa lain. Jadi, yang diperlukan bukanlah mengganti chauvinisme nasional dengan chauvinisme yang menargetkan entitas supranasional yang lebih besar, melainkan pengakuan bahwa semua jenis chauvinisme adalah keliru. Metode militeristik politik internasional kini harus digantikan oleh cara-cara damai yang bertujuan menciptakan upaya bersama dan bukan perang bersama.

Akan tetapi, para pendukung Pan-Eropa dan Eropa Serikat memiliki tujuan lain. Mereka tidak berencana membangun negara baru yang kebijakan-kebijakannya berbeda dari negara-negara imperialis dan militeristik yang ada sampai sekarang, tetapi berniat menghidupkan kembali ide imperialistik dan militeristik lama. Pan-Eropa harus lebih besar dari negara-negara anggotanya, lebih kuat dari masing-masing negara anggota dan oleh karena itu lebih efisien secara militer dan lebih siap untuk melawan kekuatan-kekuatan besar, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Chauvinisme Eropa akan menggantikan chauvinisme Perancis, Jerman, atau Hongaria; sebuah *front* persatuan yang terdiri dari semua bangsa Eropa akan diarahkan untuk melawan "orang asing": Inggris,

Amerika, Rusia, Cina, dan Jepang.

Seseorang dapat menjadikan landasan nasional sebagai landasan kesadaran politik chauvinistik dan kebijakan militer chauvinistiknya, namun ia tidak bisa menjadikan landasan geografis sebagai landasan kesadaran politik chauvinistik dan kebijakan militer chauvinistiknya. Komunitas bahasa mengikat anggotanya yang berkebangsaan sama, sedangkan keanekaragaman linguistik menimbulkan jurang antara bangsa-bangsa. Jika bukan karena fakta ini—selain ideologi—pikiran chauvinistik tidak akan pernah mampu berkembang. Ahli geografi, dengan peta di tangan, mungkin, tidak diragukan lagi, melihat benua Eropa (dengan pengecualian Rusia) sebagai satu kesatuan jika dia mau, tetapi ini tidak membuat penduduk wilayah itu memiliki solidaritas atau perasaan bahwa mereka berasal dari komunitas yang sama yang bisa dipakai oleh negarawan sebagai landasan bagi rencana-rencananya. Seorang penduduk Rhinelanders bisa diminta memahami bahwa ia membela kepentingannya sendiri jika ia pergi ke medan perang untuk orang-orang Jerman di Prusia Timur. Bahkan, bukan tidak mungkin membuat ia memahami bahwa kepentingan seluruh umat manusia adalah kepentingannya juga. Tapi dia tidak akan pernah mampu memahami bahwa, sementara ia harus berdiri berdampingan dengan Portugis sebagai sesama Eropa, kepentingan Inggris adalah kepentingan musuh, atau, paling banter, kepentingan netral pihak asing.

Tidak mungkin menghapus dari pikiran manusia (secara kebetulan liberalisme tidak berniat melakukannya) jejak yang ditinggalkan oleh perkembangan sejarah panjang yang membuat jantung orang Jerman berdetak lebih cepat setiap mendengar Jerman, orang Jerman, atau segala sesuatu yang khas Jerman, disebut. Rasa kebangsaan ini sudah ada sebelum ada upaya politik untuk menjadikan rasa kebangsaan itu sebagai landasan atas gagasan tentang negara Jerman, kebijakan Jerman, dan chauvinisme Jerman. Semua skema yang dibuat dengan niat baik untuk mengganti negara-negara berdasarkan nasionalisme dengan negara federasi, apakah Eropa Tengah, Pan-Eropa, Pan-Amerika, atau negara yang

dibangun berdasarkan landasan artifisial serupa, memiliki beberapa kelemahan fundamental yang sama. Mereka gagal memperhitungkan fakta bahwa kata “Eropa” atau “Pan-Eropa” dan “European” atau “Pan-European” tidak memiliki konotasi emosional dan dengan demikian tidak mampu membangkitkan sentimen seperti yang ditimbulkan oleh kata-kata seperti “negara Jerman” dan “orang Jerman.”

Masalah ini dapat dilihat dengan jelas jika kita mengarahkan perhatian kita pada masalah, yang memainkan peran penting dalam semua proyek ini, kesepakatan tentang kebijakan komersial untuk sebuah federasi. Dalam kondisi seperti sekarang, Bavaria dapat didorong untuk menganggap perlindungan tenaga kerja Jerman—katakan saja di Saxony—sebagai pembenaran untuk menerapkan tarif yang membuat beberapa jenis barang lebih mahal untuk orang-orang Bavaria. Kita mungkin berharap bahwa kelak ia dapat diyakinkan untuk menyadari bahwa semua tindakan politik yang dirancang untuk mencapai kemandirian (*autarky*), dan dengan demikian semua tarif protektif, tidak masuk akal dan merugikan diri sendiri dan akibatnya harus dihapuskan. Tapi orang tidak akan pernah berhasil membuat orang Polandia atau Hongaria menerima kenyataan bahwa ia harus membayar lebih dari harga pasar dunia untuk setiap komoditas semata-mata agar Perancis, Jerman, atau Italia dapat terus melanjutkan produksi di mereka negara.

Seseorang bisa memperoleh dukungan untuk kebijakan proteksionisme dengan memadukan imbauan bagi solidaritas nasional dengan doktrin nasionalistik bahwa kepentingan setiap negara saling bertentangan; tetapi tidak ada kesamaan yang diperlukan oleh sebuah (negara) federasi untuk dijadikan landasan ideologis sebuah sistem proteksionisme. Jelas tidak masuk akal untuk memecah perekonomian dunia yang semakin menyatu ke dalam sejumlah wilayah-wilayah nasional yang kecil, masing-masing sedapat mungkin mandiri. Tapi seseorang tidak bisa menangkalkan kebijakan isolasi ekonomi pada skala nasional dengan menggantinya dengan kebijakan serupa di entitas politik yang lebih besar yang terdiri

dari beberapa kebangsaan yang berbeda. Satu-satunya cara untuk menangkal kecenderungan ke arah proteksionisme dan autarki adalah untuk mengakui sifat merusak mereka dan untuk menghargai keharmonisan kepentingan semua bangsa.

Begitu bukti-bukti ditunjukkan bahwa disintegrasi ekonomi dunia ke dalam sejumlah wilayah ekonomi mandiri kecil merugikan bagi semua bangsa, kesimpulan yang mendukung perdagangan bebas akan mengikutinya. Untuk membuktikan bahwa zona Pan-Eropa yang mandiri harus dibentuk di bawah naungan tarif proteksi, terlebih dulu perlu dibuktikan bahwa kepentingan Portugis dan Rumania, meskipun selaras, bertabrakan dengan kepentingan orang-orang Brasil dan Rusia. Orang harus menunjukkan bukti bahwa Hongaria akan diuntungkan jika mereka menghentikan industri tekstil domestik mereka demi kepentingan Jerman, Perancis, dan Belgia, tetapi bahwa kepentingan Hongaria akan terganggu oleh impor tekstil dari Inggris atau Amerika.

Gerakan yang mendukung pembentukan suatu federasi negara-negara Eropa muncul dari pengakuan bahwa semua bentuk nasionalisme chauvinistik tidak mungkin diwujudkan. Apa yang ingin diraih oleh para pendukung gerakan ini tidak mungkin terlaksana karena tidak memiliki landasan penting dalam kesadaran rakyat. Dan bahkan jika tujuan gerakan Pan-Eropa dapat dicapai, dunia tidak akan menjadi lebih baik sedikit pun. Perjuangan benua Eropa yang bersatu melawan kekuatan-kekuatan besar dunia di luar wilayahnya sama merugikannya dengan pertikaian di antara sesama negara Eropa dewasa ini.

## **10. Liga Bangsa-Bangsa**

Dalam pandangan liberal, sama seperti negara bukan merupakan cita-cita tertinggi, negara juga bukan aparat terbaik untuk melakukan pemaksaan. Teori metafisik mengenai negara menyatakan—dalam hal ini, mendekati kesombongan dan praduga monarki absolut—bahwa setiap negara berdaulat, yaitu, bahwa negara mewakili pengadilan banding terakhir dan tertinggi. Namun, bagi seorang liberal,

dunia tidak berhenti pada batas-batas negara. Di matanya, makna yang terkandung dalam batas-batas nasional hanyalah sebuah kebetulan dan bersifat subordinat. Pemikiran politiknya mencakup seluruh umat manusia. Titik tolak keseluruhan falsafah politiknya adalah keyakinan bahwa pembagian kerja bersifat internasional dan tidak semata-mata bersifat nasional. Sejak awal ia menyadari bahwa tidak cukup hanya menegakkan perdamaian di setiap negara, bahwa lebih penting jika semua negara hidup dalam damai satu sama lain. Oleh karena itu kelompok liberal menuntut agar organisasi politik masyarakat dikembangkan sehingga organisasi itu berkulminasi dalam negara dunia yang menyatukan seluruh dunia berdasarkan azas persamaan. Untuk alasan inilah ia menganggap hukum di setiap negara lebih rendah dari hukum internasional, dan itulah sebabnya mengapa ia menuntut pengadilan dan pemerintahan administratif supranasional untuk menjamin perdamaian di antara negara-negara dalam cara yang sama dengan cara organ-organ pengadilan dan eksekutif setiap negara ditugaskan untuk menjaga perdamaian di wilayah masing-masing.

Untuk waktu yang lama, tuntutan bagi pembentukan organisasi supranasional dunia itu terbatas pada beberapa pemikir yang dipandang sebagai pengkhayal dan diabaikan. Tentu saja, setelah berakhirnya Perang Napoleon, dunia berulang-kali menyaksikan pertunjukan oleh para negarawan dari negara-negara terkuat dunia saat mereka berkumpul mengelilingi meja konferensi untuk mencapai persetujuan bersama, dan setelah pertengahan abad ke-19, jumlah lembaga supranasional yang didirikan meningkat, yang paling terkenal di antaranya Palang Merah dan Perhimpunan Pos Internasional. Namun, semua ini masih sangat jauh dari pembentukan organisasi supranasional yang sejati. Bahkan Konferensi Perdamaian Den Haag hampir tidak menunjukkan perkembangan apa pun dalam hal ini.

Hanya kengerian Perang Dunialah yang pertama kali berhasil meraih dukungan luas bagi gagasan sebuah organisasi bangsa-bangsa yang dapat mencegah berbagai perselisihan di masa

yang akan datang. Dengan berakhirnya perang, para pemenang mengambil langkah untuk membentuk sebuah perhimpunan yang mereka sebut “Liga Bangsa-Bangsa” dan yang dipercaya secara luas di seluruh dunia sebagai cikal bakal organisasi internasional masa depan yang benar-benar efektif.

Bagaimana pun, tidak dapat disangkal bahwa apa yang saat ini berlangsung di bawah nama itu bukanlah perwujudan cita-cita liberal bagi sebuah organisasi supranasional. Pertama-tama, beberapa negara dunia yang paling penting dan paling kuat tidak termasuk ke dalam Liga itu. Amerika Serikat, belum lagi negara-negara yang lebih kecil, tetap berada di luar. Lagipula, sejak awal perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dirugikan oleh kenyataan bahwa perjanjian itu membedakan negara-negara anggota dalam dua kategori: negara-negara yang menikmati hak penuh dan negara-negara yang, karen berada di pihak yang kalah dalam Perang Dunia, bukan anggota penuh.

Jelas bahwa ketidaksetaraan status seperti itu dalam perhimpunan bangsa-bangsa pasti melahirkan benih-benih peperangan di dalam dirinya, sama seperti halnya pembagian kasta di sebuah negara. Semua kekurangan ini bersatu untuk melemahkan Liga dan membuatnya sama sekali tak berdaya menghadapi semua permasalahan substantif. Cukup bagi seseorang untuk memikirkan tindakannya dalam perselisihan antara Italia dan Yunani atau mengenai masalah Mosul, dan khususnya dalam kasus di mana nasib minoritas yang tertindas tergantung pada keputusannya.

Di semua negara, namun khususnya di Inggris dan Jerman, ada kelompok-kelompok yang percaya bahwa untuk mengubah Liga Bangsa-Bangsa palsu ini menjadi Liga Bangsa-Bangsa yang sebenarnya—negara suprarasional yang sejati—kelemahan dan kekurangannya saat ini harus diobati sedapat mungkin dengan cara yang paling toleran. Sikap oportunistik seperti itu tidak akan berhasil, apa pun masalahnya. Liga Bangsa-Bangsa adalah—dan ini tentu saja harus diakui oleh semua orang kecuali para pejabat dan pegawai yang dipekerjakan di badan-badan Liga—lembaga yang tidak

memadai untuk menjawab tuntutan yang berhak diajukan seseorang kepada organisasi dunia itu. Kenyataan ini, jauh dari diminimalisir atau diabaikan, perlu ditegaskan berulang-kali dan terus menerus untuk mengundang perhatian pada semua perubahan yang perlu dilakukan untuk mengubah Liga palsu ini menjadi Liga Bangsa-Bangsa yang sebenarnya.

Tak ada yang lebih berbahaya bagi gagasan tentang organisasi supranasional dunia daripada kekeliruan intelektual yang muncul dari keyakinan bahwa Liga saat ini merupakan perwujudan penuh atau perwujudan sesungguhnya dari apa yang seharusnya dituntut oleh setiap pengikut liberal yang jujur dan tulus. Mustahil membangun Liga Bangsa-Bangsa yang sebenarnya, yang mampu menjamin perdamaian abadi, berdasarkan prinsip bahwa batas-batas tradisional dan historis setiap negara akan diperlakukan sebagai ketetapan yang tak dapat diubah. Liga Bangsa-Bangsa mempertahankan semua kelemahan mendasar dari semua hukum internasional sebelumnya: dalam membuat aturan prosedural untuk bertindak sebagai hakim dalam perselisihan antarnegara, Liga sama sekali tidak berniat menciptakan norma-norma lain bagi penyelesaian perselisihan itu selain menjaga *status quo* dan pene-gakan perjanjian yang ada. Namun, dalam situasi seperti itu, tidak ada jaminan untuk perdamaian kecuali jika seluruh situasi dunia dibekukan.

Yang pasti, Liga tidak menawarkan, meski dengan sangat berhati-hati dan dengan berbagai persyaratan, kemungkinan penyesuaian batas-batas di masa yang akan datang dalam rangka memenuhi tuntutan sejumlah bangsa dan wilayah-wilayah (bagian-bagian) bangsa. Liga Bangsa-Bangsa juga menjanjikan—dengan sangat berhati-hati dan berbagai syarat—perlindungan bagi minoritas kebangsaan. Ini memberi kita harapan bahwa dari awal yang sangat jauh dari memadai ini, sebuah negara dunia yang super (*world superstate*) yang sesuai dengan namanya kelak dapat dikembangkan dan mampu menjamin perdamaian yang dituntut semua bangsa. Namun masalah ini tidak akan diputuskan di Jenewa dalam sidang



Liga yang sekarang, dan tentu saja tidak di parlemen masing-masing negara anggotanya.

Ini karena permasalahannya tidak menyangkut masalah organisasi atau teknik pemerintahan internasional tetapi masalah terbesar ideologi yang pernah dihadapi umat manusia. Ini menyangkut pertanyaan tentang apakah kita akan berhasil menciptakan di seluruh dunia sebuah kerangka berpikir yang tanpanya semua kesepakatan untuk memelihara perdamaian dan semua keputusan pengadilan arbitrase, pada saat genting, tak lebih dari potongan kertas yang tidak berharga.

Kerangka berpikir ini tak boleh kurang dari penerimaan liberalisme tanpa syarat. Cara berpikir liberal harus menembus semua bangsa, prinsip liberal harus merembes ke seluruh lembaga politik, jika prasyarat perdamaian ingin diciptakan dan penyebab perang dihapuskan. Selama bangsa-bangsa berpegang teguh pada tarif proteksi, hambatan imigrasi, wajib belajar, intervensionisme, dan etatisme, perselisihan-perselisihan baru yang setiap saat dapat pecah menjadi peperangan terbuka akan terus timbul merongrong umat manusia.

## 11. Rusia

Dengan bekerja, warga negara yang taat hukum membantu dirinya sendiri dan sesamanya dan dengan demikian menyatu dengan tatanan sosial yang ada secara damai. Perampok, di sisi lain, berniat, bukan dengan kerja keras penuh kejujuran, namun dengan kekerasan, merampas hasil jerih payah orang lain. Selama ribuan tahun, dunia harus tunduk pada penindasan para penakluk militer dan bangsawan feodal yang menganggap semua produk-produk industri milik orang boleh mereka konsumsi seandainya. Syarat pertama evolusi umat manusia menuju peradaban dan penguatan ikatan sosial adalah mengatasi pengaruh intelektual dan fisik kasta militer dan feodal yang ingin menguasai dunia dan mengganti cita-cita kaum borjuis dengan cita-cita para raja yang berkuasa berdasarkan keturunan. Penghapusan cita-cita militeristik yang

hanya menghargai para prajurit dan memandang rendah pekerja yang jujur sama sekali belum tercapai. Di setiap negara masih ada individu-individu yang pemikirannya masih dipenuhi gagasan-gagasan dan gambaran-gambaran yang berasal dari era militeristik.

Ada negara-negara di mana dorongan-dorongan atavistik untuk melakukan penjarahan dan kekerasan dianggap telah berhasil ditaklukkan, muncul dan berpengaruh lagi. Namun, secara umum, dapat dikatakan di negara-negara ras kulit putih yang saat ini menghuni wilayah Eropa tengah dan barat dan Amerika, mentalitas yang disebut “militeristik” oleh Herbert dan Spencer telah digantikan oleh mentalitas yang ia namakan “industri”. Saat ini, hanya ada satu negara besar yang dengan teguh tetap menganut cita-cita militeristik, yaitu Rusia.

Tentu saja, bahkan di antara rakyat Rusia ada yang tidak setuju dengan sikap ini. Sayang mereka belum berhasil menaklukkan rekan-rekan sebangsanya. Sejak Rusia pertama kali berada dalam posisi untuk menggunakan pengaruhnya dalam politik Eropa, negara itu terus bersikap bak perampok yang menunggu kesempatan untuk menerkam korbannya dan menjarah harta bendanya. Para tsar Rusia tidak pernah mengakui batasan perluasan kekaisaran mereka selain daripada yang dipaksakan oleh situasi. Sikap kaum Bolshevik dalam hal perluasan wilayah kekuasaan mereka tidak berbeda sedikit pun. Dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru, mereka juga tidak mengakui aturan lain selain bahwa seseorang mungkin dan bahkan harus berani pergi sejauh mungkin, dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Situasi yang menguntungkan yang menyelamatkan peradaban dari penghancuran oleh Rusia adalah kenyataan bahwa negara-negara Eropa cukup kuat untuk menahan serangan gerombolan orang-orang barbar Rusia. Pengalaman Rusia di Perang Napoleon, Perang Krimea, dan Perang Rusia-Turki tahun 1877-1978 menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun jumlah prajurit mereka besar, tentara mereka tidak mampu menyerbu Eropa. Perang Dunia hanya mempertegas hal ini.

Yang lebih berbahaya dari bayonet dan meriam adalah senjata pikiran. Tentu saja, reaksi bahwa gagasan-gagasan bangsa Rusia yang ditemukan di Eropa pertama-tama disebabkan oleh kenyataan bahwa Eropa sendiri sudah penuh dengan gagasan-gagasan ini sebelum mereka keluar dari Rusia. Memang, mungkin akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa gagasan-gagasan itu bukanlah gagasan asli Rusia, betapa pun sesuainya gagasan itu dengan rakyat Rusia, namun dipinjam oleh bangsa Rusia dari Eropa. Begitu besarnya kemandulan intelektual bangsa Rusia sehingga mereka tidak akan pernah dapat merumuskan untuk diri mereka sendiri ungkapan untuk sifat dasar mereka yang terdalam.

Liberalisme, yang sepenuhnya didasarkan atas ilmu pengetahuan dan yang kebijakannya tidak menggambarkan apa pun selain penerapan hasil dari ilmu pengetahuan, harus berhati-hati untuk tidak membuat penilaian yang tidak ilmiah. Penilaian baik atau buruk berada di luar wilayah ilmu pengetahuan dan selalu bersifat subyektif. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menggolongkan bangsa-bangsa berdasarkan nilai mereka dan mengatakan apakah mereka bernilai atau kurang bernilai. Akibatnya, pertanyaan apakah bangsa Rusia lebih rendah (*inferior*) atau tidak sepenuhnya berada di luar lingkup pertimbangan kita. Kita sama sekali tidak berpendapat demikian. Kita hanya menegaskan bahwa mereka tidak *ingin* masuk ke dalam rancangan kerjasama sosial manusia. Dalam kaitan dengan masyarakat manusia dan perhimpunan bangsa-bangsa, sikap mereka adalah sikap orang yang tidak memiliki maksud lain selain mengkonsumsi apa yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh orang lain.

Selama ide-ide Dostoyevsky, Tolstoy and Lenin tetap bertahan sebagai kekuatan hidup sebuah bangsa, maka bangsa itu tidak akan bisa membangun organisasi sosial yang langgeng. Mereka harus kembali pada kondisi barbarisme. Alam menganugerahi Rusia dengan tanah yang subur dan sumber daya mineral dari segala jenis lebih daripada Amerika Serikat. Seandainya Rusia mengikuti kebijakan kapitalistik yang sama seperti Amerika, saat ini mereka

akan menjadi orang paling kaya di dunia. Despotisme, imperialisme, dan Bolshevisme telah menjadikan mereka orang-orang paling miskin. Sekarang mereka mencari modal dan pinjaman dari seluruh dunia. Setelah hal ini disadari, menjadi jelas apa yang seharusnya menjadi prinsip yang menuntun kebijakan negara-negara beradab terhadap Rusia.

Biarkan Rusia menjadi Rusia. Biarkan mereka melakukan apa pun yang mereka ingin lakukan di negara mereka sendiri. Namun jangan biarkan mereka melewati batas-batas wilayah mereka untuk menghancurkan peradaban Eropa. Tentu saja ini tidak berarti bahwa impor dan penerjemahan tulisan-tulisan Rusia harus dilarang. Orang-orang neurotik mungkin bisa menikmati sesuka mereka; orang-orang yang sehat akan menghindarinya. Ini juga tidak berarti bahwa Rusia harus dilarang menyebarkan propaganda mereka dan membayar sogokan seperti yang dilakukan para tsar di seluruh dunia. Bila peradaban modern tidak mampu mempertahankan dirinya dari serangan orang-orang sewaan, maka bagaimana pun ia tidak akan bertahan lama.

Ini juga tidak berarti orang-orang Amerika atau Eropa harus dicegah mengunjungi Rusia jika mereka tertarik untuk melakukannya. Biarkan mereka melihat secara langsung, dengan resiko dan tanggung jawab mereka sendiri, negeri di mana pembunuhan dan penderitaan massal berlangsung. Ini juga tidak berarti bahwa para pemilik modal harus dilarang memberikan pinjaman kepada Soviet atau sebaliknya untuk menanam modal di Rusia. Jika mereka cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka akan melihat modal mereka kembali, biarkan mereka mengambil resiko itu. Namun, pemerintah Eropa dan Amerika harus berhenti mempromosikan destruksionisme Soviet dengan cara membayar premi untuk ekspor ke Rusia Soviet dan dengan demikian menyokong sistem Rusia Soviet melalui sumbangan finansial. Biarkan mereka menghentikan propaganda mengenai emigrasi dan ekspor modal ke Rusia Soviet.

Apakah rakyat Rusia akan menyingkirkan sistem Soviet atau tidak, sepenuhnya terserah kepada mereka. Negeri cambuk dan kamp

penjara itu sekarang bukan merupakan ancaman bagi dunia. Walau mereka memiliki kemauan untuk berperang dan menghancurkan, rakyat Rusia tidak lagi mampu secara serius membahayakan perdamaian Eropa. Dengan demikian mereka dapat diabaikan. Satu-satunya hal yang perlu ditolak adalah kecenderungan apa pun dari pihak kita untuk mendukung atau mempromosikan kebijakan Soviet yang destruktif.





---

## BAB 4

# LIBERALISME DAN PARTAI POLITIK

### 1. "Dogmatisme" Kaum Liberal

Liberalisme klasik dikecam karena terlalu keras kepala dan tidak cukup siap untuk berkompromi. Karena tidak fleksibel liberalisme kalah dalam menghadapi partai-partai antikapitalis yang bermunculan. Seandainya liberalisme menyadari, seperti partai-partai lain, pentingnya kompromi dan konsesi bagi slogan populer dalam memenangkan dukungan massa, liberalisme setidaknya akan mampu mempertahankan sebagian dari pengaruhnya. Tapi liberalisme tidak pernah berupaya membangun bagi dirinya sendiri sebuah organisasi partai dan mesin partai seperti yang dilakukan partai-partai antikapitalis. Liberalisme tidak menganggap penting taktik politik dalam kampanye pemilihan umum dan cara kerja (proses) parlemen. Liberalisme tidak pernah terlibat dalam rencana licik oportunistis atau tawar menawar politik. Dogma (*doctrinism*) yang kaku ini mau tak mau menyebabkan kemerosotan liberalisme.

Penegasan faktual yang terkandung dalam pernyataan ini seluruhnya sesuai dengan kenyataan, tapi untuk mempercayai bahwa mereka merupakan kecaman terhadap liberalisme sama dengan memperlihatkan kesalahpahaman tentang hakekat semangatnya. Wawasan tertinggi dan paling fundamental tentang pemikiran liberal adalah bahwa ide-idenyalah yang menyediakan landasan di mana keseluruhan kerjasama sosial manusia dibangun dan ditopang

dan bahwa struktur sosial yang mampu bertahan tidak dapat dibangun berdasarkan ide-ide palsu dan keliru. Tidak ada yang bisa menggantikan ideologi yang meningkatkan kehidupan manusia dengan memelihara kerjasama sosial—apalagi kebohongan, baik yang disebut “taktik”, “diplomasi”, atau “kompromi”. Jika manusia tidak, dari pengakuan terhadap keharusan sosial, secara suka rela melakukan apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat dipertahankan dan kesejahteraan umum ditingkatkan, tak ada yang bisa menuntun mereka ke jalan yang benar dengan muslihat atau tipu daya yang licik. Jika mereka melakukan kesalahan dan tersesat, maka seseorang harus berusaha mencerahkan mereka dengan pengajaran. Tapi jika mereka tidak bisa dicerahkan, jika mereka berkeras melakukan kesalahan, maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana. Semua trik dan kebohongan politikus penghasut dapat dipakai untuk mendukung tujuan mereka yang, baik dengan niat baik mau pun buruk, menyebabkan kehancuran masyarakat. Namun tujuan kemajuan sosial, tujuan perkembangan dan intensifikasi jalinan sosial, tidak dapat dicapai dengan hasutan dan kebohongan. Tidak ada kekuatan di bumi, tidak ada muslihat kreatif atau tipuan cerdas yang akan berhasil membohongi umat manusia agar menerima doktrin sosial yang bukan saja tidak diakui tapi juga yang secara terang-terangan dipandang rendah.

Satu-satunya cara yang tersedia bagi siapa pun yang ingin menuntun dunia kembali kepada liberalisme adalah dengan meyakinkan sesama rakyatnya bahwa mengadopsi program liberal merupakan sebuah keharusan. Tugas untuk melakukan pencerahan ini adalah satu-satunya tugas yang dapat dilakukan dan harus dilakukan oleh kelompok liberal untuk mencegah, sesuai dengan kemampuannya, masyarakat menuju kehancuran. Tak ada tempat bagi konsesi untuk sudut pandang prasangka yang paling populer atau umum dan kesalahan. Terkait hal-hal yang akan menentukan apakah masyarakat akan tetap ada atau tidak, apakah jutaan orang akan sejahtera atau punah, tidak ada ruang untuk berkompromi, baik karena kelemahan atau rasa segan pada perasaan orang lain



yang tidak pada tempatnya.

Jika prinsip-prinsip liberal diperkenankan sekali lagi untuk menjadi pedoman bagi kebijakan negara-negara besar, bila revolusi dalam opini publik sekali lagi dapat memberikan kebebasan kepada kapitalisme, dunia akan mampu secara perlahan-lahan mengangkat dirinya sendiri keluar dari kondisi di mana ia dijebloskan oleh kebijakan-kebijakan gabungan faksi-faksi antikapitalis. Tidak ada cara lain untuk keluar dari kekacauan politik dan sosial masa kini.

Pandangan menyesatkan (ilusi) yang menuntun liberalisme klasik adalah rasa optimisnya sehubungan dengan arah evolusi masyarakat. Bagi para pembela liberalisme—sosiolog dan ekonom dari abad ke delapan belas dan awal sampai pertengahan abad kesembilan belas dan pendukung mereka—kelihatannya pasti bahwa umat manusia akan melangkah maju ke tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi dan bahwa tak ada yang akan bisa menghentikan proses ini.

Mereka benar-benar yakin bahwa kesadaran rasional tentang hukum fundamental kerjasama sosial dan saling ketergantungan, yang mereka temukan, tidak lama lagi akan berlaku umum dan bahwa setelah itu ikatan-katan sosial yang menyatukan umat manusia secara damai akan menjadi semakin erat, akan terjadi perbaikan progresif dalam kesejahteraan umum, dan peradaban akan naik ke tingkat kebudayaan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang bisa menggoyahkan optimisme mereka. Ketika serangan terhadap liberalisme semakin gencar, ketika pengaruh ide-ide liberal dalam politik ditantang dari segala arah, mereka mengira bahwa apa yang harus mereka hadapi hanyalah berondongan terakhir dari sistem yang sedang kembang-kempis yang tidak memerlukan telaah serius dan serangan balasan karena bagaimana pun tak lama lagi sistem itu akan runtuh dengan sendirinya.

Kelompok liberal berpendapat bahwa semua orang memiliki kapasitas intelektual untuk memikirkan dengan benar masalah rumit tentang kerjasama sosial dan untuk bertindak sesuai dengan cara berpikirnya. Mereka begitu terpujau oleh kejernihan dan bukti pemikiran yang membantu mereka sampai pada ide-ide politik

mereka sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti mengapa orang lain tidak bisa memahaminya. Mereka tidak pernah memahami dua hal: pertama, bahwa massa tidak memiliki kapasitas untuk berpikir secara logis dan kedua, bahwa di mata kebanyakan orang, bahkan saat mereka mampu mengenali kebenaran, sebuah keuntungan khusus dan sesaat yang dapat langsung dinikmati terlihat lebih penting daripada pencapaian lebih besar dan lebih kekal yang harus ditunda.

Kebanyakan orang bahkan tidak mendapat anugerah intelektual yang dibutuhkan untuk memikirkan masalah-masalah—yang sangat rumit—kerjasama sosial, dan mereka juga tidak memiliki kemauan yang dibutuhkan untuk melakukan pengorbanan sementara yang dituntut oleh semua aksi sosial. Slogan-slogan intervensionisme dan sosialisme, terutama usulan bagi pengambilalihan sebagian milik pribadi, selalu mendapatkan dukungan antusias dari massa, yang berharap mendapat keuntungan langsung dari usulan-usulan itu.

## 2. Partai Politik

Tak ada kesalahpahaman yang lebih menyedihkan tentang makna dan sifat dasar liberalisme daripada mengira bahwa mungkin untuk meraih kemenangan bagi ide-ide liberal melalui metode-metode yang dewasa ini digunakan oleh partai-partai politik lain. Dalam masyarakat kasta dan status yang warganya tidak memiliki hak yang sama namun yang dibagi-bagi ke dalam tingkatan (pangkat) dengan tugas-tugas dan hak-hak istimewa yang berbeda, tidak ada partai politik dalam artian yang modern.

Selama hak-hak istimewa dan kekebalan kasta yang berbeda tidak dipertanyakan, kedamaian akan terjamin di antara mereka. Namun, begitu hak-hak istimewa kasta dan status digugat, akan terjadi kontroversi, dan perang saudara dapat dihindari hanya jika salah satu pihak, yang menyadari kelemahannya, menyerah tanpa menggunakan senjata. Dalam semua konflik serupa, posisi setiap individu sejak awal ditentukan oleh statusnya sebagai anggota salah satu kasta. Yang jelas, pasti ada pembelot yang, dengan harapan

dapat memenuhi dengan lebih baik keuntungan pribadinya di sisi lawan, bertempur melawan anggota kastanya sendiri dan oleh karena itu dianggap sebagai penghianat.

Namun, terlepas dari kasus-kasus yang luar biasa itu, individu tidak dihadapkan pada pertanyaan dengan kelompok mana dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu dia akan bergabung. Dia setia pada anggota kastanya dan menerima nasib yang sama dengan mereka. Kasta atau kasta-kasta yang tidak puas dengan posisi mereka memberontak melawan ketentuan yang berlaku dan harus berjuang untuk mendapatkan tuntutan mereka yang mendapat tentangan dari pihak lain. Hasil akhir dari konflik tersebut adalah—jika semua hal tidak, pada kenyataannya, berubah karena pemberontak dikalahkan—ketentuan yang lama diganti dengan yang baru di mana hak-hak kasta-kasta yang berlainan berbeda dari sebelumnya.

Dengan lahirnya liberalisme muncul tuntutan bagi penghapusan semua hak-hak istimewa. Masyarakat kasta dan status harus memberi jalan bagi susunan baru di mana hanya ada warga dengan hak-hak yang sama. Yang digugat bukan hanya hak-hak tertentu dari kasta-kasta yang berbeda tetapi keberadaan semua hak-hak istimewa. Liberalisme mendobrak semua tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh pangkat dan status dan membebaskan manusia dari berbagai pembatasan oleh susunan lama yang mengungkungnya. Di masyarakat kapitalis, di bawah sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip liberal, individu untuk pertama kalinya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kehidupan politik dan untuk pertama kalinya diminta untuk membuat keputusan pribadi berkaitan dengan tujuan dan cita-cita politik.

Dalam masyarakat kasta dan status di masa yang lampau, satu-satunya konflik politik terjadi di antara kasta-kasta yang berbeda, di mana setiap kasta membentuk *front* yang kokoh dalam menghadapi kasta lain: atau, bila konflik seperti itu tidak ada, dalam kasta-kasta yang mengizinkan keterlibatan dalam kehidupan politik, ada konflik faksional di antara kelompok-kelompok sejawat dan klik

untuk merebut pengaruh, kekuasaan, dan kendali (posisi tertinggi). Hanya di bawah pemerintahan di mana semua warga menikmati hak setara—sesuai dengan cita-cita liberal, yang belum pernah di mana pun sepenuhnya terwujud—ada partai politik yang terdiri dari himpunan orang-orang yang ingin melihat ide-ide mereka tentang legislasi dan administrasi diterapkan. Ini karena bisa terjadi perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk mencapai tujuan liberal untuk jaminan kerjasama sosial yang damai, dan perbedaan opini ini berubah menjadi konflik ide.

Maka, dalam masyarakat liberal mungkin saja terdapat partai sosialis. Bahkan partai-partai yang berupaya mendapatkan posisi legal khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu tidak mustahil dalam sistem liberal. Akan tetapi semua partai-partai ini harus mengakui liberalisme (setidaknya untuk sementara, sampai mereka muncul sebagai pemenang) sejauh untuk memanfaatkan, semata-mata dalam perjuangan politik mereka, senjata kaum intelek, yang oleh liberalisme dianggap sebagai satu-satunya yang dibolehkan dalam pertarungan semacam itu, meskipun, pada akhirnya, sebagai sosialis atau pendukung hak-hak istimewa, anggota partai antiliberal menolak falsafah liberal. Maka, sebagian kelompok sosialis “utopian” pre-Marxist berjuang untuk sosialisme dalam kerangka liberalisme, dan di jaman keemasan liberalisme di Eropa Barat, kaum rohaniwan dan bangsawan mencoba untuk meraih tujuan mereka dalam kerangka negara konstitusi modern.

Partai-partai yang kita lihat saat ini adalah jenis partai yang sangat berbeda. Yang jelas, sebagian dari program mereka menyangkut keseluruhan masyarakat dan dimaksudkan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana kerjasama sosial bisa dicapai. Namun apa yang disampaikan oleh program ini hanyalah sebuah konsesi yang mereka buat secara terpaksa karena desakan ideologi liberal. Tujuan mereka sebenarnya terdapat dalam program mereka yang lain, yaitu satu-satunya program yang mereka perhatikan dan yang sangat bertolak belakang dengan program yang dibungkus dalam istilah-istilah kesejahteraan umum.

Partai-partai politik masa kini merupakan pendukung bukan saja kelas-kelas dengan hak-hak istimewa tertentu dari masa sebelumnya yang ingin melihat hak-hak prerogatif tradisional dilestarikan dan diperluas yang diijinkan oleh liberalisme karena kemenangannya tidak mutlak, namun juga pendukung kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk meraih hak-hak istimewa, dengan kata lain, hasrat untuk mendapatkan status kasta. Liberalisme memberi perhatian pada semua dan menawarkan program yang dapat diterima semua orang. Liberalisme tidak menjanjikan hak-hak istimewa kepada siapa pun. Melalui tuntutan bagi penolakan terhadap pencarian kepentingan khusus, liberalisme bahkan menuntut pengorbanan, namun, tentu saja, hanya pengorbanan sementara, berupa penyerahan sebagian keuntungan yang relatif kecil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun partai-partai dengan kepentingan khusus hanya memberi perhatian pada sebagian anggota masyarakat. Untuk kelompok masyarakat ini, satu-satunya kelompok yang ingin mereka layani, mereka menjanjikan keuntungan istimewa dengan mengorbankan anggota masyarakat lain.

Semua partai politik modern dan ideologi partai modern bermula sebagai reaksi dari kelompok-kelompok kepentingan khusus yang berjuang untuk status istimewa melawan liberalisme. Sebelum liberalisme muncul, tentu saja ada kelas-kelas dengan hak-hak istimewa dengan kepentingan khusus dan hak-hak prerogatif serta konflik bersama, namun saat itu ideologi masyarakat status masih bisa mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat naif dan tanpa malu-malu. Dalam konflik-konflik yang timbul di masa itu antara pendukung dan penentang hak-hak istimewa, tidak pernah ada pertanyaan tentang karakter antisosial dari keseluruhan sistem maupun kebutuhan untuk mempertahankan pretensi untuk membenarkannya dengan alasan sosial. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat membuat perbandingan langsung antara sistem lama kelas-kelas dengan hak-hak istimewa dan propaganda partai-partai dengan kepentingan khusus masa kini.

Untuk memahami karakter asli partai-partai ini, seseorang tidak boleh melupakan kenyataan bahwa partai-partai tersebut awalnya didirikan semata-mata untuk mempertahankan hak-hak istimewa terhadap ajaran-ajaran liberalisme. Doktrin partai mereka bukan, seperti halnya doktrin liberalisme, merupakan aplikasi politik dari sebuah teori masyarakat yang komprehensif dan yang telah dipikirkan matang-matang. Ideologi politik liberalisme berasal dari sebuah sistem ide yang fundamental yang awalnya dikembangkan sebagai teori ilmiah tanpa memikirkan dampak politisnya.

Berlawanan dengan ini, hak-hak istimewa yang dicari oleh partai-partai antiliberal telah, sejak awal, diwujudkan dalam institusi sosial yang ada, dan untuk membenarkan yang terakhir maka seseorang kemudian berupaya menguraikan sebuah ideologi, tugas yang umumnya dianggap tidak penting yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan beberapa kata singkat.

Kelompok tani berpikir bahwa cukup untuk menunjukkan bahwa pertanian mutlak penting. Serikat buruh menyatakan bahwa tenaga kerja mutlak penting. Partai-partai kelas menengah menyebutkan pentingnya keberadaan lapisan sosial yang merepresentasikan jalan tengah (*golden mean*). Kelihatannya mereka sama sekali tidak terganggu oleh kenyataan bahwa seruan-seruan itu tidak memberi sumbangan apa pun pada provinsi bahwa keharusan bagi atau bahkan manfaat hak-hak istimewa yang ingin mereka raih untuk masyarakat.

Kelompok-kelompok yang ingin mereka pengaruhi pada akhirnya akan mengikuti mereka, sedangkan untuk kelompok-kelompok lain, semua upaya untuk merekrut pendukung dari kalangan mereka akan sia-sia. Maka, semua partai-partai modern dengan kepentingan khusus ini, sebesar apa pun perbedaan tujuan mereka atau sesengit apa pun mereka bersaing satu sama lain, membentuk *front* bersama dalam pertempuran melawan liberalisme. Di mata mereka, prinsip liberalisme yang memahami dengan baik bahwa kepentingan semua orang, dalam jangka panjang, sejalan adalah seperti kain merah yang dilambaikan di hadapan seekor banteng. Dalam pemahaman mereka,

ada konflik-konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan yang dapat diselesaikan hanya dengan kemenangan salah satu faksi atas faksi lain, untuk keuntungan pemenang dan kerugian bagi pihak yang kalah. Liberalisme, menurut partai-partai ini, bukan seperti yang ingin diperlihatkan. Liberalisme juga tak lebih dari sebuah program partai yang mendukung kepentingan khusus kelompok tertentu, kalangan borjuis, misalnya kaum kapitalis dan pengusaha, melawan kepentingan kelompok lain.

Kenyataan bahwa tuduhan ini merupakan bagian dari propaganda Marxisme bertanggung jawab untuk sebagian besar keberhasilan Marxisme. Jika doktrin tentang konflik yang tidak dapat didamaikan di antara kepentingan-kepentingan kelas-kelas yang berbeda dalam sebuah masyarakat yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dianggap sebagai inti dari dogma Marxisme, maka semua partai yang dewasa ini aktif di benua Eropa harus dianggap sebagai partai Marxist. Doktrin antagonisme kelas dan konflik kelas juga diterima oleh partai nasionalis selama mereka memiliki pandangan sama bahwa antagonisme itu memang ada dalam masyarakat kapitalis dan bahwa konflik yang mereka sulut harus dibiarkan berjalan. Apa yang membedakan mereka dari partai Marxist hanyalah bahwa mereka ingin menyelesaikan konflik kelas dengan kembali pada masyarakat status yang dibangun sesuai dengan apa yang mereka rekomendasikan dan dengan memindahkan medan pertempuran ke arena internasional, yang mereka percaya merupakan tempat di mana pertempuran itu seharusnya terjadi. Mereka tidak memperdebatkan pernyataan bahwa konflik semacam ini terjadi dalam masyarakat yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Mereka cukup puas bahwa antagonisme seperti itu tidak boleh muncul, dan untuk menghilangkannya, mereka ingin mengarahkan dan mengatur hak milik pribadi melalui tindakan campur tangan pemerintah; mereka menginginkan intervensionisme sebagai ganti kapitalisme. Namun, pada akhirnya, ini sama sekali tidak berbeda dari apa yang dikatakan oleh kaum Marxist. Mereka juga berjanji akan membawa dunia ke

tatanan sosial yang baru di mana tidak ada kelas-kelas, antagonisme kelas, atau konflik kelas.

Untuk memahami arti doktrin perang kelas, seseorang tidak boleh melupakan bahwa doktrin ini ditujukan untuk melawan doktrin liberal tentang harmoni dari kepentingan seluruh anggota masyarakat bebas yang dipahami dengan baik yang didirikan atas dasar prinsip kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Kaum liberal berpendapat bahwa dengan dihapusnya seluruh perbedaan artifisial kasta dan status, abolisi seluruh hak-hak istimewa, dan ditegakkannya persamaan di hadapan hukum, tidak ada lagi yang menghalangi kerjasama damai seluruh anggota masyarakat, karena semua kepentingan jangka panjang mereka yang dipahami dengan benar pada dasarnya sama. Semua keberatan yang diajukan pendukung feodalisme, hak-hak istimewa, dan perbedaan kasta dan status untuk melawan doktrin ini terbukti tidak beralasan dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Namun dalam sistem katalis Ricardo, seseorang dapat menemukan titik tolak untuk sebuah teori baru mengenai konflik kepentingan dalam sistem kapitalis. Ricardo percaya bahwa ia dapat menunjukkan bagaimana, dalam perjalanan perkembangan ekonomi yang progresif, perubahan terjadi dalam hubungan antara tiga bentuk pendapat dalam sistemnya, viz., keuntungan, sewa, dan upah. Inilah yang mendorong beberapa penulis Inggris dalam dekade ketiga dan keempat abad kesembilan belas untuk berbicara mengenai tiga kelas, yaitu kelas kapitalis, pemilik tanah, dan pekerja yang digaji dan untuk menyatakan bahwa ada antagonisme yang tidak dapat didamaikan di antara kelompok-kelompok ini. Pemikiran ini kemudian diambil oleh Marx.

Dalam *Communist Manifesto* (Manifesto Komunis), Marx masih tidak membedakan antara kasta dan kelas. Baru setelah itu, saat Marx berkenalan di London dengan tulisan-tulisan para pembuat pamflet yang telah dilupakan dari tahun duapuluhan dan tigapuluhan dan, di bawah pengaruh mereka, memulai studi mengenai sistem Ricardo, barulah ia menyadari bahwa masalah dalam kasus ini adalah bagaimana menunjukkan bahwa bahkan dalam masyarakat



tanpa perbedaan kasta dan hak-hak istimewa konflik yang tidak dapat didamaikan tetap ada. Ia menyimpulkan antagonisme kepentingan ini dari sistem Ricardo dengan membedakan tiga kelas yang terdiri dari kapitalis, pemilik tanah, dan pekerja. Namun ia sama sekali tidak bermaksud untuk mengikuti perbedaan ini secara ketat. Ada kalanya ia menegaskan bahwa hanya ada dua kelas, yaitu pemilik kekayaan, dan yang tidak memiliki kekayaan; di saat lain ia membuat perbedaan di antara banyak kelas dan bukan hanya dua atau tiga kelas.

Namun, tak pernah sekali pun Marx atau satu pun dari sekian banyak pengikutnya yang mencoba dengan cara apa pun untuk mendefinisikan konsep dan sifat dasar kelas-kelas. Adalah hal yang signifikan bahwa bab dengan judul “The Classes” (Kelas-kelas) dalam volume ketiga *Capital* (Kapital) diakhiri hanya setelah beberapa kalimat. Lebih dari satu generasi berlalu sejak kemunculan *Communist Manifesto*, di mana Marx untuk pertama kalinya membuat antagonisme kelas dan perang kelas landasan dari seluruh doktrinnya sampai akhir hayatnya. Selama periode ini Marx menulis volume demi volume, namun dia tidak pernah sampai pada titik untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kelas”. Dalam menangani masalah kelas Marx tidak pernah membuat lebih dari sebuah pernyataan singkat ‘tanpa bukti apa pun, tentang kepercayaan atau, sebut saja, slogan.

Untuk membuktikan bahwa doktrin tentang perang kelas itu benar, seseorang harus bisa membuktikan dua hal: di satu sisi, bahwa ada identitas tentang kepentingan di antara anggota masing-masing kelas; dan di sisi lain, bahwa apa yang menguntungkan satu kelas, merugikan kelas lain. Ini, bagaimana pun, tidak pernah tercapai. Sesungguhnya, hal itu juga tidak pernah dicoba. Justru karena “kawan sekelas” (“*class comrades*”) semuanya berada dalam “situasi sosial” yang sama, tidak ada identitas kepentingan di antara mereka, yang ada kompetisi. Para pekerja, sebagai contoh, yang dipekerjakan di bawah kondisi yang lebih-baik-dari-rata-rata berkepentingan untuk melarang pesaing yang dapat mengurangi pendapatan

mereka menjadi rata-rata. Dalam dekade-dekade di mana doktrin mengenai solidaritas internasional kaum proletar diproklamasikan berulang kali dalam resolusi berbelit-belit yang diadopsi di kongres Interasional Marxist, para pekerja Amerika Serikat dan Australia menyusun hambatan terbesar bagi imigrasi. Melalui jalinan rumit mengenai peraturan picik, serikat buruh Inggris membuat kehadiran pendatang dalam cabang-cabang pekerjaan mereka sesuatu yang mustahil.

Apa yang dilakukan oleh partai-partai buruh berkaitan dengan hal ini di setiap negara selama beberapa tahun terakhir sudah diketahui dengan baik. Tentu saja, seseorang bisa saja mengatakan ini seharusnya tidak terjadi; para pekerja seharusnya menunjukkan sikap berbeda; apa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang mereka lakukan memang sesuai dengan kepentingan mereka--setidaknya pada saat itu. Liberalisme telah membuktikan bahwa antagonisme kepentingan, yang, menurut pandangan yang berlaku umum, seharusnya ada di antara orang-orang, kelompok, dan strata yang berbeda dalam masyarakat yang berdasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, pada kenyataannya tidak terjadi. Setiap peningkatan dalam modal total akan meningkatkan pendapatan kaum kapitalis dan pemilik tanah secara absolut dan bagi pekerja secara absolut dan relatif. Sehubungan dengan pendapatan mereka, setiap perubahan dalam berbagai kepentingan kelompok-kelompok dan strata masyarakat yang berbeda—pengusaha, kapitalis, pemilik tanah, dan pekerja—terjadi secara bersamaan dan bergerak ke arah yang sama saat mereka melewati fase yang berbeda dalam fluktuasi mereka; yang bervariasi hanyalah rasio dari bagian mereka dalam produk sosial.

Kepentingan pemilik tanah bertolak belakang dengan kepentingan anggota-anggota kelompok lain hanya dalam kasus monopoli sejati mineral tertentu. Kepentingan pengusaha tidak akan pernah menyimpang dari kepentingan konsumen. Semakin makmur pengusaha, semakin mampu ia mengantisipasi keinginan konsumen.

Konflik kepentingan bisa terjadi hanya jika pembatasan terhadap kebebasan pemilik untuk menggunakan alat-alat produksinya diberlakukan oleh ketentuan intervensionis pemerintah atau intervensi kekuatan-kekuatan sosial yang bersenjatakan kekuatan memaksa (*coercive*). Contohnya, harga satu barang tertentu bisa dinaikkan secara artifisial dengan tarif proteksi, atau upah kelompok pekerja tertentu dapat dinaikkan dengan melarang semua pesaing di pekerjaan mereka. Jalan pikiran terkenal dari aliran perdagangan bebas, yang tidak pernah dibantah dan tak akan pernah terbantahkan, berlaku untuk kasus-kasus seperti ini.

Hak-hak istimewa seperti itu dapat, tentu saja, memberikan keuntungan pada kelompok tertentu untuk siapa kepentingan itu dilembagakan (diberlakukan) hanya jika kelompok lain gagal memperoleh hak-hak istimewa serupa. Namun tidak bisa diasumsikan bahwa mungkin, dalam jangka panjang, untuk mengelabui mayoritas penduduk tentang makna penting sesungguhnya dari hak-hak istimewa tersebut sehingga mereka bisa mentolerirnya dengan sukarela. Namun jika seseorang memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk memaksakan penerimaan mereka, ia akan memprovokasi pemberontakan yang hebat—singkatnya, gangguan terhadap kerjasama sosial yang damai yang pelestariannya merupakan kepentingan semua orang. Jika seseorang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat hak-hak istimewa ini bukan kekecualian bagi satu atau beberapa orang, kelompok, atau strata masyarakat, namun berlaku umum, sebagai, contohnya, dengan menerapkan pajak impor untuk melindungi hampir semua barang-barang yang dijual di pasar dalam negeri atau dengan menggunakan langkah-langkah serupa untuk menutup akses ke mayoritas pekerjaan, keuntungan yang didapat oleh setiap kelompok tertentu diimbangi oleh kerugian yang harus mereka terima, dan hasil akhirnya adalah semua dirugikan oleh penurunan logis produktivitas kerja.

Jika seseorang menolak doktrin liberalisme ini, jika seseorang mengolok-olok teori kontroversial “harmoni (merupakan)

kepentingan semua orang (*"harmony of interests of all men"*), maka juga tidak benar, seperti yang disalahartikan oleh pemikiran aliran antiliberal, bahwa masih bisa ada solidaritas kepentingan dalam lingkaran yang lebih sempit, seperti, misalnya, di antara warga negara yang sama (sebagai lawan negara-negara lain) atau di antara anggota "kelas" yang sama (sebagai lawan kelas-kelas lain). Untuk membuktikan bahwa solidaritas seperti itu ada, dibutuhkan pemikiran khusus yang belum pernah diikuti atau bahkan dicoba. Ini karena semua argumen yang dapat dipakai untuk membuktikan keberadaan solidaritas kepentingan di antara anggota-anggota kelompok-kelompok ini membuktikan lebih banyak selain, viz., solidaritas kepentingan universal dalam masyarakat dunia (*ecumenical*). Bagaimana konflik-konflik kepentingan yang nyata itu sekilas terlihat tak mungkin didamaikan pada kenyataannya diselesaikan dapat ditunjukkan hanya melalui jalan pikiran yang menyikapi seluruh umat manusia sebagai komunitas yang pada dasarnya harmonis dan tidak menyediakan ruang untuk membuktikan antagonisme yang tidak dapat didamaikan di antara negara, kelas, bangsa, dan sejenisnya.

Partai antiliberal tidak, seperti yang mereka percayai, membuktikan bahwa ada solidaritas kepentingan dalam negara, kelas, bangsa, dan sebagainya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah merekomendasikan kepada anggota-anggota kelompok-kelompok ini aliansi untuk perjuangan bersama melawan kelompok lain. Ketika mereka berbicara tentang solidaritas kepentingan dalam kelompok-kelompok ini, mereka tidak mengukuhkan sebuah kenyataan tetapi mengajukan sebuah dalil (*postulate*). Pada kenyataannya, mereka tidak mengatakan, "Kepentingannya sama," namun, "Kepentingannya harus dibuat sama melalui aliansi untuk kesatuan aksi."

Sejak awal partai-partai modern dengan kepentingan khusus mendeklarasikan secara cukup terbuka dan tegas, bahwa tujuan kebijakan mereka adalah penciptaan hak-hak istimewa untuk kelompok tertentu. Partai-partai agraris berjuang untuk tarif proteksi

dan keuntungan lain (contohnya, subsidi) untuk petani; partai pegawai negeri bertujuan mengamankan hak-hak istimewa untuk birokrat; partai regional ditujukan untuk memperoleh keuntungan khusus bagi penduduk di wilayah tertentu. Semua partai ini pada kenyataannya hanya mencari keuntungan untuk satu kelompok dalam masyarakat, tanpa mempertimbangkan keseluruhan masyarakat atau kelompok lain, betapa pun mereka mungkin ingin mengurangi prosedur mereka dengan mendeklarasikan bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat bisa diperoleh hanya dengan memajukan kepentingan pertanian, pegawai negeri, dsb. Sesungguhnya, satu-satunya perhatian mereka hanyalah terhadap satu segmen masyarakat dan jerih payah serta upaya mereka atas nama segmen itu menjadi semakin jelas dan sinis dengan berlalunya waktu. Saat pergerakan antiliberal modern baru saja tumbuh, mereka harus lebih berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu, karena Generasi yang dibesarkan oleh falsafah liberal memandang dukungan tak terselubung bagi kepentingan khusus berbagai kelompok sebagai antisosial.

Pendukung kepentingan khusus dapat membentuk partai-partai besar hanya dengan membentuk satu unit tempur (kombat) dari kekuatan-kekuatan gabungan dari berbagai kelompok yang kepentingan khususnya bertentangan. Namun, hak-hak istimewa yang diberikan kepada kelompok tertentu memiliki nilai praktis hanya ketika mereka diberikan kepada kelompok minoritas dan tidak dikalahkan oleh hak-hak istimewa yang diberikan pada kelompok lain. Namun, kecuali jika situasinya luar biasa menguntungkan, satu kelompok kecil saat ini tidak dapat berharap, selagi kecaman liberal terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan masih memiliki sisa-sisa pengaruh lamanya, agar klaimnya untuk diperlakukan sebagai kelas dengan hak-hak istimewa, diakui oleh semua kelompok lain. Maka, masalah semua partai dengan kepentingan khusus adalah bagaimana membuat partai besar dari partai-partai yang relatif kecil dengan perbedaan dan, sebenarnya, kepentingan yang bertentangan. Namun mengingat mentalitas yang mendorong

partai-partai yang lebih kecil ini mengajukan dan mempertahankan tuntutan mereka bagi hak-hak istimewa, tujuan ini tidak mungkin dapat dicapai melalui aliansi terbuka yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda. Tidak ada pengorbanan sementara yang dapat diminta dari seseorang yang berjuang untuk memperoleh hak-hak istimewa untuk kelompoknya sendiri atau bahkan hanya untuk dirinya sendiri; jika ia mampu memahami alasan untuk membuat pengorbanan sementara, maka ia pasti akan berpikir sesuai dengan garis liberal dan tidak berdasarkan tuntutan mereka yang terlibat dalam pertarungan untuk memperoleh hak-hak istimewa. Juga tidak ada yang dapat memberitahunya secara terbuka bahwa ia akan mendapat keuntungan lebih banyak dari hak-hak istimewa yang dimaksudkan untuknya daripada kerugian yang harus ia tanggung karena hak-hak istimewa yang harus ia berikan kepada orang lain, karena pidato dan tulisan mengenai hal ini tidak bisa, dalam jangka panjang, disembunyikan dari yang lain dan akan mendorong mereka untuk menaikkan tuntutan mereka lebih tinggi lagi.

Maka, partai-partai dengan kepentingan khusus wajib berhati-hati. Dalam membicarakan hal yang paling penting ini dalam upaya mereka, mereka harus menggunakan ungkapan dwimakna (*ambiguous*) yang dimaksudkan untuk menyamarkan keadaan yang sebenarnya. Partai-partai proteksionis adalah contoh terbaik dari dalih seperti ini. Mereka harus selalu berhati-hati dalam merepresentasikan minat pada tarif proteksi yang mereka rekomendasikan sebagai minat dari kelompok yang lebih luas. Ketika asosiasi produsen mendukung tarif proteksi, pemimpin partai pada umumnya akan berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa kepentingan kelompok-kelompok individu dan seringkali bahkan kepentingan perusahaan-perusahaan individu sama sekali tidak sama dan harmonis. Para penenun dirugikan oleh tarif-tarif yang dikenakan pada mesin dan benang dan akan mendukung gerakan proteksionis hanya dengan mengharapkan tarif tekstil akan cukup tinggi untuk mengkompensasi kerugian yang ia tanggung dari tarif-tarif lain. Petani yang menanam makanan ternak menuntut

tarif untuk makanan ternak yang ditentang peternak sapi; petani anggur menuntut tarif untuk minuman anggur, yang sama tidak menguntungkannya bagi petani yang tidak memiliki perkebunan anggur dan konsumen kota. Meskipun begitu, kaum proteksionis muncul sebagai sebuah partai yang bersatu di balik program bersama. Ini hanya mungkin dengan mengaburkan kebenaran.

Setiap upaya untuk mendirikan partai dengan kepentingan khusus berdasarkan pembagian hak-hak istimewa yang setara di antara mayoritas penduduk benar-benar tidak masuk akal. Hak istimewa yang diberikan kepada mayoritas bukan lagi hak istimewa. Dalam negara yang didominasi pertanian, yang mengekspor produk pertanian, partai agraris yang berjuang untuk hak-hak khusus petani akan, dalam jangka panjang, mustahil. Apa yang harus menjadi tuntutanannya? Tarif proteksi tidak memberi manfaat kepada petani-petani ini, yang harus mengekspor produk mereka; dan subsidi tidak dapat dibayarkan pada mayoritas produsen, karena minoritas tidak dapat menyediakannya. Minoritas, di sisi lain, yang menuntut hak-hak istimewa bagi mereka sendiri, harus menciptakan ilusi bahwa massa berada di belakang mereka. Saat partai agraris dalam negara industri mengajukan tuntutan mereka, mereka memasukkan apa yang mereka sebut “populasi petani”, pekerja tanpa lahan, buruh pedesaan (*cottagers*), dan pemilik lahan kecil, yang tidak tertarik pada tarif proteksi untuk produk pertanian. Ketika partai pekerja membuat tuntutan atas nama kelompok pekerja, mereka selalu berbicara tentang massa pekerja dan menyembunyikan fakta bahwa kepentingan anggota-anggota serikat buruh yang dipekerjakan dalam cabang produksi yang berbeda tidaklah sama, namun, sebaliknya, bertentangan (antagonistik), dan bahkan dalam industri dan perusahaan individu terdapat konflik kepentingan yang tajam.

Ini merupakan salah satu dari dua kelemahan fundamental partai-partai yang menginginkan hak-hak istimewa atas nama kepentingan khusus. Di satu sisi, mereka diharuskan bergantung kepada sebuah kelompok kecil, karena hak-hak istimewa sudah bukan lagi hak istimewa saat mereka diberikan kepada mayoritas; namun, di sisi

lain, hanya dengan berkedok mendukung dan mewakili mayoritas maka mereka memiliki prospek untuk mewujudkan tuntutan mereka. Kenyataan bahwa banyak partai di banyak negara kadang kala berhasil mengatasi kesulitan ini dalam menjalankan propaganda mereka dan mampu mengilhami setiap strata sosial atau kelompok dengan keyakinan bahwa anggota-anggotanya bisa mendapatkan hak istimewa dari kemenangan partai hanya membuktikan kemampuan diplomatis dan taktis para pemimpin mereka dan karena massa pemilih tidak memiliki kemampuan untuk membuat penilaian dan tidak memiliki kedewasaan politik. Ini sama sekali bukan merupakan bukti bahwa solusi sebenarnya dari masalah tersebut, pada kenyataannya, mungkin. Tentu saja, seseorang bisa pada saat yang bersamaan menjanjikan warga kota roti yang lebih murah dan petani harga gandum yang lebih tinggi, tapi seseorang tidak dapat menepati kedua janji itu secara bersamaan. Cukup mudah untuk menjanjikan kepada satu kelompok bahwa seseorang akan mendukung kenaikan belanja tertentu pemerintah tanpa mengurangi belanja pemerintah di bidang lain, dan pada saat yang bersamaan menjanjikan kepada kelompok lain prospek pajak yang lebih rendah; namun seseorang tidak bisa memenuhi kedua janji ini secara bersamaan.

Tehnik partai-partai ini didasarkan atas pembagian masyarakat ke dalam kelompok produsen dan konsumen. Mereka juga terbiasa menggunakan landasan (*hypostasis*) umum negara menyangkut masalah kebijakan fiskal yang memungkinkan mereka mendukung pengeluaran baru yang dibiayai oleh kantor bendahara publik tanpa kekhawatiran tertentu tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan pada saat yang bersamaan mengeluh tentang beban pajak yang berat.

Kelemahan mendasar lain partai-partai ini adalah bahwa tuntutan yang mereka ajukan untuk kelompok-kelompok tertentu tidak mengenal batas. Di mata mereka, hanya ada *satu* batasan bagi kuantitas yang mereka tuntut: tentangan dari pihak yang berseberangan. Ini benar-benar sesuai dengan karakter mereka



sebagai partai yang memperjuangkan hak-hak istimewa atas nama kepentingan khusus. Namun partai yang tidak mengikuti program tertentu, tapi terlibat dalam konflik dalam upaya mereka memenuhi hasrat tak terbatas untuk hak-hak istimewa atas nama sebagian orang dan cacat hukum untuk sebagian lain orang, akan mengakibatkan kehancuran sistem politik. Orang telah menyadari dengan lebih jelas dan mulai berbicara tentang krisis negara modern dan krisis sistem parlementer. Pada kenyataannya, krisis itu adalah krisis ideologi dari partai-partai modern dengan kepentingan khusus.

### **3. Krisis Parlementer dan Ide tentang Majelis Permusyawaratan yang Mewakili Kelompok-kelompok Khusus**

Parlementerisme seperti yang telah berkembang secara perlahan di Inggris dan di beberapa koloninya semenjak abad ketujuhbelas, dan di benua Eropa semenjak jatuhnya Napoleon dan revolusi Januari dan Februari, mengandaikan penerimaan umum ideologi liberalisme. Semua yang masuk ke parlemen yang memiliki kewajiban menentukan bagaimana negara diperintah harus dijiwai oleh keyakinan bahwa kepentingan semua bagian dan semua anggota masyarakat yang dipahami dengan baik saling berhubungan, dan bahwa semua jenis hak istimewa kelompok dan kelas-kelas tertentu berdampak buruk pada kepentingan umum dan harus dihilangkan. Partai-partai yang berbeda dalam parlemen yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi yang ditetapkan untuknya oleh semua konstitusi masa kini bisa, tentu saja, mengambil sikap berbeda berkaitan dengan permasalahan politik tertentu, namun mereka harus menganggap diri mereka sebagai perwakilan seluruh bangsa, bukan wakil distrik atau strata sosial tertentu.

Di atas semua perbedaan pendapat mereka harus ada keyakinan bahwa, pada akhirnya, mereka disatukan oleh maksud dan tujuan yang sama dan bahwa hanya sarana untuk mencapai tujuan mereka yang diperdebatkan. Partai-partai itu tidak dipisahkan oleh selat yang tak terjembatani atau oleh konflik kepentingan yang siap mereka

pertahankan sampai akhir yang menyedihkan, bahkan jika itu berarti seluruh bangsa harus menderita dan negara mengalami kehancuran. Yang memisahkan partai-partai adalah posisi yang mereka ambil dalam kaitan dengan masalah-masalah konkrit kebijakan. Oleh karena itu, hanya ada dua partai: partai yang berkuasa dan partai yang ingin berkuasa. Bahkan oposisi tidak berupaya mendapatkan kekuasaan untuk mendukung kepentingan tertentu atau untuk mengisi pos-pos pemerintahan dengan anggota partainya, namun untuk menerjemahkan ide-idenya ke dalam legislasi dan untuk menerapkan ide-ide tersebut dalam penyelenggaraan negara.

Hanya dalam kondisi ini parlemen atau pemerintahan parlementer dapat dijalankan. Selama beberapa waktu kondisi itu diwujudkan di negara-negara Anglo-Saxon, dan sisa-sisanya masih ditemukan di sana hingga hari ini. Di benua Eropa, bahkan dalam periode yang biasa disebut sebagai periode keemasan liberalisme, seseorang hanya bisa mengatakan bahwa kondisinya hanya mendekati kondisi tersebut. Selama beberapa abad, kondisi di majelis-majelis rakyat di Eropa mirip dengan kondisi sebaliknya. Ada sejumlah besar partai, dan masing-masing partai terpecah ke dalam beberapa subkelompok, yang umumnya bersatu dalam menghadapi dunia luar, namun biasanya saling bertentangan dalam dewan partai sama sengitnya seperti saat mereka menentang partai lain secara terbuka. Setiap partai dan faksi tertentu merasa mereka terpilih sebagai satu-satunya pendukung kepentingan khusus yang mereka perjuangkan untuk meraih kemenangan dengan akibat apa pun. Untuk mengalokasikan sebanyak mungkin dari kas publik untuk “kita sendiri,” membantu mereka dengan tarif proteksi, hambatan imigrasi, “legislasi sosial”, dan segala macam hak-hak istimewa, dengan mengorbankan seluruh masyarakat, merupakan inti kebijakan mereka.

Karena tuntutan mereka, pada prinsipnya, tidak terbatas, tidak mungkin bagi setiap partai untuk meraih semua tujuan yang dibayangkan. Tidak dapat dibayangkan bila semua yang diperjuangkan oleh partai pekerja dan partai agraris bisa diwujudkan

sepenuhnya. Namun, setiap partai berupaya mendapatkan pengaruh yang memungkinkannya memenuhi semua hasratnya dan pada saat yang bersamaan memberi alasan kepada para pemilih mereka mengapa semua keinginan mereka tidak dapat diwujudkan. Ini bisa dilakukan baik dengan tampil di publik seolah-olah mereka berada di pihak oposisi, meskipun partainya sebenarnya sedang berkuasa, atau berupaya menyalahkan kekuatan-kekuatan yang tidak berada dalam pengaruhnya: penguasa, di negara monarki; atau, dalam kondisi tertentu, kekuatan asing atau sejenisnya.

Kaum Bolshevik tidak bisa membuat Rusia bahagia, seperti halnya kelompok sosialis tidak bisa membuat Austria bahagia karena dihalangi “kapitalisme barat”. Setidaknya sudah lima puluh tahun partai antiliberal berkuasa di Jerman dan Austria, namun kita masih membaca di manifesto dan pernyataan publik mereka, bahkan dalam pernyataan para pendukung “ilmu pengetahuan”, bahwa semua hal-hal buruk disebabkan oleh dominasi prinsip-prinsip “liberal”. Parlemen yang terdiri dari pendukung partai antiliberal dengan kepentingan khusus tidak dapat menyelenggarakan urusan mereka dan akan, dalam jangka panjang, mengecewakan semua orang. Inilah yang dimaksudkan saat orang-orang berbicara, selama bertahun-tahun dan hingga hari ini, tentang krisis parlementer.

Sebagai solusi krisis ini, ada yang menuntut pembubaran (abolisi) demokrasi dan sistem parlementer dan kediktatoran. Kami tidak bermaksud membahas lagi penolakan terhadap kediktatoran karena hal ini sudah dibahas dengan cukup detail.

Saran kedua ditujukan pada perbaikan semua kekurangan yang ditengarai di majelis permusyawaratan yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara langsung oleh seluruh warga negara, baik dengan menambah atau menggantinya seluruhnya dengan *diet* (majelis permusyawaratan) yang terdiri dari delegasi yang dipilih oleh badan kerjasama otonom atau serikat pekerja (*guild*) yang dibentuk oleh berbagai cabang perdagangan, industri, dan profesi yang berbeda. Ada pendapat bahwa anggota-anggota majelis rakyat tidak memiliki obyektivitas yang dituntut dan pengetahuan

mengenai masalah ekonomi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan umum ketimbang kebijakan ekonomi. Perwakilan serikat industri dan profesi dapat mencapai kesepakatan tentang permasalahan yang solusinya sepenuhnya tidak dipahami oleh delegasi para konstituen yang dibentuk berdasarkan azas geografis semata atau yang hanya menjadi jelas setelah jeda yang panjang.

Dalam hal majelis yang terdiri dari delegasi yang mewakili berbagai asosiasi profesi yang berbeda, pertanyaan penting yang harus dipahami semua orang adalah tentang mekanisme pemungutan suara, atau, jika seorang anggota memiliki satu suara, berapa jumlah perwakilan dalam satu serikat (*guild*). Ini masalah yang harus diatasi sebelum *diet* mengadakan rapat; namun begitu masalah ini terjawab, seseorang tidak perlu bersusah-payah minta agar majelis menyelenggarakan pertemuan, karena hasil pemungutan suara sudah pasti. Yang jelas, pertanyaan apakah pembagian kekuasaan di antara serikat-serikat, setelah ditentukan, dapat dipertahankan, merupakan masalah lain. Itu tidak akan pernah—jangan berangan-angan tentang hal ini—diterima oleh kebanyakan orang. Untuk membentuk sebuah parlemen yang dapat diterima oleh mayoritas, tidak perlu membagi majelis ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis pekerjaan (profesi). Semuanya akan tergantung pada apakah ketidakpuasan yang diakibatkan oleh kebijakan yang diadopsi oleh para wakil serikat cukup besar sehingga akan mengakibatkan seluruh sistem digulingkan dengan kekerasan. Bertolak belakang dengan sistem demokratis, sistem ini tidak menawarkan jaminan bahwa perubahan kebijakan yang menjadi hasrat kelompok mayoritas akan terjadi.

Dengan mengatakan ini, kita telah mengatakan semua yang perlu dikatakan untuk menentang ide majelis yang dibentuk berdasarkan pembagian profesi (pekerjaan). Bagi kaum liberal, sistem yang tidak mengecualikan interupsi kasar terhadap perkembangan yang berlangsung dengan damai, sejak awal, tidak mungkin. Banyak pendukung ide *diet* yang terdiri dari perwakilan serikat mengira bahwa konflik harus diselesaikan, bukan dengan penaklukan

satu faksi oleh faksi lain, namun melalui penyesuaian bersama terhadap perbedaan. Namun, apa yang akan terjadi jika partai-partai tidak berhasil mencapai kesepakatan? Kompromi dicapai hanya bila momok yang mengancam dalam bentuk isu yang tidak menguntungkan menyudutkan partai yang terlibat dalam sengketa (perdebatan) untuk membuat semacam konsesi. Tak ada yang menghalangi berbagai partai yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bahkan dalam parlemen yang terdiri dari delegasi yang dipilih langsung oleh seluruh bangsa. Tidak ada yang dapat memaksakan kesepakatan dalam *diet* yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh anggota-anggota asosiasi profesi.

Demikianlah, sebuah majelis yang dibangun dengan cara di atas tidak dapat berfungsi seperti parlemen yang berfungsi sebagai organ (alat) sistem demokratis. Majelis seperti itu bukan tempat di mana perbedaan opini politik dapat diselaraskan secara damai. Majelis seperti itu tidak berada dalam posisi yang dapat mencegah interupsi kasar terhadap perkembangan masyarakat yang damai oleh pemberontakan, revolusi, dan perang saudara. Ini karena keputusan krusial yang menentukan distribusi kekuatan politik dalam negara tidak dibuat di dewan-dewan majelis atau selama masa pemilihan yang menentukan komposisinya.

Faktor yang menentukan dalam menetapkan distribusi kekuatan adalah bobot relatif yang diberikan oleh konstitusi pada asosiasi korporasi yang berbeda dalam mengarahkan kebijakan politik. Namun, ini masalah yang diputuskan di luar dewan-dewan *diet* dan tanpa kaitan organik apa pun dengan pemilihan umum yang memilih para anggotanya.

Oleh karena itu cukup tepat untuk tidak menyebut majelis yang terdiri dari perwakilan asosiasi korporasi yang diorganisir berdasarkan pekerjaan (profesi) sebuah parlemen. Sebutan politik telah disesuaikan, dalam beberapa abad terakhir, untuk membuat perbedaan tajam antara parlemen dan majelis seperti itu. Jika seseorang tidak ingin mencampuradukkan semua konsep-konsep ilmu politik, ia harus mematuhi perbedaan ini.

Sidney dan Beatrice Webb, serta sejumlah sindikalisis dan sosialis serikat (*guild*), dalam hal ini mengikuti rekomendasi yang telah dibuat di masa lampau oleh para pendukung kontinental bagi sebuah reformasi di majelis tinggi (*upper chamber*), menyarankan agar kedua dewan (*chamber*) berdiri berdampingan, satu ditunjuk langsung oleh seluruh rakyat, dan satu lagi terdiri dari perwakilan yang dipilih oleh konstituen yang terbagi ke dalam jenis-jenis pekerjaan (profesi). Namun, jelas terlihat bahwa usulan ini sama sekali bukan jalan keluar untuk mengatasi kelemahan sistem perwakilan serikat (*guild*). Dalam prakteknya, sistem dua kamar (*bicameral*) hanya dapat berjalan jika salah satu dewan memiliki kontrol (*upper hand*) dan kekuatan tak terbatas untuk memaksakan keinginannya pada dewan lain, atau jika, saat kedua dewan (*chamber*) mengambil sikap berbeda dalam sebuah isu, harus ada upaya untuk melakukan kompromi terhadap solusinya. Namun, tanpa upaya tersebut, konflik tetap harus diselesaikan di luar ruangan parlemen, dan upaya terakhir adalah dengan menggunakan kekerasan. Seperti apa pun seseorang mengutak-atik masalah itu, pada akhirnya ia akan kembali menghadapi kesulitan yang sama yang tak terpecahkan. Begitu besar hambatan yang dihadapi sehingga semua usulan seperti ini dan usulan sejenis akan berakhir menyedihkan, entah itu *corporativism*, serikat (*guild*) sosialisme atau usulan lain.

Bahwa skema semacam ini tidak mungkin terlaksana diakui ketika orang akhirnya merasa puas dengan merekomendasikan inovasi yang sama sekali berbeda (ngawur): pembentukan konsil ekonomi yang kewenangannya tak lebih dari sebuah badan penasehat.

Para pendukung ide tentang majelis yang terdiri dari perwakilan serikat (*guild*) hanya berangan-angan jika mereka mengira bahwa antagonisme yang dewasa ini mengoyak persatuan nasional dapat diatasi dengan membagi-bagi penduduk dan majelis rakyat berdasarkan pekerjaan (profesi). Seseorang tidak dapat menyingkirkan antagonisme hanya ini dengan mengutak-atik masalah teknis konstitusi. Antagonisme itu hanya dapat diatasi oleh ideologi liberal.

#### 4. Liberalisme dan Partai-Partai dengan Kepentingan Khusus

Partai-partai dengan kepentingan khusus, yang memandang politik tak lebih sebagai upaya mengamankan hak istimewa dan prerogatif kelompok mereka sendiri, tidak hanya membuat sistem parlementer tak mungkin terlaksana, mereka juga merusak persatuan negara dan masyarakat. Mereka mendorong tidak hanya krisis parlementerisme tapi juga krisis politik dan sosial pada umumnya. Dalam jangka panjang masyarakat tidak bertahan kalau ia terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok dengan perbedaan tajam, masing-masing bertekad merebut hak-hak istimewa untuk anggotanya, senantiasa waspada agar tidak mengalami kemunduran, dan siap setiap saat untuk mengorbankan institusi politik yang paling penting untuk memperoleh keuntungan tak seberapa.

Partai-partai dengan kepentingan khusus melihat semua masalah politik semata-mata sebagai masalah taktik politik. Tujuan akhir mereka telah ditetapkan sejak awal. Tujuan mereka adalah mendapatkan, dengan mengorbankan semua penduduk, keuntungan paling besar dan hak-hak istimewa untuk kelompok yang mereka wakili. *Platform* partai dirancang untuk menyembunyikan tujuan ini dan memberinya pembenaran, namun dalam situasi apa pun tidak diumumkan secara terbuka sebagai tujuan kebijakan partai. Anggota-anggota partai, bagaimana pun, tahu tujuan mereka; mereka tidak perlu mendapat penjelasan mengenai hal itu. Namun, seberapa banyak dari tujuan itu yang harus disampaikan kepada dunia, sepenuhnya merupakan masalah taktis.

Tujuan semua partai antiliberal tak lain dari memperoleh hak istimewa untuk anggota mereka tanpa mempedulikan akibatnya yang dapat mengakibatkan kehancuran struktur sosial masyarakat. Mereka sama sekali tidak bisa bertahan dari kritik liberalisme terhadap tujuan mereka. Mereka tidak bisa membantah, saat tuntutan mereka diamati dengan seksama, bahwa sesungguhnya aktivitas mereka memiliki efek antisosial dan merusak dan bahkan kajian sepintas pun

akan membuktikan bahwa tidak mungkin tatanan sosial dalam bentuk apa pun muncul dari kegiatan partai dengan kepentingan khusus yang terus menerus saling bertentangan satu sama lain. Yang pasti, kenyataan bahwa fakta-fakta ini tidak terbantahkan tidak mampu merusak partai-partai dengan kepentingan khusus di mata mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk melihat jauh ke depan.

Kebanyakan orang tidak mencari tahu apa yang akan terjadi lusa atau setelah itu. Mereka memikirkan hari ini dan paling jauh besok. Mereka tidak bertanya apa yang akan terjadi jika semua kelompok lain juga, dalam mengejar kepentingan khusus mereka, menunjukkan ketidakpedulian yang sama terhadap kesejahteraan umum. Mereka berharap akan berhasil tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan mereka namun juga dalam mengalahkan tuntutan orang lain. Bagi beberapa orang yang menerapkan standar lebih tinggi untuk aktivitas partai politik, yang menuntut bahkan dalam aksi politik kategori imperatif dipatuhi (“Bertindak hanya berdasarkan prinsip yang pada saat anda inginkan menjadi hukum universal, i.e., sehingga tidak ada kontradiksi dari upaya anda membuat tindakan anda sebagai hukum yang berlaku secara universal”), ideologi partai dengan kepentingan khusus tidak menawarkan apa pun.

Sosialisme mendapatkan keuntungan yang cukup besar akibat defisiensi logis dari sikap yang dianut oleh partai-partai dengan kepentingan khusus. Prinsip sosialisme memiliki arti khusus bagi mereka yang tidak mampu memahami tujuan besar liberalisme, namun yang pikirannya terlalu jernih untuk merasa puas dengan tuntutan bagi perlakuan khusus atas nama kelompok tertentu. Ide mengenai masyarakat sosialis—yang tak bisa disangkal lahir dari pemikiran yang mulia, terlepas dari kelemahan-kelemahan yang melekat dalam dirinya yang telah kita bahas dengan detil—berfungsi menyembunyikan dan pada saat yang bersamaan memaklumi kelemahan posisi yang diambil oleh partai-partai dengan kepentingan khusus. Ini mengalihkan perhatian para kritikus dari aktivitas partai pada masalah besar yang, terlepas dari apa pun, pantas mendapat pertimbangan yang serius dan mendalam.



Dalam beberapa ratus tahun terakhir, cita-cita sosialis dalam berbagai bentuk berhasil menggalang banyak pengikut dari kalangan orang-orang tulus dan jujur. Sejumlah pria dan wanita terbaik dan paling mulia merangkulnya dengan antusias. Cita-cita itu menjadi pedoman bagi para negarawan terkemuka dan mendapatkan posisi dominan di universitas serta menjadi sumber inspirasi bagi kaum muda. Cita-cita sosialis memenuhi pikiran dan memuaskan emosi generasi dulu mau pun sekarang sehingga kelak sejarah akan menamakan era kita sebagai era sosialisme. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, di semua negara orang-orang telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkan cita-cita sosialis dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan menjadi milik nasional dan kota dan dengan mengambil langkah-langkah yang dirancang untuk menjalankan ekonomi yang terencana.

Kelemahan-kelemahan manajemen sosialis yang tidak bisa dihindari—efek yang tidak menguntungkan pada produktivitas kerja manusia dan kemustahilan perhitungan ekonomi di bawah sosialisme—di mana-mana menyebabkan semua upaya ini menuju ke titik di mana nyaris semua langkah untuk memajukan sosialisme menjadi ancaman luar biasa terhadap pasokan barang-barang yang tersedia untuk masyarakat. Ini memaksa orang untuk berhenti sejenak sebelum melangkah lebih jauh di jalan sosialisme; dan cita-cita sosialis—bahkan ketika ia berusaha mempertahankan posisi puncak ideologi itu—menjadi, dalam politik praktis, sekadar selubung bagi partai-partai buruh dalam upaya mereka meraih hak-hak istimewa.

Ini telah terbukti untuk semua partai-partai sosialis, seperti, contohnya, berbagai faksi yang berbeda di antara para pengikut sosialis Kristen. Namun, kami bermaksud membatasi pembahasan kita pada kasus sosialis Marxian, yang tak diragukan lagi pernah dan masih merupakan partai sosialis yang paling penting.

Marx dan pengikutnya benar-benar serius mengenai sosialisme. Marx menolak langkah-langkah yang dituntut oleh partai-partai dengan kepentingan khusus yang mengatasnamakan kelompok dan

strata tertentu masyarakat. Ia tidak meragukan keabsahan argumen liberal bahwa aksi campur tangan hanya akan menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Setiap kali ia berpikir, menulis, dan berbicara secara konsisten, ia selalu berpendapat bahwa setiap upaya untuk mengutak-atik mekanisme sistem kapitalis dengan tindakan intervensi pemerintah atau organ sosial lain yang memiliki kekuatan memaksa tidak ada gunanya karena tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh para pendukungnya, malah menurunkan produktivitas ekonomi.

Marx ingin mengorganisir pekerja untuk konflik yang akan berakhir dengan tegaknya sosialisme, namun bukan untuk meraih hak-hak istimewa tertentu dalam masyarakat yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Ia menginginkan partai buruh sosialis, tapi bukan, seperti ungunya, partai “borjuis *picik*” yang menasar reformasi individual sepotong-sepotong. Karena kepatuhan membabi buta kepada preconsepsi sistem ilmunya (skolastis) mencegahnya mengambil pandangan yang tidak bias tentang hal-hal sebagaimana mereka ada, ia berpikir bahwa pekerja, yang oleh para penulis yang berada di bawah pengaruh intelektualnya telah diorganisir ke dalam partai “sosialis”, akan puas untuk berdiri diam menyaksikan evolusi sistem kapitalis yang sesuai dengan doktrin agar tidak menunda saat ia siap (matang) untuk pengambilalihan apa yang menjadi milik pihak yang mengambil alih dan akan “berubah menjadi” sosialisme.

Ia tidak menganggap partai pekerja, sama seperti partai dengan kepentingan khusus yang bermunculan di berbagai tempat, walau ia mengakui bahwa program sosialis benar secara prinsip, dalam politik praktis hanya terpaku pada tujuan langsung memenangkan hak-hak istimewa golongan pekerja.

Teori solidaritas Marxist mengenai kepentingan pekerja, yang dikembangkan Marx dengan tujuan politik yang sama sekali berbeda, berhasil menyembunyikan dengan baik kenyataan bahwa harga yang harus dibayar beberapa kelompok pekerja untuk meraih kemenangan harus ditanggung oleh kelompok pekerja lain; ini

berarti bahwa dalam bidang legislasi yang ditengarai “pro pekerja”, juga dalam perjuangan serikat buruh, kepentingan kaum proletar saling berhubungan. Dalam hal ini, doktrin Marxist memainkan peran sama untuk partai yang mendukung kepentingan khusus pekerja seperti yang telah dilakukan untuk *German Centrist* dan partai-partai kelompok rohaniwan (*clerical*) lain yang memakai agama sebagai daya tarik; bagi partai nasionalis melalui daya tarik solidaritas nasional; bagi partai agraris melalui pengakuan bahwa kepentingan kelompok-kelompok produsen pertanian yang berbeda adalah sama; dan bagi partai proteksionis, melalui doktrin kebutuhan akan tarif komprehensif untuk melindungi pekerja nasional.

Semakin partai sosial demokratis berkembang, semakin kuat pengaruh serikat-serikat buruh mereka dan semakin mereka berkembang menjadi sebuah asosiasi serikat buruh yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang kesepakatan “toko tertutup” (*closed shop*, aturan yang mewajibkan pengusaha mempekerjakan orang-orang yang menjadi anggota serikat buruh) dan meningkatnya harga.

Liberalisme tidak memiliki kesamaan sedikit pun dengan partai-partai ini. Liberalisme berada di sisi yang sangat berseberangan dengan mereka semua. Liberalisme tidak menjanjikan hak istimewa kepada siapa pun. Liberalisme menuntut dari semua orang, pengorbanan untuk kelangsungan masyarakat.

Yang pasti, semua pengorbanan ini—atau lebih tepat pengingkaran keuntungan yang dapat diperoleh secara langsung—hanya bersifat sementara; dengan cepat keuntungan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan langgeng. Meskipun begitu, untuk saat ini, mereka merupakan pengorbanan.

Oleh karena itu, sejak awal liberalisme mendapati dirinya berada dalam posisi yang *tidak biasa* dalam kompetisi di antara partai-partai. Kandidat antiliberal menjanjikan hak istimewa khusus untuk setiap kelompok pemilih: harga yang lebih tinggi untuk produsen dan harga yang lebih rendah untuk konsumen; gaji yang lebih tinggi untuk pegawai negeri dan pajak yang lebih rendah untuk pembayar

pajak. Ia bersedia menyetujui pengeluaran apa pun yang diperlukan dengan mengorbankan keuangan masyarakat atau orang kaya. Tidak ada kelompok yang terlalu kecil untuk dianggap remeh dan untuk mendapatkan hak istimewa dengan pemberian dari kantong “masyarakat”. Kandidat liberal hanya bisa mengatakan kepada semua pemilih bahwa upaya memperoleh berbagai hak istimewa itu antisosial.

## 5. Propaganda Partai dan Organisasi Partai

Saat ide-ide liberal mulai menyebar ke Eropa Timur dan Eropa Tengah dari tanah asal mereka di Eropa Barat, kekuatan tradisional—monarki, kaum bangsawan, dan pemuka agama—dengan keyakinan penuh pada instrumen represi yang mereka miliki, benar-benar merasa aman. Mereka tidak menganggap perlu untuk memerangi liberalisme dan mentalitas Pencerahan dengan senjata intelektual. Mereka menganggap penindasan, penganiayaan, dan penyekapan orang-orang yang tidak puas (pembangkang) lebih bermanfaat. Mereka sesumbar tentang tentara dan polisi sebagai perangkat untuk melakukan pemaksaan melalui kekerasan. Saat mereka menyadari dengan rasa ngeri bahwa ideologi yang baru itu merebut senjata dari tangan mereka dengan cara menakutkan pikiran tentara dan pejabat pemerintah/negara, sudah terlambat. Baru setelah rezim lama mengalami kekalahan dalam peperangan melawan liberalisme mereka menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang lebih kuat di dunia ini dari ideologi dan pencetus ideologi dan bahwa ide hanya dapat dilawan dengan ide. Mereka menyadari bahwa mengandalkan senjata merupakan kebodohan, karena seseorang hanya bisa mengerahkan orang-orang bersenjata hanya jika mereka siap untuk patuh, dan dasar semua kekuatan dan kekuasaan (dominion) adalah, pada hakekatnya, bersifat ideologis.

Pengakuan tentang kebenaran sosiologis ini ini merupakan satu dari keyakinan fundamental yang mendasari teori politik liberalisme. Dari sana liberalisme telah mengambil kesimpulan bahwa dalam jangka panjang kebenaran dan kebajikan harus

menang karena kemenangan mereka di wilayah ide tidak diragukan. Dan apa pun yang meraih kejayaan di wilayah ini harus mencapai keberhasilan di bidang-bidang lain karena tidak ada kekuatan yang bisa menindasnya. Tidak ada gunanya mempersoal penyebaran liberalisme karena kemenangannya sudah pasti.

Orang bisa memahami para penentang liberalisme bahkan dalam kaitan dengan hal ini jika ia menyadari bahwa tindakan mereka tak lain dari kebalikan dari apa yang diajarkan liberalisme; yaitu semuanya didasarkan atas penolakan dan reaksi terhadap ide-ide liberal. Mereka tidak berada dalam posisi untuk menawarkan inti doktrin sosial dan ekonomi yang komprehensif dan konsisten untuk menentang ideologi liberal, karena liberalisme adalah satu-satunya kesimpulan yang bisa ditarik dari doktrin seperti itu. Namun, sebuah program yang hanya menjanjikan sesuatu kepada sekelompok orang atau beberapa kelompok orang tidak memiliki peluang untuk meraih dukungan semua orang dan ditakdirkan berakhir sebagai sebuah kegagalan politik.

Maka, partai-partai ini tidak memiliki cara lain selain membuat semacam kesepakatan yang akan membuat kelompok-kelompok yang berhubungan langsung dengan mereka berada di bawah pengaruh mereka dan untuk mempertahankan kondisi ini. Mereka harus berhati-hati agar ide-ide liberal tidak mendapatkan pengikut dari kelas-kelas yang menjadi tumpuan mereka. Untuk tujuan itu, mereka membuat organisasi partai yang mencengkeram individu dalam genggamannya sehingga ia tidak berani berpikir untuk mundur. Di Jerman dan Austria, di mana sistem ini dikembangkan dengan seksama, dan di negara-negara di Eropa Timur, di mana sistem itu ditiru, individu pada hakekatnya bukan lagi warga negara melainkan anggota partai.

Sejak kanak-kanak individu diurus oleh partai. Olah raga dan kegiatan sosial diselenggarakan sesuai dengan kebijakan partisan. Sistem koperasi petani, yang hanya melalui campur tangannya saja seorang para petani dapat menuntut jatah subsidi dan bantuan (*grant*) yang jatuh ke tangan para produsen pertanian; institusi

untuk pengembangan golongan profesional; dan pertukaran tenaga kerja dan sistem bank tabungan, semuanya diatur sesuai garis-garis kebijakan partai. Menyangkut hal-hal di mana penguasa bebas melakukan apa saja sesuai keinginan mereka, individu membutuhkan dukungan partai agar ia dihormati. Dalam situasi seperti itu, kelalaian dalam urusan partai menimbulkan kecurigaan, namun mundur dari partai akan berakibat pada kerugian ekonomi yang serius, jika bukan kehancuran dan pengucilan sosial.

Partai-partai dengan kepentingan khusus memberi perlakuan khusus pada kelompok profesional. Profesi independen pengacara, dokter, penulis, dan seniman tidak direpresentasikan dalam jumlah yang besar yang memungkinkan mereka diperlakukan sebagai partai dengan kepentingan khusus. Oleh karena itu mereka paling tidak terbuka terhadap pengaruh ideologi dengan hak-hak istimewa berdasarkan kelas. Anggota-anggotanya paling lama dan paling gigih mempertahankan liberalisme. Mereka tidak mendapat keuntungan apa pun dengan mengadopsi sebuah kebijakan perjuangan yang penuh kezaliman dan pantang mundur untuk memajukan kepentingan mereka.

Ini merupakan situasi yang dilihat dengan penuh kekhawatiran oleh partai-partai yang bekerja atas nama kelompok-kelompok penekan yang diorganisir. Mereka tidak bisa mentolelir kesetiaan kalangan intelektual (*intellegencia*) pada liberalisme. Karena mereka takut kelompok mereka akan mengecil jika ide-ide liberal, yang kembali berkembang dan dijelaskan secara panjang lebar oleh beberapa individu dalam kelompok-kelompok ini, akan mendapatkan cukup kekuatan untuk menerima pengakuan dan restu sebagian besar anggota mereka. Mereka baru saja menyadari betapa berbahayanya ideologi-ideologi seperti itu bagi hak-hak prerogatif kasta terpilih dan masyarakat status (*status society*).

Oleh karena itu, partai-partai dengan kepentingan khusus secara sistematis berupaya mengorganisir diri mereka sedemikian rupa sehingga anggota-anggota kelompok profesi yang "liberal" bergantung pada mereka. Hal ini dicapai dalam waktu singkat

dengan cara memasukkan mereka ke dalam mekanisme mesin partai. Dokter, pengacara, penulis, seniman, semua harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan membuat diri mereka tunduk pada organisasi pasien, pembaca, dan atasan (*patron*) mereka. Siapa pun yang tidak bergabung atau secara terbuka memberontak akan dipaksa ikut melalui boikot.

Pengebirian (penaklukan) kelas profesional yang independen diperparah oleh prosedur penunjukan posisi pengajar dan pos-pos dalam pelayanan sipil. Di mana sistem partai berkembang penuh, hanya anggota partai yang dipilih, baik oleh orang yang sedang berkuasa atau oleh semua partai dengan kepentingan khusus sesuai kesepakatan tidak tertulis di antara mereka. Dan pada akhirnya bahkan pers independen pun berada di bawah kontrol melalui ancaman boikot.

Puncak dari pengorganisasian partai-partai tersebut adalah pembentukan kelompok orang-orang bersenjata mereka sendiri. Diorganisir sesuai dengan cara militer, mengikuti bentuk tentara nasional, mereka memiliki rencana mobilitas dan operasional, memiliki senjata, dan siap untuk menggempur. Dengan umbul-umbul dan band yang terdiri dari alat musik tiup (*brass bands*) mereka melakukan pawai di jalan-jalan seraya menyambut kelahiran era yang ditandai agitasi dan perang yang tak berkesudahan.

Sejauh ini dua kondisi telah berhasil memperkecil bahaya tersebut. Pertama, keseimbangan di antara kekuatan partai telah dicapai di beberapa negara penting. Di negara di mana hal ini tidak terjadi, seperti di Rusia dan Italia, kekuasaan negara, dengan mengabaikan prinsip-prinsip liberal yang tersisa yang masih diakui seluruh dunia, digunakan untuk menindas dan menganiaya pengikut partai-partai oposisi.

Situasi kedua yang saat ini masih mampu mencegah hal terburuk terjadi adalah kenyataan bahwa bahkan negara-negara yang memandang liberalisme dan kapitalisme dengan penuh kebencian mengharapkan investasi dari wilayah-wilayah yang telah menjadi contoh klasik mentalitas liberal dan kapitalis—di atas segalanya,

Amerika Serikat.

Tanpa pinjaman ini, semua konsekwensi kebijakan konsumsi kapital yang mereka perjuangkan akan menjadi semakin jelas. Antikapitalisme dapat mempertahankan keberadaannya hanya dengan menyusu pada kapitalisme. Maka antikapitalisme, dalam tingkatan tertentu, harus mempertimbangkan opini publik di Barat, di mana liberalisme masih diakui hingga hari ini, meskipun dalam bentuk yang lebih cair. Dari fakta bahwa kapitalis umumnya hanya ingin meminjamkan kepada peminjam tertentu yang memiliki prospek membayar kembali pinjaman mereka, partai-partai pemusnah (*destructionist*) mengakui “pengaruh penting modal di dunia” yang mereka persoalkan.

## 6. Liberalisme sebagai “Partai Modal”

Dengan demikian mudah dilihat bahwa liberalisme tidak bisa dikelompokkan ke dalam golongan partai-partai dengan kepentingan khusus tanpa menyangkal sifat dasarnya. Liberalisme berbeda secara radikal dari semua partai-partai itu. Mereka siap berperang dan mendewakan kekerasan; iberalisme, sebaliknya, menginginkan perdamaian dan supremasi ide-ide. Karena alasan ini semua partai, sekali pun mereka tidak kompak, bersatu melawan liberalisme.

Musuh-musuh liberalisme mencapnya sebagai partai kepentingan khusus kaum kapitalis. Ini merupakan ciri khas mentalitas mereka. Mereka benar-benar tidak bisa menerima ideologi politik selain sebagai advokasi kepentingan khusus tertentu yang bertentangan dengan kesejahteraan umum. Seseorang tidak bisa memandang liberalisme sebagai partai kepentingan khusus, hak-hak istimewa, dan hak-hak prerogatif, karena kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi bukanlah hak istimewa yang diakibatkan kelebihan eksklusif para kapitalis, namun sebuah institusi untuk kepentingan semua anggota masyarakat dan karena itu sebuah institusi yang menguntungkan semua orang. Ini merupakan opini bukan hanya tentang orang-orang liberal, namun bahkan, sampai pada titik tertentu, tentang lawan-lawan mereka.



Ketika kaum Marxist mendukung pandangan bahwa sosialisme tidak bisa diwujudkan sampai dunia “siap” untuk itu, karena sistem sosial tidak pernah punah sebelum “semua kekuatan produktif telah berkembang cukup luas untuk menampungnya,” mereka terpaksa mengakui, setidaknya untuk saat ini, bahwa kepemilikan pribadi penting dan harus ada. Bahkan kaum Bolshevik, yang hanya beberapa waktu sebelumnya menyebarluaskan dengan api, pedang, dan tiang gantungan interpretasi mereka tentang Marxisme—yaitu bahwa “kematangan” tersebut telah dicapai—sekarang harus mengakui bahwa masih terlalu dini untuk mewujudkan sosialisme. Namun, seandainya, walau hanya untuk sesaat, tercapai kondisi di mana kapitalis dan “struktur super” sistem hukumnya, kepemilikan pribadi, tidak bisa dihilangkan, bisakah seseorang mengatakan bahwa ideologi yang menganggap kepemilikan pribadi sebagai fondasi masyarakat hanya melayani kepentingan egois pemilik modal sehingga merugikan kepentingan orang lain?

Yang pasti, jika ideologi-ideologi antiliberal menganggap kepemilikan pribadi penting, baik untuk saat ini saja atau untuk selamanya, mereka percaya, walau bagaimana pun, bahwa kepemilikan itu harus diatur dan dibatasi oleh undang-undang yang otoriter dan intervensi negara. Mereka merekomendasikan intervensionisme, bukan liberalisme dan kapitalisme. Namun ilmu ekonomi telah memperlihatkan bahwa sistem intervensionisme bertolak belakang dengan tujuannya dan merusak dirinya sendiri. Ia tidak bisa meraih tujuan yang digembar-gemborkannya. Sebagai akibatnya, merupakan kesalahan untuk menganggap bahwa selain sosialisme (kepemilikan bersama) dan kapitalisme (kepemilikan pribadi) ada sistem ketiga untuk pengorganisasian kerjasama sosial yang masuk akal dan dapat dilaksanakan, yaitu intervensionisme. Upaya untuk menerapkan intervensionisme harus, sebagai konsekwensinya, mendorong terciptanya kondisi yang bertolak belakang dengan tujuan para pencetusnya, yang kemudian dihadapkan pada pilihan untuk tidak melakukan semua aksi intervensi, dan dengan demikian membiarkan kepemilikan pribadi, atau mengganti

kepemilikan pribadi dengan sosialisme.

Ini juga tesis yang didukung bukan saja oleh para pakar ekonomi liberal. (Tentu saja, ide populer bahwa para ekonom terpecah berdasarkan garis partai merupakan sebuah kesalahan) Marx juga, dalam semua diskusi teoritisnya, hanya melihat alternatif sosialisme atau kapitalisme dan tidak memiliki sikap lain kecuali sikap mengejek dan kebencian terhadap kaum pembaru yang, terbelenggu dalam “pemikiran borjuis yang picik,” menolak sosialisme dan, pada saat bersamaan, ingin membentuk ulang kapitalisme. Ilmu ekonomi bahkan tidak pernah mencoba untuk menunjukkan bahwa sistem kepemilikan pribadi yang diatur oleh undang-undang dan dibatasi oleh intervensi pemerintah bisa terlaksana. Ketika kaum “sosialis yang duduk di posisi kekuasaan” ingin membuktikannya dengan akibat apa pun, mereka mulai dengan menyangkal kemungkinan pengetahuan ilmiah dalam bidang ekonomi dan berakhir dengan pernyataan bahwa apa pun yang dilakukan negara tentu saja harus rasional. Karena ilmu pengetahuan membuktikan kekonyolan kebijakan yang ingin mereka rekomendasikan, mereka berupaya untuk menghapus logika dan ilmu pengetahuan.

Hal sama berlaku juga untuk bukti yang menunjukkan bahwa sosialisme itu mungkin dan dapat dilaksanakan. Para penulis pre-Marxist telah berupaya tanpa hasil untuk memberikan bukti itu. Mereka tidak dapat melakukannya dan juga gagal dalam upaya mereka menyerang keabsahan dari keberatan serius tentang kemungkinan pelaksanaan utopia mereka yang oleh para pengkritik mereka didasarkan atas penemuan ilmu pengetahuan.

Sekitar pertengahan abad kesembilanbelas ide-ide sosialis sepertinya telah berhasil ditinggalkan. Kemudian Marx muncul. Yang pasti, ia tidak mengemukakan bukti—yang tentu saja tidak bisa dikemukakan—bahwa sosialisme bisa dilaksanakan, namun ia hanya menyatakan—tentu saja tanpa bisa menunjukkan—bahwa kelahiran sosialisme tidak terelakkan. Dari asumsi serampangan ini dan dari aksiom, yang menurutnya telah membuktikan dirinya sendiri, bahwa semua yang terjadi kemudian dalam sejarah

umat manusia merepresentasikan kemajuan dari apa yang ada sebelumnya, Marx menggambarkan kesimpulan bahwa sosialisme dengan demikian lebih sempurna daripada kapitalisme dan oleh karena itu tidak ada keraguan bahwa hal itu bisa terlaksana.

Oleh karena itu, sama sekali tidak ilmiah bila seseorang mempertanyakan kemungkinan sebuah masyarakat sosialis atau bahkan mempelajari masalah-masalah tatanan sosial. Siapa pun yang ingin mencobanya akan dikucilkan oleh kaum sosialis dan dibungkam oleh opini publik, yang mereka kontrol. Tanpa mengindahkan semua kesulitan ini—yang pasti hanya dari sisi eksternal—ilmu ekonomi menyibukkan diri dengan penyusunan teori mengenai sistem sosialis dan menunjukkan secara gamblang bahwa semua tipe sosialisme tidak mungkin terlaksana karena kalkulasi ekonomi tidak mungkin dalam komunitas sosialis.

Para pendukung sosialisme hampir tidak pernah mencoba untuk menjawab masalah ini, dan apa yang mereka kemukakan sebagai sanggahan tidak penting dan tidak bermakna. Apa yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan secara teoritis dipertegas dalam praktek oleh kegagalan semua percobaan sosialis dan intervensionis.

Dengan demikian, pernyataan bahwa pembelaan kapitalisme semata-mata urusan kaum kapitalis dan pengusaha, yang kepentingan khususnya bertentangan dengan kepentingan kelompok lain didukung oleh sistem kapitalis, tidak lebih dari propaganda yang kelihatannya bagus yang dirancang untuk memanfaatkan kurangnya penilaian orang-orang yang sembrono.

“Orang-orang kaya” tidak memiliki alasan lebih untuk mendukung kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dibandingkan dengan “golongan tidak mampu”. Jika kepentingan *khusus* langsung mereka dipertanyakan, mereka nyaris tidak liberal. Gagasan bahwa seandainya kapitalis dilestarikan, kelas-kelas yang memiliki kekayaan dapat selamanya mempertahankan kekayaan mereka, berasal dari kesalahpahaman tentang sifat dasar ekonomi kapitalis, di mana kekayaan selalu berpindah-pindah dari pengusaha yang tidak efisien kepada pengusaha yang lebih efisien. Dalam masyarakat

kapitalis seseorang dapat mempertahankan kekayaannya hanya jika ia terus memperbaruinya dengan cara menginvestasikannya secara bijak.

Orang kaya, yang sudah memiliki kekayaan, tidak memiliki alasan khusus untuk menginginkan pelestarian sistem kompetisi bebas yang terbuka untuk semua orang; terutama jika mereka tidak mendapatkan kekayaan mereka sendiri, namun mewarisinya, mereka memiliki lebih banyak alasan untuk takut terhadap dan bukan berharap dari kompetisi. Mereka memang mempunyai kepentingan khusus terhadap intervensionisme, yang selalu mempunyai kecenderungan untuk melestarikan pembagian kekayaan di antara para pemiliknya. Namun mereka tidak dapat berharap mendapat perlakuan khusus dari liberalisme, sebuah sistem yang tidak menghiraukan klaim tradisi yang dihormati sepanjang masa yang dikembangkan oleh kepentingan terselubung kekayaan yang mapan.

Pengusaha dapat meraih kesejahteraan hanya jika ia mampu menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen. Jika dunia sedang dibakar oleh gairah perang, kaum liberal melontarkan manfaat perdamaian; namun, pengusaha memproduksi meriam dan senapan mesin.

Jika opini publik dewasa ini menguntungkan penanaman modal di Rusia, kelompok liberal mungkin akan berupaya untuk menjelaskan bahwa menanam modal di negara yang pemerintahnya secara terbuka memproklamasikan perampasan semua modal sebagai tujuan akhir kebijakannya sama artinya dengan membuang semua barang-barang ke laut; namun pengusaha tidak akan ragu-ragu untuk memasok barang-barang ke Rusia jika ia bisa memindahkan resiko ke pihak lain, baik negara atau kapitalis lain yang tidak terlalu cerdas, yang membiarkan diri mereka disesatkan oleh opini publik, dan ia sendiri dimanipulasi oleh uang Rusia.

Kaum liberal berjuang melawan tren ke arah kemandirian (*autarky*) komersial; namun, pabrik Jerman membangun pabrik di provinsi timur, yang melarang barang-barang Jerman, agar mereka bisa melayani pasar itu melalui perlindungan tarif.

Pengusaha dan kapitalis yang berpikir jernih akan memandang konsekuensi kebijakan antiliberal merugikan seluruh masyarakat; namun dalam kapasitas mereka sebagai pengusaha dan kapitalis mereka harus berupaya, bukan menentangnya, tapi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

Tidak ada golongan yang dapat mendukung liberalisme untuk kepentingan egoisnya sendiri dengan akibat kerusakan pada seluruh masyarakat dan strata populasi lain, hanya karena liberalisme tidak memiliki kepentingan khusus apa pun. Liberalisme tidak bisa mengharapkan bantuan yang diterima partai-partai antiliberal karena kenyataan bahwa semua orang yang ingin mendapatkan beberapa hak istimewa untuk diri mereka sendiri mengorbankan seluruh masyarakat di mana ia berada. Saat orang liberal tampil di hadapan para pemilih sebagai kandidat untuk jabatan publik dan diminta oleh mereka yang suaranya ia butuhkan apa yang ia atau partainya akan lakukan bagi mereka dan kelompoknya, satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan adalah: Liberalisme bekerja untuk semua orang, tapi tidak memiliki kepentingan khusus apa pun.

Menjadi seorang liberal adalah menyadari bahwa hak-hak istimewa khusus yang diberikan kepada kelompok kecil dengan akibat kerugian pada orang lain tidak bisa, dalam jangka panjang, dilestarikan tanpa perlawanan (perang sipil): namun, di sisi lain, seseorang tidak bisa memberikan hak-hak istimewa kepada mayoritas karena ini berarti membatalkan nilai hak-hak istimewa yang diperuntukkan bagi mereka yang seharusnya menerimanya, dan satu-satunya yang dihasilkan adalah penurunan produktivitas kerja sosial.



---

## BAB 5

# MASA DEPAN LIBERALISME

**S**EMUA peradaban terdahulu punah, atau setidaknya-tidaknya smandek, jauh sebelum mereka mencapai tingkat kemajuan material yang berhasil dicapai peradaban modern Eropa. Bangsa-bangsa mengalami kehancuran, baik karena perang dengan musuh mereka maupun pergolakan di dalam negeri. Anarki merusak pembagian kerja; kota, perdagangan, dan industri mengalami kemunduran; dan, karena landasan perekonomian menjadi keropos, pembaruan moral dan intelektual tersingkir akibat ketidaktahuan dan kebrutalan. Orang Eropa pada jaman modern berhasil mempererat ikatan sosial di antara individu dan negara, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini merupakan pencapaian ideologi liberalisme, yang, mulai akhir abad ke-17, diuraikan dengan semakin jelas dan tepat dan mempengaruhi semakin banyak orang. Liberalisme dan kapitalisme menjadi landasan dari semua keajaiban yang menjadi ciri kehidupan modern.

Saat ini, peradaban kita mulai mengendus hawa kematian di udara. Pencinta seni berkoar-koar bahwa semua peradaban, termasuk peradaban kita, pasti punah: ini hukum yang tak terbantahkan. Saat-saat terakhir Eropa telah tiba, para nabi kiamat itu mengingatkan, dan mereka menemukan alasan bagi keyakinan itu. Di mana-mana suasana kemunduran dapat dirasakan.

Akan tetapi peradaban modern tidak akan punah, kecuali akibat

tindakan penghancuran diri. Tidak ada musuh dari luar dapat menghancurkannya seperti ketika bangsa Spanyol menghancurkan peradaban Aztec, karena tidak ada seorang pun dapat menandingi kekuatan pengusung panji-panji peradaban modern.

Telah muncul kesadaran bahwa kemajuan material hanya mungkin terjadi dalam masyarakat kapitalis liberal. Sekali pun hal ini tidak secara tegas diakui oleh kelompok antiliberal, hal itu sepe-nuhnya diakui secara tidak langsung dalam berbagai pernyataan yang memuji ide tentang stabilitas dan ketenteraman.

Kemajuan material yang dicapai oleh beberapa generasi terakhir tentu saja sangat menyenangkan dan bermanfaat. Sekarang saatnya untuk berhenti. Hiruk pikuk kapitalisme modern digantikan oleh kontemplasi penuh ketenangan. Orang harus meluangkan waktu untuk berdialog dengan dirinya sendiri, dan sistem lain ekonomi harus menggantikan kapitalisme sehingga orang tidak dirundung kegelisahan dalam mengejar hal-hal baru dan membuat inovasi. Kalangan romantis bernostalgia tentang kondisi ekonomi Abad Pertengahan—bukan Abad Pertengahan sesungguhnya, tetapi bayangan tentang abad itu yang dibangun oleh angan-angan yang tidak ada kaitannya dengan realitas sejarah. Atau ia berpaling ke Timur—bukan Timur yang sesungguhnya tetapi yang dibangun atas fantasi mimpinya. Betapa bahagianya orang tanpa teknologi modern. Bagaimana mungkin kita bisa dengan mudah meninggalkan surga ini?

Siapa pun yang menganjurkan agar kita kembali ke bentuk-bentuk sederhana dari organisasi ekonomi masyarakat tak boleh melupakan kenyataan bahwa hanya corak sistem ekonomi kita yang menawarkan kemungkinan menunjang penduduk yang dewasa ini memenuhi bumi dalam cara yang sudah terbiasa kita nikmati. Kembali ke Abad Pertengahan berarti pemusnahan ratusan juta orang. Mereka yang mendukung stabilitas dan ketenangan mengatakan orang tidak perlu melangkah sejauh itu. Cukup untuk mempertahankan dengan sekuat tenaga apa yang telah dicapai dan untuk tidak melangkah lebih jauh.

Mereka yang mendewakan ketenteraman dan ekuilibrium lupa



bahwa dalam diri manusia ada keinginan melekat untuk memperbaiki kondisi materialnya. Dorongan ini tidak bisa dihapus karena dorongan itu merupakan kekuatan yang memotivasi semua tindakan manusia. Jika orang mencegah orang lain bekerja untuk kepentingan masyarakat dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhannya, maka hanya ada satu cara untuknya: membuat dirinya semakin kaya dan orang lain semakin miskin melalui penindasan penuh kekerasan dan penjarahan terhadap sesama manusia.

Memang benar bahwa semua usaha dan perjuangan untuk meningkatkan standar hidup mereka tidak membuat orang lebih bahagia. Namun demikian, merupakan sifat manusia untuk terus berjuang demi memperbaiki kondisi materialnya. Jika ia dilarang memenuhi aspirasinya ini, ia akan berubah menjadi membosankan dan kasar. Masyarakat tidak akan mendengarkan imbauan agar mereka bersikap moderat dan merasa puas; besar kemungkinan para filsuf yang membuat imbauan tersebut sedang berkhayal. Jika seseorang mengatakan bahwa ayah mereka mengalami hal yang jauh lebih buruk, mereka akan menjawab bahwa mereka tidak mengerti mengapa mereka tidak boleh menikmati kondisi yang lebih baik.

Apakah itu baik atau buruk, apakah hal itu dibenarkan secara moral atau tidak, yang pasti manusia selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi mereka dan tidak akan pernah berhenti berusaha. Ini adalah takdir manusia yang tak terelakkan. Keresahan dan kegelisahan manusia modern mengaduk pikiran, syaraf, dan indra. Orang dapat dengan mudah mengembalikan kepolosan masa kanak-kanaknya dan menuntunnya kembali ke periode pasif masa lalu sejarah manusia.

Tapi, apa yang ditawarkan sebagai ganti penolakan terhadap kemajuan material lebih lanjut? Kebahagiaan dan kepuasan, harmoni dan kedamaian dalam diri tidak akan tercipta hanya karena orang tidak lagi berniat melakukan perbaikan guna memenuhi kebutuhan mereka. Diracuni oleh rasa tidak suka, kalangan sastrawan membayangkan bahwa kemiskinan dan ketiadaan keinginan menciptakan kondisi yang menguntungkan terutama untuk pengembangan

kapasitas spiritual manusia, tapi ini semua omong kosong. Dalam membahas pertanyaan-pertanyaan ini, orang harus menghindari eufemisme dan mengungkapkan kejujuran. Kekayaan modern diungkapkan di atas segalanya melalui pemujaan terhadap tubuh: kebersihan, kebersihan, olahraga

Saat ini masih merupakan kemewahan khusus yang dinikmati golongan kaya—mungkin di Amerika Serikat tidak lagi, tetapi di tempat lain masih—semua itu akan terjangkau oleh setiap orang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jika kemajuan pembangunan ekonomi berlanjut seperti saat ini. Apakah kehidupan batin manusia akan mengalami peningkatan kalau orang banyak tidak diikutsertakan dalam pencapaian tingkat kebudayaan fisik yang dinikmati golongan kaya? Apakah kebahagiaan bisa ditemukan dalam tubuh tak terawat?

Dalam menanggapi para pemuja Abad Pertengahan orang hanya bisa menjawab bahwa kita tidak tahu apakah orang-orang dari Abad Pertengahan merasa lebih bahagia daripada manusia modern. Tapi kita bisa mengharapkan mereka yang mendukung gaya hidup Timur sebagai model bagi kita untuk menjawab pertanyaan apakah Asia benar-benar surga seperti yang mereka gambarkan.

Pujian berlebihan terhadap ekonomi yang stabil (*stationary economy*) sebagai suatu tujuan sosial adalah argumen terakhir yang bisa dipakai musuh-musuh liberalisme untuk membenarkan doktrin-doktrin mereka. Kita tidak boleh lupa bahwa titik tolak kritik mereka adalah bahwa liberalisme dan kapitalisme menghambat perkembangan kekuatan produktif, bahwa keduanya bertanggung jawab atas kemiskinan massa. Para penentang liberalisme berkilah bahwa tujuan mereka adalah tatanan sosial yang dapat menciptakan lebih banyak kekayaan dibandingkan dengan tatanan sosial yang menjadi sasaran serangan mereka. Dan sekarang, tersudut oleh serangan balasan ilmu ekonomi dan sosiologi, mereka harus mengakui bahwa hanya kapitalisme dan liberalisme, hanya milik pribadi dan aktivitas bebas pengusaha yang dapat menjamin produktivitas tertinggi kerja manusia.

Ada anggapan bahwa apa yang membedakan partai-partai politik saat ini adalah pertentangan mendasar tentang komitmen filosofis mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan argumen rasional. Oleh karena itu sia-sia membahas antagonisme itu. Masing-masing pihak tak tergoyahkan dalam keyakinannya karena yang terakhir didasarkan atas pandangan dunia yang tidak dapat diubah oleh pertimbangan rasional. Tujuan akhir setiap manusia berbeda. Oleh karena itu, mustahil mengharapkan orang yang memiliki tujuan berbeda bersedia menerima sebuah prosedur yang seragam.

Tidak ada yang lebih konyol dari keyakinan ini. Di luar beberapa gelintir pertapa yang berkeinginan melepaskan diri dari berbagai jeratan fisik dan yang akhirnya berhasil mencapai titik di mana mereka bisa melepaskan diri dari keinginan dan tindakan dan bahkan menafikan keberadaan mereka, semua orang kulit putih, terlepas dari keragaman pandangan mereka tentang hal-hal yang bersifat supranatural, sepakat untuk memilih sebuah sistem sosial di mana kerja lebih produktif dibandingkan dengan sistem di mana kerja kurang produktif. Bahkan mereka yang percaya bahwa perbaikan terus menerus dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia tidak membawa hasil dan bahwa lebih baik jika kita memproduksi lebih sedikit barang—meski pun diragukan bahwa jumlah mereka yang benar-benar berpendapat sama cukup besar—pasti tidak ingin kalau upaya yang sama menghasilkan lebih sedikit barang. Paling tidak, mereka akan berharap lebih sedikit kerja akan berakibat pada lebih sedikit produksi, tapi tidak ingin kalau upaya yang sama menghasilkan lebih sedikit produksi.

Permusuhan politik dewasa ini bukan kontroversi mengenai falsafah tetapi mengenai pandangan yang saling bertentangan tentang bagaimana sebuah tujuan yang diakui sebagai tujuan yang sah bisa dicapai dengan cara paling cepat dan dengan pengorbanan paling sedikit.

Tujuan semua orang adalah memenuhi semua kebutuhannya, kemakmuran dan kelimpahan. Tentu tidak hanya ini yang menjadi tujuan manusia, tapi semua hal itu diharapkan bisa mereka capai

dengan memanfaatkan berbagai cara eksternal dan melalui kerjasama sosial. Kekayaan batin—kebahagiaan, ketenangan pikiran, kemuliaan—manusia harus mencari semua itu dalam diri masing-masing.

Liberalisme bukan agama, cara pandang dunia, atau partai dengan kepentingan khusus. Liberalisme bukan agama karena tidak menuntut iman atau ketaatan, karena tidak bersifat gaib, dan karena tidak memiliki dogma. Liberalisme bukan cara pandang dunia karena tidak mencoba menjelaskan kosmos dan tidak memberi penjelasan tentang makna dan tujuan keberadaan manusia. Liberalisme bukan partai dengan kepentingan khusus karena tidak memberikan atau berusaha untuk memberikan keuntungan khusus kepada individu atau golongan mana pun. Liberalisme adalah sebuah ideologi, doktrin tentang hubungan yang setara antara anggota masyarakat dan pada saat yang sama merupakan penerapan doktrin tersebut dalam tindakan manusia dalam sebuah masyarakat. Liberalisme tidak menjanjikan hal-hal yang melebihi apa yang bisa dicapai dalam sebuah masyarakat melalui masyarakat. Liberalisme hanya menjanjikan satu hal, yaitu kemajuan kesejahteraan material semua orang dalam suasana damai tanpa rintangan untuk melindungi umat manusia dari rasa sakit dan penderitaan yang berasal dari luar sejauh masih dalam batas-batas kemampuan institusi-institusi sosial. Itulah tujuan liberalisme.

Tak satu pun sekte dan partai politik percaya mereka bisa melupakan tujuan mereka dengan cara memikat semua indera manusia. Retorika bombastis, alunan musik dan nyanyian, lambaian spanduk, bunga-bunga dan warna, semua merupakan simbol dan para pemimpin berupaya menyatukan pengikut mereka ke dalam diri mereka. Liberalisme tidak berkaitan dengan semua hal itu. Tidak ada bunga dan warna partai, lagu dan idola partai, simbol dan slogan partai untuk liberalisme. Liberalisme hanya memiliki substansi dan argumentasi. Keduanya akan mengantarnya pada kemenangan.

---

## LAMPIRAN

### 1. Catatan Mengenai Kepustakaan Tentang Liberalisme

Agar buku ini tidak berkepanjangan, saya harus membatasi diri. Saya menganggap tindakan saya dapat dibenarkan terlebih karena saya sudah membahas semua masalah mendasar liberalisme dalam serangkaian buku dan esei yang komprehensif.

Bagi pembaca yang ingin memperoleh pemahaman lebih lengkap tentang masalah ini, saya tambahkan daftar pustaka yang paling penting.

Ide-ide liberal sudah dapat ditemukan dalam karya sejumlah besar penulis terdahulu. Para pemikir besar Inggris dan Skotlandia dari abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas adalah yang pertama-tama merumuskan ide-ide ini ke dalam sistem. Siapapun yang ingin mengetahui lebih jauh pemikiran liberal harus merujuk ke mereka:

David Hume, *Esei Moral, Politik, dan Sastra* (1741 dan 1742), dan

Adam Smith, *Sebuah Penelitian tentang Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa-bangsa* (1776), tetapi terutama

Jeremy Bentham, dengan berbagai tulisannya, dimulai dengan *Pembelaan Terhadap Praktik Riba* (1787), hingga *Deontologi*, atau *Ilmu Tentang Moralitas*, diterbitkan setelah kematiannya pada tahun 1834. Semua tulisan-tulisannya, kecuali *Deontologi*, diterbitkan secara lengkap dan diedit oleh Bowring antara 1838 dan 1843.

John Stuart Mill adalah pengikut liberalisme klasik dan, terutama

di tahun-tahun terakhir, di bawah pengaruh istrinya, penuh kompromi lemah. Perlahan-lahan dia beralih ke sosialisme dan merupakan pencetus ide-ide liberal dan sosialis yang benar-benar membingungkan yang menyebabkan kemunduran liberalisme Inggris dan menghancurkan standar hidup orang Inggris. Namun demikian—atau mungkin justru karena ini—kita harus berkenalan dengan tulisan-tulisan utama Mill: *Prinsip-prinsip Ekonomi Politik* (1848), *Tentang Kebebasan* (1859), *Utilitarianisme* (1862).

Tanpa studi menyeluruh tentang Mill mustahil memahami peristiwa yang terjadi dalam dua generasi terakhir karena Mill adalah penganjur besar sosialisme. Semua argumen yang bisa dipakai untuk mendukung sosialisme ia uraikan dengan seksama.

Dibandingkan dengan Mill semua penulis sosialis lain—bahkan Marx, Engels, dan Lassalle—nyaris tidak penting.

Seseorang tidak dapat memahami liberalisme tanpa pengetahuan tentang ekonomi. Karena liberalisme adalah ekonomi terapan; liberalisme adalah kebijakan sosial dan politik berdasarkan landasan ilmiah. Dalam hal ini, selain tulisan-tulisan yang telah disebutkan, seseorang harus membiasakan diri dengan mahaguru ekonomi klasik: David Ricardo, *Prinsip-prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan* (1817).

Pengantar terbaik untuk studi ekonomi ilmiah modern adalah: H. Oswalt, *Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe* (banyak edisi), CA Verriijn Stuart, *Die Grundlagen der Volkswirtschaft* (1923).

Mahakarya Jerman tentang ekonomi modern adalah: Carl Menger, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre* (edisi pertama, 1871). Sebuah terjemahan bahasa Inggris dari bagian pertama karya ini tersedia di bawah judul, *Prinsip-prinsip Ekonomi* (Glencoe, Illinois, 1950). Eugen von Bohm-Bawerk: *Teori Positif Modal* (New York, 1923). Yang juga mencerahkan adalah *Karl Marx dan Akhir dari Sistemnya* (New York, 1949).

Dua kontribusi paling penting dari Jerman untuk literatur liberal mengalami nasib buruk yang tidak berbeda dari yang menimpa liberalisme Jerman itu sendiri. Karya Wilhelm von Humboldt,

*Tentang Wilayah dan Tugas Pemerintah* (London, 1854) selesai pada 1792. Pada tahun yang sama Schiller memuat sebuah kutipan dalam *Thalia Neuen*, dan kutipan lain muncul di *Monatsschrift Berliner*. Namun, karena penerbit Humboldt takut menerbitkan buku itu, maka buku itu disisihkan, terlupakan, dan hanya setelah kematian penulisnya ditemukan dan dipublikasikan.

Seorang penerbit ditemukan untuk karya Hermann Heinrich Gossen, *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus. fliessenden Regein für menschliches Handeln*, namun ketika buku itu muncul pada 1854 tak seorang pun tertarik membacanya. Karya itu dan pengarangnya terlupakan sampai Adamson, seorang berkebangsaan Inggris, menemukannya. Pemikiran liberal merasuki puisi klasik Jerman, terutama karya-karya Goethe dan Schiller.

Sejarah liberalisme politik di Jerman hanya berlangsung singkat dan tidak terlalu berhasil. Jerman modern—termasuk para pendukung Konstitusi Weimar berikut para penentangannya—sangat berseberangan dengan semangat liberalisme. Orang-orang Jerman melupakan liberalisme, tapi mereka tahu cara untuk membencinya. Kebencian terhadap liberalisme adalah satu-satunya hal yang menyatukan orang Jerman. Membicarakan karya-karya Jerman tentang liberalisme berarti menyebut karya-karya Leopold von Wiese, *Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft* (1917); *Staatssozialismus* (1916); dan *Freie Wirtschaft* (1918).

Hembusan nafas semangat liberal nyaris tidak mencapai orang-orang di Eropa Timur. Meski pun pemikiran liberal sedang mengalami kemunduran bahkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat, orang bisa mengatakan bangsa-bangsa Eropa Timur lebih liberal dibandingkan dengan Jerman.

Menyangkut penulis-penulis liberal yang lebih tua, orang juga harus membaca karya Frédéric Bastiat, *Oeuvres Complètes* (Paris, 1855). Bastiat adalah seorang penulis dengan gaya sastra (*stylist*) yang cemerlang sehingga membaca karyanya memberi kenikmatan luar biasa. Mengingat kemajuan luar biasa di bidang teori ekonomi setelah kematiannya, tak mengherankan jika ajaran-

ajaran telah menjadi usang saat ini. Akan tetapi kritiknya terhadap segala sesuatu yang bersifat proteksionis dan kecenderungan yang berkaitan dengannya tidak tertandingi bahkan hingga hari ini. Kaum proteksionis dan intervensionis belum berhasil menemukan satu kata pun yang bisa menanggapinya secara obyektif. Mereka terus terbata-bata: Bastiat itu "dangkal."

Saat membaca karya-karya politik Inggris yang lebih mutakhir, seseorang tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa di Inggris dewasa ini kata "liberalisme" sering diartikan sebagai sosialisme moderat. Pemaparan singkat namun jelas tentang liberalisme disampaikan oleh L. T. Hobhouse, seorang berkebangsaan Inggris, *Liberalisme* (1911), dan oleh orang Amerika, Jacob H. Hollander, *Liberalisme Ekonomi* (1925). Pengantar yang lebih baik lagi bagi pemikiran-pemikiran liberal Inggris adalah: Hartley Withers, *Argumen untuk Kapitalisme* (1920). Ernest J. P. Benn, *Pengakuan Seorang Kapitalis* (1925). *Seandainya Saya Seorang Pemimpin Buruh* (1926). *Surat-surat Seorang Individualis* (1927). Buku terakhir memuat bibliografi (hal. 74 et seq.) literatur Inggris tentang masalah-masalah mendasar sistem ekonomi. *Kembali ke Laissez Faire* (London, 1928).

Kritik terhadap kebijakan proteksionis disampaikan oleh Francis W. Hirst dalam *Perlindungan dan Proteksi* (1926). Yang juga mencerahkan adalah catatan tentang debat publik di New York pada 23 Januari 1921 antara E.R.A. Seligmann dan Scott Nearing dengan topik: "Bahwa kapitalisme menawarkan lebih banyak kepada para pekerja Amerika daripada sosialisme."

Pengantar bagi pemikiran sosiologis disampaikan oleh Jean Izoulet, *La cité Moderne* (edisi pertama, 1890), dan R. M. MacIver, *Masyarakat* (1924). Sejarah ide-ide ekonomi dipersembahkan oleh Charles Gide dan Charles Rist, *Histoire des doctrines économiques* (banyak edisi); Albert Schatz, *L'individualisme économique et social* (1907); dan Paul Barth, *Die Philosophie der Geschichte als Soziologie* (banyak edisi).

Peran partai politik dibahas oleh Walter Sulzbach dalam *Die*



*Grundlagen der politischen Parteibildung* (1921). Oskar Klein-Hattungen, *Geschichte des deutschen Liberalismus* (1911/1912, dua volume) mempersembahkan esei tentang sejarah liberalisme Jerman, dan Guido de Rugaiero membuat karya serupa untuk liberalisme di Eropa dalam *Sejarah Liberalisme Eropa* (Oxford, 1927).

Akhirnya, saya mengutip karya saya sendiri sejauh mereka berhubungan erat dengan masalah-masalah liberalisme: *Nation, Staat und Wirtschaft: Belträge zur Politik und Geschichte der Zeit* (1919), dalam bahasa Inggris (1983). *Antimarxismus (Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. XXI, 1925)*. *Kritik des Interventionismus* (1929), dalam bahasa Inggris (1977). *Sosialisme* (1936), dengan *Kemelut yang Direncanakan*, 1951. *Pemerintah yang Omnipoten* (1944). *Tindakan Manusia* (1949). *Mentalitas Antikapitalis* (1956).

## 2. Tentang Istilah “Liberalisme”

Mereka yang akrab dengan tulisan-tulisan tentang liberalisme yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dan dengan penggunaan bahasa dewasa ini mungkin akan menyatakan keberatan karena apa yang disebut liberalisme dalam buku ini tidak sama dengan apa yang dipahami sebagai istilah tersebut dalam literatur politik kontemporer. Saya tidak menyangkal hal ini. Sebaliknya, saya sendiri secara tegas menunjukkan bahwa apa yang dipahami sebagai istilah “liberalisme” dewasa ini, terutama di Jerman, bertolak belakang dengan apa yang harus dinyatakan oleh sejarah sebagai ide-”liberalisme” karena istilah itu mengandung isi penting program liberal dari abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Hampir semua orang yang dewasa ini menyebut diri “liberal” menolak mengikrarkan diri mereka sebagai pendukung kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menyokong langkah-langkah yang sebagian bersifat sosialis dan sebagian bersifat intervensionis. Mereka berusaha untuk mencari pembenaran dengan alasan bahwa esensi liberalisme tidak terdapat dalam kepatuhan terhadap lembaga kepemilikan pribadi, tetapi dalam hal-hal lain, dan bahwa hal-hal lain menuntut pengembangan lebih lanjut liberalisme, sehingga

sekarang liberalisme tidak lagi mendukung kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi melainkan sosialisme atau intervensionisme.

Seperti apa ini "hal-hal lain" itu belum dijelaskan oleh para liberal semu. Kita mendengar banyak hal tentang kemanusiaan, kemurahan hati, kebebasan nyata, dll. Ini semua merupakan sentimen yang sangat baik dan mulia, dan semua orang dengan mudah akan menyetujuinya. Dan, pada kenyataannya, setiap ideologi mengakui nilai-nilai itu. Setiap ideologi—selain beberapa aliran pemikiran yang sinis—percaya mereka memperjuangkan kemanusiaan, kemurahan hati, kebebasan nyata, dll. Apa yang membedakan satu doktrin sosial dari yang lain bukanlah tujuan akhir kebahagiaan manusia universal yang menjadi tujuan mereka semua, tetapi dengan cara bagaimana mereka berusaha untuk mencapai tujuan ini. Ciri khas liberalisme adalah bahwa ia mengusulkan untuk mencapainya melalui kepemilikan pribadi atas alat produksi.

Tapi masalah terminologis, pada akhirnya, tidak terlalu penting. Yang penting bukan nama, tetapi makna di balik nama itu. Betapa pun fanatiknya seseorang dalam oposisinya terhadap milik pribadi, ia harus mengakui setidaknya kemungkinan bahwa seseorang mungkin mendukung hal itu. Dan jika seseorang mengakui ini, ia harus, tentu saja, memberi nama untuk aliran pemikiran ini. Seseorang harus minta mereka yang dewasa ini menyebut diri liberal nama yang akan mereka berikan kepada ideologi yang menganjurkan pelestarian kepemilikan pribadi atas alat produksi. Mereka mungkin akan menjawab bahwa mereka ingin menyebutnya ideologi "Manchesterisme." Kata "Manchesterisme" awalnya diciptakan sebagai sebuah istilah ejekan dan pelecahan.

Namun demikian, hal ini tidak akan menghalangi penggunaannya untuk merujuk pada ideologi liberal jika bukan karena fakta bahwa ungkapan ini sampai sekarang selalu digunakan untuk menunjukkan program ekonomi ketimbang program umum liberalisme.

Aliran pemikiran yang menganjurkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi harus, betapa pun, diberi hak untuk mendapatkan sebuah nama. Tapi yang terbaik adalah untuk mengikuti nama

tradisionalnya. Kebingungan akan muncul jika seseorang menganut pemakaian nama baru yang memungkinkan bahkan kaum proteksionis, sosialis, dan pendukung perang menyebut dirinya "liberal" sesuka mereka.

Pertanyaannya bukan apakah, dalam rangka memfasilitasi penyebaran ide-ide liberal, seseorang tidak memiliki keharusan untuk memberikan nama baru untuk ideologi liberalisme sehingga prasangka umum yang dipupuk untuk melawannya, terutama di Jerman, tidak menjadi penghalang. Saran itu bertujuan baik, tapi benar-benar merupakan antitesis terhadap semangat liberalisme. Seperti halnya liberalisme harus, sebagai kebutuhan internal, menghindari setiap trik propaganda dan semua upaya licik oleh gerakan-gerakan lain untuk mendapat pengakuan masyarakat, liberalisme tidak boleh menanggalkan nama lamanya hanya karena nama itu tidak populer. Justru karena kata "liberal" memiliki konotasi yang buruk di Jerman, liberalisme harus mempertahankan nama itu. Seseorang mungkin tidak membuat cara berpikir liberal mudah bagi siapa pun, karena yang penting bukanlah bahwa orang menyatakan diri mereka liberal, tetapi bahwa mereka menjadi liberal dan berpikir dan bertindak sebagai orang-orang liberal.

Keberatan kedua yang dapat dikemukakan terhadap terminologi yang digunakan dalam buku ini adalah bahwa di sini liberalisme dan demokrasi tidak difahami sebagai hal yang bertentangan. Dewasa ini di Jerman "liberalisme" sering diartikan sebagai doktrin yang tujuan politiknya adalah monarki konstitusional, dan "demokrasi" dipahami sebagai doktrin yang tujuan politiknya adalah monarki parlemen dalam republik. Pandangan ini sama sekali tidak dapat dipertahankan, bahkan dari sudut pandang sejarah. Liberalisme memperjuangkan monarki parlemen, bukan monarki konstitusional, dan kegagalannya terletak pada fakta bahwa di Kekaisaran Jerman dan di Austria liberalisme hanya mampu menciptakan monarki konstitusional. Kemenangan antiliberalism terletak pada kenyataan bahwa *Reichstag* (lembaga legislatif) Jerman terlalu lemah sehingga mungkin secara akurat, meski tidak sopan, dicirikan sebagai "klub

para pembual,” dan pemimpin partai konservatif mengatakan yang sebenarnya ketika ia mengatakan bahwa hanya dibutuhkan seorang letnan dan dua belas orang untuk membubarkan *Reichstag*.

Liberalisme adalah konsep yang lebih komprehensif. Liberalisme mengacu pada sebuah ideologi yang mencakup semua kehidupan sosial. Ideologi demokrasi hanya mencakup bagian dari dunia hubungan sosial yang mengacu pada konstitusi negara. Alasan mengapa liberalisme harus menuntut demokrasi sebagai akibat wajar politik ditunjukkan dalam bagian pertama buku ini. Untuk menunjukkan mengapa semua gerakan antiliberal, termasuk sosialisme, juga antidemokrasi harus ada penyelidikan (investigasi) untuk membuat analisis mendalam tentang ciri-ciri ideologi-ideologi tersebut. Dalam kaitan dengan sosialisme, saya telah mencoba melakukan investigasi itu dalam buku saya dengan judul tersebut.

Jerman dapat dengan mudah tersesat karena selalu memikirkan kaum Liberal Nasional dan Sosial Demokrat. Tapi Liberal Nasional bukan, bahkan sejak awal—setidaknya dalam urusan hukum konstitusi—partai liberal. Mereka adalah sayap liberal partai lama yang mengaku mengambil posisi berdasarkan ”fakta-fakta sebagaimana adanya”; yaitu menerima sebagai fakta yang tidak dapat diubah kekalahan yang dialami liberalisme dalam konflik konstitusi Prusia dari lawan-lawannya, kaum ”Kanan” (Bismarck) dan kaum ”Kiri” (para pengikut Lassalle). Sosial Demokrat bersikap demokratis selama mereka bukan partai yang berkuasa, yaitu selama mereka merasa tidak cukup kuat untuk menekan lawan-lawan mereka dengan kekerasan.

Begitu mereka mengira diri mereka adalah yang paling kuat, mereka menyatakan diri mereka—seperti disarankan para pendiri mereka pada titik ini—pendukung kediktatoran. Hanya ketika kelompok bersenjata partai-partai Kanan membuat mereka berdarah-darah dalam kekalahan barulah mereka kembali menjadi demokratis ”sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Para pendiri partai mereka mengungkapkan hal ini dengan mengatakan: ”Dalam dewan

partai-partai sosial demokrat, sayap yang menyatakan dukungan terhadap demokrasi menang atas salah sayap yang mendukung kediktatoran”.

Tentu saja, satu-satunya partai yang dapat digambarkan sebagai demokratis adalah partai yang dalam situasi apa pun—bahkan saat ia merupakan partai terkuat dan memegang kendali—mendukung lembaga-lembaga demokratis.





---

## INDEKS

- Abyssinia, 145  
Adam Smith, 4, 227  
Albert Schatz, 230  
American Economic Association,  
    xviii  
Amerika Serikat, xv, xxxii, 1, 38,  
    62, 65, 120, 151, 152, 161-163,  
    165, 166, 168, 173, 177, 192,  
    214, 224, 229  
anarkisme, 43  
Anglo-Saxon, 163, 200  
Antimarxism, 231  
apologist, 101, 102  
apology, 102  
Argentina, 32  
Aristoteles, 20, 29  
Arthur Goddard, xxxiv  
Arthur M. Schlesinger, vii, viii  
Australia, 32, 150, 156, 162, 163,  
    164, 165, 192  
Austria, xvi-xviii, 51, 93, 125, 163,  
    201, 211, 233  
Austrian Institute for Business  
    Cycle Research, xvii  
Aztec, 222  
Balkan, 143  
Bastiat, 105, 229, 230  
Bavaria, 141, 170  
Beatrice Webb, 204  
Bentham, 4, 32, 227  
Berlin, 30, 133, 134  
Bismarck, xxxii, xxxiii, 234  
Bizantium, 38  
Bolshevik, 52, 54, 55, 58, 59, 60,  
    147, 176, 201, 215  
Bolshevisme, 58, 59, 178  
Bowring, 227  
Brasil, 32, 171  
budak, 24-27, 47, 64, 69, 75, 148  
bureaucracy, xvii  
caesarisme, 82  
Carl Menger, xi, xvi, 228  
CA Verrijn Stuart, 228  
Cekoslowakia, 152, 164, 167  
Charles Gide, 230  
Charles Rist, 230  
chauvinisme, 168  
chauvinistic, 124  
Cina, 146, 151, 160, 163, 166, 169  
class comrades, 191

- Cobden, 32  
 Cockaigne, 18  
 Communist Manifesto, 190, 191  
 Culloden, 125  
  
 Darwinisme, 65  
 Das Kapital, xxi  
 David Hume, 4, 227  
 David Ricardo, 4, 228  
 Den Haag, 172  
 Deontologi, 227  
 destructionist, 214  
 Disraeli, 51  
 Dostoyevsky, 177  
  
 economic royalist, xxxii  
 ekuilibrium, 222  
 Engels, 228  
 enlightenment, xxxi  
 E.R.A. Seligmann, 230  
 Ernest J. P. Benn, 230  
 Eropa, 1, 2, 24, 26, 30, 31, 56, 61,  
     72, 87, 96, 100, 127, 131, 133,  
     138, 142, 144-151, 156, 157,  
     161-171, 176-179, 186, 189, 199,  
     200, 210, 211, 221, 229, 231  
 Eugen von Böhm Bawerk, xvi  
  
 F.A. Hayek, xviii  
 fasis, xxxii, 58, 59  
 Faust, 16  
 Franklin D. Roosevelt, viii, xxxiii  
 Ferdinand Lassalle, 44  
 finance capital, 130  
 Ford, 38  
 Fourier, 15, 16, 17, 18, 20  
  
 Fourierisme, 17  
 Frédéric Bastiat, 229  
 Freie Wirtschaft, 229  
 Freud, 16, 17  
 fundamentalis, 65  
  
 George Miller Beard, 15  
 Gladstone, 51  
 Goethe, 16, 20, 39, 113, 124, 229  
 golden mean, 188  
 Graduate Institute of International  
     Studies, xvii  
 Grove City College, xviii  
 Guido de Rugaiero, 231  
 Gustav Fischer, xxxiii  
  
 Hartley Withers, 230  
 Hegel, 44, 68  
 Hellenes, 139  
 Herbert, 176  
 Hermann Heinrich Gossen, 229  
 Hitler, xvii, 52  
 Hohenzollerns, 82  
 H. Oswald, 228  
 Human Action, xvi,xvii  
  
 India, 32, 148, 151  
 Inggris, 1-3, 8, 31, 32, 38, 49, 102,  
     125, 134, 143, 145, 149-152,  
     156, 157, 162, 163, 165, 166,  
     168, 169, 171, 173, 190, 192,  
     199, 227-231  
 international gold trust, 130  
 Ionan, 143  
 Israel Kirzner, xviii



- Jacob H. Hollander, 230  
 Jawa, 32  
 Jean Izoulet, 230  
 Jepang, 32, 151, 163, 165, 169  
 Jeremy Bentham, 4, 227  
 John F. Kennedy, vii  
 John Stuart Mill, 227, 228  
 Joseph S. Clark, xv  
 J. P. Hamilius, xxxiii
- Kamar Dagang Austria, xvii  
 Kant, 32  
 kapitalis, 8, 11, 13, 14, 39, 74, 76-80, 83-89, 100-106, 111, 113, 121, 133, 153, 185, 189, 190-192, 208, 213-215, 217-219, 222  
 kapitalisme, 11-15, 22, 31, 56, 71, 74, 75, 77-79, 90, 100, 101, 103, 105, 112, 130, 151, 165, 166, 183, 189, 201, 213-217, 221, 222, 224, 230  
 Karl Marx, 20, 101, 190, 191, 207, 208, 216, 217, 228  
 kartel, 13, 105, 107, 109, 110, 157  
 Kaukasus, 145  
 Klein-Hattingen, 231  
 Kongo, 150
- La cité Moderne, 230  
 l'Action Française, 52  
*laissez faire* viii, xii, 230  
 Lassalle, 82, 44, 228, 234  
 Latvia, 127  
 legislasi sosial, 200  
*leisure class*, xxxiii  
 Lenin, 23, 52, 54, 177
- Leopold von Wiese, 229  
 liberalism, vii, 46  
 libéralisme, 1-6, 8-15, 22-24, 31-34, 45, 46, 49, 53, 55-57, 59, 60, 62, 66-69, 81, 101, 103-105, 111, 118, 123-125, 127, 138, 139, 142, 146, 147, 155, 159, 160, 166, 169, 175, 181-188, 193, 199, 200, 205, 206, 209, 210-215, 218, 219, 221, 224, 226, 227-234  
 libéralisme klasik, 112, 183, 227  
 libéralisme neo-klasik, xxvii  
 Liberalismus, xvi, xxvi, 229, 231  
 libertarian, xxvii  
 Lithuania, 127  
 London, 20, 30, 39, 133, 134, 190, 229, 230  
 Louis Napoleon, 82  
 Louis Philippe, 139  
 L. T. Hobhouse, 230  
 Luxembourg, xxxiii
- magistrate, 136  
 Manifesto Komunis, 190  
 Marxisme, 17, 18, 189, 215  
 Meksiko, 145  
 Melayu, 163  
 Mesir, 26, 32, 151  
 Metodis, 65  
 modal, 10, 22, 37, 73, 78, 81, 84, 85, 88, 90-94, 96, 99, 107, 112, 122, 130, 144, 152-158, 178, 192, 214, 215, 218  
 Modal, 107, 144, 153, 156, 214, 228  
 Monarki, 139

- Monatsschrift Berliner, 229  
 monopoli, 87, 105, 107, 108, 109,  
 110, 111, 192  
  
 Napoleon, 31, 82, 172, 176, 199  
 National Association of  
 Manufacturers, xviii  
 Nationaloekonomie, xvii  
 New Deal, xxxiii  
  
 Oeuvres Complètes, 229  
 Omnipotent Government, xvii  
  
 Paul Barth, 230  
 Pencerahan, xxxi, 32, 210  
 Perancis, 15, 49, 50, 121, 125, 129,  
 139, 141, 143, 145, 151, 168,  
 170, 171  
 Perang Krimea, 176  
 Perang Napoleon, 172, 176  
 Pilgrim Fathers, xxxii  
 Planning for Freedom, xvii  
 Polandia, 51, 127, 129, 132, 141,  
 143, 164, 170  
 Prometheus, 16  
 proteksionisme, 32, 129, 132, 152,  
 157, 158, 160, 170, 171  
 Prussia, 82  
  
 Ralph Raico, xxxiv  
 Revolusi Perancis, 49  
 Ricardo, 4, 154, 155, 190, 191, 228  
 R. M. MacIver, 230  
 Robinson Crusoe, x  
 Romawi, 26, 68  
 Rusia, 25, 32, 54-56, 58, 65, 72, 87,  
 127, 166, 168, 169, 171, 175-  
 179, 201, 213, 218  
  
 Schelling, 68  
 Schiller, 39, 229  
 Schleswig-Holstein, 127, 143  
 Schmoller, 82  
 Scott Nearing, 230  
 servile, 24  
 Sidney, 204  
 Sistem Kontinental, 31  
 socialism, xvii  
 sosialis, 44  
 sosialisme, 3, 8, 15, 18, 19, 22, 32,  
 34, 60, 71, 72, 74-76, 78, 83, 84,  
 86, 89, 93, 99, 104, 105, 112,  
 121, 184, 186, 204, 206-208,  
 215-217, 228, 230, 232, 234  
 Soviet, 65, 178, 179  
 Sozialpolitik, xxxiii, 10  
 Spanyol, 24, 166, 222  
 Spencer, 176  
 Srilanka, 32  
 Staatssozialismus, 229  
 Swiss, 39, 47, 128, 129, 149  
  
 Thalia Neuen, 229  
 The Camel and the Tent, xxvii  
 The Classes, 191  
 The Free and Prosperous  
 Commonwealth, viii, xviii  
 Theory and History, xviii  
 The Theory of Money and Credit,  
 xvii  
 The Ultimate Foundations of  
 Economic Science, xviii

Tolstoy, 177

Tory, 3, 51

Tory-isme, 3

Trotzky, 52, 54

Turki, 176

Universitas Freiburg, xviii

Universitas New York, xviii

Universitas Vienna, xvi-xviii

Utilitarianisme, 228

Venesia, 38

Walter Sulzbach, 230

Whig, 51

Wilhelm von Humboldt, 4, 32

Yunani, 26, 27, 47, 101, 173



---

## PENULIS



LUDWIG VON MISES (1881-1973) adalah salah satu eksponen Mazhab Ekonomi Austria. Lahir dan tumbuh dalam keluarga Yahudi sekuler di Wina yang saat itu masih dalam kekuasaan imperium Austro-Hungaria, Mises sejak awal menaruh minat intelektual yang kuat terhadap ilmu ekonomi. Setelah Perang Dunia I, ia menjadi dosen pada Universitas Wina dan menjadi penasihat ekonomi pemerintah Austria. Ia menyaksikan Eropa usai

PD I, Eropa yang hancur akibat perang. Dalam situasi semacam itu, Mises merasa galau dengan skeptisisme yang meluas terhadap cita-cita liberal Pencerahan dan naiknya pamor sosialisme dan Marxisme di kalangan masyarakat Eropa. Ini tercermin dari kritiknya terhadap sosialisme dalam bukunya yang terbilang cukup kontroversial ketika terbit.

Pada saat yang sama, Mises juga cemas dengan semakin menguatnya Nazisme di Jerman. Oleh karena itu, beberapa tahun sebelum Hitler mencaplok Austria, Mises menetap sementara di Swis sebelum akhirnya hijrah untuk selamanya ke Amerika Serikat pada 1940. Sejak tahun itu ia tinggal di New York, mengajar ekonomi di New York University sampai akhir hayatnya. Di tanah perantauannya yang baru, Mises tak henti henti mengumandangkan paham liberalisme klasik, yang saat itu dianggap sudah kadaluwarsa dan anakronistik. Latar belakang Mises sebagai ekonom dalam tradisi Mazhab Ekonomi Austria perlu kita garisbawahi manakala kita mau memahami signifikansi bukunya tentang liberalisme ini.

Buku ini, yang pertama kali terbit dalam bahasa Jerman pada tahun 1927 dan dalam bahasa Inggris tahun 1965, menegaskan, bahwa liberalisme per definisi adalah doktrin tentang kebebasan yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu tanpa pengaturan, kontrol dan regulasi dari negara (berbeda dengan kolektivisme dan intervensionisme). Liberalisme juga berurusan dengan aktivitas manusia menyangkut soal kesejahteraan material (berbeda dengan agama, misalnya).

Ludwig von Mises (1883-1973) tak henti henti mengkampanyekan paham liberalisme klasik yang dianutnya. Baginya, liberalisme sosial ala Amerika yang tercermin dalam bentuk kebijakan regulasi dan intervensi negara terhadap mekanisme pasar merupakan ancaman terhadap keberlangsungan masyarakat bebas, yang tidak kalah berbahayanya dibanding dengan ideologi kolektivisme seperti sosialisme dan komunisme.

AKHMAD SAHAL, Kata Pengantar

ISBN 978-602-99571-1-2

